



**LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2011**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2012**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	2
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa	3
1.2.1. Kondisi Geografis	3
1.2.1.1. Batas Administratif Daerah	3
1.2.1.2. Luas Wilayah	4
1.2.1.3. Topografis	5
1.2.1.4. Iklim dan Curah Hujan	5
1.2.2. Demografis	6
1.2.2.1. Penduduk	6
1.2.2.2. Ketenagakerjaan.....	8
1.2.2.3. Penduduk Miskin.....	10
1.2.2.4. Tingkat Pendidikan	11
1.2.3. Kondisi Ekonomi	11
1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah	11
1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah/PDRB.....	22
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	26
2.1. Visi dan Misi	26
2.1.1. Visi	26
2.1.2. Misi	27
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Sesuai RPJMD (2011-2015)	28
2.3. Prioritas Pembangunan.....	35
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	36
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	36
3.1.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah	36

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan	39
3.1.3. Permasalahan dan Solusi	41
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah	45
3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	45
3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	55
3.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	55
3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	56
3.4. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2011	57
3.5. Permasalahan dan Solusi	57
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	59
4.1. Urusan Wajib	59
4.1.1. Program dan Kegiatan	59
4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program pada Urusan Wajib	66
4.1.2.1. Urusan Wajib Pendidikan	66
4.1.2.2. Urusan Wajib Kesehatan	76
4.1.2.3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup	84
4.1.2.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum	86
4.1.2.5. Urusan Wajib Penataan Ruang	89
4.1.2.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	90
4.1.2.7. Urusan Wajib Perumahan	94
4.1.2.8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah raga	95
4.1.2.9. Urusan Wajib Penanaman Modal	98
4.1.2.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM.....	99
4.1.2.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	101
4.1.2.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan	102
4.1.2.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan	109
4.1.2.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111
4.1.2.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	113
4.1.2.16. Urusan Wajib Perhubungan	116
4.1.2.17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	117
4.1.2.18. Urusan Wajib Pertanahan	119
4.1.2.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	119

4.1.2.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah, dan Persandian	123
4.1.2.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	141
4.1.2.22. Urusan Wajib Sosial	144
4.1.2.23. Urusan Wajib Kebudayaan	146
4.1.2.24. Urusan Wajib Statistik	147
4.1.2.25. Urusan Wajib Kearsipan	148
4.1.2.26. Urusan Wajib Perpustakaan	148
4.1.3. Permasalahan	149
4.2. Urusan Pilihan	151
4.2.1. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	151
4.2.2. Realisasi Program pada Urusan Pilihan	152
4.2.2.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	152
4.2.2.2. Urusan Pilihan Pertanian	159
4.2.2.3. Urusan Pilihan Kehutanan	179
4.2.2.4. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	182
4.2.2.5. Urusan Pilihan Pariwisata	185
4.2.2.6. Urusan Pilihan Industri	186
4.2.2.7. Urusan Pilihan Perdagangan	188
4.2.2.8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian	189
4.2.3. Permasalahan dan Solusi	190
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	192
5.1. Tugas Pembantuan yang Diterima	192
5.1.1. Dasar Hukum.....	192
5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	193
5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan	194
5.1.4. Program dan Kegiatan yang Diterima	194
5.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran	206
5.1.6. Permasalahan dan Solusi	211
5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan	212
5.2.1. Dasar Hukum.....	212
5.2.2. Urusan Pemerintahan yang Ditugasperbantukan Kepada Desa	213

5.2.3. Sumber dan Jumlah Anggaran	214
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN	215
6.1. Kerjasama Antar Daerah	215
6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan	215
6.1.2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan	216
6.1.3. Permasalahan dan Solusi	216
6.2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	217
6.2.1. Kebijakan dan Kegiatan	217
6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	217
6.2.3. Permasalahan dan Solusi	218
6.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	219
6.3.1. Kebijakan dan Kegiatan	219
6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	219
6.3.3. Permasalahan dan Solusi	222
6.4. Pembinaan Batas Wilayah	222
6.4.1. Kebijakan dan Kegiatan	222
6.4.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	223
6.4.3. Permasalahan dan Solusi	223
6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	223
6.5.1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya	223
6.5.2. Status Bencana	224
6.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran	224
6.5.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Bencana	224
6.6. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	224
6.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	225
6.7.1. Gangguan yang Terjadi	225
6.7.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani	225
6.7.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.....	226
6.7.4. Sumber dan Jumlah Anggaran	226
6.7.5. Penanggulangan	226
6.7.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan	227
BAB VII PENUTUP	228
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten Sumbawa.....	4
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2006-2010	6
Tabel 1.3.	Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Sumbawa 2011	14
Tabel 1.4.	Luas Lahan dan Potensi wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011..	19
Tabel 1.5.	Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2011.....	20
Tabel 1.6.	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2004-2010	23
Tabel 1.7.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 200 Tahun 2004-2010 (Persen).....	25
Tabel 1.8.	Lar Yang Telah Ditetapkan di Kabupaten Sumbawa	14
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Sumbawa Tahun 2011	40
Tabel 4.1.	Program Pembangunan pada Penyelenggaraan Urusan wajib di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011	60
Tabel 4.2.	Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011....	67
Tabel 4.3.	Rata-rata lama sekolah	69
Tabel 4.4.	Sebaran Lembaga Pendidikan (Sekolah) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011	69
Tabel 4.5.	Kondisi Fisik Ruang Kelas	70
Tabel 4.6.	Rasio Rombongan Belajar dan Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan di kabupaten Sumbawa (2010-2011)	72
Tabel 4.7.	Rasio Siswa dan Rombel Menurut Jenjang Pendidikan di kabupaten Sumbawa (2009-2011).....	73
Tabel 4.8.	Siswa Paket A, B dan C di kabupaten Sumbawa (2009-2011)	74
Tabel 4.9.	Beasiswa berdasarkan Jenjang dan Sumber Dana Tahun 2010 dan 2011	75
Tabel 4.10.	Kualitas Tenaga Kesehatan di RSUD kabupaten Sumbawa	79
Tabel 4.11.	Jumlah Pengunjung Rawat Inap dengan Jamkesmas/Jamkesda menurut Ruang Perawatan di RSUD Sumbawa (2011).....	73
Tabel 4.12.	Kondisi Perumahan Penduduk di kabupaten Sumbawa Tahun 2011.	94

Tabel 4.13	Jumlah koperasi, Koperasi RAT dan Hasil pemeringkatan Koperasi Tahun 2010 dan 2011	99
Tabel 4.14.	Jumlah KSP/USP dan Hasil penilaian Kesehatan KSP/USP tahun 2010 dan 2011 di Kabupaten Sumbawa	100
Tabel 4.15.	Bahan-bahan Penunang Pelayanan Administrasi Catatan Sipil.....	102
Tabel 4.16.	Jumlah Tenaga Kerja yang telah dilatih melalui Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011.....	103
Tabel 4.17.	Jumlah Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial	104
Tabel 4.18.	Kegiatan Inspeksi Kontrol dan Kunjungan Tahun 2011.....	107
Tabel 4.19.	Media Informasi di Kabupaten Sumbawa.....	118
Tabel 4.20.	PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Rincian Golongan.....	131
Tabel 4.21.	PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Pendidikan.....	131
Tabel 4.22.	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 2011.....	133
Tabel 4.23.	Pengurusan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Tanda-tanda Jasa lainnya, Tahun 2011	133
Tabel 4.24.	Pemberian izin pada Kantor Pelayanan Izin terpadu Tahun 2010-2011.....	134
Tabel 4.25.	Jumlah PMKS dan yang sudah tertangani di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011.....	145
Tabel 4.26.	Daftar Aset Pustaka di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011.....	148
Tabel 4.27.	Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa pada Urusan pilihan Tahun 2011.....	151
Tabel 4.28.	Data RTP Pengelolaan Hasil Perikanan Tahun 2011.....	157
Tabel 4.29.	Data RTP Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2011.....	158
Tabel 4.30.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Satu Paket Pencetakan Sawah di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011.....	161
Tabel 4.31.	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa yang di Bangun di Kabupaten Sumbawa	162
Tabel 4.32.	Luas Kerusakan padi dan palawija Tahun 2011.....	165
Tabel 4.33.	Bantuan Bibit dan Alat Pertanian Pendukung Pengembangan Hortikultura di Kabupaten Sumbawa.....	166
Tabel 4.34.	Potensi sumber Daya Alam Di Kabupaten Sumbawa	179
Tabel 4.35.	Potensi Bahan Galian Kabupaten Sumbawa.....	182
Tabel 4.36.	Daftar Perusahaan Eksplorasi Pertambangan di Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2011	183
Tabel 4.37.	Potensi sumberdaya Energi Angin	184

Tabel 4.38.	Potensi Sumberdaya Energi Air	185
Tabel 4.39.	Perkembangan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sumbawa	187
Tabel 4.40.	Pengembangan Jumlah Pelaku Usaha perdagangan menurut besaran usahanya di Kabupaten Sumbawa.....	188
Tabel 5.1.	Realisasi Pelaksanaan program dan Masing-masing Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan pada masing-masing SKPD.....	210
Tabel 5.2.	Sumber dan Jumlah Anggaran Tugas pembantuan Tahun 2011.....	220
Tabel 5.3.	Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi pemecahannya Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan	
Tabel 6.1.	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD yang Menangani Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011.....	224 226
Tabel 6.2.	Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan kamtibmas.....	226

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Porsentase Komposisi Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2000-2010.....	8
Gambar 1.2	Porsentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut lapangan Usaha Utama.....	9
Gambar 1.3	Pendaftaran dan Penempatan tenaga kerja.....	9
Gambar 1.4	Porsentase Penduduk Miskin.....	10
Gambar 1.5	Populasi ternak Besar.....	13
Gambar 1.6	Perkembangan Populasi ternak kecil dan unggas.....	14
Gambar 1.7	Kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB terhadap ADHB.....	24
Gambar 4.1	Perkembangan APK SD, SMP dan SMA.....	67
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Murni.....	68
Gambar 4.3	Kasus Kematian Bayi.....	81
Gambar 4.4	Angka Kematian Ibu.....	82
Gambar 4.5	Jumlah penderita Gizi Buruk	83
Gambar 4.6	Kondisi jalan Kabupaten Sumbawa.....	87
Gambar 4.7	Perbandingan Jumlah Kasus dengan Jumlah tenaga Kerja	105
Gambar 4.8	Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.....	108
Gambar 4.9	Lowongan Tenaga kerja ke Luar Negeri.....	108
Gambar 4.10	Sasaran dan Penyaluran benih unggul bersertifikat.....	160
Gambar 4.11	Konsumsi Daging di Kabupaten Sumbawa	170
Gambar 4.12	Konsumsi Telur di Kabupaten Sumbawa	170
Gambar 4.13	Perkembangan Populasi Ternak Rakyat Hasil Registrasi.....	174

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa Akhir Tahun Anggaran 2011 dapat dirampungkan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Penyusunan LKPJ ini merupakan laporan pencapaian (progress report) penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang secara umum memberikan gambaran hasil-hasil pembangunan yang di dalamnya berisikan pelaksanaan program, tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta penyelenggaraan tugas pembantuan. Oleh karena itu LKPJ ini juga menyajikan data capaian kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumbawa yang merupakan bentuk keberhasilan yang dapat diraih sebagai upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, DPRD Kabupaten Sumbawa dan masyarakat secara luas. Akan tetapi masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan di masa yang akan datang. Untuk itu berdasarkan mekanisme penyusunan LKPJ diperlukan pembahasan secara internal oleh DPRD, guna menghasilkan rekomendasi, catatan-catatan strategis sebagai masukan ataupun koreksi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan menjadi sebuah wahana bagi peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKPJ tahun 2011 ini, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat yang diberikan guna terwujudnya cita-cita masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar, 2012

BUPATI SUMBAWA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jamaluddin Malik', written in a cursive style.

Drs. H. JAMALUDDIN MALIK



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesungguhnya memiliki tujuan besar yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban Kepala Daerah perlu dilaksanakan, yang salah satunya melalui mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pada pasal 27 ayat (2) bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada pasal 17, bahwa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan, Bupati mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Mekanisme LKPJ ini juga sekaligus menjadi sarana untuk mengetahui pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun tersebut. Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan (a) urusan desentralisasi, (b) tugas pembantuan, dan (c) tugas



umum pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan demikian, secara konstitusional LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2011 wajib disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sumbawa dalam rapat paripurna DPRD.

1.1. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran Bupati Sumbawa Tahun 2011 dilaksanakan dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan perkembangan (progress report) sekaligus gambaran pembangunan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2011 yang penyusunannya didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012;

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

1.2.1. Kondisi Geografis

1.2.1.1. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Kabupaten Sumbawa terletak diantara 116°42'–118°22' Bujur Timur, 8°8'–9°7' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;



1.2.1.2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah 11.556,44 km², yang terdiri dari wilayah daratan 6.643,98 km², dan wilayah lautan 4.912,46 km². Dengan luasan tersebut menjadikan Kabupaten Sumbawa memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar dengan posisi geostrategic pada jalur lalu lintas perdagangan Surabaya-Waingapu dan berada pada koridor lima Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang berorientasi pada pembangunan pariwisata, perikanan dan peternakan. Secara administratif Kabupaten Sumbawa terbagi dalam 24 wilayah kecamatan, 158 Desa dan 8 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administratif Pemerintahan
Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Desa / Kelurahan	Persentase Dataran
1	2	3	4	5
1.	Lunyuk	513,74	7	7,73
2.	Orong Telu	465,97	4	7,01
3.	Alas	123,04	8	2,64
4.	Alas Barat	168,88	8	1,16
5.	Buer	137,01	6	2,66
6.	Utan	155,42	9	2,8
7.	Rhee	230,82	4	3,01
8.	Batulanteh	391,40	6	5,89
9.	Sumbawa	44,83	8*	0,66
10.	Labuhan Badas	435,89	7	6,69
11.	Unter Iwes	82,38	8	1,13
12.	Moyohilir	186,79	10	2,81
13.	Moyo Utara	90,80	6	1,37
14.	Moyohulu	311,96	12	4,7
15.	Ropang	444,48	5	6,69
16.	Lenangguar	504,32	4	7,59
17.	Lantung	167,45	4	2,52
18.	Lape	204,43	4	3,07
19.	Lopok	155,59	7	2,34
20.	Plampang	418,69	12	7,11
21.	Labangka	243,08	5	2,52
22.	Maronge	274,75	4	4,46
23.	Empang	558,55	10	8,41
24.	Tarano	333,71	8	5,02
Jumlah		6.643,98	166	100

(*) kelurahan

Sumber Data : BPS Kabupaten Sumbawa. Sumbawa Dalam Angka (2010)



1.2.1.3. Topografi.

Topografi daratan Kabupaten Sumbawa cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian antara 0 sampai 1.730 meter dpl, 41,81% berada pada ketinggian 100 m hingga 500 m (355.108 Ha). Ketinggian tempat kota-kota kecamatan berkisar antara 10 m sampai 650 m di atas permukaan air laut. Dari keseluruhan luas wilayah daratan Kabupaten Sumbawa, 54,38% dikategorikan ke dalam kawasan lindung, dengan klasifikasi kemiringan lahan dibagi menjadi 4 kelas, yaitu 0 – 5%, 5 – 15%, 15 – 40%, dan >40%. Adapun wilayah yang kemiringan lahannya >40% seperti Kecamatan Batulanteh, Ropang, Lenangguar dan Orong Telu, umumnya aksesibilitas masyarakat di wilayah tersebut amat rendah, sehingga penyediaan anggaran untuk infrastruktur dan fasilitas public lebih besar dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya.

1.2.1.4. Iklim dan Curah Hujan

Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2011 temperatur maksimum mencapai 36,6 °C yang terjadi pada bulan Oktober dan temperatur minimum 17,2 °C yang terjadi pada bulan Juli. Adapun kelembaban udara tertinggi selama tahun 2011 mencapai 95% yang terjadi pada bulan Januari, April dan Mei, sedangkan kelembaban udara terendah sebesar 61% pada bulan Agustus dan September. Untuk Tekanan Udara Maksimum sebesar 1.014,0 mb yang terjadi pada bulan Oktober dan minimum 1.003,1 mb pada bulan Januari. Adanya gejala alam seperti elnino yang melanda sebagian wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa, berpengaruh terhadap banyaknya hari hujan dan curah hujan. Hal ini terlihat dari banyaknya hari hujan dan curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2011. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah rata-rata hari hujan terlihat lebih sedikit yaitu sebanyak 93 hari hujan, dengan curah hujan tertinggi pada bulan Februari sebesar 85,8 mm.



1.2.2. Demografis

1.2.2.1. Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2010 sebesar 415.789 jiwa, terdiri dari laki-laki 212.185 jiwa dan perempuan 203.604 jiwa, ini berarti penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan sex ratio 104.

Berdasarkan data BPS dalam rentang waktu periode 5 (lima) tahun antara tahun 2006-2010 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumbawa mencapai 3,52%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,87% pertahun, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2006-2010

No	Kec.	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)			Sex Rasio	Kepada tan (Jiwa/Km ²)
			Laki	Perem.	Jumlah		
1.	Lunyuk	513,74	9.326	8.783	18.109	106	35
2.	Orong Telu	465,97	2.400	2.184	4.584	110	10
3.	Alas	123,04	14.218	13.903	28.121	102	229
4.	Alas Barat	168,88	9.364	9.018	18.382	104	109
5.	Buer	137,01	6.821	6.800	13.621	100	99
6.	Utan	155,42	14.521	14.224	28.745	102	185
7.	Rhee	230,82	3.592	3.307	6.899	109	30
8.	Batulanteh	391,40	5.302	4.854	10.156	109	26
9.	Sumbawa	44,83	28.548	27.789	56.337	103	1.257
10.	Lab. Badas	435,89	14.643	14.449	29.092	101	67
11.	Unter Iwes	82,38	9.332	8.818	18.150	106	220
12.	Moyohilir	186,79	11.218	10.881	22.099	103	118
13.	Moyo Utara	90,80	4.643	4.486	9.129	103	101
14.	Moyohulu	311,96	10.254	9.657	19.911	106	64
15.	Ropang	444,48	2.644	2.370	5.014	112	11
16.	Lenangguar	504,32	3.317	3.003	6.320	110	13
17.	Lantung	167,45	1.408	1.360	2.768	104	17
18.	Lape	204,43	8.281	7.839	16.120	106	79
19.	Lopok	155,59	8.869	8.695	17.564	102	113
20.	Plampang	418,69	14.269	13.565	27.834	105	66
21.	Labangka	243,08	5.272	4.940	10.212	107	42
22.	Maronge	274,75	5.076	4.695	9.771	108	36



23.	Empang	558,55	11.132	10.523	21.655	106	39
24	Tarano	333,71	7.735	7.461	15.196	104	46
Jumlah		6.643,98	212.185	203.604	415.789	104	63
Th. 2009		6.643,98	210.487	202.008	412.495	104	62
Th. 2008		6.643,98	212.331	196.558	408.889	108	62
Th. 2007		6.643,98	210.458	194.812	405.270	108	61
Th. 2006		6.643,98	208.570	193.070	401.640	108	61

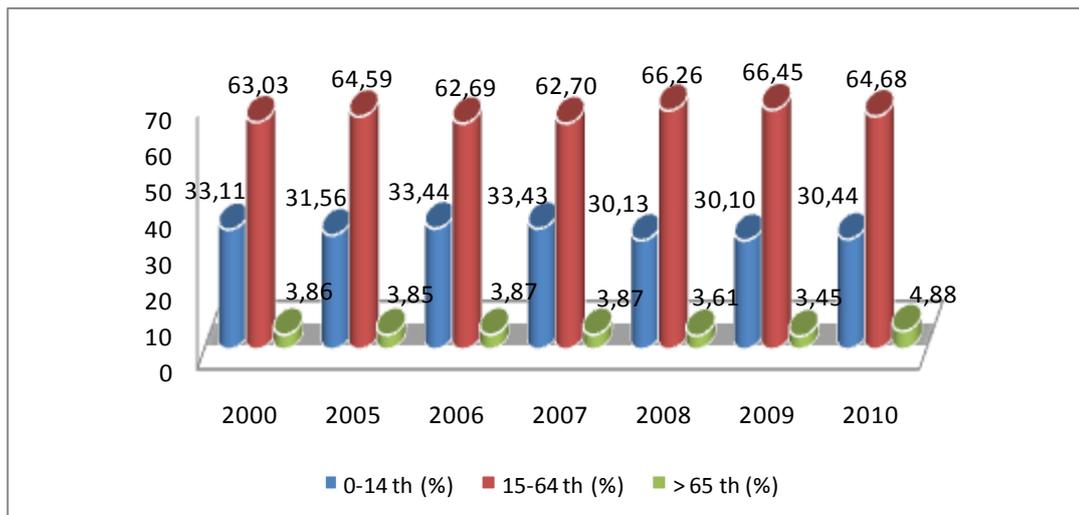
Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa (data diolah), untuk data tahun 2011 belum tersedia.

Berdasarkan tabel diatas, luas masing-masing wilayah Kecamatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, memperlihatkan Kecamatan Sumbawa merupakan kecamatan terpadat dibandingkan 23 kecamatan lainnya dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 1.257 jiwa/km², dan Kecamatan Orong Telu merupakan kecamatan terjarang penduduknya dengan jumlah penduduk sebesar 10 jiwa/km². Sedangkan untuk Kabupaten Sumbawa bila diakumulasi penduduknya berjumlah 415.789 jiwa dengan luas wilayah 6.643,98 km², maka setiap km² dihuni oleh 63 jiwa. Hal ini menggambarkan penduduk Kabupaten Sumbawa masih jarang, sehingga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan suatu daerah menjadi daerah tujuan transmigrasi, akan tetapi hal ini harus tetap diwaspadai agar besaran penduduk dapat dipertahankan pada tingkat tertentu, sehingga kondisi daerah dapat terjaga dari segi estetika, kenyamanan dan kesehatan penduduk. Hal ini dimaksudkan, agar penduduk yang ada tidak menjadi beban bagi pembangunan akan tetapi dapat menjadi modal pembangunan. Untuk itu peran serta semua lini terus ditingkatkan agar penduduk tersebut baik dari segi pendidikan, keterampilan, kesehatan dan pendapatannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun guna menghasilkan penduduk yang produktif, serta dapat berperan optimal dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan. Hal ini tergambar dari struktur penduduk Kabupaten Sumbawa berdasarkan kelompok umur sesuai hasil sensus 2000, Supas tahun 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010, dimana pada kelompok usia muda lebih besar dibandingkan dengan usia dewasa/tua, hal ini terlihat dari rasio ketergantungan (dependensi ratio) penduduk Kabupaten Sumbawa yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Rasio ketergantungan ini menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (penduduk usia antara 15-64 tahun) terhadap kelompok tidak produktif (penduduk usia muda 0-14 tahun dan usia tua di



atas 65 tahun) sebagai berikut.

- a. Proporsi penduduk usia muda (dibawah 15 tahun) berkisar antara 30,10% sampai dengan 33,44% dengan rata-rata 31,74%.
- b. Proporsi penduduk muda/produktif (15-64 tahun) berkisar antara 62,69% sampai dengan 66,45% dengan rata-rata 64,34%.
- c. Proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) berkisar antara 3,45% sampai dengan 4,88% dengan rata-rata 3,91%.

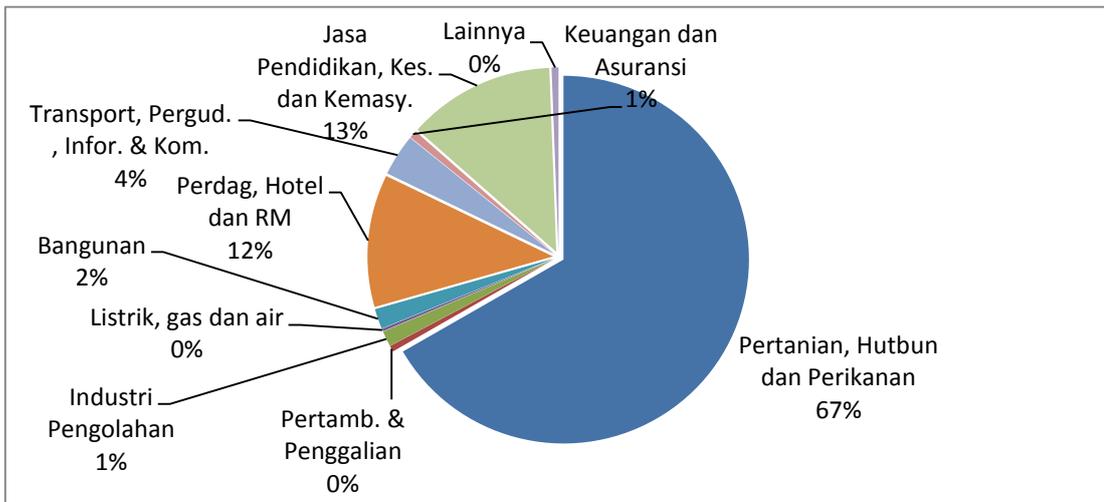


Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa (data diolah), untuk data tahun 2011 belum tersedia.

Gambar 1.1
Porsentase Komposisi Penduduk Kab. Sumbawa Tahun 2000-2010

1.2.2.2. Ketenagakerjaan

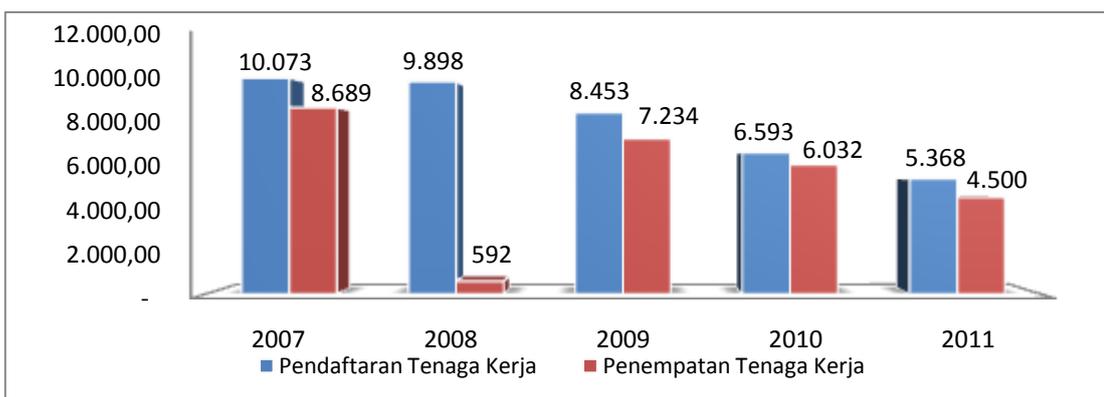
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan utama mencapai 202.263 orang, terdiri dari sektor Pertanian Tanaman Padi dan Palawija sebesar 118.031 orang, Hortikultura 890 orang, Perkebunan 5.028 orang, Perikanan 7.651 orang, Peternakan 2.632 orang, Kehutanan 597 orang, Pertambangan dan Penggalian 1.065 orang, Industri Pengolahan 2.766 orang, Listrik dan gas 467 orang, Konstruksi /Bangunan 3.578 orang, Perdagangan 22.460 orang, Hotel dan Rumah Makan 1.090 orang, Transportasi dan Pergudangan 6.879 orang, Informasi dan Komunikasi 531 orang, Keuangan dan Asuransi 1.379 orang, Jasa Pendidikan 9.713 orang, jasa kesehatan 1.556 orang, Jasa Kemasyarakatan 14.731 orang dan jasa lainnya sejumlah 1.219 orang, hal ini terlihat pada gambar berikut.



Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa (data diolah), untuk data tahun 2011 belum tersedia.

Gambar 1.2
Porsentase Penduduk 15 tahun keatas Menurut Lapangan Usaha Utama Hasil Sensus tahun 2010 di Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data tahun 2011, bahwa jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 5.368 orang dan telah mendapatkan penempatan kerja sebanyak 4.500 orang (83,83%). Sedangkan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2007 - 2011 dari 40.385 orang yang terdaftar pencari kerja telah ditempatkan sebanyak 27.047 orang (66,97%) penyerapan tenaga kerja. Sebagai gambaran mengenai tenaga kerja terdaftar dan penempatannya pada tahun 2007-2011 disajikan pada gambar berikut.



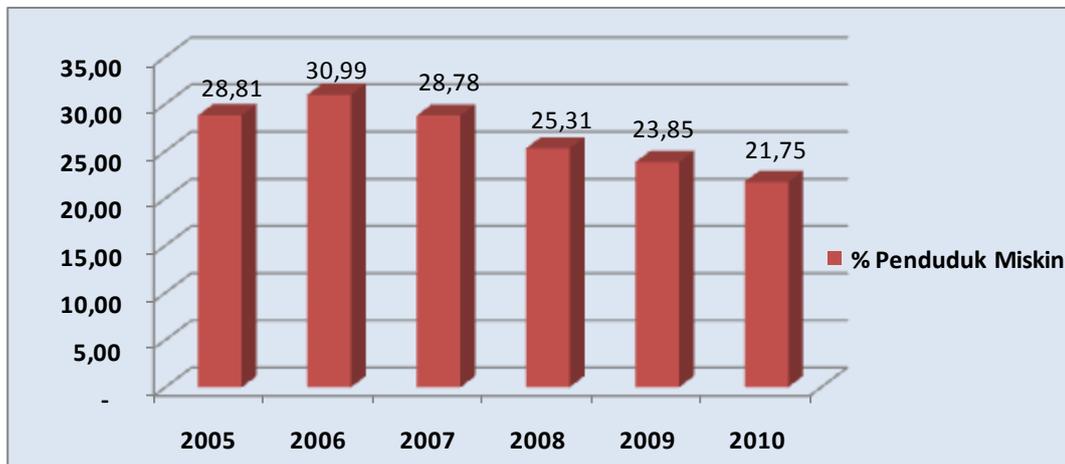
Sumber Data : Disnakertrans Kabupaten Sumbawa

Gambar 1.3
Pendaftaran dan Penempatan Tenaga Kerja di Kab. Sumbawa Th. 2007-2011



1.2.2.3. Penduduk Miskin

Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Berdasarkan data BPS bahwa penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2005 berjumlah 114.664 jiwa (28,81% dari penduduk), pada tahun 2006 meningkat sebesar 124.468 jiwa (30,99% dari penduduk). Terjadinya peningkatan penduduk miskin pada tahun 2006 disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM (mengurangi subsidi), karena dampak dari kebijakan tersebut harga kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan yang cukup membebani masyarakat, sementara itu pendapatan yang diperoleh masyarakat tetap sama sehingga daya beli masyarakat menurun. Sedangkan pada tahun 2007 berjumlah 116.637 jiwa (28,78% dari penduduk), pada tahun 2008 menurun menjadi 103.490 jiwa (25,31% dari penduduk), pada tahun 2009 menjadi 98.380 jiwa (23,85% dari jumlah penduduk) dan pada tahun 2010 turun menjadi 90.434 jiwa (21,75% dari jumlah penduduk). Penurunan angka kemiskinan ini mengindikasikan bahwa sejumlah penduduk miskin mampu keluar dari kemiskinannya, hal ini ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasarnya.



Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa (data diolah), untuk data tahun 2011 belum tersedia

Gambar 1.4
Porsentase Penduduk Miskin di Kab. Sumbawa Tahun 2005-2010



1.2.2.4. Tingkat Pendidikan

Kabupaten Sumbawa pada Tahun Anggaran 2011/2012 berdasarkan tingkat pendidikan penduduk, dikelompokkan pada usia 7-12 tahun sebanyak **49.689 jiwa**, usia 13-15 tahun sebanyak **24.017 jiwa**, usia 16-18 tahun sebanyak **24.198 jiwa**, selebihnya berusia di bawah usia 7 tahun dan di atas usia 18 tahun.

Perkembangan jumlah murid dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, karena kesadaran akan pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat guna mencetak SDM yang berkualitas, karena proses pendidikan dapat merubah pola pikir masyarakat dari statis tradisional menjadi dinamis rasional, oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa terus dipacu dan ditingkatkan, sehingga Angka Melek Huruf dan Lamanya sekolah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang melek huruf di Kabupaten Sumbawa selama periode 2004 – 2010 mengalami peningkatan. pada tahun 2010 Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten Sumbawa sebesar 93,44% dan pada tahun 2011 mencapai 99,70%. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumbawa dengan rata-rata 7 tahun (SLTP kelas 1) lebih tinggi dibandingkan pencapaian Provinsi NTB.

1.2.3. Kondisi Ekonomi

1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah

Otonomi daerah saat ini menjadikan daerah secara kreatif berupaya melakukan peningkatan dalam pengelolaan potensi daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan nilai tambah pada pendapatan daerah. Kabupaten Sumbawa memiliki beragam potensi sumber daya yang bisa dikembangkan secara optimal dalam rangka menarik peluang investasi. Potensi komoditas unggulan Kabupaten Sumbawa yang dapat dikembangkan adalah :

a. Potensi Peternakan

Penetapan Pulau Sumbawa sebagai daerah tempat pemurnian sapi bali merupakan wujud perhatian Pemerintah Pusat kepada daerah untuk diapresiasi lebih lanjut, hal ini dikarenakan **sapi bali** merupakan sapi asli Indonesia dengan



keunggulan daya reproduksi cukup tinggi, calving interval cukup pendek dan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang sangat baik. Pertumbuhan sapi bali mengalami peningkatan sebesar **10.247 ekor (6,64%)**, dengan jumlah populasi pada tahun 2011 sebesar 164.505 ekor dan pada tahun 2010 sebesar 154.258 ekor. Sejalan dengan hal tersebut telah dilakukan penguatan program Bumi Sejuta Sapi yang dicanangkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai langkah terobosan dalam pembangunan daerah dengan mengutamakan sumber daya lokal. Hal ini didasarkan pada upaya *mendukung kecukupan daging sapi pada tahun 2014 dan mengurangi ketergantungan pada import daging maupun sapi bakalan.*

Potensi ternak lainnya adalah **sapi Sumbawa** yang sebelumnya dikenal dengan nama **sapi hissar** yang merupakan rumpun sapi lokal yang berkembang di pulau Sumbawa dan ditenakkan secara murni oleh masyarakat di pulau Sumbawa secara turun temurun sampai sekarang, sehingga telah ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian RI Nomor : 2909/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Sapi Sumbawa, sebagai Sumber Daya Genetik Hewani asal Kabupaten Sumbawa. Sapi Sumbawa disukai dan dikembangkan karena kemampuan beradaptasinya sangat baik serta menghasilkan jenis susu daerah tropis. Pertumbuhan sapi Sumbawa mengalami peningkatan sebesar **291 ekor (11,46%)**, dengan jumlah populasi pada tahun 2011 sebesar 2.830 ekor dan pada tahun 2010 sebesar 2.539 ekor.

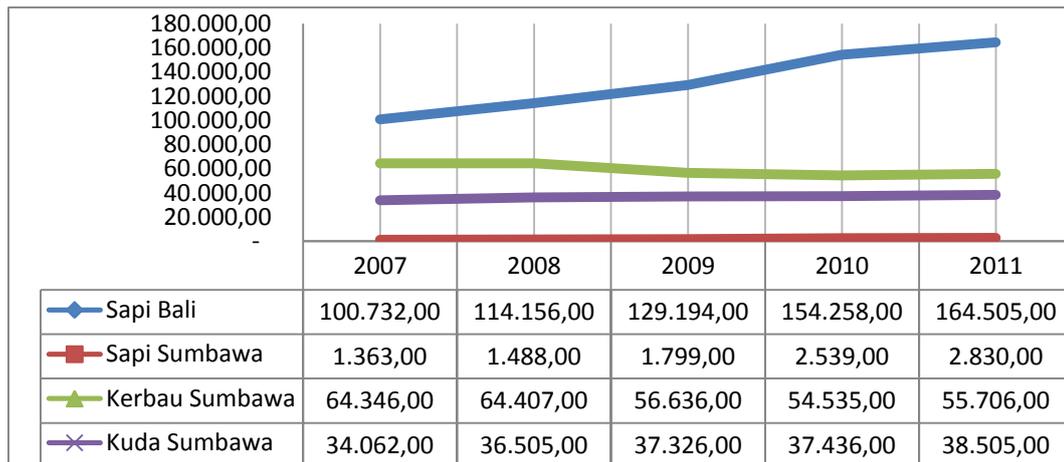
Potensi lainnya adalah **Kerbau Sumbawa** yang merupakan jenis kerbau lokal yang telah ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian RI Nomor 2910/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Sumbawa. Pertumbuhan kerbau mengalami peningkatan sebesar **1.171 ekor (2,15%)**, dengan jumlah populasi pada tahun 2011 sebesar 55.706 ekor dan pada tahun 2010 sebesar 54.535 ekor).

Demikian juga dengan ternak lainnya seperti **Kuda Sumbawa** yang mempunyai kemampuan beradaptasi cukup baik pada keterbatasan lingkungan dengan keunggulan daya angkut, tarik dan lari serta dapat menghasilkan susu yang sudah terkenal karena menjadi salah satu ikon Kabupaten Sumbawa dengan Brand susu kuda liar Sumbawa, yang telah ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian RI Nomor : 2917/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan



Rumpun Kuda Sumbawa. Pertumbuhan Kuda Sumbawa mengalami peningkatan sebesar **1.069 ekor (2,86%)**, dengan jumlah populasi pada tahun 2011 sebesar 38.505 ekor dan pada tahun 2010 sebesar 37.436 ekor.

Populasi ternak besar (Sapi Bali, Sapi Sumbawa, kerbau sumbawa dan kuda sumbawa) menunjukkan perkembangan sebagai berikut.

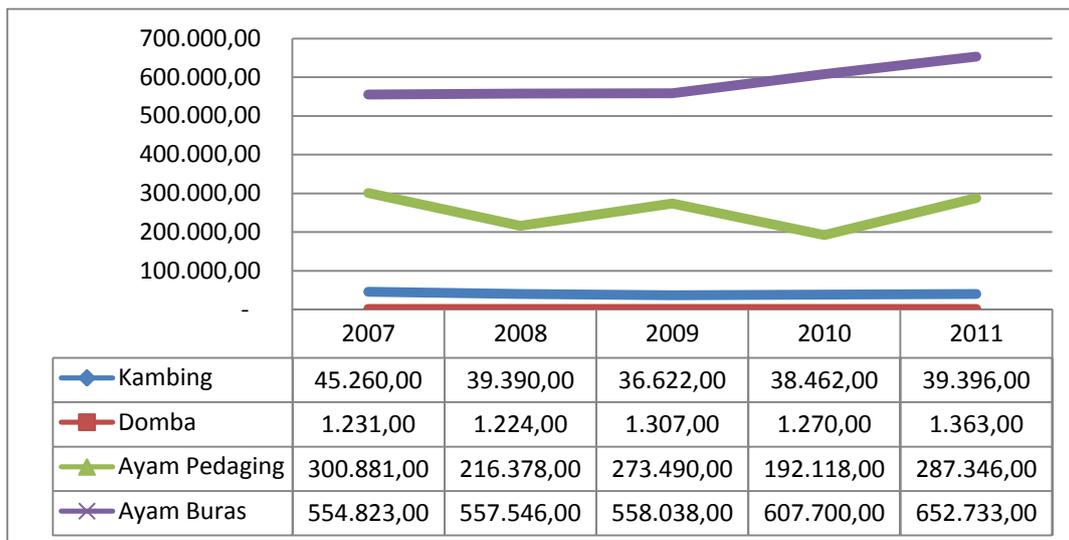


Sumber Data : Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa (Beberapa Tahun Terbitan)

Gambar 1.5
Populasi Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa Tahun 2007-2011

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan populasi ternak besar selama periode 2007–2011, maka populasi ternak sapi sumbawa menunjukkan perkembangan yang amat pesat sebesar 20,67%, sapi bali 13,14%, kuda Sumbawa 3,14%, sedangkan untuk populasi kerbau mengalami penurunan sebesar 3,38%, hal ini disebabkan karena penciutan areal lar, pencurian ternak, kematian akibat serangan penyakit, pemotongan betina produktif, daya dukung lingkungan, reproduksi, penataan kuota pengiriman antar pulau dan peralihan fungsi ternak kerbau yang tidak lagi dipakai sebagai alat dominan pengolahan lahan pertanian.

Kambing dan domba adalah ternak kecil yang masih banyak dipelihara masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Gambaran perkembangan ternak kecil dan unggas di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.



Sumber Data : Dinas Peternakan Kab. Sumbawa (data diolah)

Gambar 1.6
Perkembangan Populasi Ternak Kecil dan Unggas
di Kab. Sumbawa 2007-2011

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan populasi ternak kecil dan unggas pada periode 2007–2011, maka populasi ayam pedaging sebesar 4,53%, Ayam buras 4,22%, domba 2,68% sedangkan untuk populasi kambing mengalami penurunan sebesar 3,14%.

b. Potensi Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Sumbawa dengan luas perairan sebesar ± 3.831,72 Km² dengan potensi sumber daya perikanan sebagai berikut.

Tabel 1.3
Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Kab. Sumbawa 2011

No	Sumber Daya	Potensi		Dimanfaatkan			
		Luas (Ha)	Prod (ton)	Luas (Ha)	%	Prod (ton)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Perikanan Laut						
	a. Perikanan Tangkap						
	1. P. Pantai	677.600	24.864	677.600	100,00	41.401,84	166,37
	2. P. Lepas Pantai	900.000	30.789	286.722	31,86	3.972,18	12,90
	3. Z E E	7.400.000	203.390	-	-	-	-
	Jumlah	8.977.600	259.043	964.322	10,74	45.374,02	17,52
	b. Budidaya Laut						
	1. Budidaya Rumput Laut	14.950	897.000	7.142	47,77	88.902,98	9,91
	2. Budidaya Kerapu	1.200	15.080	260	21,67	231,47	1,53
	3. Budidaya Mutiara	5.700	13,4	2.108	36,98	0,30	2,24
	Jumlah	21.850	912.093	9.510	43,52	89.134,75	9,77
II	Perairan Umum						



No	Sumber Daya	Potensi		Dimanfaatkan			
		Luas (Ha)	Prod (ton)	Luas (Ha)	%	Prod (ton)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Waduk Dam	1.074	1.074	704	65,55	1.531,07	142,56
	2. Sungai	900	900	796	88,44	340,53	37,84
	3. Laguna	50	50	23	46,00	20,40	40,80
	Jumlah	2.024	2.024	1.523	75,25	1.892,00	93,48
III	Perairan Air Tawar						
	1. Kolam	1.464	1.464	132,97	9,08	432,26	29,53
	2. Sawah/mina Padi	398,2	398,2	2,70	0,68	4,1	1,03
	3. Kerambah/KJA	406,2	406,2	9,00	2,22	2,6	0,64
	Jumlah	2.268,4	2.268,4	144,67	6,38	438,96	19,35
IV	Perairan Air Payau						
	1. Tambak	10.375	12.744,50	2.807,30	27,06	42.331,29	332,15
	Jumlah	10.375	12.744,50	2.807,30	27,06	42.331,29	332,15
	TOTAL	9.014.117,4	1.188.173,3	978.306,97	10,85	179.171,02	15,08

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

1. Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap (perairan pantai, perairan lepas pantai dan ZEE) seluas 8.977.600 ha dengan potensi produksi 259.043 ton. Sampai saat ini telah dimanfaatkan seluas 964.322 ha (10,74%) dengan produksi 45.374,02 ton (17,52%). Adapun jenis tangkapan yang dominan antara lain adalah jenis ikan tongkol, cakalang, tenggiri, cumi-cumi, layang, kembung, lemuru, kerapu serta jenis-jenis ikan karang. Kegiatan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa seluruhnya dilakukan oleh nelayan dengan jumlah nelayan 10.322 orang (5.532 RTP).

Penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan konsep pengembangan wilayah, meliputi 4 wilayah pengembangan, yaitu :

- Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Barat dengan pusat pengembangan di Kecamatan Alas Barat. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Alas, Buer dan Utan.
- Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Tengah dengan pusat pengembangan di Kecamatan Labuhan Badas. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Rhee, Moyo Utara dan Moyo Hilir.
- Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Timur dengan pusat pengembangan Kecamatan Plampang (Teluk Santong). Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Maronge dan Lape.



- d). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Lunyuk. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Labangka dan Ropang.

2. Perikanan Budidaya

Potensi **perairan umum** di Kabupaten Sumbawa sampai saat ini adalah seluas 2.024 Ha dan sekitar 1.523 Ha (75,24%) telah dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan. Produksi penangkapan di perairan umum pada tahun 2011 sebesar 1.892,00 ton (93,48%) dari potensi produksi yang ada. Kegiatan penangkapan ikan di perairan umum banyak dilakukan di bendungan-bendungan besar seperti Bendungan Batu Bulan (volume air 56 Juta m³), Bendungan Mamak (32,5 juta m³), Bendungan Tiu Kulit (10,8 juta m³), dan Bendungan Gapit (10,3 juta m³). Sistem budidaya yang dianggap memungkinkan untuk dilakukan adalah sistem budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas budidaya berupa ikan mas (*Cyprinus carpio L.*), nila gift (*Oreochromis niloticus*) dan nila merah (*Tilapia nilatica*).

Selain perairan umum, Kabupaten Sumbawa juga sangat potensial untuk pengembangan **budidaya laut**. Luas potensi areal untuk pengembangan budidaya laut adalah sebesar 21.850 ha dengan luas pemanfaatan sebesar 9.510 ha. Adapun **produksi pada tahun 2011 sebesar 89.796,75 ton**. Disamping itu jenis komoditas yang diusahakan antara lain mutiara, ikan kerapu, dan rumput laut.

- a) **Budidaya Mutiara**, luas potensi untuk usaha budidaya mutiara di Kabupaten Sumbawa adalah \pm 5.700 Ha dengan potensi produksi 13,4 ton, sampai dengan tahun 2011 baru dimanfaatkan sebesar 2.108 Ha (36,98%), dengan total produksi sebesar 300 kg (2,24%). Kegiatan usaha budidaya mutiara di Kabupaten Sumbawa seluruhnya dilakukan oleh 18 perusahaan swasta (aktif berproduksi 4 perusahaan, tidak aktif 10 perusahaan dan dalam masa persiapan 4 perusahaan) dengan total investasi/modal sebesar Rp. 66.952.500.000,- yang terdapat pada 11 kecamatan, yaitu Alas Barat, Alas, Utan, Rhee, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Moyo Utara, Lape, Plampang, Labangka dan Tarano.
- b) **Budidaya Kerapu**, Kegiatan usaha budidaya kerapu di Kabupaten Sumbawa memiliki luas potensi areal pemanfaatan adalah \pm 1.200 Ha, akan tetapi hingga



Tahun 2011 pemanfaatan areal yang telah dilakukan masih sangat kecil yaitu sekitar 260 Ha (21,67 %) dengan produksi 231,47 ton. Jenis usaha budidaya ini pun di Kabupaten Sumbawa dilakukan oleh perusahaan swasta sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, dengan jumlah investasi Rp. 2.050.000.000,- Budidaya kerapu yang dilaksanakan oleh masyarakat masih terbatas dalam bentuk usaha penampungan kerapu hidup hasil tangkapan, hal ini terkendala karena : kurangnya modal usaha, belum dikuasainya teknologi budidaya kerapu oleh masyarakat dan ketersediaan benih kerapu masih sangat kurang.

- c) **Budidaya Rumput Laut;** Kegiatan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Sumbawa merupakan jenis usaha budidaya yang cukup berkembang dengan baik. Adapun luas potensi budidaya rumput laut sebesar \pm 14.950 Ha, dan telah dimanfaatkan seluas \pm 7.142 Ha, dengan total produksi sebesar 88.902,98 ton (basah) meningkat 102,35 % dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya memproduksi sebesar 43.936,00 ton. Pada tahun 2011 terdapat 10 perusahaan yang bergerak dalam usaha budidaya rumput laut (8 perusahaan aktif dan 2 tidak aktif) yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Sumbawa, yakni di Kecamatan Alas Barat, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Lape, Maronge, Plampang dan Tarano, dengan total investasi Rp. 1.850.000.000,- Perusahaan aktif tersebut telah bermitra dengan pembudidaya lokal rumput laut yang seluruhnya berjumlah 1.542 KK.

Kabupaten Sumbawa juga berpotensi untuk pengembangan **budidaya ikan air payau**, dengan potensi untuk budidaya pertambakan di Kabupaten Sumbawa adalah seluas 10.375 Ha, dan telah dimanfaatkan seluas 2.807,30 Ha (27,06%). Adapun total produksi tahun 2011 sebesar 42.331,29 ton meliputi komoditas udang (39.819,80 ton) dan bandeng (2.511,5 ton).

Sebagian besar usaha budidaya udang di Kabupaten Sumbawa dilakukan secara semi intensif dengan jumlah pembudidaya sebanyak 120 RTP/RTPP, sedangkan tradisional plus sebanyak 137 RTP, dan intensif sebanyak 123 RTP/RTPP. Jumlah perusahaan/perorangan yang bergerak di bidang usaha tambak di Kabupaten Sumbawa hingga Tahun 2010 berjumlah 91 perusahaan dengan luas areal tambak udang sebesar 983 Ha (aktif 87 perusahaan dengan luas areal tambak 992,6 Ha, tidak aktif 4 perusahaan dengan luas areal tambak 66,5 Ha), dengan total investasi Rp. 41.995.000.000,-, hingga tahun 2011 dari berbagai sentra



pengembangan budidaya tambak terdapat sentra yang telah dibangun jaringan irigasi tambak yang dibiayai melalui APBN yaitu sentra pengembangan tambak penyaring, sentra pengembangan tambak Sepayung, Labuhan Jontal dan sentra pengembangan tambak Labuhan Bontong, sedangkan rehabilitasi tambak telah dilakukan pada sentra pengembangan tambak Labuhan Sangoro, Labuhan Kuris, Batu Rea Utan dan Maronge.

Selain itu, luas potensi budidaya ikan di **kolam** sebesar 1.464 Ha, dengan luas pemanfaatan pada tahun 2011 sebesar 132,97 Ha (9,08%) dan total produksi sebesar 432,26 ton. Secara umum kegiatan budidaya ikan di kolam dilakukan oleh masyarakat, dengan penerapan sistem teknologi tradisional dan tradisional plus sehingga belum terlihat peningkatan jumlah produksi yang optimal. Peningkatan produksi secara signifikan tentunya harus dengan penerapan teknologi tepat guna, dan pengembangannya juga bergantung pada besarnya investasi yang harus dilakukan.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah produk perikanan dilakukan dengan pengembangan sentra-sentra pengolahan, seperti :

1. Sentra pengolahan terasi dan masin di wilayah Kec. Tarano meliputi Labuhan Bontong dan Labuhan Aji.
2. Sentra pengolahan rumput laut di Ngeru dan Labuhan Terata.
3. Sentra pengolahan bandeng presto di Penyaring, Labuhan Kuris dan Labuhan Mapin.
4. Sentra ikan bakar di Karang Dima.
5. Sentra ikan kering dan pindang di Labuhan Sumbawa, Sangoro, Labuhan Jontal, Teluk Santong, Labuhan Jambu, Pulau Kaung, Bungin, Labuhan Bajo dan Labuhan Mapin.

Secara keseluruhan tingkat pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa rata-rata sebesar 20%. Disamping itu terdapat 62 buah pulau-pulau kecil, 6 diantaranya berpenghuni (Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Moyo, Pulau Medang, Pulau Ngali dan Ketapang) serta tidak berpenghuni 56 buah. Pulau-pulau kecil tersebut sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari, budidaya rumput laut, budidaya kerapu dan budidaya mutiara.



c. Potensi Pertanian

1. Sumberdaya lahan

Luas wilayah daratan Kabupaten Sumbawa mencapai 664.398 Ha, sementara luas penggunaan lahan untuk pertanian pada tahun 2011 sebesar 165.607 Ha (24,93%), terdiri dari : Sawah 49.324 Ha (7,42%), pekarangan yang ditanami tanaman pertanian 20.337 Ha (3,06 %), tegalan/kebun 61.461 Ha (9,25 %), ladang/huma 9.576 Ha (1,44%) dan sementara tidak diusahakan 24.911 Ha (3,75%), seperti terlihat pada tabel 1.4. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka penggunaan lahan untuk pertanian pada tahun 2011 mengalami peningkatan luas sebesar 893 ha (0,54%), hal ini disebabkan karena berbagai faktor seperti bertambahnya irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa sehingga terjadi alih fungsi lahan yang sebelumnya bukan lahan pertanian dijadikan lahan pertanian seperti lahan sawah dengan dilakukannya perعتakan sawah-sawah baru.

Tabel 1.4
Luas Lahan dan Potensi Wilayah di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

NO	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)
1.	Lahan Sawah	49.324
	a. Irigasi Teknis	19.001
	b. Irigasi Setengah Teknis	11.012
	c. Irigasi Sederhana	4.198
	d. Irigasi Desa / Non PU	5.956
	e. Tadah Hujan	9.157
2.	Lahan Bukan Sawah	239.633
	a. Tegalan / Kebun	61.461
	b. Ladang Huma	9.576
	c. Perkebunan	27.381
	d. Hutan Rakyat	88.911
	e. Tambak	3.027
	f. Kolam/Tebat/Empang	252
	g. Padang Pengembalaan	3.777
	h. Sementara Tidak Diusahakan	24.911
	i. Lainnya (Pekarangan yang ditanami tanaman pertanian, dll)	20.337
3.	Lahan Bukan Pertanian	375.441
	a. Rumah, Bangunan dan Halaman Sekitar	6.308
	b. Hutan Negara	278.154



c. Rawa-Rawa (Tidak Ditanam)	6
d. Lainnya (Jalan, Sungai, Danau, Lahan Tandus, dll)	90.973
664.398	

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Sumbawa

2. Komoditi Tanaman Pangan

Komoditi tanaman pangan di Kabupaten Sumbawa tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.5
Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2011

No	Komoditi	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
1.	Padi	79.270	390.940	49,32
2.	Jagung	26.065	132.554	50,86
3.	Kedelai	4.357	6.549	15,03
4.	Kacang Hijau	32.518	36.305	11,16
5.	Kacang Tanah	1.454	1.499	10,31
6.	Ubi Kayu	339	4.952	146,08
7.	Ubi Jalar	67	879	131,19

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sumbawa (Angka Sementara)

1). Padi

Tanaman padi sebagai komoditi pangan pokok merupakan komoditi yang dominan, karena padi menjadi tanaman pangan utama yang dihasilkan oleh Kabupaten Sumbawa, hal ini tergambar dari besaran **luas panen** pada tahun 2011 sebesar 79.270 ha, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 73.588 ha, sehingga terjadi peningkatan luas panen sebesar 5.682 ha (7,72%). Demikian dengan **produksi** mengalami peningkatan sebesar 19.765 ton (5,32%) dengan total produksi pada tahun 2011 sebesar 390.940 ton dan pada tahun 2010 sebesar 371.175 ton. Peningkatan luas panen dan produksi ini tidak diikuti oleh peningkatan **produktivitas**, karena terjadi penurunan sebesar 1,00 kw/ha (2,22%) dari produktivitas tahun 2011 sebesar 49,32 kw/ha dan pada tahun 2010 sebesar 50,44 kw/ha. Adapun upaya peningkatan ini terus dipacu melalui ekstensifikasi seperti program perluasan areal, dan intensifikasi dengan menerapkan program-program peningkatan produktivitas, sehingga Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten yang menerima **penghargaan Ketahanan Pangan** dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2011, karena keberhasilannya dalam meningkatkan produksi padi sebesar 5% selama 2 tahun berturut-turut.



2). Jagung

Jagung merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Sumbawa karena memiliki keunggulan kompetitif yaitu berupa kecerahan biji yang sempurna serta produktivitas tinggi. Adapun **Luas panen** jagung pada tahun 2011 sebesar 26.065 ha, meningkat 11.513 ha (79,12%) dibandingkan tahun sebelumnya dengan luas panen sebesar 14.552 ha. Demikian juga dengan **produksi** pada tahun 2011 sebesar 132.554 ton terjadi peningkatan sebesar 78.563 ton (145,51%) dibandingkan tahun sebelumnya dengan produksi 53.991 ton. Peningkatan luas panen dan produksi jagung ini juga diikuti oleh **produktivitas** yang meningkat sebesar 14,00 kw/ha (37,09%) dengan produktifitas pada tahun 2011 sebesar 50,86 kw/ha, dan pada tahun 2010 sebesar 37,10 kw/ha.

3). Kedelai

Produksi kedelai di Kabupaten Sumbawa cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari **luas panen** kedelai pada tahun 2011 sebesar 4.357 ha mengalami penurunan sebesar 5.592 ha (56,21%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan luas panen sebesar 9.949 ha, demikian juga dengan **produksi** kedelai menurun sebesar 6.299 ton (49,03%) dibandingkan tahun sebelumnya dengan total produksi pada tahun 2011 sebesar 6.549 ton dan tahun 2010 sebesar 12.848 ton. Penurunan luas panen dan produksi kedelai ini terjadi karena adanya peralihan komoditi kedelai ke komoditi jagung. Akan tetapi penurunan luas panen dan produksi ini tidak diikuti oleh penurunan produktivitas, karena pada tahun 2011 **produktivitas** kedelai mengalami peningkatan sebesar 2,00 kw/ha (16,42%) bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena produktivitas kedelai pada tahun 2011 sebesar 15,03 kw/ha dan pada tahun 2010 sebesar 12,91 kw/ha. Adapun upaya pemerintah daerah kedepan untuk semakin meningkatkan produksi kedelai adalah dengan mengoptimalkan penyaluran benih-benih berkualitas serta peningkatan pengetahuan petani akan tata cara pembudidayaan kedelai dengan penerapan teknologi tepat guna melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).



4). Kacang Hijau

Kacang hijau merupakan salah satu komoditi yang banyak dikembangkan di Kabupaten Sumbawa, seperti varietas Kacang Hijau Sampeong. Varietas ini merupakan varietas lokal unggulan yang memiliki rasa dan aroma kacang hijau yang kuat serta daya simpan yang lebih lama. Pada tahun 2011 mengalami penurunan **luas panen** sebesar 1.693 ha (4,95%), karena terjadinya peralihan tanam dari kacang hijau ke jagung, akan tetapi dari sisi **produksinya** meningkat sebesar 812 ton (2,29%), dari 35.493 ton tahun 2010 menjadi 36.305 ton tahun 2011. Demikian juga dengan **produktivitasnya** mengalami peningkatan sebesar 1 kw/ha (7,62%), dari 10,37 kw/ha tahun 2010 menjadi 11,16 kw/ha tahun 2011.

5). Kacang Tanah

Kacang tanah di Kabupaten Sumbawa memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan kacang tanah dari daerah lain karena jumlah biji perpolongnya berjumlah tiga bahkan lebih dengan kondisi fisik polong yang besar dan berisi. Adapun perkembangan kacang tanah dari **luas panen** mengalami peningkatan sebesar 28 ha (1,96%) dengan luas panen pada tahun 2011 sebesar 1.454 ha dan pada tahun 2010 sebesar 1.426 ha. Peningkatan luas panen ini tidak diikuti oleh peningkatan produksi dan produktivitas, dimana terjadi penurunan **produksi** sebesar 269 ton (15,21%), dengan produksi pada tahun 2011 sebesar 1.499 ton dan pada tahun 2010 sebesar 1.768 ton. Demikian juga dengan **produktivitas** menurun sebesar 2 kw/ha (16,85%), dengan produktivitas pada tahun 2011 sebesar 10,31 kw/ha dan pada tahun 2010 sebesar 12,40 kw/ha. Hal ini disebabkan karena tingginya curah hujan sebagai dampak anomali iklim.

1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah/PDRB

PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya dalam menciptakan nilai tambah. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah. Dari nilai PDRB ini akan menggambarkan kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah. Adapun nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000 Kabupaten Sumbawa rentang tahun 2004 – 2010 mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tabel berikut.



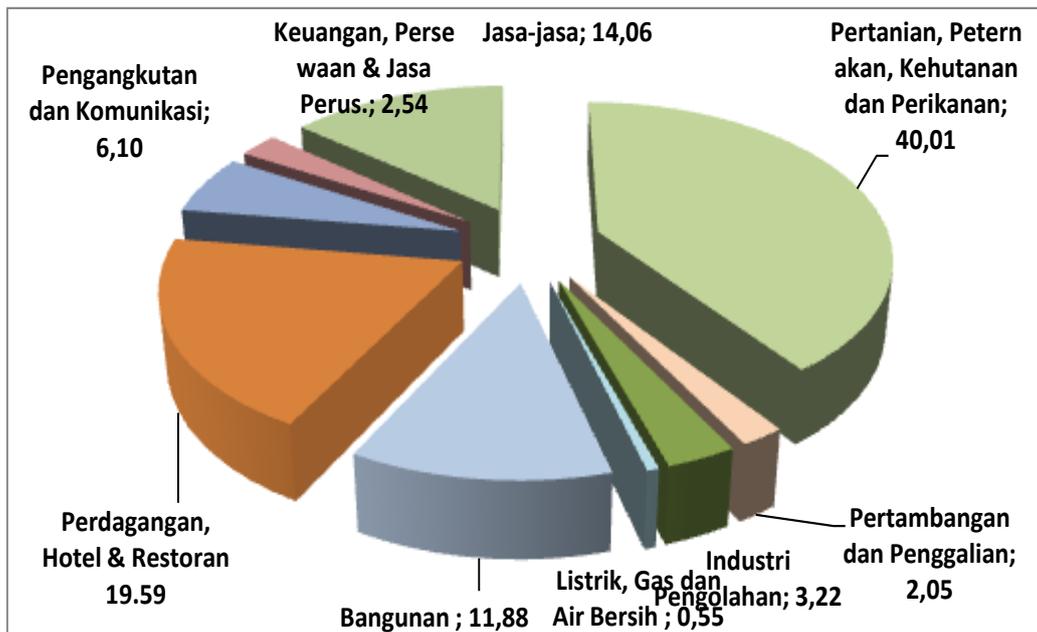
Tabel 1.6
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2004 – 2010

Tahun	PDRB ADH (Juta Rp.)		Laju Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan (2000)	Berlaku	Konstan (2000)
2004	1.795.531	1.371.038	11,21	4,49
2005	2.078.961	1.426.289	15,79	4,03
2006	2.339.417	1.493.099	12,53	4,68
2007	2.637.990	1.564.566	12,76	4,79
2008	3.027.829	1.640.940	14,78	4,88
2009	3.453.488	1.730.446	14,06	5,45
2010	3.968.119	1.833.215	14,90	5,94

Sumber Data : BPS Kabupaten Sumbawa

Pada tahun 2010, nilai PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai 3,968 trilyun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 14,90% dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2004 – 2010 bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2004 sebesar 4,49% dan mengalami penurunan menjadi 4,03% pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2006 – 2007 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 4,68% dan 4,79%, namun pada tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Sumbawa mengalami pertumbuhan diatas 5 (lima) persen.

Cerminan struktur ekonomi Kabupaten Sumbawa pada tahun 2010 masih ditunjang oleh **sektor primer** (pertanian, pertambangan dan penggalian) sebesar **42,06%**, sektor ke-2 adalah **sektor sekunder** (industri, listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan) sebesar **15,65%** dan sektor ke-3 adalah **sektor tersier** (perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor Bank, usaha persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa) yakni **42,29%**, hal ini tergambar sebagai berikut.



Sumber Data : BPS Kabupaten Sumbawa

Gambar 1.7
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap Pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kab. Sumbawa Tahun 2010

Kinerja perekonomian Kabupaten Sumbawa pada tahun 2010 tercermin dalam PDRB **Atas Dasar Harga Konstan** dengan pertumbuhan sebesar **5,94%**. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan diatas pertumbuhan total PDRB meliputi sektor pertambangan dan penggalian (7,02%), sektor listrik, gas dan air bersih (9,90%), sektor bangunan (8,61%), sektor perdagangan hotel dan restoran (8,29%), sektor pengangkutan dan komunikasi (9,48%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (6,65%) dan sektor jasa-jasa (7,74%). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor listrik, gas dan air bersih dengan pertumbuhan mencapai 9,90%, mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan sebelumnya yang hanya pada angka 9,07%,. Sedangkan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan terendah sebesar 3,04%. Hal ini menunjukkan perkembangan sektor sekunder dan tersier lebih cepat dibandingkan sektor primer dengan mengindikasikan terjadinya perubahan pada struktur perekonomian ke arah yang lebih maju, hal ini terlihat pada tabel berikut.



Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2004 – 2010 (Persen)

NO.	LAPANGAN USAHA	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3,60	4,07	3,62	3,51	3,04
2.	Pertambangan & Penggalian	5,01	4,65	3,82	7,60	7,02
3.	Industri Pengolahan	5,27	5,27	4,27	6,14	5,26
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	7,38	7,65	9,80	9,07	9,90
5.	Bangunan	5,68	4,54	6,51	7,31	8,61
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,19	6,31	6,47	7,92	8,29
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	8,42	8,34	3,26	4,13	9,48
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,02	5,33	4,13	6,64	6,65
9.	Jasa-jasa	3,24	3,14	6,81	6,47	7,74
	P D R B	4,68	4,79	4,88	5,45	5,94

Sumber: BPS Kab. Sumbawa



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa periode tahun 2011 – 2015 adalah : **"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Berdayasaing Dalam Memantapkan Samawa Mampis Rungan"**.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Sumbawa :
Kumpulan orang per orang dengan beragam latar belakang suku, ras dan agama yang bertempat tinggal pada wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB.
2. Berdaya Saing :
 - kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya.
 - kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.
 - masyarakat berdaya saing merupakan kondisi masyarakat Sumbawa yang mampu bersaing secara sehat yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan Kabupaten Sumbawa.
3. Memantapkan Samawa Mampis Rungan.
 - Secara harfiah **Samawa Mampis Rungan** berarti Sumbawa yang menebarkan kabar baik. **Samawa Mampis Rungan** merupakan bagian dari syiar masyarakat Sumbawa yang berkehendak tenteram secara spiritual religius (*senap semu*), rukun damai secara sosial (*riam remo*) dan makmur secara material-ekonomis (*nyaman nyawe*).
 - Memantapkan kondisi Kabupaten Sumbawa yang Makmur Aman Mandiri, Partisipatif, Inovatif dan Sehat yang bersendikan Semangat Religius, Ulet dan uNggul, Gotong royong, Akuntabel dan transparan, mengandung pengertian mempertahankan prestasi yang telah dicapai sebelumnya



sekaligus memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang masih kurang atau belum tercapai.

- Memantapkan terwujudnya Samawa Mampis Rungan dilakukan dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan dasar, peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pengembangan potensi agribisnis wilayah yang didukung oleh infrastruktur dan lingkungan hidup yang lestari.

2.1.2. Misi

Sebagai pencerminan dari upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa, dijabarkan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum.

Makna misi pertama ini dimaksudkan, pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan yang memadai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan didukung oleh semangat yang religius serta terciptanya suasana yang mendukung untuk peningkatan kualitas keberagaman masyarakat. Melalui misi pertama juga dilakukan optimalisasi sumberdaya manusia yang semakin mengembangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam keberagaman, serta peningkatan partisipasi masyarakat pada umumnya dan khususnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan tetap mengedepankan kesadaran dan penegakan hukum.

Misi 2 : Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Makna misi kedua ini dimaksudkan untuk pengembangan budaya inovatif yang diupayakan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, serta misi masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Melalui misi kedua juga memberikan perhatian pada persoalan-persoalan sosial masyarakat terutama dalam mengantisipasi pengaruh era global yang cenderung memberi pengaruh besar kehidupan sosial tersebut.



Misi 3 : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Makna misi ketiga ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis, "*mara tali ontar telu*", antara *pemerintah - dunia usaha - masyarakat* dalam mengisi pembangunan. Partisipasi merupakan salah satu kata kunci dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Sumbawa, serta misi menciptakan rasa aman dan mandiri. Terciptanya rasa aman akan menjadi jaminan bagi berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Kemandirian masyarakat diupayakan dengan melakukan reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subjek yang sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan memberdayakan masyarakat.

Misi 4 : Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

Makna misi keempat ini diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai hasil usaha produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia. Dalam periode tahun 2011-2015 diupayakan pemantapan dan peningkatan daya dukung baik infrastruktur maupun suprastruktur sehingga perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Misi 5 : Memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Makna misi kelima ini diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, misi meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis, "*mara tali ontar telu*", antara *pemerintah - dunia usaha - masyarakat* dalam mengisi pembangunan. Misi memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, juga merupakan langkah untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa mendatang terutama terkait dengan kelestarian alam lingkungan hidup.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Sesuai RPJMD (2011-2015)

Agenda pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam RPJMD 2011-2015 merupakan keberlanjutan dari RPJMD tahun 2006–2010 dengan mengedepankan



tahapan identifikasi terhadap berbagai faktor dengan harapan mampu memberikan solusi terbaik akan berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum.

Strategi		Arah Kebijakan	
1	Penguatan partisipasi masyarakat dan lembaga keagamaan.	1	Memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya dalam kegiatan keagamaan.
2	Penguatan partisipasi masyarakat dan peran institusi Kebudayaan.	2	Memperkuat partisipasi masyarakat dan peran institusi Kebudayaan.
3	Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan situs-situs benda cagar budaya		
4	Peningkatan prasarana pengembangan seni budaya daerah		
5	Membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat yang menghargai pluralitas.	3	Mengembangkan wawasan kebangsaan untuk membentuk masyarakat yang menghargai pluralitas.
6	Meningkatkan intensitas komunikasi forum antaragama/antarbudaya		
8	Mengsinergikan aktivitas stakeholder dalam pengarusutamaan gender.	4	Meningkatkan sinergitas aktivitas stakeholder dalam pengarusutamaan gender.
9	Sinergitas kegiatan sosialisasi, penyadaran dan penegakan hukum antara institusi penegak hukum dan elemen masyarakat.	5	Menurunkan tingkat pelanggaran hukum dan peningkatan ketentraman, keamanan dan nyaman lingkungan.

Misi 2 : Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Strategi		Arah Kebijakan	
10	Sinkronisasi pendanaan pendidikan.	6	Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan masyarakat mulai dari jenjang anak usia dini hingga perguruan tinggi.



Strategi		Arah Kebijakan	
11	Optimalisasi sarana prasarana pendidikan.		
12	Efisiensi dan efektivitas sasaran alokasi anggaran pendidikan.	7	Meningkatkan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah.
13	Mengembangkan wawasan SDM kependidikan		
14	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.	8	Meningkatkan budaya baca masyarakat.
15	Sinkronisasi pendanaan kesehatan .	9	Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin
16	Efisiensi dan efektivitas sasaran alokasi anggaran kesehatan.	10	Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat.
17	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBS		
18	Optimalisasi sarana prasarana kesehatan.	11	Meningkatkan mutu layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah.
19	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
20	Revitalisasi program Keluarga Berencana.	12	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesadaran keluarga berencana.
21	Peningkatan partisipasi publik dalam perlindungan anak.		
22	Sinkronisasi pendanaan kesejahteraan sosial dari berbagai sumber.	13	Meningkatkan pelayanan, pembinaan, rehabilitasi dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
23	Efisiensi dan efektivitas sasaran alokasi anggaran kesejahteraan sosial.		
24	Optimalisasi sarana prasarana kesejahteraan sosial.		
25	Penajaman program kesejahteraan sosial.		
26	Menciptakan ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan	14	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
27	Meningkatkan even olahraga edukasi dan olahraga prestasi	15	Meningkatkan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi
28	Meningkatkan rasio prasarana olahraga prestasi		



Misi 3 : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance).

Strategi		Arah Kebijakan	
29	Artikulasi dan sosialisasi komitmen pimpinan unit kerja terhadap agenda reformasi birokrasi.	16	Menerapkan Standar Operasional dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
30	Implementasi Pelayanan Prima		
31	Membangun kesadaran anti korupsi.	17	Melaksanakan agenda reformasi birokrasi, pakta anti korupsi, dan peningkatan akuntabilitas organisasi pemerintah daerah. serta akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan penerimaan daerah.
32	Penerapan SIMPEG terpadu dalam pengurusan administrasi kepegawaian.	18	Meningkatkan pelayanan admnitrase kepegawaian dan kualitas SDM aparatur
33	Meningkatkan petugas pelayanan adminitrasi publik.	19	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
34	Meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat.	20	Meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat.
35	Memantapkan sistem internal pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, aset dan penerimaan daerah.
36	Meningkatkan kualitas sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	22	Meningkatkan sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
37	Mengembangkan layanan gerak dalam pelayanan KTP dan akta kependudukan	23	Meningkatkan pelayanan adminitrasi publik dibidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil serta kearsipan.
38	Meningkatkan percepatan penyelesaian kasus pertanahan dan batas wilayah		
39	Meningkatkan SDM arsiparis		
40	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip		
41	Meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan administrasi perkantoran.	24	Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi dan manajemen teknis SKPD
42	Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset		



Strategi		Arah Kebijakan	
	daerah.		
43	Meningkatkan dukungan anggaran bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan.		

Misi 4 : Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agribisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

Strategi		Arah Kebijakan	
44	Pendanaan tahun jamak dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.	25	Meningkatkan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka kelancaran aktivitas masyarakat dan pengembangan kawasan agribisnis.
45	Meningkatkan ketersediaan prasarana wilayah terutama untuk membuka akses wilayah potensial terisolir		
46	Meningkatkan kondisi prasarana wilayah		
47	Kerjasama dengan asosiasi dalam rangka pembinaan kualitas pekerjaan rekanan.	26	Meningkatkan kualitas pekerjaan jasa konstruksi.
48	Pemberian subsidi dalam pengembangan rumah layak huni.	27	Meningkatkan kualitas dan kuantitas permukiman layak huni yang didukung oleh utilitas yang memadai.
49	Meningkatkan penataan lingkungan permukiman		
50	Pengembangan kerjasama dengan PT. Pos dan PT. Telkom.	28	Meningkatkan pemanfaatan prasarana dan sarana perhubungan, potensi pos dan telekomunikasi.
51	Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pengembangan infrastruktur.		
52	Meningkatkan ketersediaan terminal dan shelter, prasarana perhubungan laut pembuka akses pulau-pulau kecil potensial		



Strategi		Arah Kebijakan	
53	Sinergi dan Optimalisasi prasarana dan sarana transportasi antarmoda.	29	Meningkatkan pengembangan industri kreatif dan kelancaran perdagangan serta perlindungan konsumen.
54	Pengembangan kerjasama dengan maskapai penerbangan.		
55	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak konsumen.		
56	Penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi.	30	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan realisasi investasi.
57	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perizinan		
58	Pemantapan zonasi kawasan strategis dan sinergi program lintas sektor pada kawasan strategis.	31	Mengembangkan kawasan strategis, wilayah transmigrasi dan wilayah pedesaan.
59	Sinergi program PT. PLN dan PT. Pertamina.	32	Meningkatkan pelayanan kelistrikan dan pengawasan perdagangan migas.
60	Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan		
61	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agribisnis.	33	Meningkatkan keberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agribisnis.
62	Sinergi program dengan lembaga keuangan bank dan non bank dalam penciptaan wirausahawan baru dan penguatan kelembagaan koperasi, BUMDes dan UMKM.		
63	Pemberian insentif dalam pengembangan Koperasi, BUMDes dan UMKM berbasis agribisnis.		
64	Revitalisasi manajemen usaha Koperasi, BUMDes dan UMKM.		
65	Peningkatan populasi dan produktivitas petani	34	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani tanaman pangan.
66	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.		
67	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak.	35	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani peternak.



Strategi		Arah Kebijakan	
68	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan.	36	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
69	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan.	37	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani perkebunan.
		38	Mengintensifkan kegiatan penyuluh.
70	Sinergi program nasional, provinsi dibidang kepariwisataan.	39	Meningkatkan daya tarik dan kemitraan kepariwisataan.
71	Meningkatkan daya tarik obyek dan destinasi wisata.		
72	Meningkatkan promosi wisata		

Misi 5 : Memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Strategi		Arah Kebijakan	
73	Melengkapi regulasi penataan ruang dan konsistensi dalam penegakan hukum tata ruang.	40	Meningkatkan kualitas penataan ruang dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai daya dukungnya.
74	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian persampahan dan pencemaran lingkungan	41	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
75	Mengembangkan kerjasama dengan BMG dan Pusat Penelitian Kegeologian.	42	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan serta mitigasi bencana geologi.
76	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus ilegal logging, ilegal mining dan ilegal fishing.		
77	Sosialisasi mitigasi bencana.	43	Meningkatkan mitigasi bencana dan penanggulangan korban bencana.
78	Optimalisasi potensi sumberdaya hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terutama melalui pengelolaan kawasan eks Perum Perhutani dan peluang memanfaatkan <i>carbon trade</i> (perdagangan karbon)	44	Menurunkan tingkat kerusakan hutan dan lahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
79	Sinergi rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan.		



2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

Prioritas pembangunan merupakan titik tekan perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Urutan prioritas pembangunan tidak menggambarkan urutan besarnya alokasi anggaran. Prioritas pembangunan terkait dengan penjabaran tema pembangunan. Adapun prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2011 adalah :

- 1) Reformasi birokrasi dan pementapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
- 2) Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan.
- 3) Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan.
- 4) Penanggulangan kemiskinan.
- 5) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi.
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- 7) Penguatan ekonomi lokal dan perbaikan iklim investasi dan berusaha.
- 8) Pengembangan kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
- 9) Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 166 Tahun 2010/4 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011, disebutkan bahwa kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2011 adalah sebagai berikut.

- 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- 2) Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut.

(1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Kebijakan dasar penetapan target PAD dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah.
- b) Dalam konteks penetapan target PAD Tahun Anggaran 2011, pencapaian realisasi PAD Tahun Anggaran 2010 telah menjadi pijakan utama mengingat ketentuan peraturan perundang-



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- undangan, potensi PAD dan asumsi pertumbuhan ekonomi masih belum banyak memberikan pengaruh terhadap peningkatan/penurunan target PAD.
- c) Dalam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
 - d) Dalam upaya pengelolaan PAD, Pemerintah Daerah menerapkan sistem *reward and punishment*. *Reward* (penghargaan) berupa insentif diberikan kepada unit kerja pemungut/pengelola PAD yang dapat mencapai dan atau melampaui target, demikian pula sebaliknya *punishment* (hukuman) diberikan kepada unit kerja yang tidak dapat memenuhi target PAD yang telah ditetapkan.
 - e) Dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan PAD, terus ditempuh perbaikan tata kelola seperti penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
 - f) Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan target pendapatan pada Tahun Anggaran 2011 sesuai ketentuan pada Pasal 180 Undang-Undang dimaksud, masih mengacu pada Peraturan Daerah yang ada.
 - g) Pemerintah daerah konsisten untuk tidak melaksanakan pemungutan terhadap perda yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan pemerintah.
 - h) Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

- i) Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- j) Upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali, ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan (masih *idle*) untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan.
- k) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

(2) Dana Perimbangan.

- a) Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa TA 2011 berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta diupayakan untuk



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

memperoleh Dana Penyesuaian Bidang Infrastruktur yang termasuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan, terus diupayakan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.

(3) lain-lain pendapatan

- a) Hibah yang diterima baik berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/ lembaga tertentu/ perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- b) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.
- c) Dana darurat, Dana Bencana Alam dan Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh pemerintah daerah bilamana belum dapat diperkirakan dan dipastikan pada saat penyusunan APBD TA 2011 akan dianggarkan pada Perubahan APBD TA 2011.
- d) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011 disahkan melalui Perda No. 1 Tahun 2011 kemudian mengalami perubahan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, menyebutkan bahwa target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2011 adalah sebanyak Rp. **839.716.704.059,70,-** terealisasi sebesar Rp. **837.080.583.562,25,-** atau mencapai 99,69%. Sementara pada tahun 2010 dari target sebesar Rp. **663.271.611.924,00,-** terealisasi sebesar Rp. **660.428.377.995,30,-** atau 99,57%. Rincian atas jumlah pendapatan dan realisasinya pada tahun 2011, disajikan sebagai berikut.



Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2011

NO	URAIAN	TARGET PENDAPATAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	PENDAPATAN	839.716.704.059,70	837.080.583.562,25	99,69
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	97.236.896.920,05	89.055.715.571,60	91,59
1.1.	Hasil Pajak Daerah	9.883.518.134,86	10.560.918.500,00	106,85
1.2.	Hasil Retribusi Daerah	24.554.048.800,00	14.460.845.228,00	58,89
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.406.774.474,00	56.407.147.255,00	100,00
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.392.555.511,19	7.626.804.588,60	119,31
2.	DANA PERIMBANGAN	598.697.724.019,00	604.187.204.870,00	100,92
2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	44.124.548.019,00	49.614.028.870,00	112,44
2.2.	Dana Alokasi Umum	495.852.276.000,00	495.852.276.000,00	100,00
2.3.	Dana Alokasi Khusus	58.720.900.000,00	58.720.900.000,00	100,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	143.782.083.120,65	143.837.663.120,65	100,04
3.1.	Dana BHPajak dari provinsi & pemerintah daerah lainnya	15.246.874.440,65	15.246.874.440,65	100,00
3.2.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	126.314.128.680,00	126.369.708.680,00	100,04
3.3.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya	2.221.080.000,00	2.221.080.000,00	100,00

Sumber Data : Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa

Realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun 2011 meningkat sebesar **26,75%** dari Rp. **660,428,377,995.30,-** pada tahun 2010 menjadi Rp. **837.080.583.562,25,-** pada tahun 2011. Proporsi realisasi terbesar adalah komponen *Dana Perimbangan* yang mencapai 100.92%, nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 101,45. Sementara realisasi pendapatan retribusi daerah hanya mencapai 58,89%, jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 81.19%. Rendahnya realisasi retribusi daerah dalam dua tahun terakhir disebabkan karena dari ketiga instrumen retribusi daerah yang ada, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu yang memiliki nilai diatas 100%, sedangkan kedua instrument lainnya hanya mencapai masing-masing sebesar 49,28% dan 73,26%. Secara lebih lengkap mengenai target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2011 disampaikan melalui laporan tersendiri.



3.1.3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun Anggaran 2011 mencapai 99,69%. Kondisi ini karena tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (91,59%). Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rendahnya pendapatan yang dihasilkan melalui pajak mineral dan batuan (68,73%) disebabkan karena dari beberapa komponen pajak tidak mencapai target seperti Pajak Batu Hias (40,00%), Pajak Batu Kali/Gunung (56,57%), Pajak Kerikil (77,68%), Pajak Pasir Urug (26,71%), Pajak Sirtu (61,65%) dan Pajak Tanah Liat (53,52%), sedangkan komponen pajak lainnya sudah melewati target seperti Pajak Batu Tiang (240%), Pasir Pasang (90,47%) dan Tanah Urugan (103%). Rendahnya setoran komponen pajak tersebut antara lain disebabkan karena kelalaian/ketidak patuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terutama terhadap kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari luar APBD Kabupaten. Disamping itu, adanya beberapa keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak (pembayaran dilakukan sudah melewati jatuh tempo), sehingga realisasi dari beberapa komponen pajak tersebut relatif tidak memenuhi target pada tahun bersangkutan.

2. Pajak Parkir

Pajak parkir yang rendah (49,99%), disebabkan masih terbatasnya fasilitas parkir yang dipersiapkan oleh pihak swasta dan belum terkelola secara optimal.

3. Pajak Air Tanah

Rendahnya realisasi pajak air tanah (35,88%), disebabkan karena pada tahun 2011 merupakan masa transisi pelimpahan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Pada tahun yang sama regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pajak air tanah berlaku efektif pada bulan Juni 2011, sehingga potensi pajak tersebut belum tertangani secara optimal.



Sedangkan realisasi pendapatan dari sektor Hasil Retribusi Daerah relatif masih rendah (58,89%), disebabkan karena beberapa komponen retribusi daerah tersebut tidak mencapai target, seperti :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa usaha dengan capaian yang rendah (49,32%) disebabkan antara lain, karena dari beberapa komponen retribusi masih rendah, terdiri dari :

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Rendahnya realisasi retribusi pelayanan kesehatan (39,96%), disebabkan karena adanya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat oleh program jamkesmas pusat, jamkesmas NTB, dan dana bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, sehingga retribusi pelayanan kesehatan yang memanfaatkan jasa puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah rendah.

- **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Rendahnya realisasi retribusi parkir ditepi jalan umum (49,81%) disebabkan belum optimalnya pengelolaan parkir, dan juru pungut dalam menyetor pungutannya tidak sesuai dengan target yang sudah disepakati dengan SKPD.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha dengan capaian realisasi sebesar 72,99%, hal ini disebabkan karena dari beberapa komponen seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah hanya mencapai realisasi 55,57%, yang terdiri dari :

- **Sewa Alat Berat Dinas PU** (43,97%) dan **Sewa Lab. Dinas PU** (76,46%).

Rendahnya realisasi tersebut disebabkan karena dari beberapa kegiatan SKPD yang ada terutama pelaksanaan pekerjaan fisik terjadi dalam waktu yang bersamaan, sedangkan keberadaan alat berat tersebut jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan capaian pendapatan dari laboratorium disebabkan karena peralatan yang ada saat ini tidak optimal dalam melaksanakan pengujian dilapangan.



- **Radio Pemerintah Daerah** (68,56%), rendahnya realisasi RPD tersebut disebabkan karena semakin kompetitifnya sistem promosi yang digunakan oleh masyarakat, sehingga pilihan yang digunakan semakin beragam baik lewat media cetak maupun media elektronik (radio swasta), sehingga berdampak terhadap retribusi RPD yang dihasilkan.
- **Alsintan** (16,07%), rendahnya capaian retribusi dari Alsintan disebabkan karena pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) yang ada belum menerapkan manajemen berorientasi bisnis dan rendahnya kesadaran UPJA, sehingga berdampak terhadap rendahnya setoran yang dihasilkan.
- **Jasa Jembatan Timbang** (32,83%), rendahnya retribusi dari sektor jasa jembatan timbang disebabkan karena belum diatur didalam Perda pendapatan daerah mengenai retribusi yang ditarik melalui sumbangan pihak ketiga.
- **Retribusi Terminal** (43,02%), rendahnya realisasi penerimaan dari terminal antara lain disebabkan karena banyaknya Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Pedesaan (Angdes) tidak masuk dalam terminal.
- **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan** (46,29%), rendahnya setoran retribusi ini disebabkan karena jumlah kapal-kapal yang memanfaatkan jasa pelabuhan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Pengusaha cenderung menggunakan transportasi darat dalam pengangkutan barang antar pulau.

Permasalahan secara umum rendahnya capaian pendapatan masing-masing SKPD karena belum tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) sebagai salah satu instrument dalam pengawasan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan solusi terbaik sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, seperti :

1. Tidak tercapainya target penerimaan **pajak mineral bukan logam dan batuan** dapat diatasi antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pada waktu pencairan termyn kegiatan-kegiatan fisik harus melampirkan bukti pajak mineral bukan logam dan batuan dari



daerah lokasi pekerjaan, dan mengintensifkan penagihan terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak.

2. Realisasi **pajak parkir** dapat ditingkatkan dengan cara mengintensifkan pengelolaan fasilitas parkir yang disediakan oleh swasta/dunia usaha.
3. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari **Pajak Air Tanah** yang sudah diatur dalam Perda nomor 34 tahun 2010 dan Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Harga Dasar Air sebagai dasar penetapan nilai perolehan air tanah dan akan dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak.
4. Peningkatan retribusi **parkir** di tepi jalan umum dilakukan dengan penyempurnaan sistem pengelolaan parkir.
5. Permasalahan rendahnya realisasi dari sektor retribusi jasa usaha dapat tertangani antara lain melalui upaya pembenahan terhadap masing-masing komponen yang ada seperti :

- **Retribusi Sewa Alat Berat dan Sewa Lab. Dinas PU**

Perlu upaya pembenahan/peremajaan terhadap keberadaan alat-alat tersebut baik alat berat maupun alat laboratorium yang digunakan, sehingga keterbatasan pelayanan yang diberikan dapat teratasi dengan baik.

- **Retribusi Radio Pemerintah Daerah (RPD)**

Upaya yang akan dilakukan adalah dengan peremajaan peralatan siaran secara bertahap, sehingga jangkauan siarannya lebih luas dan membuat program-program siaran lebih menarik.

- **Retribusi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)**

Upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan intensif serta melakukan pelatihan-pelatihan manajerial dalam pengelolaan UPJA. Disamping itu menghidupkan kembali bengkel-bengkel alsintan yang sudah ada, agar keberadaan alat-alat pertanian tersebut dapat terpelihara dengan baik untuk meminimalisir pengeluaran, sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik.

- **Retribusi Jasa Jembatan Timbang**

Pengelolaan jasa jembatan timbang telah diakomodir dalam Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha melalui komponen pemakaian



kekayaan daerah dan akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemanfaatan jasa jembatan timbang.

- **Retribusi Terminal**

Peningkatan capaian target retribusi terminal dilakukan dengan mengadakan operasi terpadu dengan yang terkait, bahwa semua AKDP, AKAP dan Angdes yang melewati terminal harus masuk kedalam terminal sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.

Untuk optimalisasi capaian target pendapatan tahun 2012, maka semua SKPD pengelola pendapatan membuat Standard Operating Procedure (SOP) disertai dengan penetapan target yang rasional.

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan umum keuangan daerah menyangkut belanja daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2011 adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh



- setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut.
- a) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman diperkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - b) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
 - d) Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 6) Belanja Pegawai.
- a) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Daerah, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan



- Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;
 - e) Belanja pegawai sambil menunggu penetapan pagu anggaran indikatif dana perimbangan, maka pengalokasian anggaran masih menggunakan pagu anggaran belanja pegawai tahun sebelumnya. Setelah dana perimbangan telah ditetapkan pemerintah, maka belanja pegawai dianggarkan dengan memperhitungkan kebijakan pemerintah menaikkan gaji pokok sebesar 10% dan "accres" gaji sebesar 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai terutama akibat adanya penerimaan pegawai baru;
 - f) Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
 - g) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD, atau unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMD, atau unit usaha yang bersangkutan;
 - h) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,



Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran;

- i) Pemberian honorarium bagi PNS dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

7) Belanja Barang dan Jasa

- a) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dengan memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2010. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
- b) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
- c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
- d) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dibatasi frekuensi, jumlah hari dan pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
- e) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNSD (seperti staf khusus, Kepala Desa, kelompok tani, murid teladan) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



- f) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka pada Tahun Anggaran 2011, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dihindari adanya penganggaran yang bersifat "paket". Standar komponen dan satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- g) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat dilaksanakan di kantor kecuali dengan alasan tertentu dapat dilaksanakan di luar kantor.
- h) Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan yang akan didaerahkan terhitung 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Kabupaten akan mengambil langkah-langkah dalam penyiapan dukungan program kegiatan pengalihan (data, sistem, standar pengelolaan, keterampilan, dsb) atas PBB perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku efektif 1 Januari 2011 menjadi pajak daerah.
- i) Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan dukungan program dan kegiatan terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud.

8) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dengan kriteria; a) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) merupakan objek pemeliharaan; c) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi, dan d) pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maka perencanaan belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi daerah.



- Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

9) Belanja DPRD

- a) Penganggaran belanja DPRD mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD;
- c) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri



Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21;

d) Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.

10) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula ditertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota" sekarang tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota";

d) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah;



- e) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 11) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Penyediaan kredit anggaran untuk memobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA/DPA SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b) Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan;
- c) Sambil menunggu perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. Apabila penyediaan kredit anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah perubahan APBD dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- d) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial dilaporkan kepada DPRD;
- e) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan apabila keadaan



darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

f) Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, yang antara lain mencakup :

- (1) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- (2) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

12) Belanja Subsidi

- a) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

13) Bantuan Sosial

- a) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
- b) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan



masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program-program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

- d) Penyediaan anggaran untuk bantuan kepada partai politik mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta dianggarkan dalam bantuan sosial.
- e) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang menerima bantuan dana APBD berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada kepala daerah.

14). Belanja Bagi Hasil

- a) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten /kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

15). Belanja Bantuan Keuangan

- a) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah



daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;
- c) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- d) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut pada angka 1 disalurkan ke kas daerah/desa yang bersangkutan.

16). Belanja Tidak Terduga

- a) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

3.3. Kebijakan Pembiayaan daerah

3.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD tahun sebelumnya;



- b) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- a) Pembentukan dana cadangan
Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam tahun anggaran 2011 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- b) Penyertaan modal pemerintah
- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah/BUMD atau BUMN dalam tahun anggaran 2011;
 - 2) Jumlah yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - 3) Investasi atau penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, dan pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.
- c) Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- d) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)



- 1) SILPA digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan;
- 2) SILPA yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2011 bersifat estimasi, berhubung jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran 2010 juga bersifat estimasi;
- 3) Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, SILPA tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga menjadi nihil.

3.4. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2011

Belanja Daerah dikelompokkan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, bahwa target belanja daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 adalah sebesar **Rp. 880.673.749.379,36,-** atau meningkat dibandingkan tahun anggaran 2010 yaitu sebesar **Rp. 722,791,928,714.24,-**. Dari rencana belanja tersebut, hingga akhir bulan Desember 2011 terealisasi sebesar **Rp. 798.572.686.424,55,-** atau **90,68%** dari target dalam APBD Tahun 2011, nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2010 yang terealisasi sebesar **92,26%** dari target APBD Tahun 2010.

3.5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih terjadi pada belanja daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 adalah besarnya proporsi belanja tidak langsung (55,13%) dibandingkan dengan belanja langsung (44,87%), hal ini terjadi karena kebutuhan belanja pegawai yang masih besar, sementara anggaran yang tersedia terbatas. Disamping itu masih terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran, sehingga terjadi penumpukan pada triwulan terakhir tahun anggaran.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Solusi dari permasalahan tersebut diupayakan antara lain dengan terus dilakukan peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi serta melakukan rasionalisasi dan efisiensi pada belanja-belanja tidak langsung. Terhadap keterlambatan penyerapan anggaran diperlukan langkah-langkah percepatan dimasa yang akan datang dengan upaya pelaksanaan jadwal secara ketat.



BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka negara kesatuan RI dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan. Prinsip dari amanat tersebut merupakan pijakan sekaligus kerangka umum penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan daerah yang dirangkum dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun rincian masing-masing urusan dimaksud serta program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 adalah sebagai berikut.

4.1. Urusan Wajib

4.1.1. Program dan Kegiatan

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa terdapat 26 (dua puluh enam) urusan dan 85 (delapan puluh lima) program nasional yang dilaksanakan oleh kabupaten menjadi urusan wajib dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi. Program pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa pada 26 (dua puluh enam) urusan wajib dimaksud disajikan sebagai berikut.



Tabel 4.1
Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

No.	Urusan Wajib	Program
1	2	3
1.	Urusan Pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
		2. Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		3. Program Pendidikan Menengah
		4. Program Pendidikan Non Formal
		5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
		8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.	Urusan Kesehatan	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
		2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
		4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
		5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
		6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
		7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
		10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
		11. Program Keitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
		12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
		13. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
		14. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
3.	Urusan Lingkungan Hidup	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



		2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4.	Urusan Pekerjaan Umum	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		2. Program Pemanfaatan Ruang
		3. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
		4. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		5. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
		6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
		7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
		8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
		9. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
		10. Program Pengendalian Banjir
		11. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
		12. Program Pengawasan JasaKonstruksi
		13. Program Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
		14. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5.	Urusan Penataan Ruang	1. Program Perencanaan Tata Ruang
		2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6.	Urusan Perencanaan Pembangunan	1. Program Pengembangan Data / Informasi
		2. Program Kerjasama Pembangunan
		3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
		4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
		5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya`



7. Urusan Perumahan	8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 10. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan 3. Program Pembangunan / Penataan Taman dan Penerangan Jalan
8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Program Peningkatan Peran Serta Pemuda 2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Organisasi Olahraga 4. Program Pembinaan dan Per masyarakatan Olahraga 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
9. Urusan Penanaman Modal	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invenstasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
10. Urusan Koperasi dan UKM	1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan PAD
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
12. Urusan Ketenagakerjaan	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
13. Urusan Ketahanan	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.



	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perekebunan
		3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
14.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
		2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dan Anak
15	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Program Keluarga Berencana
		2. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
		3. Program Pelayanan Kontrasepsi
		4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR
		5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
16	Urusan Perhubungan	1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
		2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
		5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
		7. Program Pemanfaatan Potensi Sektor Pos dan Telekomunikasi
		8. Program Peningkatan Akses Informasi dan Keselamatan Penerbangan
17.	Urusan Komunikasi dan Informatika	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
		3. Program Pengembangan Teknologi Informatika
18.	Urusan Pertanahan	1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Program Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		2. Program Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		3. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
19.	Urusan Kesatuan	1. Program Peningkatan Keamanan dan



	Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kenyamanan Lingkungan
		2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
		4. Program Pendidikan Politik Masyarakat
		5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		6. Program Dukungann Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
		7. Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal
20.	Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah dan Persandian	1. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
		2. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
		3. Program Peningkatan sarana & Prasarana Aparatur
		4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
		6. Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD
		7. Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
		9. Program Peningkatan dan Program Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah
		10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		11. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
		12. Program Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
		13. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial
		14. Program Koordinasi Pembinaan Pemuda dan Olahraga
		15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
		16. Program Pemberitaan dan Penyebaran Informasi
		17. Program Analisis Jabatan
		18. Program Peningkatan Kapasitas Sumber



		<p>Daya Pembangunan.</p> <ol style="list-style-type: none">19. Program Pengembangan dan Penataan Kecamatan20. Program Penataan dan Pengembangan Kesandian Daerah21. Program Pengembangan Kelompok Drumband22. Program Penataan Sistem Administrasi Kearsipan23. Program Penataan Daerah Otonomi Baru24. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan25. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah26. Program Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan Daerah27. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah28. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH29. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS30. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur31. Program Pendidikan Kedinasan32. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur33. Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian34. Program Peningkatan Pelayanan Izin Usaha35. Program Koordinasi Pembangunan Kecamatan36. Program Pembangunan Partisipatif Kecamatan37. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
21	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan5. Program Pengembangan dan Penataan Desa dan Kelurahan



22. Urusan Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya.2. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial3. Program Pembinaan Anak Terlantar4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba, Dan Penyakit Sosial Lainnya)6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
23. Urusan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Nilai Budaya2. Program Pengelolaan kekayaan Budaya3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
24. Urusan Statistik	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengembangan Data dan Informasi
25. Urusan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
26. Urusan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Uraian kegiatan masing-masing program disajikan pada lampiran

4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program Pada Urusan Wajib

4.1.2.1. Urusan Wajib Pendidikan

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pendidikan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011, penyelenggara pemerintahan daerah telah menempuh beberapa kebijakan diantaranya adalah peningkatan layanan akses pendidikan melalui pemerataan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Peningkatan layanan akses pendidikan dapat dilihat dari cakupan jumlah anak usia sekolah yang bersekolah yang ditunjukkan oleh perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Sampai akhir tahun 2011, APK dan APM masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 4.2
Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

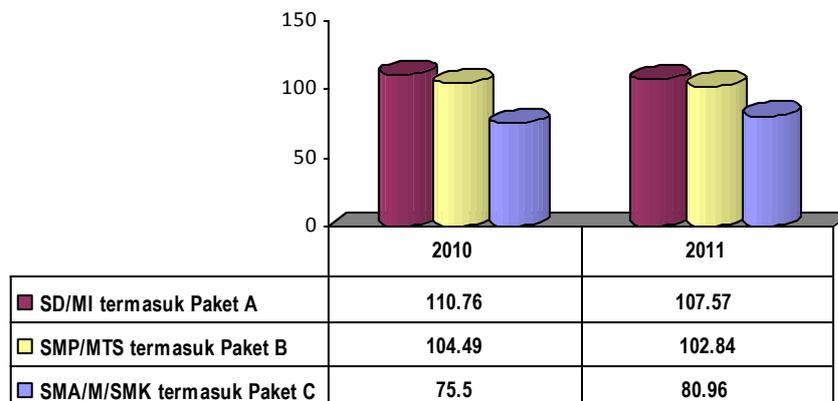
Jenjang	APK (%)	APM (%)
SD	107,75	94,07
SMP	102,84	79,15
SM	80,96	57,62

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu (dasar dan menengah) tanpa memperhitungkan usia sebagai persentase dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dalam satu tahun ajaran. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Secara umum perkembangan APK SD,SMP dan SM di Kab. Sumbawa (2010-2011) disajikan sebagai berikut.



Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbaw (Beberapa tahun terbitan)

Gambar 4.1
Perkembangan APK SD,SMP dan SMA di Kab. Sumbawa (2010-2011)

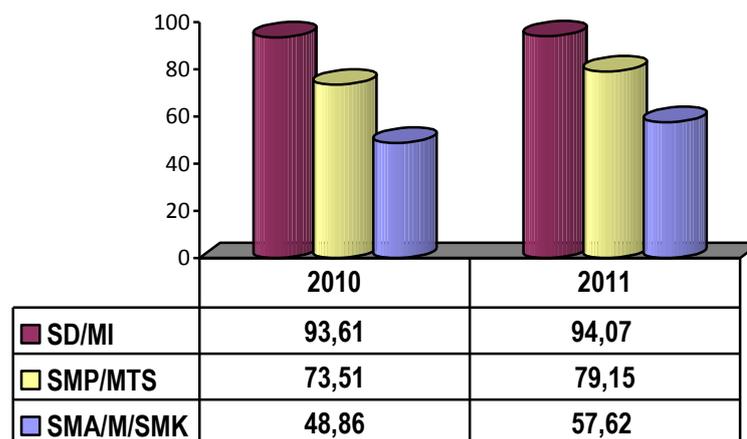
Gambar 4.1 menunjukkan bahwa APK SD pada tahun 2011 mengalami penurunan, baik jenjang SD maupun SMP. Pada jenjang SD penurunan sebesar 2,88% dan jenjang SMP menurun sebesar 1,58%. Hal ini, menjelaskan bahwa siswa pada jenjang SD yang berusia interval 7-12 tahun dan SMP diluar usia 13-15 tahun berkurang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan



efisiensi internal dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Pada jenjang Sekolah Menengah (SM) APK tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 7,23% dibanding tahun 2010.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa dari kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan tertentu dinyatakan sebagai persentase dari populasi yang sesuai. APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu, yang merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APM menunjukkan tingginya partisipasi penduduk usia sekolah resmi.



Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)

Gambar 4.2
Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kabupaten Sumbawa 2010-2011

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa APM tahun 2011 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan dari tahun 2010. Semakin tinggi jenjang pendidikan pada tahun 2011 APM semakin kecil. Hal ini menunjukkan, masih terdapat lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kondisi ini dapat juga disebabkan karena adanya lulusan di Kabupaten Sumbawa melanjutkan sekolahnya keluar Kabupaten Sumbawa.



c. Rata – rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah yang mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal.

Tabel 4.3
Rata–rata Lama Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa (2009-2011)

Jenjang Pendidikan	Tahun		
	2009	2010	2011
- SD sederajat	6,21	6,23	6,23
- SMP sederajat	3,00	3,01	3,02
- SMA sederajat	3,00	3,01	3,01

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa (Beberapa tahun terbitan)

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Sumbawa untuk tingkat SD sederajat, tahun 2009 adalah 6,21 tahun dan tahun 2010 adalah 6,23 tahun dan tahun 2011 adalah 6,23 tahun. Untuk tingkat SMP sederajat, tahun 2009 adalah 3,00 tahun dan tahun 2010 adalah 3,01 tahun dan tahun 2011 adalah 3,02 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMA sederajat, tahun 2009 adalah 3,00 tahun dan tahun 2010 adalah 3,01 tahun dan tahun 2011 adalah 3,01 tahun. Terkait dengan kondisi ini, maka rata–rata lama sekolah pada tingkat pendidikan SD sederajat dan SMA sederajat di Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2011 sama dengan tahun 2010 kecuali pada jenjang SMP sederajat mengalami peningkatan.

d. Lembaga Pendidikan

Salah satu faktor penentu yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah selain kesadaran masyarakat (orang tua dan anak didik), juga akses masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan (sekolah) baik pendidikan dasar maupun menengah. Secara spasial, sebaran lembaga pendidikan di Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Sebaran Lembaga Pendidikan (Sekolah) di Kab. Sumbawa Tahun 2011

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENJANG PENDIDIKAN		
			SD/MI	SMP/MTs	SM/SMK/MA
1.	Lunyuk	7	20	5	3
2.	Alas	8	19	7	5
3.	Utan	9	23	6	2
4.	Batulanteh	6	18	6	2
5.	Sumbawa	8	23	8	13



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

6.	Moyo Hilir	10	31	7	2
7.	Moyo Hulu	12	22	7	2
8.	Ropang	5	7	1	0
9.	Lape	4	15	5	1
10.	Plampang	12	27	8	3
11.	Empang	10	23	5	3
12.	Lab. Badas	7	23	9	3
13.	Alas Barat	8	16	3	3
14.	Labangka	5	7	4	1
15.	Rhee	4	6	2	0
16.	Buer	6	10	4	1
17.	Maronge	6	6	3	1
18.	Tarano	4	20	6	1
19.	Lopok	8	17	4	1
20.	Lenangguar	7	10	5	1
21.	Orong Telu	4	8	1	1
22.	Unter Iwes	4	18	7	3
23.	Lantung	8	3	1	0
24.	Moyo Utara	4	12	3	1
JUMLAH		165	384	117	53

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas, terutama di kecamatan-kecamatan pemekaran yang baru terbentuk. Sedangkan SD/MI, dan SMP/MTs sudah tersedia merata di seluruh kecamatan.

e. Kondisi Sekolah

Kondisi fisik ruang kelas, juga turut menentukan tumbuhnya minat belajar siswa. Pada tabel berikut digambarkan kondisi fisik ruang kelas di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 4.5
Kondisi Fisik Ruang Kelas

No	Uraian	TK/RA		SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
		10/11	11/12	10/11	11/12	10/11	11/12	10/11	11/12
1.	Jml Sekolah	178	197	384	384	112	117	48	52
2.	Jml Siswa	7.694	8.184	53.323	53.750	21.911	22.240	15.114	15.244
3.	Jml Rombel	234	306	2.468	2.820	731	782	477	433
4.	Ruang Kelas Milik	220	276	2.036	2.238	716	623	355	378
5.	Ruang kelas baik	161	200	1.516	1.587	568	457	325	346
6.	Ruang kelas rusak ringan	31	47	371	440	123	120	27	24
7.	Ruang kelas rusak berat	28	29	149	211	25	46	3	8

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa



Dari tabel tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. SD/MI

Pada tingkat SD/MI yang seluruhnya berjumlah 384 sekolah pada tahun 2011 ini mempunyai siswa sebanyak 53.750 orang yang ditampung dalam 2.238 ruang kelas. Sebanyak 1.587 (70,91%) ruang kelas tersebut dalam kondisi baik, 440 (19,66%) ruang kelas rusak ringan, dan 211 (9,43%) ruang kelas rusak berat.

2. SMP/MTs

Jumlah SMP/MTs di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 sebanyak 117 sekolah dengan siswa 22.240 orang yang ditampung ke dalam 623 ruang kelas dimana kondisi fisik ruang kelas dengan rincian 457 (73,35)% ruang kelas kondisi baik, 120 (19,26%) ruang kelas rusak ringan, dan 46 (7,38%) ruang kelas rusak berat.

3. SMA/SMK/MA

SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumbawa berjumlah 52 sekolah dengan siswa 15.244 orang dengan ruang kelas sebanyak 378 ruang kelas. Kondisi ruang kelas yang dalam keadaan baik yaitu 346 ruang kelas atau 91,53%, rusak ringan sebanyak 24 ruang kelas atau 6,35% dan yang rusak berat hanya 8 ruang kelas atau 2,12%.

Walaupun persentase sarana dan prasarana pendidikan yang layak/dalam kondisi baik belum dapat mencapai target, namun persentase sarana dan prasarana pendidikan yang layak/dalam kondisi baik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana yang masih kurang dan rasio per ruang kelas masih tinggi maka secara bertahap dilakukan pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB).

f. Rasio Pendidikan

Gambaran rasio rombongan belajar dan ruang kelas serta rasio siswa dan ruang kelas, disajikan sebagai berikut.

1. Rasio Rombongan Belajar dan Ruang Kelas

Rasio rombongan belajar dan ruang kelas menggambarkan perbandingan antara jumlah kelas (rombongan belajar) dengan jumlah ruang kelas yang



tersedia untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Rasio terbaik dicapai bila jumlah rombongan belajar sama dengan jumlah ruang kelas yang tersedia (100%). Bila rasio menunjukkan angka di atas 100% berarti masih terjadinya *double shift* penggunaan ruang kelas, sebaliknya bila di bawah 100% berarti adanya ruang kelas yang tidak dipergunakan sebagai ruang belajar.

Tabel 4.6
Rasio Rombongan Belajar dan Ruang Kelas Menurut
Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Sumbawa (2010-2011)

NO	TAHUN	JENJANG PENDIDIKAN								
		SD/MI			SMP/MTs			SMA/SMK/MA		
		RK	RB	RASIO	RK	RB	RASIO	RK	RB	RASIO
1	2010 / 2011	2.013	2.437	82,60	716	731	97,95	355	480	73,95
2	2011 /2012	2.250	2.820	79,79	625	782	79,92	399	433	92,15

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.

Memperhatikan Tabel 4.6. bahwa pada tahun 2010/2011 pada jenjang pendidikan SD/MI masih terdapat kekurangan rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar sebesar 17,40% (424 RK), untuk jenjang pendidikan SMP/MTS sebesar 2,05 (15 RK) dan SMA/SMK juga masih kekurangan 26,04% (125 RK). Pada tahun 2011/2012, meskipun telah terjadi penambahan jumlah ruang kelas pada seluruh jenjang pendidikan, tetapi penambahannya masih dibawah peningkatan jumlah rombongan belajar, sehingga rasio kekurangan ruang kelas terhadap rombongan belajar pada tingkat SD meningkat menjadi 20,21% (570 RK), hal yang sama juga terjadi pada tingkat SMP/MTs, dengan rasio kekurangannya meningkat menjadi 20,07%(157 RK). Pada tingkat SMA/SMK/MA penambahan jumlah Ruang Kelas sangat signifikan dan peningkatan jauh diatas peningkatan jumlah rombongan belajar, sehingga rasio Rombongan Belajar terhadap Ruang Kelas hampir ideal, hanya kurang 7,85% (34 RK).

2. Rasio Siswa dan Rombongan Belajar

Rasio siswa per rombel menunjukkan jumlah siswa yang ditampung pada setiap rombongan belajar/kelas. Pada Tabel 4.7. menunjukkan bahwa rata-rata siswa per rombel/kelas pada masing-masing jenjang pendidikan.



Tabel 4.7
Rasio Siswa dan Rombel Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Sumbawa (2009-2011)

No	Jenjang Pendidikan	Rasio Siswa Terhadap Rombel		
		2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	SD	27	22	19
2	MI	21	18	18
3	SMP	35	30	29
4	MTs	24	26	23
5	SMA	39	33	40
6	MA	79	27	32
7	SMK	63	31	31

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pendidikan, setiap rombongan belajar pada jenjang SD paling banyak 28 siswa, SMP 32 siswa dan SMA/SMK 32 siswa. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada jenjang SD/MI, SMP/MTs telah mendekati SPM. Sedangkan jenjang SMA rasio siswa per rombel melebihi dari SPM

g. Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada tahun 2011 dalam menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan taman kanak-kanak, dilaksanakan pendampingan PPAUD, pelatihan pengelolaan PKBM, pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan non formal, dan pengembangan sanggar kegiatan belajar. Pada tahun 2011, jumlah TK/RA/PAUD terdapat sebanyak 197 sekolah, yang terdiri dari 178 TK dan 19 RA. Walaupun dibandingkan dengan jumlah desa di Kabupaten Sumbawa, rasionya TK/RA lebih dari 1 (secara rata-rata terdapat 1 TK/RA untuk setiap desa), namun belum memperhitungkan distribusinya, sehingga kuantitas sekolah masih relatif belum sebanding dengan jumlah anak usia dini yang menjadi sasarannya.

h. Pendidikan Non Formal dan Informal

Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi angka putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan, maka telah diprogramkan pendidikan non formal dan informal (PNFI), diantaranya melalui jalur pendidikan paket A, B dan C.



Tabel 4.8
Siswa Paket A, B dan C di Kab. Sumbawa (2009-2011)

No	Tahun	Paket A		Paket B		Paket C	
		Siswa	Siswa 7-12	Siswa	Siswa 13-15	Siswa	Siswa 16-18
1.	2009 - 2010	150	24	1.045	179	380	116
2.	2010 - 2011	120	120	1.960	1.960	1.410	1.410

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

i. Angka Melek Huruf

Pendidikan yang dilaksanakan selama ini khususnya melalui jalur non formal lewat program Keaksaraan Fungsional (KF) telah berdampak positif dan signifikan pada pencapaian Kabupaten Sumbawa menurunnya angka buta aksara atau meningkatkan angka melek huruf. Ukuran yang sangat mendasar dari angka melek huruf dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk umur 15 tahun keatas. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf di Kabupaten Sumbawa pada akhir tahun 2009 sudah mencapai 90,43%. Angka tersebut terus meningkat menjadi 93,44% pada tahun 2010 dan 99,70% pada tahun 2011. Khusus pada usia 15 – 24 tahun angka melek huruf sudah mencapai 100% pada tahun 2011.

j. Pelayanan Pendidikan Bagi Penduduk Miskin

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan struktur umur yang kebanyakan berusia anak-anak, maka beban kuantitas penduduk dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa tergolong tidak kecil. Walaupun demikian pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun khususnya dan program pendidikan lanjutan relatif berjalan baik. Dalam rangka menyukseskan program wajar dikdas 9 tahun serta sekolah menengah atas, kebijakan yang ditempuh untuk tahun 2011 adalah tetap memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dilaksanakan melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) termasuk BOS buku, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin, pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, serta pembangunan rumah guru di daerah terpencil.



Pada tahun 2010 dan 2011, telah diberikan beasiswa kepada siswa dari kalangan keluarga miskin, baik dari sumber dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Sumbawa, seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Beasiswa Berdasarkan Jenjang dan Sumber Dana Tahun 2010 dan 2011

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2010		Tahun 2011	
		Jumlah Siswa Penerima	Jumlah Uang (Rp)	Jumlah Siswa Penerima	Jumlah Uang (Rp)
A	APBN				
1	SD	4.269	1.536.840.000	-	-
2	SMP Terbuka	547	82.050.000	-	-
3	SMP	1.742	925.002.000	-	-
	Jumlah	6.558	2.543.892.000	-	-
B	APBD Kabupaten				
1	SD/SDLB	6.528	2.350.080.000	1.149	206.640.000
2	SMP/SMPLB	2.456	1.414.656.000	1.242	297.960.000
3	SMA	1.191	928.980.000	784	376.320.000
4	SMK	771	601.380.000	456	218.880.000
5	MI	533	191.880.000	-	-
6	MTs	477	274.752.000	-	-
7	MA	186	145.080.000	-	-
	Jumlah	12.142	5.906.000.000	3.631	1.099.800.000
C	APBD Provinsi				
1	SD/SDLB	6.527	2.349.720.000	1.149	206.820.000
2	SMP/SMPLB	2.458	1.414.656.000	1.242	596.160.000
3	SMA	1.191	928.980.000	2.128	1.276.800.000
4	SMK	771	601.380.000	1.320	792.000.000
5	MI	533	191.880.000	-	-
6	MTs	477	274.752.000	-	-
7	MA	186	145.080.000	-	-
	Jumlah	12.141	5.906.448.000	5.839	2.871.780.000

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

k. Tenaga Pendidik

Kualitas pendidikan tidak terlepas dari kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, maka sesuai ketentuan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 8 dan 9 disebutkan bahwa untuk memenuhi kualifikasi akademik guru harus memiliki ijazah sarjana atau diploma empat. Sampai dengan tahun 2011 jumlah guru di Kabupaten Sumbawa tercatat 9.950 orang, dari jumlah tersebut guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV tercatat 4.897 orang.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupaya meningkatkan kualifikasi akademik guru dengan memfasilitasi guru-guru yang belum memiliki ijazah sarjana untuk menempuh pendidikan



sarjana melalui pemberian bantuan biaya pendidikan.

Prosentase guru yang memenuhi syarat akademik (berijazah minimal sarjana/diploma empat) bervariasi menurut jenjang pendidikan yaitu pada tingkat SD/MI sebesar 28,65%, pada tingkat SMP/MTs sebesar 78,90% dan pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 88,87%.

Untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan ditunjang melalui kegiatan-kegiatan: a) Pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal (PTK-PNF); b) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG); c) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi; d) Seleksi kepala sekolah berprestasi dan pengawas berprestasi; e) Pelaksanaan sertifikasi pendidik; f) Pelaksanaan program BERMUTU; g) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan; h) Pembinaan dewan pendidikan.

Berdasarkan pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2011 yang ditetapkan dalam penetapan kinerja SKPD, maka secara rata-rata tingkat pencapaiannya mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat ketersediaan input (dana) realisasinya mencapai 89,51% dari total belanja yang dianggarkan Dinas Pendidikan Nasional tahun 2011 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Secara rinci realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib pendidikan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.

4.1.2.2. Urusan Wajib Kesehatan

Sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas yang dilaksanakan melalui revitalisasi puskesmas/puskesmas pembantu, serta meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai pusat pelayanan kesehatan rujukan. Upaya yang telah dilakukan guna peningkatan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ditingkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta layanan Puskesmas/Pustu di kecamatan-kecamatan. Untuk itu Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 mendapatkan penghargaan **Swasti Saba Padapa**



dibidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI.

Pembangunan urusan kesehatan melalui program dan kegiatan Dinas Kesehatan serta instalasi pelayanan kesehatan di Kecamatan dan Desa yang diantaranya dihajatkan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui peningkatan ketersediaan serta kelayakan prasarana kesehatan di puskesmas/pustu dan polindes, sampai tahun 2011 di Kabupaten Sumbawa telah terbangun 25 puskesmas, 93 puskesmas pembantu, 27 polindes, Posyandu 647 dan Poskesdes 29. Dengan semakin bertambahnya jumlah sarana dan prasarana di bidang kesehatan diharapkan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat jadi meningkat, disamping itu juga dilaksanakan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya.

Pada tahun 2011 telah dilaksanakan Pengadaan alat-alat kesehatan berupa alat kedokteran dan alat laboratorium, pengadaan obat-obatan, meubelair, perlengkapan rumah tangga rumah sakit, bahan-bahan logistik rumah sakit, pemeliharaan alat-alat kesehatan, sarana dan prasarana penunjang lainnya, Di samping hal-hal yang bersifat *fisically*, juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan SDM melalui kegiatan kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis berdasarkan jenjang pendidikan dari Diploma I ke Diploma III yang diikuti oleh 100 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari 60 orang bidang dan 40 orang perawat. Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedia tenaga dokter dan paramedis yang berkualitas, bermutu dan professional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2010, sampai saat ini telah memasuki tahun akhir pelaksanaannya. Disamping kegiatan diatas juga dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan, yaitu PPGDON (Pertolongan Pertama ke Gawat Daruratan Obstetric Neonatal) yang diikuti oleh 30 bidan, kegiatan Asfiksia (perangsangan bayi) diikuti oleh 10 bidan, penanganan berat badan lahir rendah (BBLR) 39 orang bidan, MTBS (38 perawat dan bidan), penanganan kekerasan terhadap anak (9 perawat dan bidan), tenaga kesehatan haji Indonesia (3 orang peserta).

Total penyediaan jamkesmas yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan melalui jamkesmas yang dibiayai oleh APBN berjumlah 174.565 orang, APBD I berjumlah 37.020 orang dan APBD II sebanyak 37.020 orang, sehingga total



keseluruhan tercatat 248.605 orang.

Kegiatan pelayanan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumbawa pada tahun 2011 tercatat, Jamkesmas sebanyak 5.476 orang, Jamkesmas Daerah (Jamkesda) sebanyak 1.089 orang, sedangkan masyarakat yang berobat dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu sebanyak 2.924 orang, sehingga total masyarakat miskin yang dilayani di RSUD Kab. Sumbawa Tahun 2011 sebanyak 9.489 orang. Selain itu pada tahun 2011 juga dilaksanakan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat miskin yaitu berupa operasi katarak sebanyak 100 orang dan operasi bibir sumbing pada masyarakat miskin sebanyak 22 orang yang terdiri dari pasien anak-anak 16 orang dan pasien dewasa sebanyak 6 orang.

Peningkatan layanan kesehatan melalui akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di Pustu dan perbaikan pola hidup masyarakat sedikit banyak mempengaruhi jumlah kunjungan ke RSUD Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2011, jumlah pengunjung ke RSUD Kabupaten Sumbawa sejumlah 50.416 orang, yang terdiri dari pengunjung rawat jalan dan rawat inap, Jumlah kunjungan pasien rawat jalan tahun 2011 sebanyak 37.524 lebih tinggi dari tahun 2010 sebanyak 33.832 orang, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 3.692 (9,84%). Hal ini mengindikasikan bahwa perlu segera dilakukan tindakan antisipasi terhadap perubahan global masyarakat terhadap pola pelayanan yang diinginkan masyarakat. Bahkan sangat mungkin telah terjadi pergeseran perilaku berobat masyarakat yang lebih merasa nyaman dengan langsung berobat langsung ke rumah sakit dari pada harus ke Puskesmas terlebih dahulu. Sedangkan jumlah pengunjung rawat inap pada tahun 2011 sebanyak 12.892 orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 12.749 orang, maka terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien masuk rawat inap sebesar 143 orang. Jika dirasioikan jumlah pengunjung RSUD dengan jumlah penduduk maka jumlah kunjungan ke RSUD Kab. Sumbawa adalah 12,12%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah sebesar 18,28%.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Sumbawa, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tersedia tenaga kesehatan yaitu sebagaimana tabel berikut.



Tabel 4.10
Kualitas Tenaga Kesehatan di RSUD Kab. Sumbawa Tahun 2009 - 2011

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah			Rasio per 100.000		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	Dokter	18	22	27	4,32	5,29	6,49
	- Dokter Umum	16	19	26	3,84	4,56	6,25
	- Dokter gigi	2	3	1	0,48	0,72	0,24
2	Dokter spesialis	6	5	7	1,44	1,20	1,68
	- Spesialis penyakit dalam	1	1	1	0,24	0,24	0,24
	- Spesialis anak	1	1	1	0,24	0,24	0,24
	- Spesialis obsgyn	1	1	2	0,24	0,24	0,24
	- Spesialis gigi anak	1	1	1	0,24	0,24	0,24
	- Spesialis bedah	1		1	0,24		0,24
	- Spesialis THTKL	1	1	1	0,24	0,24	0,24
3	Bidan	19	24	30	4,56	5,77	7,21
4	Perawat	173	155	186	41,60	37,27	44,73
5	Paramedik Lainnya	53		60	12,74		14,43
	- Radiologi	2	4	7	0,48	0,96	1,68
	- Fisioterapi	5	5	8	1,20	1,20	1,92

Sumber Data : RSUD Kab. Sumbawa

Total tempat tidur di ruang perawatan tanpa kelas yang ada saat ini sebanyak 11 buah, ruang VIP sebanyak 9 buah, kelas I (4 buah), kelas II (20 buah), kelas III (76 buah), ruang observasi (8 buah), ruang tindakan (7 buah), sehingga secara keseluruhan berjumlah 135 buah. Pada tahun 2009 RSUD Sumbawa memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan Status Akreditasi Penuh Tingkat Dasar dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang meliputi administrasi manajemen, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan dan rekam medis. Untuk mempertahankan serta meningkatkan prestasi tersebut RSUD akan menuju akreditasi 12 (dua belas) standar pelayanan yaitu Pelayanan Medis, Keperawatan, Gawat Darurat, Rekam Medis, Administrasi dan Manajemen, Radiologi, Farmasi, Laboratorium, Kamar Operasi, Infeksi Nosokomial, Perinatalogi, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimana pada tahun ini sedang dalam proses bimbingan-bimbingan yang selanjutnya akan dilakukan penilaian akreditasi terhadap 12 standar pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Sumbawa telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit dari aspek-aspek tersebut.



Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin sudah menjangkau keseluruhan masyarakat miskin yang termasuk dalam Askeskin. Sehingga setiap masyarakat yang tergolong dalam pengguna Askeskin, diberikan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2011 jumlah kartu Jamkesmas di Kabupaten Sumbawa sebanyak 174.565 buah, sementara jumlah kartu Jamkesmas yang telah digunakan di Puskesmas tahun 2010 sebanyak 37.020 buah (21,21% dari jumlah kartu Jamkesmas). Selanjutnya gambaran pengunjung rawat inap dengan menggunakan Jamkesmas/Jamkesda pada RSUD Sumbawa dalam tahun 2011, sebagai berikut.

Tabel 4.11
Jumlah Pengunjung Rawat Inap Dengan Jamkesmas/Jamkesda
menurut Ruang Perawatan di RSUD Sumbawa (2011)

NO	RUANG PERAWATAN	ASKES	JKM	JKMD	SKTM	JUMLAH	%
1	Dalam	671	986	263	677	2.597	36,47
2	Anak	385	544	191	654	1.774	24,92
3	Absgyn	239	719	182	140	1.280	17,98
4	Bedah	312	524	113	520	1.469	20,63
	Jumlah	1.607	2.773	749	1.991	7.120	
	%	22,57%	38,95%	10,52%	27,96%	100%	

Sumber Data : RSUD Sumbawa

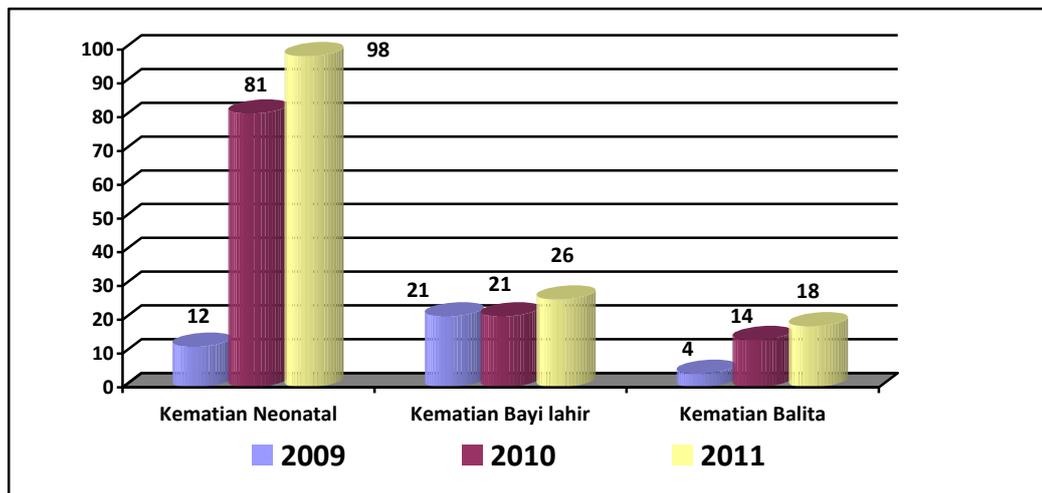
Tabel 4.11, menunjukkan bahwa pengunjung rawat inap pada RSUD Sumbawa dengan Jamkesmas/Jamkesda pada tahun 2011 keseluruhan sebanyak 7.120 pengunjung, yang menggunakan Jamkesmas mencapai 38,95%, sedangkan yang menggunakan Jamkesda (10,52%), selebihnya yaitu sebanyak 27,96% menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari yang berwenang, dan 22,57% menggunakan Askes. Secara umum pengunjung rawat inap di RSUD berada pada ruang perawatan dalam, diikuti ruang anak, absgyn dan bedah.

Berbagai upaya bidang kesehatan tersebut telah memberikan dampak positif pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin membaiknya pelayanan kesehatan dan meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan.



a. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap 1.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Angka kematian bayi di Kabupaten Sumbawa tahun 2005 mencapai 59,11/1000 kelahiran hidup, masih lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata angka kematian bayi Propinsi NTB, pada tahun 2008 tercatat total kematian bayi di Kabupaten Sumbawa sebanyak 45 kasus terdiri atas kematian neonatal sebanyak 10 kasus, kematian bayi lahir sebanyak 23 kasus serta kematian balita sebanyak 12 kasus. Kemudian pada tahun 2009 tercatat total kematian bayi sebanyak 35 kasus terdiri atas kematian neonatal sebanyak 12 kasus, kematian bayi lahir sebanyak 21 kasus serta kematian balita 4 kasus. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan kasus kematian bayi di Kabupaten Sumbawa. Tercatat 81 kasus kematian neonatal, 21 kasus kematian bayi lahir dan 14 kasus kematian balita. Sampai dengan tahun 2011 angka kematian bayi terus mengalami peningkatan, dimana kasus kematian neonatal sebanyak 98 kasus, kematian bayi lahir sebanyak 26 kasus dan kematian balita sebanyak 18 kasus. Angka Kematian Bayi pada tahun 2009, 2010 dan 2011, baik kematian neonatal, bayi lahir mati, maupun kematian balita disajikan sebagai berikut.



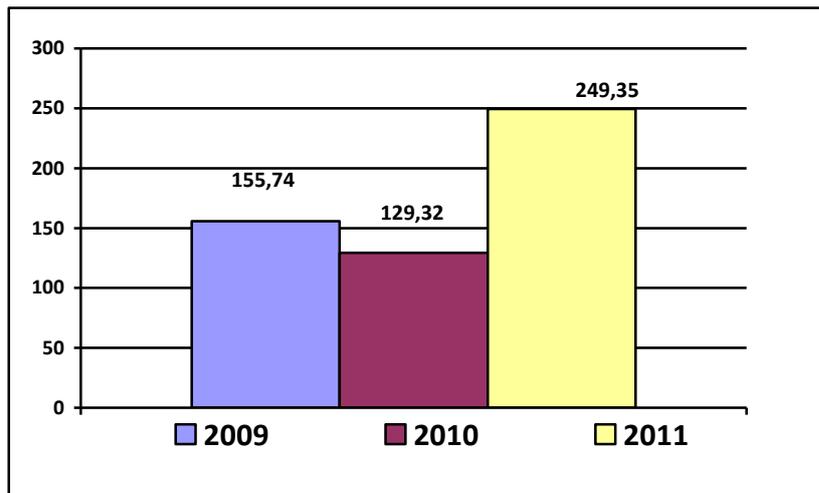
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Gambar 4.3
Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2009-2011



b. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI merupakan jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Jumlah kematian ibu Kabupaten Sumbawa berturut-turut selama 3 tahun terakhir, yakni tahun 2009 AKI sebanyak 12 kasus (155,74 orang), tahun 2010 sebanyak 12 kasus (129,32 orang), dan pada tahun 2011 naik menjadi 22 kasus (249,35 orang). Gambaran angka kematian ibu (AKI) sebagai berikut.

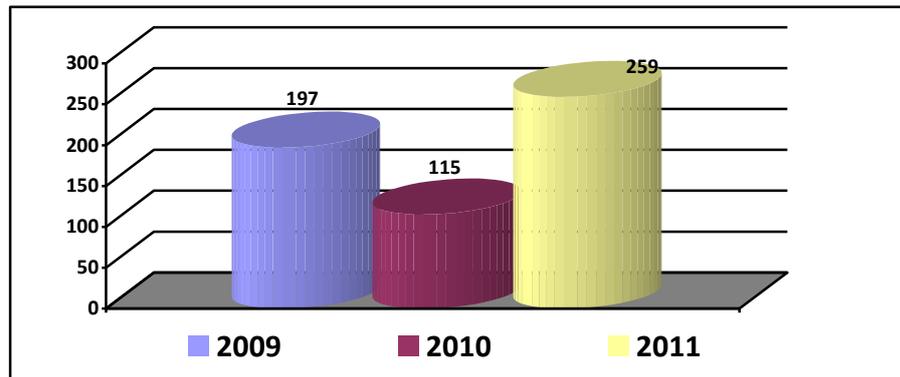


Sumber Data : Dinas Kesehatan

Gambar 4.4
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2009-2011

c. Gizi Buruk

Pada tahun 2009, berdasarkan hasil Pekan Penimbangan Balita terdapat 197 balita berstatus gizi buruk atau 0,37% dari sasaran penimbangan. Pada tahun 2010 terdapat 115 kasus balita berstatus gizi buruk atau 0,59% dari sasaran penimbangan. Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 295 kasus balita berstatus gizi buruk atau 0,82% dari sasaran penimbangan. Kondisi tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2011. Hal ini merupakan tantangan akan mendapat perhatian serius pada tahun berikutnya. Berikut jumlah penderita gizi buruk Kabupaten Sumbawa tahun 2009-2011.



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa (beberapa tahun terbitan)

Gambar 4.5.
Jumlah Penderita Gizi Buruk Tahun 2009 – 2011

Status gizi balita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga dapat menunjukkan kualitas fisik penduduk. Terkait dengan upaya perbaikan gizi masyarakat, setiap tahun dilaksanakan kegiatan-kegiatan layanan baik dalam bentuk pemberian makanan tambahan pemulihan dari kondisi gizi buruk ke gizi kurang, dari gizi kurang ke gizi baik, serta penanganan dalam rangka mempertahankan kondisi tetap gizi baik. Pada tahun 2011 dilakukan penanggulangan kurang energi protein (KEP) kepada 427 balita serta penanggulangan Anemia gizi besi berupa distribusi Fe 1 bagi 10.597 ibu hamil dan Fe 3 kepada 9.638 ibu hamil.

Berdasarkan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tahun 2011 sebagai bagian dari pelaksanaan *urusan kesehatan*, tingkat capaiannya secara simultan rata-rata mencapai skala ordinal 80%-100%. Selanjutnya tingkat keterserapan input (dana) yang diukur dari tingkat realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan mencapai **94,72%** dari total belanja yang dianggarkan tahun 2011 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Demikian pula pada penetapan kinerja RSUD Kabupaten Sumbawa tahun 2011, tingkat capaiannya secara simultan rata-rata mencapai skala ordinal 80%-100%. Secara rinci realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.



4.1.2.3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Berdasarkan penetapan kinerja urusan wajib lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 sebagai implementasi operasional untuk pencapaian *urusan lingkungan hidup*. Sebagai gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan lingkungan hidup pada tahun 2011, terkait dengan upaya peningkatan edukasi masyarakat dibidang lingkungan hidup, maka dilaksanakan peningkatan intensitas koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, selain itu juga dilaksanakan kegiatan penyusunan status lingkungan hidup daerah, dengan sasaran pemenuhan akses informasi yang cukup bagi masyarakat tentang lingkungan.

Pelaksanaan koordinasi lintas sektor tersebut dilakukan dengan frekwensi sebanyak 27 kali. Demikian pula dengan pengendalian dampak lingkungan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan; meningkatkan pemahaman tentang pelestarian lingkungan; pemenuhan akses informasi yang cukup bagi masyarakat tentang lingkungan; meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam; meningkatkan pengendalian polusi serta tersedianya data-data pengujian kadar limbah padat dan limbah cair.

Dalam rangka penyediaan data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah rentan dan rawan bencana dilakukan melalui lintas SKPD karena terkait dengan keamanan dan keselamatan masyarakat. Pemenuhan akses informasi yang cukup bagi masyarakat tentang lingkungan sehingga terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pelestarian lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemenuhan akses informasi tentang lingkungan juga diikuti dengan penyebaran informasi tentang potensi bencana alam, sehingga dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bagaimana menghadapi dan mengantisipasi kejadian bencana alam dengan tanpa bermaksud meresahkan masyarakat.

Dengan meningkatnya masyarakat yang peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam pemantauan kualitas lingkungan akan mengurangi dan dapat mengendalikan terjadinya Kerusakan lingkungan yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan. Kegiatan peningkatan



edukasi masyarakat di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kegiatan untuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Selain hal sebagaimana disebutkan terdahulu, dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan, untuk menunjang cakupan pelayan persampahan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana persampahan baik berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih lainnya serta pakaian lapangan bagi pasukan kuning.

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, sasaran meningkatkan kebersihan kota dengan melaksanakan pelayanan kebersihan jalan, pengangkutan sampah di wilayah ibu kota kabupaten sumbawa juga mengadakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana persampahan yang meliputi alat berat buldozer, dump truck dan truck sampah serta melakukan penggantian suku cadang dan pengadaan alat-alat perbengkelan, namun kegiatan ini belum sepenuhnya teratasi karena terbatasnya sarana dan semakin meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya.

Demikian pula dengan upaya meningkatkan kepedulian akan kelestarian lingkungan yang dewasa ini menunjukkan masih terjadinya kerusakan hutan yang berdampak pada meningkatnya jumlah lahan kritis, pencemaran lingkungan dan sumber air sebagai akibat dari pembuangan limbah oleh pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan, adanya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan, serta belum maksimalnya pelaksanaan/penerapan peraturan perundang-undangan. Sisi lain dari upaya pelestarian lingkungan hidup, setiap tahun dilaksanakan penataan taman kota dan pengelolaan lampu penerangan jalan dan lingkungan. Dengan meningkatnya masyarakat yang peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam pemantauan kualitas lingkungan akan mengurangi dan dapat mengendalikan terjadinya Kerusakan lingkungan yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan. Pada tahun 2011 Kabupaten Sumbawa berhasil meraih **Anugerah Raksaniyata (penghargaan di bidang Lingkungan Hidup)** dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2011.



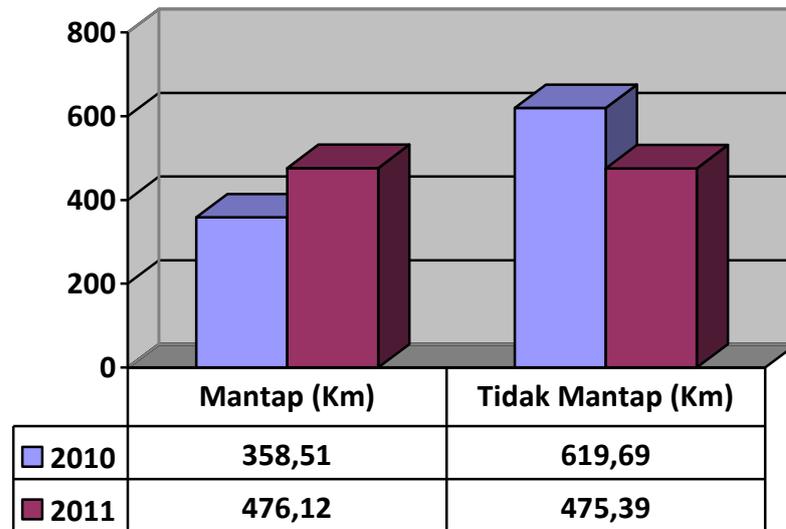
Terkait dengan realisasi dari rencana kinerja yang ditetapkan, hingga akhir tahun anggaran 2011 secara kumulatif rata-rata tingkat pencapaian indikator outputnya mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **98,22%** dari pagu total anggaran belanja BPM-LH tahun 2011 baik dari belanja langsung maupun dari belanja tidak langsung. Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi program dan kegiatan pada urusan wajib lingkungan hidup disajikan pada lampiran.

4.1.2.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Dalam penyelenggaraan *urusan wajib pekerjaan umum*, secara umum tingkat capaian kinerja pada tahun 2011 dapat dikategorikan berhasil karena kisaran capaian kinerjanya berada pada interval 80%-100%. Pada sisi realisasi belanja yang dianggarkan, tingkat realisasinya mencapai **91,10%** dari total pagu anggaran belanja Dinas PU tahun 2011 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pada urusan wajib pekerjaan umum di Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2011 dilaksanakan beberapa kegiatan pokok, yaitu meliputi bidang kebinamargaan berupa pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan; bidang keciptakarya berupa pembangunan infrastruktur air bersih dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong; bidang Sumber Daya Air berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai serta pengendalian banjir.

Dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang sarannya adalah untuk membuka akses antar wilayah dan pemanfaatan wilayah-wilayah yang masih terisolir yang memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan, dimana total panjang jalan di Kabupaten Sumbawa (berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 558 tahun 2010 tentang penetapan ruas jalan menurut fungsinya di provinsi Nusa Tenggara Barat) adalah 951,51 km dengan kondisi sebagaimana tergambar pada gambar berikut.



Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa

Gambar 4.6
Kondisi Jalan Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

Hal ini menunjukkan peningkatan kondisi infrastruktur jalan dibandingkan dengan tahun 2010. Dimana pada tahun 2010 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap 358,51 km (37,68%), kondisi tidak mantap/rusak 619,69 km (62,32%), sedangkan pada tahun 2011 Kondisi jalan yang mantap sepanjang 476,12 (50,03%), dan jalan yang tidak mantap 475,39 km (49,97%), sehingga terjadi peningkatan panjang jalan dari yang tidak mantap pada tahun sebelumnya menjadi jalan mantap pada tahun 2011 sepanjang 143,57 km. Untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi jalan mantap, maka pada tahun tahun 2011 dilaksanakan kegiatan antara lain; (1) pemeliharaan rutin jalan sepanjang 50 km, (2) pemeliharaan berkala jalan sepanjang 26,75 km, yang merupakan alokasi dari dana DAK, APBD, DPID dan tanggap darurat. dan (3) peningkatan jalan sepanjang 39,43 km .

Demikian pula dengan total panjang jembatan di kabupaten sumbawa adalah 2.505,50 meter (202 unit) dan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi jembatan tetap baik maka pada tahun tahun 2011 dilaksanakan kegiatan pemeliharaan jembatan sepanjang 634 meter (5 unit).

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan keserasian pengembangan wilayah yang masih terisolir yang mempunyai potensi besar untuk dapat dikembangkan dari anggaran yang tersedia untuk



pembangunan jalan / jembatan. Pembangunan jalan / jembatan difokuskan untuk menghubungkan daerah – daerah potensial yang masih terisolir sehingga akselerasi pembangunan menjadi merata. Untuk menghubungkan daerah yang masih terisolir dibangun jembatan sepanjang 60 meter (4 unit).

Dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan talud/bronjong dan saluran drainase/gorong-gorong, yang diarahkan pada upaya untuk mengamankan wilayah pemukiman di sekitar sungai dari gerusan air sungai terutama saat banjir dan terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat dan tertata, maka pada tahun 2011 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan talud/bronjong pengaman tebing sungai sepanjang 1.266 meter yang tersebar di seluruh wilayah pemukiman yang rawan dari gerusan air sungai dan kegiatan pembangunan saluran drainase sepanjang 2.005 m' dengan persentase pencapaian 100%.

Sedangkan program pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi ditujukan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencukupi / melayani kebutuhan air bagi seluruh areal pertanian di Kabupaten Sumbawa, disamping itu ketersediaan sarana prasarana pengendalian banjir juga harus mendapat perhatian demi menjaga dari daya rusak air itu sendiri. Pada tahun 2011 operasi dan pemeliharaan daerah irigasi mencapai 24 daerah irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mencapai 11.000 Ha, pembangunan / rehab bendung desa sebanyak 20 bendung, pembangunan / peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan sepanjang 1.785 m' serta pembangunan prasarana pengaman pantai sepanjang 600 m'. Program pengendalian banjir dilaksanakan pekerjaan berupa normalisasi saluran sungai sepanjang 3.965 m'. Untuk mengoptimalkan hasil dari pembangunan / peningkatan serta rehabilitasi saluran irigasi diiringi dengan penyediaan sarana pengelolaan dan organisasi pengelolaan air agar distribusi air dapat merata ke seluruh areal pertanian.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyediaan air bersih di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2011 telah dilaksanakan pembangunan sarana air bersih sepanjang 13.114 meter. Menyangkut pengamanan pantai untuk dapat mengamankan kondisi permukiman sekitar pantai dari abrasi maupun terjangan ombak yang sering terjadi, pada tahun 2011, dilaksanakan



pembangunan sarana pengamanan pantai di Desa Labuhan Sumbawa sepanjang 500 meter yang merupakan proyek lanjutan dari pelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya. Disamping itu juga telah di laksanakan pembuatan talud pengaman pantai desa Pidang Tarano sepanjang 50 meter. Sedangkan pembangunan pengaman tebing sungai, pelaksanaannya sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dimana wilayah permukiman sekitar talud pengaman sungai tersebut aman dari gerusan air sungai terutama pada saat banjir. Pada pelaksanaan di tahun 2011 telah terbangun 1.103 meter talud pengaman tebing sungai.

Terkait kebutuhan pembangunan wilayah strategis dan tumbuh cepat yang dengan indikator sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan prasarana pendukung lainnya maka sasaran program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai termasuk prasarana pendukung untuk mendukung pembangunan wilayah strategis dan tumbuh cepat, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai maka arus barang dan jasa berjalan lancar dan dampaknya adalah terjadi akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat wilayah yang strategis dan tumbuh cepat. Wilayah-wilayah yang menjadi rumpun wilayah strategis dan tumbuh cepat ini adalah kawasan agropolitan Alas-Utan, Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan Kawasan Agropolitan Brang Pelat. Kawasan ini menjadi kawasan pengembangan produktif sesuai dengan potensi komparatif yang dimiliki. Penumbuhan kawasan ini diletakkan dalam kerangka penciptaan stimulus ekonomi untuk produktivitas komoditas sebagai komoditas unggulan wilayah untuk percepatan akselerasi ekonomi.

4.1.2.5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Urusan wajib penataan ruang yang dilaksanakan tahun 2011 adalah penyusunan raperda RTRW, berupa penyusunan materi batang tubuh yang telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) serta persetujuan BKPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sarasannya adalah termanfaatnya ruang/kawasan yang sesuai dengan ketentuan dimana



implementasi dari kegiatan ini diwujudkan melalui kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan perijinan ruang dan pemanfaatan lahan dan ruang. Akselerasi pembangunan tetap memperhatikan keseimbangan dengan tetap memperhatikan konsep pengembangan wilayah, baik wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan. Untuk menjaga agar pembangunan yang berjalan sesuai dengan konsep pengembangan wilayah maka disusun kebijakan yang mengatur tentang perijinan pemanfaatan ruang dengan tujuan agar tertatanya kegiatan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib perencanaan pembangunan pada tahun 2011 meliputi pengembangan sistem perencanaan pembangunan, koordinasi perencanaan pada setiap sektor pembangunan, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, penyusunan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan laporan evaluasi pembangunan, koordinasi pelaksanaan Tugas Pembantuan serta beberapa program koordinasi perencanaan penunjang untuk penyelarasan dengan program dari pemerintah pusat.

Dokumen data dalam rangka perencanaan pembangunan yang disediakan meliputi profil daerah, statistik ekonomi, data spasial daerah. UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, mengamanatkan bahwa data menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam perencanaan pembangunan. Data ini menjadi acuan sangat strategis dalam membuat perencanaan yang baik. Seiring dengan otonomi daerah kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir semakin dirasakan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat selalu membutuhkan data dan informasi dari daerah bagi penentuan besaran dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil), sedangkan pemerintah daerah memerlukan data untuk membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi demikian, secara praktis sebenarnya dapat dibantu melalui data dan informasi tentang pembangunan daerah yang merupakan suatu unit fungsional pengelolaan basis data dan informasi daerah bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta dapat digunakan dalam rangka pengembangan



peluang investasi dan potensi daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 152 ayat 1, yang berbunyi Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, yang mencakup: (a) penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (b) organisasi dan Tata laksana Pemerintah Daerah; (c) kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan PNS Daerah; (d) keuangan daerah; (e) potensi Sumberdaya Daerah; (f) produk Hukum daerah; (g) kependudukan; (h) informasi Dasar Wilayah; (i) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJMN 2005 -2009, Bab 13 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang berbunyi bahwa dalam rangka mencapai tujuan program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, salah satu kegiatan pokok adalah pengoptimalan dan peningkatan sistem informasi pemerintah daerah untuk memperkuat kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta perencanaan daerah rawan bencana. Penguatan koordinasi ini, merupakan *basic need* perencanaan pada setiap bidang. Karena dengan koordinasi inilah diharapkan akan terbangun sinergisitas konsep implementasi pembangunan dan tersedianya bahan evaluasi perencanaan penanganan daerah. Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan pada tingkat desa pada tahun 2011 dilaksanakan bersama-sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam beberapa bentuk untuk penyusunan RPJM Desa, implementasi pola perencanaan partisipatif dalam program PNPM, serta koordinasi perencanaan SKPD. Upaya tersebut dipandang penting, selain untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur di desa, kecamatan dan SKPD-SKPD juga dalam rangka memperkuat ketersediaan data-data empiris masing-masing wilayah, kesamaan persepsi dan pola pikir mengenai perencanaan pembangunan. Manfaat yang diraih dengan upaya tersebut telah mulai terlihat pada tahapan diskusi forum SKPD dan forum gabungan SKPD sebagai salah satu tahap dalam



proses Musrenbang dan Pra Musrenbang di Kabupaten Sumbawa, meskipun masih tetap menyisakan beberapa kelemahan yang akan terus diperbaiki untuk tahapan berikutnya. Output dari proses Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2012, selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), dan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dijadikan acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.

Dalam rangka menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, maka proses koordinasi perencanaan dilaksanakan baik dilakukan secara sektoral, spasial maupun secara terintegrasi pada berbagai bidang koordinasi perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang selain dilaksanakan dalam jajaran pemerintahan daerah serta *stakeholders* internal lainnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumbawa termasuk lembaga swadaya masyarakat juga dilakukan dengan pemerintah Provinsi dan pusat, terutama dalam memperlancar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011, serta pengembangan lembaga ekonomi lokal di desa melalui pembinaan dan pengembangan BUMDes-LKM yang sudah mulai memberikan kontribusi bagi peningkatan *income* desa. Demikian pula dengan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya, selain melibatkan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan sejak tingkat desa hingga kabupaten, juga dilakukan dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta masyarakat. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan segenap *stakeholder* dilaksanakan juga dalam rangka memantapkan pelaksanaan PNPM PISEW, program AMPL dan perencanaan pembangunan kesehatan, PPAUD, perencanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah serta KTM, selain koordinasi perencanaan bidang pemerintahan lainnya di lingkup pembangunan sosial budaya. Koordinasi perencanaan pembangunan fisik prasarana wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2011, selain mencakup perencanaan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa, juga terkait dengan koordinasi perencanaan dengan pemerintah



provinsi dan pusat termasuk Bakosurtanal, serta beberapa pihak lainnya sebagai *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk pembinaan kelembagaan P3A dan koordinasi penetapan batas desa serta dengan batas Kabupaten yang berbatasan.

Persoalan batas wilayah kabupaten merupakan domain pemerintah provinsi. Berbagai instrumen diupayakan untuk menghasilkan solusi dalam membangun keputusan bersama, dengan berbagai argumentasi fakta empiris. Persoalan batas wilayah dengan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu hingga tahun 2011 masih menunggu ketetapan dari Menteri Dalam Negeri RI. Hal lain yang menjadi persoalan adalah permasalahan batas wilayah desa. Konflik batas desa mengemuka setelah adanya pemekaran desa. Pada tahun 2011 telah dilakukan koordinasi penetapan wilayah perbatasan dan telah dihasilkan dokumen peta desa.

Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh akan selalu konsisten untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata. Intervensi program/kegiatan pada kawasan tersebut terus dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur jalan, pasar agribisnis dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan KTM Labangka.

Keberadaan kawasan kumuh di setiap daerah perkotaan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Salah satu langkah yang ditempuh untuk menata kawasan kumuh, pada tahun 2011 telah dilakukan identifikasi kawasan kumuh, serta strategi penanganannya yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari pelaksanaan *urusan perencanaan pembangunan dan urusan statistik* berdasarkan penetapan kinerja SKPD tahun 2011, tingkat capaian kinerja output dari kegiatan-kegiatan tersebut secara simultan dapat mencapai target. Tingkat capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda pada tahun 2011 berada dalam skala ordinal 80%-100%, dengan tingkat realisasi input (dana) mencapai **91,82%** dari pagu total anggaran belanja Bappeda tahun 2011 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Realisasi belanja dimaksud, diarahkan



untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

4.1.2.7. Urusan Wajib Perumahan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib perumahan, digambarkan dari Kondisi penanganan perumahan di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.

Tabel 4.12
Kondisi Perumahan Penduduk di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

No	Kecamatan	Rumah Penduduk	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Yang Telah Tertangani	Rumah Belum Yang Tertangani
1	Sumbawa	15.082	1.131	10	1.121
2	Lab. Badas	6.572	1.115	-	1.115
3	Utang	7.770	1.950	30	1.950
4	Alas	7.359	1.893	10	1.883
5	Alas Barat	5.309	1.123	30	1.093
6	Lape	4.289	686	170	516
7	Lopok	4.693	765	-	-
8	Plampang	7.045	2.071	60	2.011
9	Labangka	2.834	962	-	962
10	Empang	5.651	1.377	250	1.127
11	Lenangguar	1.754	321	30	291
12	Lantung	911	268	-	268
13	Orong Telu	1.128	265	-	265
14	Lunyuk	4.721	1.060	10	1.050
15	Batulanteh	2.714	298	10	288
16	Rhee	1.838	600	10	590
17	Buer	3.593	803	70	733
18	Unter Iwes	4.594	741	50	691
19	Moyo Hilir	5.928	687	80	607
20	Moyo Utara	2.833	396	-	396
21	Moyo Hulu	5.819	860	90	770
22	Ropang	1.394	235	-	235
23	Maronge	2.459	244	-	244
24	Tarano	3.662	1.752	10	1.742
Jumlah		109.952	21.603	920	20.683

Sumber Data : BPMPD Kab. Sumbawa

Secara umum kebijakan di bidang pengembangan perumahan berupa pembangunan baru dan renovasi/rehabilitasi dari dana yang bersifat stimulan



sampai dengan tahun 2011 telah menunjukkan peningkatan sebanyak 920 (4,26%) rumah yang sudah tertangani dari 21.603 rumah tidak layak huni.

4.1.2.8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Wajib kepemudaan dan Olah Raga merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa merupakan implementasi pelaksanaan urusan wajib kepemudaan dan olahraga. Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan, secara simultan tingkat realisasi kegiatan sebagai ukuran tingkat capaian kinerja output mencapai skala ordinal 80%-100%. Sementara tingkat keterserapan input (dana) yang diukur dari realisasi anggaran mencapai **96,35%** dari totalitas pagu anggaran belanja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan dalam APBD tahun 2011 (meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terkait dengan urusan wajib kepemudaan dan olahraga sepanjang tahun 2011 adalah dengan berperan sertanya pemuda dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dengan memanfaatkan peluang untuk ikut serta dalam pembangunan. Oleh karena itu telah dilaksanakan berbagai lomba diantaranya berupa pembinaan pemuda pelopor tingkat Kabupaten, seperti terpilihnya pemuda pelopor dari Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes dibidang kewirausahaan, pemuda pelopor dibidang pendidikan dari Dusun Labuhan Badas Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, pemuda pelopor dibidang Teknologi Tepat Guna dari Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas, dan pemuda pelopor bidang Budaya dan Pariwisata dari Desa Juru Mapin Kecamatan Buer serta pemuda pelopor dibidang Kelautan dan Kebaharian dari Pulau Bungin Kecamatan Alas.

Organisasi Pemuda yang ada di Kabupaten Sumbawa seperti KNPI, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Pramuka, Karang Taruna dan Senat Mahasiswa yang pembinaannya dilakukan oleh berbagai Instansi Pemerintah maupun organisasi masyarakat.



Memperhatikan peran strategis pemuda dengan jumlah yang besar merupakan aset yang sangat berharga yang potensial sebagai kader pemimpin, pelopor dan penggerak pembangunan yang produktif namun demikian belum seluruh generasi muda memiliki kualitas yang cukup untuk mengisi pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas pemuda salah satu program yang dilaksanakan yaitu program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda yang bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kecakapan dan ketahanan hidup di kalangan pemuda sebagai salah satu pilar pembangunan sehingga mampu berpartisipasi aktif dan mendukung program ini yaitu: Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan pelatihan keterampilan bagi pemuda serta peningkatan kreatifitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat yang dilaksanakan kepada 55 (lima puluh lima) orang pemuda.

Sebagai upaya peningkatan prestasi olahraga masyarakat, pada tahun 2011 dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas ditentukan antara lain oleh derajat kesehatan dan kebugaran jasmani, serta perilaku terpuji seperti kejujuran dan sportifitas. Kurang intensifnya pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga dalam pengembangan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan antara lain dipengaruhi oleh belum mantapnya kelembagaan olahraga terutama klub-klub olahraga yang merupakan ujung tombak pembinaan olahraga. Terbatasnya jumlah dan sebaran pelatih yang berkualitas serta kurangnya kejuaraan kelompok usia dini, baik dalam skala kabupaten maupun regional menyebabkan pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga belum mengalami kemajuan seperti yang diharapkan.

Pemerintah Daerah sangat memperhatikan peningkatan kapasitas para pemuda untuk mendapatkan pencapaian terbaik di bidang olahraga. Berbagai bangunan gedung menyediakan suatu tempat yang baik untuk masyarakat umum dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang olahraga, seperti halnya stadion, lapangan tenis, lapangan-lapangan yang dikelola oleh masyarakat, lapangan yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah dan lain-lainnya. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dimaksudkan mengupayakan ketersediaan, pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga,



baik dijalur pendidikan mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, maupun diberbagai tempat fasilitas umum dan pemukiman.

Sebagai upaya peningkatan prestasi olahraga masyarakat, pada tahun 2011 difasilitasi penyelenggaraan event-event olahraga pada berbagai cabang olahraga. Sasaran dari upaya tersebut adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga, serta berkembangnya prestasi. Untuk itu dilakukan juga pembangunan lanjutan gedung olahraga Mampis Rungan, sebagai penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Iklm keolahragaan ini juga didukung dengan berbagai upaya pembinaan dalam rangka meningkatkan minat yang ditandai dengan berkembangnya intensitas olahraga dan persepsi masyarakat terhadap olahraga menjadi frame yang sangat mendasar. Inisiasi-inisiasi untuk pelaksanaan even-even olahraga merupakan salah satu indikator capaian sasaran ini selain semakin kapabelnya organisasi cabang-cabang olahraga. Even-even yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa beberapa cabang olahraga sudah menjadi agenda rutin tahunan seperti sepak bola antarpelajar, Suratin Cup, Pertandingan sepak bola Cenderawasih Cup, pertandingan seleksi Persisum, pertandingan bulu tangkis, pertandingan, perlombaan olahraga antarpelajar, dan lain-lain. Optimasi organisasi cabang-cabang olahraga di Kabupaten Sumbawa relatif sudah mencapai ke tingkat desa. Adapun cabang olah raga yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 adalah dari Cabang Olah raga Billyard pada Open Turnamen (Pra PON) yang dilaksanakan di Provinsi Bali berhasil keluar sebagai juara II, dicabang Volly pada Kejurda Putra-Putri di Kabupaten Bima meraih juara I beregu putra dan juara III beregu putri, demikian juga di cabang Tenis Meja pada Popda di Mataram berhasil meraih juara II di tunggal putra. Adapun prestasi yang telah diraih tersebut dapat menjadi pendorong bagi pemuda-pemuda lainnya dalam meraih prestasi berikutnya, sehingga dengan lahirnya pemuda-pemuda berprestasi tersebut dapat meminimalisir lingkungan yang tidak sehat menjadi lingkungan yang sehat, hal ini akan berdampak terhadap salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda, yang penanganannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait.



Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAFZA) atau yang populer diistilahkan dengan narkoba menunjukkan gejala yang semakin memprihatinkan dan seperti tidak dibatasi lagi oleh ruang. Pada tahun 2011 telah dilakukan kegiatan sosialisasi kegiatan bahaya narkoba dengan sasaran para pelajar, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbawa.

4.1.2.9. Urusan Wajib Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal merupakan urusan yang dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan penciptaan iklim kondusif bagi investasi termasuk penghapusan penyebab ekonomi biaya tinggi serta penyiapan sumberdaya dalam mendukung investasi, merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada urusan wajib penanaman modal di tahun 2011.

Pemerintah daerah telah menempuh upaya penyebaran informasi potensi unggulan melalui kegiatan promosi investasi yang telah diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta melalui media-media cetak.

Secara umum perkembangan rencana dan realisasi investasi di Kabupaten Sumbawa khususnya PMDN meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 realisasi investasi mencapai Rp. 748.685.331.456, dengan jumlah 10.832 investor dan pada tahun 2011 mencapai Rp. 974.570.171.736,- dengan jumlah 11.007 investor. Sedangkan PMA pada tahun 2011 dari rencana sebesar USD. 28.440.000,- (22 investor) terealisasi sebesar USD. 11.256.992,- (6 investor). Rendahnya realisasi jumlah investor yang ingin berinvestasi di daerah disebabkan investor tersebut harus mengurus ijin prinsip (ijin pendahuluan) terlebih dahulu sebelum melakukan survey awal ataupun ijin pelaksanaan lainnya, sementara kondisi yang ada setelah survey awal tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Disamping itu peraturan yang menjamin dan mendukung serta memberikan kemudahan akses dan kelangsungan investasi di daerah masih kurang.

Secara rinci mengenai rencana dan realisasi program dan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal disajikan pada lampiran.



4.1.2.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

Berdasarkan penetapan kinerja urusan Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa tahun 2011 bahwa secara kumulatif, tingkatan capaian kegiatan tersebut relatif mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **97,18%** dari total belanja yang dianggarkan melalui Koperasi Perindustrian dan Perdagangan tahun 2011 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Secara garis besar pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan wajib koperasi dan UKM diuraikan sebagai berikut.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan koperasi dapat diketahui berdasarkan indikator – indikator:

- 1) Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT);
- 2) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi yang dikategorikan sangat berkualitas, berkualitas atau kurang berkualitas;
- 3) Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam (KSP)/unit simpan pinjam (USP) yang dikategorikan sehat, sedang atau kurang sehat.

Jumlah koperasi di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 sebanyak 353 unit atau meningkat 2,31% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 345 unit. Berdasarkan hasil pemeringkatan koperasi, terdapat 41 koperasi dengan peringkat “berkualitas” (meningkat 24,00% dari tahun sebelumnya), sedangkan 64 unit merupakan koperasi dengan peringkat “cukup berkualitas” (mengalami peningkatan 14,28% dari tahun sebelumnya). Sebagai gambaran koperasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2011 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.13
Jumlah Koperasi, Koperasi RAT Dan Hasil Pemeringkatan Koperasi Tahun 2010 dan 2011 di Kab. Sumbawa

No	Tahun	Jumlah koperasi	Koperasi RAT		Hasil pemeringkatan			
			Jumlah	%	Sangat berkualitas	Berkualitas	Cukup berkualitas	Jumlah
1.	2010	345	97	28,12	-	33	56	89
2.	2011	353	98	27,76	-	41	64	105
Perkembangan		8	1	(0,36)	-	8	8	16
%		2,00	1,03	-1,28	-	24,00	14,28	17,97

Sumber Data : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa.



Berdasarkan tabel 4.13, dari 353 unit koperasi, hanya 127 unit koperasi aktif dan hanya 98 unit melaksanakan RAT pada tahun 2011. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 160 unit. Menurunnya jumlah koperasi aktif pada tahun 2010 dan 2011 disebabkan adanya penyesuaian kondisi organisasi koperasi dengan PP 09 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam dimana sebagian besar koperasi aktif yang ada belum memenuhi kriteria dalam hal persyaratan modal yang disetor. Sementara itu, jumlah koperasi tidak aktif adalah 226 unit, dengan total jumlah anggota 49.257 orang.

Sedangkan KSP / USP menurut hasil penilaian kesehatan KSP/USP di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2011 sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Jumlah KSP / USP dan Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP tahun 2010 dan 2011 di Kab. Sumbawa

No.	Tahun	Jumlah KSP / USP Aktif	Hasil penilaian kesehatan			KSP / USP sehat	
			Sehat	Cukup sehat	Kurang sehat	Jumlah	%
1.	2010	127	7	45	50	102	80,31
2.	2011	127	13	59	0	72	56,69
Perkembangan		0	6	14	(50)	-30	
%		0,00	85,71	31,11	-100,00	-29,41	

Sumber Data : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa

Selain koperasi, urusan wajib ini dihajatkan untuk membina usaha daerah melalui pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing UKM, untuk itu perlu dikembangkan strategi pengembangan kewirausahaan dimasa mendatang. Pengembangan wirausaha baru diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan gerakan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.

Usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar di Indonesia (92%) dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing, untuk itu pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri.



Adapun jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun 2011 sebanyak 8.383 unit, jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2010 sebanyak 9.293 unit, atau menurun sebesar 910 unit atau 10,85 %. Sedangkan jumlah UKM pada tahun 2011 sebanyak 5.846, pada tahun 2010 sebanyak 6.114 unit, menurun 268 unit atau 4,58%.

Dalam rangka menumbuhkembangkan UKM yang berkualitas dan wirausaha baru, maka ditempuh beberapa kebijakan; (1) Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; (2) Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif; (3) Peningkatan daya saing hasil produksi UKM di pasar daerah, regional maupun nasional melalui pola promosi industri daerah.

4.1.2.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan penetapan kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana *urusan kependudukan dan catatan sipil* tahun 2011, secara umum, tingkat capaian kegiatan berdasarkan tolak ukur indikator kinerja mencapai nilai ordinal 80%-100%. Sedangkan realisasi anggaran belanja mencapai **96,99%** dari total anggaran belanja yang ditargetkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pada tahun 2011, penataan administrasi kependudukan diarahkan pada kegiatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan seperti penduduk ber-KTP, penduduk ber-KK, dan Kelahiran bayi ber Akte Kelahiran. Penataan administrasi dicapai melalui kegiatan – kegiatan berupa: a) *Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu*, tujuan dari kegiatan ini untuk ketersediaan informasi kependudukan secara terintegrasi; b) *Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan*, hasil yang ingin dicapai yaitu ketersediaan data catatan sipil; c) *Penyusunan dan pemutakhiran data base kependudukan, catatan sipil dan DP4*, ditujukan untuk Ketersediaan basis data kependudukan.

Cakupan pembinaan administrasi kependudukan ini ditujukan di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Sumbawa, sehingga kedepan diharapkan tertib administrasi berkaitan dengan kependudukan dapat tercapai. Adapun



target dan realisasi bahan penunjang pelayanan administrasi catatan sipil tergambar sebagai berikut.

Tabel 4.15
Bahan-Bahan Penunjang Pelayanan Administrasi Catatan Sipil

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
- Penyediaan blanko akta kelahiran	116.000.000	193.234.000	166,58
- Akta kematian	150.000	85.000	56,66
- Pencatatan perceraian baru dan terlambat	450.000	350.000	77,77
- Kartu Keluarga (KK)	90.000.000	110.229.000	122,47
- Penyediaan blanko KTP	390.000.000	737.137.500	189,00

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sumbawa.

Berdasarkan tabel 4.15, tergambar bahwa tingkat realisasi dari penyediaan blanko akta kelahiran, Kartu Keluarga dan blanko KTP melebihi 100%, hal ini disebabkan karena permintaan pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2011, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka dicetak sebanyak 580 blanko tambahan yang semula dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan pada tahun 2012.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat dan tepat baik dalam hal biaya maupun sistem dan prosedurnya yang akhirnya akan terwujud pelayanan prima serta birokrasi yang bersih dan berwibawa. Untuk menjamin pelayanan dapat berlangsung sesuai prosedur dan standar pelayanan, maka ketersediaan logistik pendukung administrasi catatan sipil menjadi hal yang mutlak, upaya ini ditempuh melalui pengadaan surat-surat administrasi pencatatan sipil.

4.1.2.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Urusan Wajib Ketenagakerjaan merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dimana pada tahun 2011 dalam penetapan kinerja pelaksanaan *urusan wajib ketenagakerjaan*, secara umum tingkat capaian kinerja kegiatan mencapai skala ordinal 80%-100%. Tingkat keterserapan input (dana), realisasinya mencapai **87,65%** dari total belanja yang dianggarkan tahun 2011.



Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam meningkatkan kualitas kerja dimana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja.

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ditempuh melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja dengan latihan-latihan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam rangka peningkatan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja agar dapat berperan serta dalam mengisi pembangunan, Tahun 2011 Bidang Latihan dan Produktivitas telah melaksanakan kegiatan / latihan yang bersifat kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, diantaranya pelatihan kejuruan las listrik, kejuruan tukang kayu dan kejuruan mobil bensin dari dana APBD seperti pada tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16
Jumlah Tenaga Kerja Yang Telah Dilatih
Melalui Dana APBD Kab. Sumbawa Tahun Anggaran 2011

No	Nama Kejuruan	Jenis/Tingkat Latihan	Peserta (Orang)	Lokasi Desa/Kel.	Realisasi Fisik (%)
1.	Las Listrik	Dasar	16	Ds. Sebedo Kec. Uthan	100%
2.	Tukang Kayu	Dasar	16	Ds. Mokong Kec. Moyo Hulu	100%
3.	Mobil bensin	Dasar	16	Ds. Lok Karya Kec. Rhee	100%
Jumlah			48		

Sumber Data : Disnakertrans Kab. Sumbawa.

Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS) juga merupakan bagian dari instrumen pencapaian sasaran ini. Sampai dengan tahun 2011 dilaksanakan pelatihan uji kompetensi bagi tenaga kerja terlatih dengan pembinaan terhadap 12 LLS dari 26 LLS yang ada di Kabupaten Sumbawa yaitu :

- Handayani : bidang yang dibina adalah bahasa inggris, komputer dan mengetik.
- LPK Sumbawa : bidang yang dibina adalah komputer.
- Tambora : bidang yang dibina adalah komputer dan mengetik.



- Bintang Samawa : bidang yang dibina adalah bahasa Inggris, komputer, bahasa Jepang, bahasa Korea.
- Komunikasi : bidang yang dibina adalah bahasa Inggris.
- Seruni : bidang yang dibina adalah menjahit.
- Yayasan Kuterina Madani: bidang yang dibina adalah bahasa Inggris.
- Penjahit NTB : bidang yang dibina adalah menjahit.
- PPLS LAGA : bidang yang dibina adalah bahasa Inggris.
- Melamin PPLS : bidang yang dibina adalah bahasa Inggris.
- Penjahit Gadis : bidang yang dibina adalah menjahit.
- YPPM Samawa : bidang yang dibina adalah mengemudi.

Peningkatan teknologi dalam pembangunan berdampak langsung kepada pekerja sehingga perlu ditingkatkan koordinasi pelayanan perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja melalui pembinaan dibidang hubungan industrial yaitu penyuluhan tata cara penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta kegiatan revitalisasi lembaga kerjasama bipartit di perusahaan. Untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja ditekankan pada pemberian hak – hak dasar tenaga kerja baik perlindungan di bidang sosial ekonomi, perlindungan norma umum serta norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Kegiatan-kegiatan pengawasan dan keselamatan kerja, pengaturan pengupahan, jaminan sosial, perluasan perjanjian kerja bersama dan pembinaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan terus dilanjutkan dan tingkatkan dari tahun ke tahun. Penyuluhan dan perlunya perlindungan tenaga kerja, untuk itu ditempuh melalui kebijakan-kebijakan yang terus disempurnakan tiap tahunnya.

Tabel 4.17
Jumlah Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial Tahun 2010 - 2011

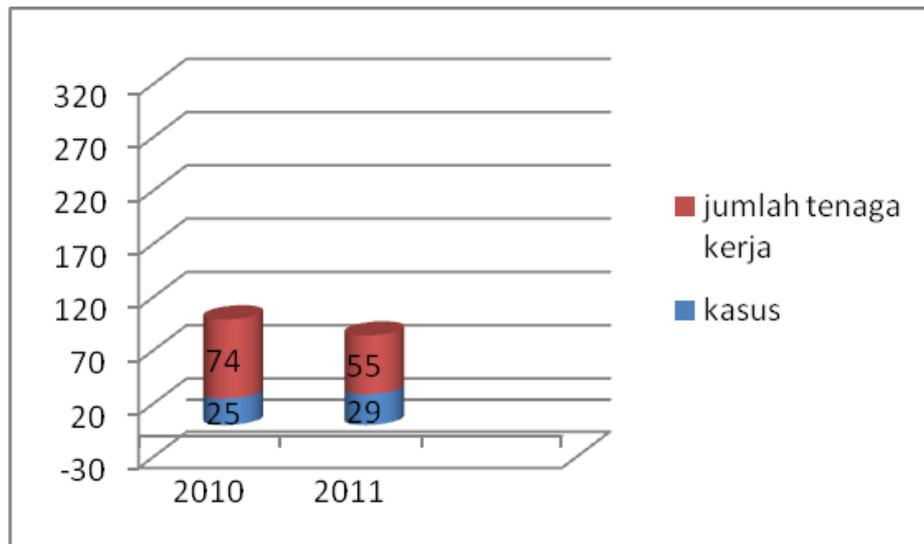
No	Sarana Hubungan Industrial	Kelembagaan			Keterangan
		Lama	Baru	Tercatat	
Tahun 2010					
1	Peraturan perusahaan	40	31	71	Jumlah TK 397 orang Anggota 11 orang 246 orang pengurus 3.745 orang
2	Perjanjian kerja bersama	31	22	53	
3	Tripartit	1	-	1	
4	Bipartit	30	11	41	
5	SP/SB	107	2	109	
Jumlah		209	66	275	



Tahun 2011					
1	Peraturan perusahaan	70	5	75	
2	Perjanjian kerja bersama	12	0	12	
3	Tripartit	1	0	1	
4	Bipartit	55	0	55	
5	SP/SB	59	1	60	
Jumlah		197	6	203	

Sumber Data : Disnakertrans Kab. Sumbawa.

Kasus ketenagakerjaan yang mengemuka adalah kasus-kasus perselisihan hak, kepentingan, PHK dan antar SP/BP. Jumlah kasus ketenagakerjaan tahun tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 4 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2011 terjadi 29 kasus dari 55 orang tenaga kerja dan pada tahun 2010 sebanyak 25 kasus dari 74 orang tenaga kerja. Hal ini tergambar pada gambar berikut.



Gambar 4.7
Perbandingan Jumlah Kasus dengan Jumlah Tenaga Kerja
Tahun 2010 -2011

Untuk meningkatkan operasional pembinaan hubungan industrial, organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga tripartit, bipartit dan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja terus ditingkatkan. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan antara lain:



1. Penyelesaian kasus PHI sebanyak 29 perusahaan.
2. Penyuluhan/sosialisasi advokasi PHI (UU No. 2 Tahun 2004) sebanyak 10 perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, antara lain dilaksanakan melalui pengaturan pengupahan, agar upah terendah sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini terus diusahakan agar upah dalam jabatan yang sama tidak jauh berbeda dan terdapat keseimbangan antar wilayah, keseimbangan antara upah tertinggi dan terendah dalam satu sektor atau perusahaan.

Melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 688 Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yaitu upah bulanan terendah pekerja dalam wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap Tahun 2011 sebesar Rp. 950.000,- setiap bulan. Upah Minimum ini hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah maka pada Tahun 2011 telah dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sumbawa melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 106 Tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010 . Adapun unsur-unsur yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Sumbawa yang beranggotakan Tripartit sebagai berikut.

1. Unsur pemerintah
2. Unsur pengusaha
3. Unsur pekerja

Tugas utama Dewan Pengupahan Kabupaten Sumbawa adalah :

- Meneliti dan mengkaji masalah – masalah pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja
- Mengajukan konsep – konsep kebijakan strategis pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Pengawasan norma kerja dan Jamsostek pada Tahun Anggaran 2011 terus ditingkatkan terhadap perusahaan, baik pengawasan, pemeriksaan kasus maupun penyimpangan waktu kerja dan kerja malam wanita, serta melakukan penyuluhan aturan perundang-undangan yaitu Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada 20 (dua puluh) perusahaan dengan



jumlah peserta sebanyak 546 orang.

Sasaran keselamatan tenaga kerja diarahkan menurunkan kasus kecelakaan kerja yang diarahkan untuk perlindungan tenaga kerja di tempat kerja dengan mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja. Pada tahun 2011 jumlah kasus kecelakaan kerja sejumlah 9 kasus dengan identifikasi jenis kecelakaan adalah luka berat 6 orang dan meninggal dunia 3 orang.

Kebijakan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja ditujukan kepada perlindungan tenaga kerja ditempat kerja dengan mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja. Usaha peningkatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dalam Tahun 2011 telah mengadakan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 50 orang tenaga kerja, serta kegiatan inspeksi kontrol UU Nomor 1 Tahun 1970, pemeriksaan kasus kecelakaan kerja, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik dan petir, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.18
Kegiatan Inspeksi Kontrol Dan Kunjungan Tahun 2011

NO	KEGIATAN	PROGRAM	REALISASI
1.	Inspeksi	75	75
2.	Kontrol	75	75
3.	Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja	25	25
4.	Pemeriksaan Kasus PHK	29	29
5.	Pemeriksaan Kasus Jam Kerja	50	50
Jumlah		254	254

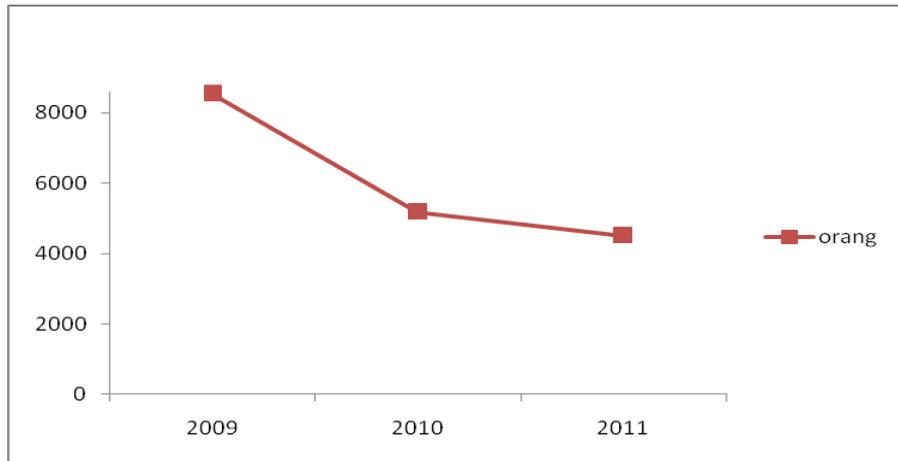
Sumber Data : Disnakertrans Kab. Sumbawa.

Untuk mempermudah akses informasi ketenagakerjaan khususnya informasi bursa lapangan kerja, dilakukan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui media-media baik cetak maupun elektronik dan penerbitan buletin pasar kerja yang terdistribusi sampai ke desa-desa dengan harapan untuk memberikan arah, tujuan sekaligus informasi lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja sehingga pencari kerja mendapat gambaran tentang pekerjaan yang diinginkan.

Jumlah pencari kerja yang terregistrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2009 mencapai 8.453 orang dengan komposisi 7.587 perempuan dan 866 laki-laki, sedangkan pada tahun 2010 total pencari kerja turun menjadi 6.593 orang dengan rincian 5.511 perempuan dan 1.082 laki – laki dan pada tahun 2011 jumlah pencari kerja yang tercatat kembali turun menjadi



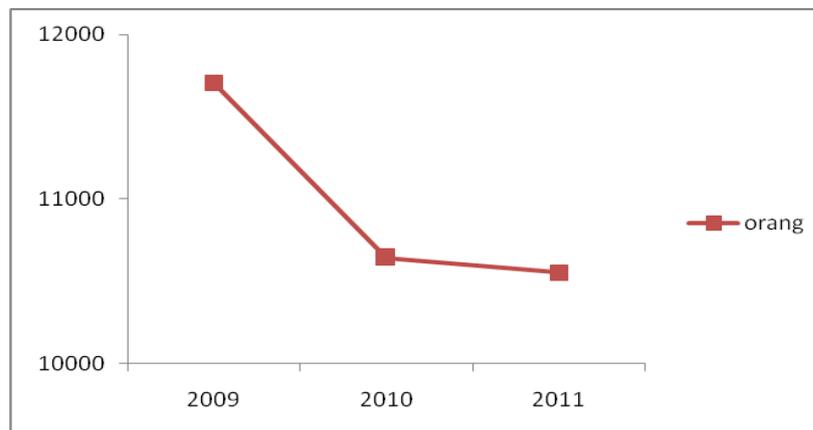
5.580 orang dengan rician 4.659 perempuan dan 921 laki-laki. Sementara itu, penempatan tenaga kerja ke luar negeri pada tahun 2008 mencapai 8.536 orang, pada tahun 2009 turun menjadi 7.234 orang, sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 5.176 orang dan pada tahun 2011 juga terjadi penurunan menjadi hanya 4.506 orang.



Sumber Data : Dinas Nakertrans Kab. Sumbawa.

Gambar 4.8
Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Tahun 2009 – 2011

Demikian pula dengan lowongan pekerjaan untuk tenaga kerja luar negeri juga terjadi penurunan sekitar 88 orang yaitu Tahun 2011 = 10.555 orang bila dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2010 = 10.643 , Tahun 2009 = 11.709 orang, Tahun 2008 = 13.891 orang, Tahun 2007 = 11.777 orang, Tahun 2006 = 11.980 orang dan Tahun 2005 = 7.358 orang, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.9
Lowongan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Tahun 2009 – 2011



Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 disajikan pada lampiran.

4.1.2.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa tahun 2011 dilaksanakan melalui program kegiatan SKPD Kantor Ketahanan Pangan sebagai leading sektor yang didukung dengan beberapa program melalui SKPD lainnya seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada tahun 2011, khusus untuk Kantor Ketahanan Pangan sebagai SKPD pelaksana *urusan wajib ketahanan pangan*, tingkat capaian kinerjanya secara rata-rata berada pada skala ordinal 80%- 100%.

Ketahanan Pangan diartikan dengan tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, dan terdistribusi dengan harga terjangkau. Adapun indikator untuk mengetahui ketahanan pangan penduduk/masyarakat di suatu wilayah melalui pola konsumsi pangan masyarakat. Jenis pangan yang beragam merupakan persyaratan utama untuk menghasilkan pola pangan yang bermutu gizi seimbang berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat dengan mengembangkan potensi lokal.

Untuk mengukur upaya penganeekaragaman dibidang penyediaan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Sumbawa, dibutuhkan suatu parameter berupa Pola Pangan Harapan (PPH), karena dengan pendekatan PPH maka skor mutu pangan yang dikonsumsi penduduk dapat dinilai, yakni semakin tinggi skor PPH maka menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Berdasarkan hasil survey mandiri Pola Pangan Harapan Kabupaten Sumbawa, diperoleh Skor PPH 75,0 dari hasil ini mengindikasikan bahwa situasi pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Sumbawa masih dibawah target skor pola Pangan Harapan Nasional sebesar 87,0 yang menggambarkan situasi pola konsumsi sudah beragam dan memenuhi



angka kecukupan energi dan Protein.

Ada beberapa hasil yang dapat diambil dari penyusunan PHH ini antara lain :

1. Situasi konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumbawa baik energi, maupun protein belum menggembirakan karena masih didominasi dari kelompok pangan nabati terutama beras. Sedangkan kelompok pangan hewani dan biji-bijian serta kelompok pangan lainnya relatif masih rendah jika dibandingkan standar konsumsi pangan nasional.
2. Konsumsi energi mencapai 1.857,4 Kkal/kap/hari lebih rendah 142,6 Kkal//kap/hari (7,13%) dari standar konsumsi energi yaitu 2.000 Kkal/kap/hari.
3. Konsumsi protein mencapai 52,3 gr/kap/hari lebih tinggi sebesar 0,3 gram/kapita/hari hal ini menunjukkan bahwa konsumsi protein Kabupaten Sumbawa melebihi standar (0,58%) dari kebutuhan protein yang ditetapkan secara nasional yang ditetapkan yaitu 52 gr/kap/hari.
4. Jika dilihat konsumsi pangan dari persentase angka kecukupan energi/gizi (AKE/G) Kabupaten Sumbawa berada pada angka 92,9% termasuk kategori normal (Standar Depkes) yang berada pada kisaran angka 90 % - 119 % dari angka kecukupan gizi/energi.
5. Capaian Skor PPH dari survey konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumbawa menunjukkan angka 75 yang berarti bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumbawa relatif masih rendah, namun menunjukkan adanya perbaikan terhadap kualitas dan keragaman konsumsi pangan.

Kegiatan lainnya pada urusan ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilaksanakan di 97 desa dari 165 desa di Kecamatan. Berdasarkan hasil analisa situasi pangan dan gizi di Kabupaten Sumbawa secara umum berada pada kondisi aman bila dipandang pada aspek ketersediaan dan akses pangan.

Pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan (MAPAN) di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2011 telah dikembangkan di 9 Kecamatan dan 12 desa yang dimulai sejak tahun 2007. Program ini dimaksudkan agar masyarakat mampu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem



konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara bijaksana dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya yang difokuskan melalui peningkatan pemahaman petani tentang agribisnis, bekerjasama dalam kelompok, pemanfaatan lahan kering yang lebih intensif dan orientasi usaha tani komoditas sesuai permintaan pasar.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat adanya dukungan ketersediaan hasil pemantauan dan analisis pangan masyarakat guna mendorong terwujudnya desa mandiri pangan, terbentuknya kelompok lumbung pangan, tersedianya media informasi ketahanan pangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan: (a) pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; (b) pengembangan desa mandiri pangan, (c) pengembangan pertanian lahan kering; dan (d) pengembangan lumbung pangan desa.

Secara rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib ketahanan pangan pada tahun 2011 disajikan pada lampiran.

4.1.2.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. Adapun sasaran penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan perempuan diantaranya adalah memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan politik dan pembangunan masyarakat baik melalui pemerintahan maupun kegiatan sosial.

Pada tahun 2011 dilaksanakan sosialisasi kepada aparat desa dengan maksud agar aparat di desa mempunyai wawasan dan pemahaman tentang isi, penjelasan dan pendalaman terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking), serta agar mereka selaku aparat dapat



memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga maupun seksual sesuai aturan hukum yang berlaku. Sampai dengan akhir tahun 2011 melalui P2TP2A telah menangani sekitar 120 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada tahun 2011 Kegiatan Gerakan Sayang Ibu yang tujuan umumnya meningkatkan jumlah dan kualitas Kecamatan Sayang Ibu dengan sasaran kegiatan adalah Satgas GSI tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta ibu hamil, ibu menyusui, kader posyandu, bayi, balita dan anak. Gerakan sayang ibu pada tahun 2011 memperoleh juara II Tingkat Provinsi NTB pada penilaian lomba kecamatan yang dipusatkan di Kecamatan Moyo Hilir, dengan desa locus adalah desa poto dan desa imbasnya adalah desa Moyo Mekar.

Terkait dengan pemenuhan terhadap hak anak, pada tahun 2011 dilaksanakan Temu Anak Samawa dengan sasaran kegiatan adalah anak – anak dari usia 7 hingga 17 tahun untuk menjadi peserta Temu Anak Samawa, dari kegiatan Temu Anak Samawa yang diikuti oleh 50 peserta telah terpilih 10 orang anak perwakilan yang dikirim ke Mataram dan dari mereka dipilih 3 orang anak sebagai wakil NTB untuk mengikuti Kongres Anak Nasional tahun 2011 yang dilaksanakan di Bandung Provinsi Jawa Barat.

Guna meningkatkan peran dan posisi strategis perempuan sebagai ibu rumah tangga dilakukan penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera yang dipusatkan di desa Bale Brang, Kecamatan Utan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu pada khususnya dan kaum perempuan pada umumnya tentang peran dan potensi perempuan dalam membangun desa untuk mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka memperoleh gambaran tentang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumbawa diukur dari proporsi perempuan dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data sampai Desember 2011, jumlah PNS Kabupaten Sumbawa adalah 8.393 orang, dengan proporsi pria 57,83 % (4.854 orang) dan perempuan 42,17% (3.539 orang), terjadi peningkatan 46 orang PNS yang berjenis kelamin perempuan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah 41,41% (3.493 orang). Dibidang politik wanita juga telah berperan aktif dengan keterlibatan dalam pemilu tahun



2009 sebagai anggota partai politik dan menjadi calon anggota legislatif dan telah terwakili keanggotaannya di legislatif.

4.1.2.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sasaran pembangunan yang ditangani pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2011 khususnya urusan keluarga berencana, urusan keluarga sejahtera dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya layanan kependudukan, dan keluarga berencana terhadap masyarakat; meningkatnya peserta keluarga berencana aktif; meningkatnya kesertaan kader secara aktif dalam pelaksanaan program kependudukan dan KB ditingkat desa/kelurahan; meningkatnya kualitas kelompok PIK-R ditingkat Kecamatan; meningkatnya jumlah keluarga yang mempunyai anak balita dan remaja yang berpartisipasi aktif melalui kegiatan BKB dan BKR serta meningkatnya anggota kelompok BKB dan BKR dalam kesertaan ber-KB; meningkatnya jumlah kader /tenaga lapangan kelompok bina keluarga dan UPPKS yang berkualitas; meningkatnya peran serta perempuan dalam berbagai pembangunan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam rangka mewujudkan Keluarga Berencana diperlukan peran aktif dari masyarakat itu sendiri dalam upaya menurunkan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk dapat ditekan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menghasilkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, sebagai wujud terciptanya keluarga yang berkualitas.

Pasangan Usia Subur (PUS) berperan cukup besar dalam mensukseskan keluarga berencana, hal ini terlihat berdasarkan hasil pendataan keluarga pada tahun 2011 dari total 87.345 PUS, yang telah menjadi peserta KB sebesar 60.767 (69,57%) terdiri dari 47.563 akseptor KB aktif pemerintah dan 13.204 akseptor KB aktif swasta.

Adapun Pasangan Usia Subur dari keluarga Pra Sejahtera sebesar 16.230 (18,58% dari total PUS) dan yang menjadi peserta KB adalah sebanyak 10.913 akseptor (jalur pemerintah : 10.084 pasangan dan jalur swasta : 829 pasangan), sedangkan untuk Pasangan Usia Subur keluarga Sejahtera I sebesar 20.821 (23,84% dari total PUS) dan yang ber-KB adalah sebanyak 14.031 akseptor (jalur pemerintah : 13.048 pasangan dan jalur swasta sebesar 983 pasangan),



sehingga total PUS keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I berjumlah 37.051 pasangan dan yang ber-KB adalah sebesar 24.944 akseptor (67,32%).

Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah PUS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga pelayanan terhadap akseptor KB dapat lebih ditingkatkan baik pendekatan terhadap akseptor baru ataupun pembinaan bagi akseptor KB yang sudah ada untuk dapat di pertahankan, hal ini terbukti dari pembinaan akseptor KB aktif Kabupaten Sumbawa meraih **juara I Tingkat Provinsi** untuk kategori **lomba keluarga harmonis** yang berasal dari Kecamatan Alas. Disamping itu ketersediaan tenaga pendamping yang terlatih mutlak diperlukan, saat ini jumlah tenaga Penyuluh KB (PKB) masih sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah desa binaan saat ini 1 orang PKB membina 4 – 5 desa sedangkan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah desa / wilayah binaannya dengan jumlah PKB idealnya 1 pkb membina 1 – 2 desa. Pengadaan sarana kerja dan rehabilitasi / pembangunan gedung / ruang UPTB KB ditingkat kecamatan juga diperlukan untuk menunjang program kerja PKB.

Selain itu dalam upaya peningkatan pengetahuan remaja tentang alat reproduksinya dan menekan jumlah angka usia perkawinan muda, dilakukan melalui kegiatan pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR telah membentuk 34 kelompok yang tersebar di 21 kecamatan dengan kualifikasi tumbuh sebanyak 24 kelompok, tegak sebanyak 7 kelompok dan tegar sebanyak 3 kelompok.

Adapun kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Sumbawa cukup berhasil, dan sampai saat ini terdapat 101 kelompok BKB yang tersebar di 24 kecamatan dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 6.661 keluarga, dengan berstatus PUS 6.372 pasang dan berhasil diajak ber-KB sejumlah 5.063 pasang (80%). Pembinaan BKB di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 ini berhasil menuai prestasi di tingkat provinsi sebagai juara I lomba KB Lestari Teladan (15 tahun) dari kelompok BKB TIU Penang desa Berora Kecamatan Lape dan Lomba Kader BKB yang juga berhasil meraih juara I tingkat Provinsi yang berasal dari Kecamatan Lape.

Dalam upaya peningkatan kualitas keluarga melalui wadah pembinaan kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL dan BLK) telah melaksanakan



kegiatan dengan hasil:

- Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) = 101 kelompok = 6.661 keluarga
- Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) = 46 kelompok = 3.607 keluarga
- Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) = 46 kelompok = 2.294 keluarga
- Kelompok Bina Lingkungan Keluarga (BLK) = 27 kelompok = 994 keluarga

Yang tak kalah penting dari urusan ini adalah upaya pengendalian kelahiran yang merupakan bagian dari pengendalian pertumbuhan penduduk ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain mengharapkan peran serta masyarakat secara sukarela dalam mensukseskan program keluarga berencana, pemerintah juga memiliki kewajiban dalam membuka kesadaran masyarakat agar mau berpartisipasi aktif dalam mengikuti program keluarga berencana, karena peserta KB tidak hanya ditujukan untuk kaum wanita saja namun kaum pria juga merupakan objek yang perlu mendapat perhatian untuk digarap, peserta KB baru pria sampai dengan akhir tahun 2011 sejumlah 2.687 akseptor atau sekitar 15% dari PPM peserta KB baru (17.756) atau sebesar 9,88 % dari total peserta KB baru yang mencapai 27.198, apabila dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur yang total mencapai 88.000 pasangan, maka peserta KB pria sebesar 3,05%, sedangkan untuk peserta KB aktif pria sampai akhir desember 2011 terlayani 1.750 akseptor atau sebesar 1,90% dengan target indikator kinerja sebesar 1,75%, berarti sudah melebihi target sasaran sebesar 0,15%. Sedangkan untuk peserta KB pria dari keluarga miskin (pra sejahtera dan sejahtera I) terdapat 2.530 akseptor baru atau sebesar 6,51% dari PUS total. Untuk peserta KB aktif pria sampai akhir tahun 2011 berjumlah 877 akseptor atau sebesar 2,25% dari PUS.

Sedangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal, maka dari jumlah keluarga miskin yang sebesar 49.349 KK atau 42,59 % dari jumlah keluarga perlu di lakukan pendekatan – pendekatan tertentu untuk menaikkan status ekonomi mereka, maka melalui kelompok UPPKS diharapkan mampu menaikkan taraf ekonominya. Sampai dengan akhir tahun 2011 baru terdapat 104 kelompok UPPKS dengan jumlah anggota 808 keluarga berstatus PUS dan 650 keluarga berstatus PUS ber-KB. Cakupan PUS peserta KB anggota kelompok UPPKS sebesar 80%, berarti melewati target sebesar 79,78%. Adapun besaran modal yang diberikan adalah sebesar Rp.



5.000.000,-perkelompok dengan jumlah kelompok sebanyak 27 kelompok, sehingga diharapkan kelompok tersebut dapat bersaing dengan menampilkan produk-produk unggulan agar stimulan dana yang diberikan tersebut dapat berhasil guna.

4.1.2.16. Urusan Wajib Perhubungan

Berdasarkan penetapan urusan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana *urusan perhubungan* dan *urusan komunikasi dan informatika* tahun 2011 secara kumulatif, kinerja kegiatan yang dilaksanakan mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **94,17 %**.

Penyelenggaraan urusan wajib perhubungan pada tahun 2011 yang dilaksanakan secara umum dapat digambarkan menurut sasaran dan kebijakan yang telah dicapai sebagai berikut.

Dalam rangka meningkatkan daya dukung perhubungan melalui peningkatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, pada tahun 2011 dilaksanakan kegiatan pembangunan sarana perhubungan darat dengan mengadakan angkutan perintis 3 unit untuk Kecamatan Plampang, Kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Moyo Utara. Sedangkan untuk menunjang perhubungan laut pada tahun 2011 dilaksanakan pembangunan pos pelayanan Muara Kali, hal ini diharapkan agar lebih memaksimalkan pelayanan terhadap pos pelayan kepelabuhan yang sudah ada, disamping itu telah ditetapkannya Pelabuhan Badas sebagai pelabuhan Nasional, sehingga pelayanan perhubungan laut dapat terus ditingkatkan.

Peningkatan layanan angkutan yang telah dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi ketersediaan kendaraan yang layak jalan untuk menjamin keselamatan penumpang yang menjadi pengguna angkutan, pengujian telah dilakukan terhadap 2.417 unit kendaraan dan mengadakan peralatan pengujian kendaraan bermotor. Demikian juga dengan peningkatan layanan terhadap transportasi dokar telah dilakukan pengujian sebanyak 1.540 unit dengan diberikan SIM kepada 1.000 orang sais dokar. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya bagi pengguna jalan



sehingga dituntut disiplin dalam pengoperasian angkutan umum di jalan raya. Adapun penertiban angkutan umum di jalan raya dilakukan sebanyak 6 kali.

Kegiatan di terminal harus ditunjang dengan keamanan dan kenyamanan bagi calon penumpang yang akan menggunakan jasa kendaraan umum di terminal dengan pelaksanaan di 7 terminal yang ada dan menyediakan peralatan kebersihan di lingkungan terminal.

Perizinan dibidang perhubungan juga diperlukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan dengan cara memberikan ijin operasi dan ijin trayek kendaraan umum kepada 832 kendaraan dari target 1.180 kendaraan. Berdasarkan penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 mendapatkan penghargaan **Wahana Tata Nugraha**, yakni sebagai salah satu kota tertib lalu lintas dari Menteri Perhubungan RI.

4.1.2.17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Urusan wajib komunikasi dan informatika yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan informasi antar dinas dengan *e-goverment* dipandang sangat penting untuk efisiensi di dalam penggunaan sumberdaya, kecepatan waktu dan akurasi dalam proses tukar menukar informasi di lingkungan instansi. Pengembangan infrastruktur jaringan memiliki output terpeliharanya dan tersedianya komunikasi LAN/WAN di SKPD sehingga mudah dalam mengakses informasi. Untuk menghindari penggunaan Software yang ilegal dipenuhi melalui sosialisasi dan bintek open source software, yang muaranya akan menjamin ketersediaan software yang legal.

Sampai dengan saat ini Kabupaten Sumbawa telah memiliki website yaitu *sumbawa.go.id*, yang pengoperasiannya terus disupport baik kebutuhan data maupun tenaga teknisnya. Dengan website ini telah mampu memberi informasi tentang Kabupaten Sumbawa yang dapat diakses secara luas. Hingga tahun 2011 belum semua SKPD mengimplimentasikan jaringan ini, namun sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010. Demikian pula dengan upaya fasilitasi peningkatan akses informasi sebagai wujud peran pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat, dilaksanakan optimalisasi peran operasi Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (RPD). Jangkauan siaran RPD sudah hampir menjangkau semua kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Selain RPD, radio-radio swasta yang dikelola oleh masyarakat sudah semakin



marak perkembangannya di Kabupaten Sumbawa. Kontribusi media ini berdampak luas pada penyebarluasan informasi untuk masyarakat. Peningkatan siaran RPD juga dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama RPD dengan RRI yang menghasilkan informasi Kabupaten Sumbawa yang tersebar baik di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melaksanakan penyebaran informasi melalui media cetak lokal, regional dan nasional, serta memfasilitasi media lokal untuk berperan aktif dalam membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Guna mendukung penyebaran akses informasi serta pelayanan kehumasan, di Kabupaten Sumbawa hingga tahun 2011 telah tersedia media sebagai berikut.

Tabel 4.19
Media Informasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

INDIKATOR KINERJA	JUMLAH
Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui media cetak :	
Media Lokal	4
Media Regional	2
Media Nasional	2
Media Elektronik	sumbawakab.go.id dprd-sumbawakab.go.id lpse.sumbawakab.go.id distan.sumbawakab.go.id bappeda.sumbawakab.go.id

Sumber Data : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Sumbawa.

Dukungan masyarakat dalam pembangunan sangat membantu suksesnya pelaksanaan pembangunan, oleh karenanya kebijakan pemerintah perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Pelaksanaan even pameran sangat membantu penyampaian informasi pembangunan daerah. Selain even pameran pembangunan pengembangan implementasi teknologi internet sangat membantu dalam penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah untuk menunjang hal tersebut perlu di lakukan Updating content dan pemeliharaan situs web site sumbawakab go. Id dan dprd go. Id, pembinaan dan pendampingan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) serta koordinasi program Kampung Media Digital.



4.1.2.18. Urusan Wajib Pertanahan

Urusan wajib pertanahan sepanjang tahun 2011 ditujukan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena selama ini masalah pertanahan terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang ada. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sosialisasi yang intensif sebagai upaya peningkatan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga masalah pertanahan yang timbul dapat teratasi.

Untuk ketertiban administrasi tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, maka pada tahun 2011 dilakukan dokumentasi database tanah agar semua tanah yang dimiliki dapat terdata secara utuh dan lengkap. Adapun upaya inventarisasi yang menjadi aset pemerintah daerah sejumlah 1.170 objek tanah (10.252.678 m²) dan tanah yang telah disertifikasi pada tahun 2011 berjumlah 37 objek tanah (158.397 m²), sedangkan pada tahun 2010 sejumlah 11 objek tanah (51.867 m²), sehingga terjadi peningkatan sebesar 26 objek tanah yang telah disertifikasi. Sampai dengan saat ini, secara keseluruhan objek tanah yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah disertifikasi berjumlah 314 objek tanah (2.616.091 m²), dan yang telah diajukan untuk proses sertifikasi sejumlah 117 objek tanah (1.093.591 m²). Selain itu, telah dilakukan pengukuran terhadap objek tanah sejumlah 71 buah (167.228 m²) dan pada tahun 2011 telah dilakukan pengamanan terhadap 10 objek tanah (348.573 m²) yang belum termanfaatkan (masih kosong) dengan memasang informasi kepemilikan, sebagai langkah antisipasi terjadinya penyalahgunaan lahan. Sedangkan tanah-tanah yang belum tersentuh penanganannya akan terus diupayakan proses hukumnya lebih lanjut.

4.1.2.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Secara kumulatif rata-rata tingkat pencapaian indikator output *urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri* tahun anggaran 2011 mencapai skala ordinal 80%-100%, sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **95,99 %** dari pagu total anggaran belanja pada tahun 2011, baik dari sisi belanja langsung maupun dari sisi belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri



yang dilaksanakan pada tahun 2011 diarahkan di antaranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kriminalitas dan gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari gangguan keamanan memegang peranan penting untuk stabilisasi daerah. Kabupaten Sumbawa relatif terkendali dalam hal situasi keamanan. Hal ini dapat dilihat dari intensitas dan kualitas kejahatan yang tidak begitu menonjol. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan bagian dari Pemerintah sebagai mempunyai fungsi stabilisasi, dalam operasionalisasi pemerintahan melaksanakan beberapa kegiatan yang diharapkan berimplikasi pada partisipasi masyarakat yaitu peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social di kalangan masyarakat, penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba, penyuluhan pencegahan praktek perjudian. Untuk menggugah kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam penanggulangan kriminalitas dan gangguan di lingkungan masing – masing, diselenggarakan kegiatan yang dilaksanakan di 2 Kecamatan, sehingga dihasilkan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan yang siap mengantisipasi kemungkinan bahaya yang akan terjadi.

Keragaman umat beragama di Kabupaten Sumbawa membawa berbagai macam konsekuensi baik positif maupun negatif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang negatif perlu ditingkatkan sikap toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat, selain itu pemerintah juga melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keagamaan. Selain keragaman umat beragama di lingkungan masyarakat juga terjadi keragaman sosial, hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat sehingga dapat terwujud percepatan proses asimilasi di kalangan masyarakat.

Demikian pula, wahana keamanan dan kenyamanan lingkungan akan menciptakan rasa aman dalam masyarakat yang pada akhirnya meumbuhkan kesadaran individu tentang pentingnya turut serta dalam pengamanan lingkungan. Dalam rangka ini Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat melakukan kegiatan: a) *Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba*, kegiatan ini berupa penyuluhan pencegahan



peredaran dan penggunaan miras dan narkoba kepada 90 orang; *b) Penyuluhan pencegahan praktek perjudian*, tujuan kegiatan ini adalah untuk menghindari meluasnya praktek perjudian dimasyarakat maka dilaksanakan penyuluhan pencegahan praktek perjudian; *c) Koordinasi intelijen daerah (kominda)*, dengan menyelenggarakan pemberdayaan kominda kepada 84 orang.

Guna meningkatnya kesadaran politik masyarakat, yang ditandai oleh peningkatan kesadaran politik masyarakat diharapkan akan mampu menciptakan suasana politik yang kondusif di kalangan masyarakat. Adapun pencapaian indikator ditempuh melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, dengan fokus kegiatan adalah memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam partai politik atau memberikan pembinaan kepada partai politik;
2. Koordinasi forum-forum diskusi politik, dengan fokus kegiatan adalah membentuk forum – forum yang bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang Undang – Undang bidang politik terutama menjelang pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden;
3. Rapat koordinasi pembina wilayah;
4. Verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol

Fungsi lain yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 terkait dengan penanggulangan bencana alam yang tak dapat diprediksi, sehingga dibutuhkan kesigapan dan antisipasi dini terhadap bencana alam untuk meminimalisir kerusakan yang akan terjadi dan jatuhnya korban jiwa. Untuk itu pemerintah daerah melakukan upaya-upaya melalui kegiatan:

1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam yang dilaksanakan di desa rawan bencana, sehingga terwujudnya pemahaman masyarakat desa tentang kewaspadaan dini bencana alam;
2. Pengadaan logistik dan obat - obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara;
3. Kewaspadaan dan antisipasi dini bencana, dengan melatih 400 orang relawan.



b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Secara kumulatif, pelaksanaan kegiatan pada *urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri* yang dilaksanakan melalui Satpol PP Kabupaten Sumbawa tahun 2011, tingkat capaian kinerja kegiatan mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **97,14%**.

Peran Satpol PP dalam penyelenggaraan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri semakin menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2011 dilaksanakan upaya peningkatan kapasitas Satpol Pamong Praja sebagai institusi pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah. Hal ini dipandang penting mengingat intensitas pengamanan dan penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP sebagai upaya menjamin tegaknya peraturan daerah dalam implementasinya. Langkah-langkah antisipatif yang dilaksanakan untuk penegakan Perda, Keputusan Bupati dan aturan lainnya adalah; konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, operasi gabungan terpadu, pelatihan dan pembinaan, serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Tahun 2011 telah dilaksanakan operasi gabungan bersama stakeholder kepolisian Sumbawa serta polisi hutan dalam pengamanan hasil hutan. Selain itu dilaksanakan pembinaan fisik mental Pol PP dengan melibatkan Kepolisian Sumbawa dan Kodim Sumbawa. Adapun kasus ternak (membawa ternak tanpa surat ijin yang sah) sebanyak 6 kasus dan sudah tertangani sampai pada tingkat persidangan. Sedangkan penertiban lainnya meliputi Tertib Susila (dari 21 kasus terdapat 42 tersangka) dan terjaring PSK sebanyak 10 tersangka. Demikian pula dengan Kartu Tanda Penduduk berhasil ditertibkan sebanyak 19 kasus pelanggaran. Untuk kasus kepemilikan miras illegal berdasarkan hasil penertiban, telah diproses dengan denda dipersidangan mencapai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Adapun penertiban kafe-kafe yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa merupakan bagian dari pelaksanaan pencapaian sasaran ini. Kasus-kasus lainnya telah dapat diselesaikan sebelum sampai pada tahap persidangan.

Peraturan Daerah yang belum tertangani secara Pro Justitia dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perda no. 5 Tahun 1983 tentang Asusila perlu dilakukan revisi;



2. Perda no. 9 Tahun 2022 tentang Pertambahan Umum tidak berlaku lagi, karena adanya perubahan Undang-undang yang mendasarinya;
3. Perda no. 5 Tahun 1999 tentang Ijin Gangguan (HO), perlu disesuaikan berdasarkan PP no. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah;
4. Perda no. 32 Tahun 2010 tentang Kependudukan, perlu dilakukan sosialisasi Implementasi terlebih dahulu sebelum dilakukan proses hukum bagi pelajar;
5. Perlu pengaturan khusus tentang menara/Tower Telekomunikasi dengan asumsi :
 - a). Pola/jaminan asuransi masyarakat yang berada dalam radius ketinggian.
 - b). Kewajiban perijinan Legal/Ilegal.
 - c). Tentang ketentuan pidana untuk eksekusi.

Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri disajikan pada lampiran.

4.1.2.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;

a. Sekretariat Daerah

Berdasarkan penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka secara rata-rata tingkat pencapaian target kinerja berada pada skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **89,62%** dari total belanja yang dianggarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, yang pelaksanaannya dilakukan melalui program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuntut lahir dan terlaksananya proses



pemerintahan yang efektif, diantaranya melalui penataan perundang-undangan untuk meningkatnya kelengkapan perangkat aturan baik berupa peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah sebagai acuan pelaksanaan urusan pemerintah daerah, maka pada tahun 2011, dalam rangka penataan perundang-undangan, yang diarahkan untuk meningkatkannya kelengkapan perangkat aturan baik berupa peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah sebagai acuan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang berproses sejak dari penyusunan sampai publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk efektivitas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan disahkannya peraturan daerah; fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan; publikasi peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk tertatanya dokumentasi dan informasi produk hukum pusat dan provinsi serta tersebar luasnya peraturan perundang-undangan; serta kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antarperaturan perundang-undangan daerah. Dalam rangka itu, pada tahun 2011 telah diterbitkan sebanyak **48 (empat puluh delapan)** Peraturan Kepala Daerah.

Demikian pula dengan peraturan daerah, pada tahun 2011 juga telah dibentuk beberapa Peraturan Daerah terkait dengan APBD, serta Rancangan Peraturan Daerah yang hingga berakhirnya tahun anggaran 2011 belum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Terkait Peraturan Daerah telah dibentuk sebanyak **11 (Sebelas)** buah PERDA menyangkut antara lain :

1. Perda No. 1 Tahun 2011, tanggal 26 Januari 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Perda No. 2 Tahun 2011, tanggal 22 Agustus 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Perubahan atas Perda Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, No. 3 Tahun 2011, tanggal 5 Nopember 2011.



4. Perda No. 4 Tahun 2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
5. Perubahan Atas Perda Kabupaten Sumbawa No. 2 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa No. 5 Tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011.
6. Perubahan Atas Perda Kabupaten Sumbawa No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa No. 6 Tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011.
7. Perubahan kedua atas Perda Kabupaten Sumbawa No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa No. 7 Tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011.
8. Perubahan Atas Perda Kabupaten Sumbawa No. 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa No. 8 Tahun 2011,, tanggal 31 Desember 2011.
9. Perda No. 9 Tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Izin Pertambangan Rakyat.
10. Perda No. 10 Tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak.
11. Perda No. 11 Tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan juga dilaksanakan pemberian bantuan hukum penyelesaian kasus-kasus sengketa yang melibatkan pemerintah daerah, dari target sebanyak 2 kasus maka dapat diselesaikan 1 kasus PTUN dan 1 kasus perdata. Adapun kasus yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2 kasus perdata dan 1 kasus PTUN; penyuluhan hukum terpadu yang hanya terlaksana di 20 kecamatan dari 24 kecamatan yang direncanakan, kecamatan yang belum dijangkau adalah kecamatan Lunyuk, Orong Telu, Lantung dan Ropang karena kendala lokasi yang jauh dan medan yang sulit dijangkau. Penyuluhan hukum terpadu dimaksudkan



untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban; serta desiminasi bahan informasi dan peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah tentang HAM, yang diharapkan adanya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum dan aparat pemerintah akan pentingnya HAM.

Untuk terlaksananya urusan pemerintah daerah ditempuh melalui program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui kegiatan pengkajian peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan yang dimaksudkan agar tersedianya informasi dan profil tentang kelembagaan organisasi perangkat daerah; evaluasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja kelembagaan SKPD, yaitu dilakukannya evaluasi terhadap tupoksi dan tata kerja kelembagaan sehingga dapat di ketahui kelemahan dari masing-masing SKPD untuk perbaikan kedepan; dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang lembaga lain. Terkait dengan penatalaksanaan organisasi perangkat daerah yang pada tahun 2010 telah dilakukan dengan dikeluarkannya paket regulasi organisasi pemerintah daerah sebagai manifestasi dari Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi pemerintah daerah, melakukan pengkajian SOP terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD, pada tahun 2011 juga dilakukan kegiatan evaluasi tugas pokok, fungsi dan tata kerja kelembagaan SKPD, serta penyusunan Rancangan Perda organisasi perangkat daerah dan penyusunan profil kelembagaan OPD. Selain itu, juga dilaksanakan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di RSUD dan beberapa Puskesmas untuk mengetahui kepuasan publik terhadap kinerja OPD, melakukan inventarisasi permasalahan aktual bidang PAN di daerah sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan Bidang PAN; serta menyamakan persepsi, pola pikir dan pola tindak pelaksanaan program PAN nasional, terutama di daerah. Sosialisasi program dan kebijakan bidang PAN, yang diharapkan menjadi wadah inovatif dalam mendorong kualitas pelayanan publik dengan kebijakan pendayagunaan aparatur negara yang dituangkan dalam dalam Rencana Strategis Daerah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah beserta jajarannya melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka Reformasi Birokrasi. Terkait dengan pelaksanaan tupoksi SKPD, pada tahun 2011 analisis beban kerja pada 2 Dinas (PU dan Kesehatan) dan 6 UPTD



lingkup Dinas (Pendidikan Nasional, Pertanian Tanaman Pangan, Kelautan dan Perikanan, Kominfo, Peternakan, Koperindag).

Sesuai dengan fungsi manajemen pemerintahan, maka kebijakan pembangunan yang sebelumnya telah disepakati secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sumbawa sebagaimana dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan mengenai Kebijakan Umum, maka fungsi pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud tetap dipandang penting. Untuk itu, pada tahun 2011 dilaksanakan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pembangunan dengan melakukan pemantauan terhadap capaian program/kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh SKPD. Prinsip pengendalian ini, adalah bahwa pelaksanaan Kegiatan di SKPD baik fisik maupun non fisik harus sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun dalam Penetapan Kinerja Tahun 2011. Hasil pemantauan dan pengendalian dapat dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun - tahun berikutnya.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan kebijakan pelayanan kesejahteraan rakyat, pemahaman agama dan kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dimana pada tahun 2011 secara berkala dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan sarana ibadah umat Islam 623 buah (477 masjid dan 146 mushollah), gereja 5 buah, pura 35 buah, vihara 2 buah. Sedangkan organisasi keagamaan umat beragama sebagai pilar penting konstruksi kerukunan umat beragama, secara kuantitatif terdapat 46 organisasi yang terdiri dari organisasi Muhammadiyah sebanyak 17 buah, NU sebanyak 15 buah, NW sebanyak 15 buah dan Al Irsyad sebanyak 2 buah.

Demikian pula dengan upaya untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan, maka prasarana aparatur dan pelayanan pemerintahan di kecamatan tetap menjadi perhatian. Pada tahun 2011, dilaksanakan pembangunan Rumah Dinas Camat Orong Telu, Ropang dan Lantung, pembangunan konstruksi pagar/tembok kantor Camat Rhee dan Tarano, serta rehabilitasi sedang kantor Kelurahan Brang Bara.

Dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas lembaga keuangan, kebijakan harga serta kebijakan



lainnya terkait dengan perekonomian daerah, maka dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan ekonomi daerah melalui perumusan kebijakan. Pada tahun 2011, kebijakan ekonomi daerah meliputi arahan untuk panduan pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam hal kebijakan anggaran untuk mendorong stimulus ekonomi daerah. Berhubungan dengan sasaran ini ketercapaian sasaran diterapkan dengan penyusunan harga satuan upah dan bahan pekerjaan, koordinasi pelaksanaan pembangunan, Koordinasi sektor pengembangan perekonomian daerah serta pembinaan dan pengembangan BUMD yang diarahkan untuk 1 BUMD.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, telah dilakukan pelayanan fasilitasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan kehumasan, yang ditujukan dalam rangka berfungsinya arus komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjaminnya responsibiliti antara kebijakan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Instrumen yang digunakan untuk menjaga *gap* ini adalah dilakukan melalui implementasi kegiatan-kegiatan: (i) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat; (ii) Rubrik "masyarakat bertanya pemerintah menjawab (MBPM)"; (iv) peliputan dan pemberitaan; (v) Penerbitan khusus pemerintah daerah; (vi) Kerjasama publikasi dengan media massa; (vii) Iklan layanan masyarakat dan interaktif melalui media elektronik; (viii) Pemberitaan dan penyebaran informasi.

Secara lebih rinci target dan realisasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah, dan pemerintahan umum yang dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.

b. Sekretariat DPRD

Berdasarkan penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 dalam menjalankan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, secara rata-rata tingkat pencapaian kegiatan mencapai skala ordinal 80%-100%, sehingga relatif keseluruhan kegiatan yang direncanakan mencapai target yang ditetapkan sebagai indikator kinerja output. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana)



realisasinya mencapai **89,75%** dari total belanja yang dianggarkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Tingginya dinamika aktifitas DPRD dalam mengimplementasikan Tri Fungsi DPRD baik dalam kegiatan persidangan DPRD, konsultasi dan kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya, diperlukan sistem pendampingan sekretariat DPRD yang berkualitas, yakni mampu memfasilitasi secara administratif dan operasional seluruh rangkaian kegiatan DPRD. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pelayanan tersebut di antaranya adalah pelayanan dalam kegiatan rapat pembahasan Perda APBD 210 kali. Melakukan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama sebanyak 6 kali, rapat - rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 273 kali, pelaksanaan Rapat - rapat paripurna sebanyak 129 kali, serta reses sebanyak 2 kali dalam tahun 2011.

c. Inspektorat

Pada penetapan kinerja SKPD tahun 2011, sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, secara simultan, tingkat capaian kegiatan rata-rata mencapai skala ordinal 80%-100%. Pada sisi realisasi anggaran, tingkat keterserapannya hingga akhir tahun 2011 mencapai **96,16%** dari total anggaran belanja yang ditargetkan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Beberapa langkah yang telah ditempuh dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya adalah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dilaksanakan untuk mewujudkan pengawasan yang lebih komprehensif pada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Sumbawa, pelaksanaan pengawasan internal secara berkala merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan diantaranya pemeriksaan reguler yang dilaksanakan setiap sebulan sekali pada SKPD, inspeksi mendadak yang dilaksanakan menjelang libur bersama.

Selain melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara



reguler di semua SKPD di Kabupaten Sumbawa juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat, salah satunya menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, walaupun dalam pelaksanaan dilapangan banyak ditemui kendala namun sampai dengan akhir tahun 2011 Inspektorat Kabupaten Sumbawa telah menyelesaikan 71 kasus pengaduan dari 111 kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, sementara 34 kasus telah dikonfirmasi ke SKPD dan diupayakan secara damai/kekeluargaan, sedangkan 6 kasus lainnya ditunda untuk diperiksa pada bulan Januari 2012.

Hasil dari kegiatan pemeriksaan dan pengaduan di tindaklanjuti dengan inventaris hasil temuan dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, untuk mengurangi tumpang tindih pengawasan maka dilakukan rapat koordinasi pengawasan dan rapat PKPT TK regional II Jakarta, Denpasar dan Mataram.

Selain itu untuk mendukung ketercapaian sasaran pengawasan dan pengendalian kebijakan ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan evaluasi kebijakan, pendataan ketersediaan objek IPPT, koordinasi evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemerintahan, fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Untuk menjamin berjalannya sistem pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan maka dibutuhkan pengawasan yang intensif, meliputi: (a) Masalah Struktur yaitu kelembagaan pengawasan, hubungan antar lembaga pengawasan pada saat ini, apakah telah sesuai dengan perubahan lingkungan strategik terutama adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, keuangan negara dan otonomi daerah; (b) Masalah Substansi, yaitu masalah integritas, independensi, profesionalisme, koordinasi pengawasan, standar, sumber daya manusia dan akuntabilitas serta transparansi pengawasan; (c) Masalah Kultur, masalah kode etik, penghargaan atas prestasi pengawasan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan pengawasan. Secara rinci mengenai target dan realisasinya disajikan pada lampiran.



d. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 rata-rata mencapai kisaran 90%-100%, dengan realisasi anggaran sebesar **88,02%** dari total belanja langsung dan tak langsung. Sebagai gambaran kondisi PNS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 adalah sebagai berikut .

Tabel 4.20
PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Rincian Golongan (2011)

NO	GOLONGAN	JUMLAH PNS	%
1.	I	135	1,61
2.	II	2.729	32,52
3.	III	3.581	42,67
4.	IV	1.948	23,21
Jumlah		8.393	100.00

Sumber : BKPP Kab. Sumbawa.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.21
PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Pendidikan (2011)

No.	Pendidikan	Jumlah PNS	%
1.	SD / Sederajat	87	1,04
2.	SMP / Sederajat	235	2,80
3.	SMA / Sederajat	2.732	32,55
4.	D – 1	182	2,17
5.	D – II	1.451	17,29
6.	D – III	867	10,33
7.	D - IV / S-1	2.746	32,72
8.	S – 2	92	1,10
9.	S – 3	1	0,01
Jumlah		8.393	100

Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa.

Sesuai dengan fungsinya, dalam penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah dan pemerintahan umum yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas



penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur serta peningkatan kapasitas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, pada tahun 2011 Peningkatan keterampilan dan profesionalisme yang terkait dengan program kedinasan diarahkan pada pelaksanaan ujian dinas yang diikuti oleh 24 orang dan ujian penyesuaian ijazah PNS yang merupakan salah satu syarat kenaikan pangkat dan pindah golongan yang diikuti oleh 95 orang sehingga total 119 orang.

Peningkatan pengetahuan dan moralitas aparatur pemerintah daerah dalam mengemban tugas sehari – hari dipenuhi melalui diklat teknis jabatan fungsional bagi sekretaris desa yang diikuti oleh 61 orang sekretaris desa dan diklat prajabatan bagi CPNS daerah yang diikuti oleh CPNS daerah golongan III sebanyak 285 orang, golongan II sebanyak 282 orang dan golongan I sebanyak 9 orang sehingga total 546 orang.

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan melalui pendidikan kedinasan serta diklat fungsional juga dilaksanakan melalui pemberian izin dan pengiriman PNS untuk mengikuti tugas belajar yang bermuara kepada peningkatan intensitas pembinaan dan inovasi bagi pengembangan aparatur.

Menyangkut pelayanan aparatur, seperti penerimaan/pengangkatan CPNSD, penempatan, mutasi kenaikan pangkat, serta pengurusan Karsu/Karis, Karpeg, Taspen, Taperum, Satyalencana Karya Satya yang dilaksanakan pada tahun 2011 dapat disampaikan sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan kegiatan usul pensiun PNS, pada tahun 2011 terealisasi sebanyak 195 orang, yakni 152 orang pensiun penuh, 29 orang pensiun janda/duda dan 14 orang pensiun permintaan sendiri.
- 2) Penempatan PNS dengan mengacu pada pola karier dalam rangka pengisian jabatan structural dari 950 jabatan struktural pada tahun 2011 telah terisi sebanyak 820 jabatan.
- 3) Usulan mutasi kenaikan pangkat tahun 2011 terealisasi sebanyak 2.533 Kenaikan Pangkat PNS, sedangkan mutasi antar Kabupaten / Provinsi / Departemen terealisasi sebanyak 42 PNS (105%) dari target fisik kegiatan sebanyak 40 PNS;



- 4) Berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur, pada tahun 2011 ditangani adalah sebagai berikut.

Tabel 4.22
Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 2011

No.	Uraian Penanganan Kasus	Jumlah
1.	Kasus yang telah diselesaikan (terbit SK. Bupati)	52
2.	Kasus yang sedang dalam proses penyelesaian	17
3.	Kasus yang masih dalam proses pembinaan	21
Jumlah		90

Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa

- 5) Realisasi Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu, Satya Lencana, Taspem dan Taperum Pensiun, sebagaimana table berikut.

Tabel 4.23
Pengurusan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Tanda – tanda Jasa lainnya, Tahun 2011

No.	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Kartu Pegawai (KARPEG)	420	346	82,38
2.	Kartu Istri (KARIS) Pegawai	302	254	84,11
3.	Kartu Suami (KARSU) Pegawai	210	220	104,76
4.	Satya Lencana (Tanda Jasa Pengabdian PNS)	67	65	97,01
5.	TASPEN	420	592	140,95
6.	TAPERUM PNS Pensiun	130	145	111,54
7.	Lain-lain	65	73	112,31
Jumlah		1.614	1.695	105,02

Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa

e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)

KPPT sebagai bagian dari SKPD pelaksana Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, berdasarkan penetapan kinerja yang menjadi dasar penilaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011, secara rata-rata tingkat pencapaiannya mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat realisasi anggaran sebagai deskripsi performance keterserapan anggaran mencapai **92,95%**.

Pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Sumbawa dimulai sejak dibentuknya KPPT dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008. Melalui Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 34 tahun 2008 tanggal 21 januari 2008, KPPT mengelola 97



jenis ijin, mencakup ijin pertanian, ijin perdagangan, ijin kehutanan, ijin usaha perikanan, ijin usaha sarana pariwisata, ijin usaha pertambangan umum, ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, ijin usaha peternakan dan pemotongan hewan, ijin pelayanan medic dasar, ijin pelayanan medic spesialis, ijin pelayanan medic penunjang, ijin bagi saran pengobatan tradisonal dan pengobatan tradisional. Berdasarkan data pada KPPT Kabupaten Sumbawa, sampai dengan akhir tahun 2011 telah terbit sebanyak 4.181 izin yang telah dilimpahkan secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.24
Pemberian Izin Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2011

No.	Jenis Izin	Jumlah Izin Yg Terbit	
		2010	2011
1.	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	8	4
2.	Izin Pertanian	15	17
3.	Izin Gangguan (HO/Izin Tempat Usaha)	90	106
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	315	215
5.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	246	306
6.	Izin Reklame	334	74
7.	Izin Penyimpanan / Penimbunan BBM	179	281
8.	Izin Perdagangan	1.051	2.704
9.	Izin Usaha Penyediaan Jasa Listrik (IUPJL)	2	3
10.	Izin Kehutanan	75	81
11.	Izin Usaha Perikanan	24	25
12.	Izin Usaha Sarana Pariwisata	42	61
13.	Izin Usaha Pertambangan Umum	33	184
14.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	8	6
15.	Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan	67	99
16.	Izin Pelayanan Medik Dasar	1	3
17.	Izin Pelayanan Medik Spesialis	1	0
18.	Izin Pelayanan Medik Penunjang	13	12
19.	Izin Bagi Saran Pengob. Tradisional & Pengob. Tradisional	1	0
Jumlah		2.505	4.181

Sumber Data : KPPT Kab. Sumbawa.

Pada tabel 4.24, tergambar bahwa izin tertinggi dikeluarkan pada tahun 2010 adalah Ijin Perdagangan sebanyak 1.051 izin, demikian pula pada tahun 2011 jumlah izin tertinggi adalah Izin Perdagangan sebanyak 2.704 (terdiri dari izin Usaha Perdagangan/SIUP sebanyak 1.514 izin, izin usaha industry sebanyak 46 izin dan izin Tanda Daftar Perusahaan sebanyak 1.144 izin).



Secara rinci mengenai target dan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2010 disajikan dalam lampiran.

f. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset

Capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan urusan Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa tahun 2011 sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, secara rata-rata mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **91,48%**. Sesuai dengan fungsinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka beberapa pelaksanaan program dan kegiatan melalui DPKA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan professional, telah dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
- Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan SP2D;
- Pengelolaan Administrasi dan Perkartuan Gaji PNS Daerah Otonom;
- Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penerbitan SPD;
- Penyaluran Dana Bantuan;
- Penyusunan Akuntansi Pendapatan Daerah;
- Penyusunan Akuntansi Belanja Daerah;



- Pengelolaan Administrasi Kegiatan TPTGR;
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Rencana Penerimaan Daerah;
- Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah;
- Pengendalian dan Evaluasi Penerimaan PBB dan PAD;
- Sosialisasi PBB dan PAD kepada Wajib Pajak;
- Perhitungan, Penerbitan dan Penyampaian SKPD;
- Pelayanan keberatan Atas Materi Pajak;
- Penagihan PAD dan PBB;
- Penyusunan Tahapan Penerimaan Daerah;
- Koordinasi Penyelesaian Dana Perimbangan;
- Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB;

Pada tahun 2011 dilaksanakan beberapa kegiatan mulai dari pendataan kembali potensi penerimaan, pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penyusunan rencana penerimaan, sosialisasi kepada wajib pajak/retribusi, perhitungan dan penyampaian SKPD, pelayanan keberatan atas materi ketetapan pajak, penagihan PAD dan PBB dan rekonsiliasi penerimaannya, koordinasi penyelesaian dana perimbangan. Mengenai hasil-hasil yang dicapai, secara khusus disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban APBD.

Menyangkut aset daerah, pada tahun 2011 juga dilaksanakan kegiatan pengadaan dan pembebasan tanah untuk keperluan pelayanan pemerintahan baik dalam bentuk pengadaan di lokasi baru maupun perluasan lokasi yang telah ada. Selain itu juga telah dilaksanakan pelelangan aset daerah serta pengadaan barang-barang modal seperti kendaraan dinas, dan lain-lain.

Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset, disajikan pada lampiran.

g. Kantor Kecamatan

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan tahun 2011 relatif seragam meliputi program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pengembangan sistem pelaporan, program penyusunan rencana kerja SKPD, program pelayanan



penyelenggaraan pemerintahan desa, program koordinasi pembangunan kecamatan, program pembangunan partisipatif kecamatan. Pelaksanaan kegiatan oleh kantor kecamatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan *urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian*. Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%.

Capaian kegiatan input dan output yang dilaksanakan pada tahun 2011 pada kantor kecamatan menurut rincian kecamatan di Kabupaten Sumbawa dijelaskan sebagai berikut.

(a) Kantor Kecamatan Alas Barat

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Alas Barat tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **92,79%**.

(b) Kantor Kecamatan Alas

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Alas tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **94,53%**.

(c) Kantor Kecamatan Buer

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Buer tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **93,63%**.

(d) Kantor Kecamatan Utan

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Utan tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan



tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **94,41%**.

(e) Kantor Kecamatan Rhee

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Rhee tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **93,71%**.

(f) Kantor Kecamatan Labuhan Badas

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Labuhan Badas tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,81%**.

(g) Kantor Kecamatan Sumbawa

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sumbawa tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **95,91%**.

(h) Kantor Kecamatan Unter Iwes

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Unter Iwes tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **95,17%**.

(i) Kantor Kecamatan Batulanteh

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Batulanteh tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,97%**.



(j) Kantor Kecamatan Moyo Utara

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Utara tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung,realisasinya mencapai **97,57%**.

(k) Kantor Kecamatan Moyo Hilir

Secara kumulatif tingkat pencapaiannya menurut indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Hilir tahun 2011 mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **94,12%**.

(l) Kantor Kecamatan Moyo Hulu

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Hulu tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **93,99%**.

(m) Kantor Kecamatan Lenangguar

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lenangguar tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **89,27%**.

(n) Kantor Kecamatan Ropang

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ropang tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **96,35%**.

(o) Kantor Kecamatan Lantung

Secara kumulatif tingkat pencapaiannya menurut indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor



Kecamatan Lantung tahun 2011 mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **96,40%**.

(p) Kantor Kecamatan Orong Telu

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Orong Telu tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai **97,94%**.

(q) Kantor Kecamatan Lunyuk

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lunyuk tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai **93,70%**.

(r) Kantor Kecamatan Lopok

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lopok tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai **97,50%**.

(s) Kantor Kecamatan Lape

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lape tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **90,81%**.

(t) Kantor Kecamatan Maronge

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Maronge tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,25%**.



(u) Kantor Kecamatan Plampang

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Plampang tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **93,42%**.

(v) Kantor Kecamatan Labangka

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Labangka tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **94,55%**.

(w) Kantor Kecamatan Empang

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Empang tahun 2011 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,12%**.

(x) Kantor Kecamatan Tarano

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tarano tahun 2011 menurut indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **98,98%**.

4.1.2.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa tahun 2011 rata-rata mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **90,91%** dari pagu total anggaran belanja baik dari sisi belanja langsung maupun dari sisi belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011, diarahkan pada beberapa sasaran di antaranya adalah pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam



perencanaan dan pembangunan desa. Menyadari bahwa keberdayaan masyarakat desa yang dihayatkan dalam pembangunan daerah ini bukan hanya sekedar agar masyarakat di desa dapat berpartisipasi dalam perencanaan saja, melainkan juga secara kelembagaan. Masalah aktual pembangunan dewasa ini tidak terlepas dari persoalan ekonomi baik nasional maupun daerah serta kapasitas aparatur pemerintahan desa. Dengan demikian, maka penanganan kelembagaan ekonomi dan pembinaan aparatur dipandang perlu untuk menjadi perhatian. Untuk hal tersebut, pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa kegiatan.

Dalam rangka terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa dan kecamatan secara partisipatif, maka pada awal tahun 2011 dilaksanakan Musrenbang desa dan musrenbang kecamatan. Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Maka pelaksanaan Musrenbang Tahun 2011 di Kabupaten Sumbawa telah diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan perencanaan seperti : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Top Down, dan Bottom Up. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Kabupaten. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mulai dari desa hingga kabupaten sepanjang tahun 2011 sudah dipandang cukup baik, ditandai dengan kelancaran pelaksanaan musrenbang pada 165 desa/kelurahan.

Keluaran yang dihasilkan dari hasil Musrenbang adalah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun berikutnya, Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh SKPD ataupun gabungan SKPD, Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten,



Berita acara Musrenbang tahunan Kecamatan. Prioritas Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2012 sebagai gambaran hasil musrenbang desa dan kecamatan adalah isu tentang penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian dan perdesaan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, pemantapan keamanan ketertiban masyarakat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah/kawasan yang terkena bencana.

Selain pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi PNPM melalui program kecamatan – PPK. Tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan program PNPM – PPK terdiri dari 49 tahapan diantaranya sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa, pembentukan kelembagaan pelaksanaan PNPM–PPK, pelatihan–pelatihan sampai dengan pelaksanaan kegiatan fisik prasarana dan sarana bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2011, penyelenggaraan PNPM – Mandiri Perdesaan dilaksanakan di 12 kecamatan. Adapun jumlah desa yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat sebanyak 174 desa yang tersebar di 12 Kecamatan. Total jumlah BLM sebesar Rp. 29,85 M (Sharing Pemda Rp. 5,97 M, Pemerintah Pusat sebesar Rp. 23,88 M) terdiri dari Kecamatan Alas Barat, Utan, Labuhan Badas, Lape, Lopok, Lunyuk, Plampang dan Labangka, masing-masing sebesar Rp. 3 M (Sharing Pemda Rp. 600 juta dana bantuan Pusat sebesar Rp. 2.400 juta) sedangkan Kecamatan Orong Telu, lantung dan Lenangguar masing-masing sebesar Rp. 1,75 M (Sharing Pemda Rp. 350 juta dana bantuan pusat sebesar Rp.1.400. M).

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin. Untuk menurunkan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah sebuah forum koordinasi yang pembentukannya didasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Tahun 2011 penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas baik dalam skala nasional



maupun global seperti yang disepakati dalam Milenium Development Goals (MDGs) maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Peanggulangan Kemiskinan (TKPK) Propinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya:

1. Fasilitasi dan koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan melalui P2KP Paket. Melaksanakan Kegiatan PNPM P2KP di Kabupaten Sumbawa. Program P2KP untuk Tahun Anggaran 2011, dilaksanakan di 2 Kecamatan meliputi Kecamatan Alas dan Kecamatan Sumbawa. Adapun jumlah desa yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat sebanyak 16 desa yang tersebar di 2 Kecamatan. Total jumlah BLM sebesar Rp. 2.225.000.000,- (Sharing Pemda Rp. 385.000.000,- Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.840.000.000,-) terdiri dari Kecamatan Alas sebesar Rp. 1.525.000.000,- (Sharing Pemda Rp. 305.000.000,- dana bantuan Pusat sebesar Rp. 1.220.000.000,-) sedangkan Kecamatan Sumbawa sebesar Rp. 700.000.000,- (Sharing Pemda Rp. 80.000.000,- dana bantuan pusat sebesar Rp.620.000.000,-). Pelaksanaan P2KP sampai saat ini telah mencairkan dana BLM sebesar masing-masing 20% dana APBD dan 80% dana Pusat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun berdasarkan Siklus P2KP sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4.1.2.22. Urusan Wajib Sosial

Pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui urusan Sosial Kabupaten Sumbawa tahun 2011 sebagai pelaksanaan *urusan sosial*, secara rata-rata mencapai skala ordinal 80%-100%, sedangkan tingkat keterserapan input (dana), mencapai **98,31%** dari total belanja yang dianggarkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan urusan sosial pada hakekatnya adalah pembangunan sumberdaya manusia dalam rangka menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan dinamis untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk



Kabupaten Sumbawa mempunyai tanggungjawab dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial, rentan dan miskin. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas ketrampilan berusaha bagi keluarga kurang mampu dan penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap 120 orang 2 desa, Fasilitas pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dilakukan di 2 desa, yaitu dusun Jamu desa Jamu Kecamatan Lunyuk sebanyak 141 jiwa dan dusun Brang Bako Desa Jotang Beru Kecamatan Empang sebanyak 90 jiwa. Pembinaan/pelatihan anak nakal, anak cacat dan terlantar sebanyak 402 orang, pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang terbina 67 orang dan 40 kelompok.

Adapun penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk rawan sosial (PMKS) di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2011 adalah :

Tabel 4.25
Jumlah PMKS dan yang sudah Tertangani di Kab. Sumbawa Tahun 2011

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah PMKS s.d Th. 2011	Yang Tertangani Th. 2011
1	Anak Balita Terlantar	Jiwa	278	8
2	Anak Terlantar	Jiwa	8.459	609
3	Anak Nakal	Jiwa	414	37
4	Anak Jalanan	Jiwa	44	5
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	-	-
6	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	40	40
7	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	4.384	20
8	Penyandang Cacat	Jiwa	1.839	308
9	Tuna Susila	Jiwa	113	20
10	Pengemis	Jiwa	-	-
11	Gelandangan	Jiwa	-	16
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	Jiwa	1.527	20
13	Korban Penyalahgunaan Napza	Jiwa	256	35
14	Keluarga Fakir Miskin	KK	43.079	2.070
15	Keluarga Yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni	KK	15.862	200
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	-	-
17	Komunitas Adat Terpencil	KK	-	77
18	Korban Bencana Alam	Jiwa	-	12.800
19	Korban Bencana Sosial	Jiwa	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Jiwa	168	20
21	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	-	-
	Keluarga Rentan	Jiwa	-	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Sumbawa.



4.1.2.23. Urusan Wajib Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk pemantapkan identitas bangsa dan daerah, serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ditujukan untuk memperkuat kepribadian, memperkokoh rasa persatuan, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memupuk nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sumbawa, dilaksanakan kegiatan pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah yaitu melaksanakan Pekan Budaya Samawa (PBS) ke XIV tahun 2011 dalam rangka pengembangan, peningkatan dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan benda purbakala untuk kepentingan generasi muda juga melaksanakan Musyawarah Lembaga Adat. Implementasi pembinaan diarahkan juga pada pembinaan sanggar seni, hingga saat ini tercatat 38 sanggar seni yang masih eksis. Beberapa event budaya seperti permainan rakyat (pacuan kuda dan barapan kebo) masih tetap terlaksana oleh masyarakat atas inisiasi organisasi sosial seperti PORDASI serta kelompok masyarakat lainnya. Demikian pula dengan even kegiatan seni budaya yang dilakukan secara rutin seperti festival ponan di Kecamatan Moyo Hilir, festival samawa malanti budaya di Kecamatan Plampang merupakan agenda tahunan yang semakin berkembang. Adapun keikutsertaan Kabupaten Sumbawa pada kegiatan seni budaya pada tahun 2011 diantaranya :

1. Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Sumbawa.
2. Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Provinsi NTB, dan berhasil keluar sebagai juara I Putra-Putri, sehingga Kabupaten Sumbawa berhak mewakili NTB ke Jakarta.
3. Festival Lombok Bagending, yang merupakan kerjasama budaya
4. Parade Gita Permata Nusantara Tingkat Nasional, dan keluar sebagai juara 3 untuk yel-yel Tim, serta Kabupaten Sumbawa tampil sebagai 10 penyaji terbaik nasional.

Untuk menunjang pelestarian kepurbakalaan telah dilaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya yang dilaksanakan secara komprehensif oleh UPTD Museum Daerah sebagai *leading sektor*, sasaran program ini yaitu



penguatan kelembagaan pengelolaan kekayaan budaya daerah untuk merumuskan dan menyusun kebijakan daerah terkait dengan kegiatan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, sejarah dan kepurbakalaan, kesenian dan kepariwisataan daerah, serta sosialisasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya lokal.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program ini di antaranya: fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno, pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pemeliharaan dan pengembangan terhadap 16 benda cagar budaya. Uraian lebih rinci dari target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib kebudayaan disajikan pada lampiran.

4.1.2.24. Urusan Wajib Statistik

Secara umum penyelenggaraan urusan wajib statistik yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan data, informasi dan statistik daerah. Data/informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2011, publikasi data/informasi adalah terdiri dari statistik dasar seperti Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Penyusunan PDRB, Profil daerah, Statistik Ekonomi, distribusi pendapatan dan data spasial daerah ditunjang dengan dikembangkannya Pusat informasi spasial kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini selaras dengan amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa data menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam perencanaan pembangunan.



4.1.2.25. Urusan Wajib Kearsipan

Kinerja urusan Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan SKPD yang melaksanakan *urusan perpustakaan dan urusan kearsipan* pada tahun 2011 mencapai skala ordinal 80%-100%, sedangkan tingkat realisasi input (dana) mencapai **96,82%** dari total anggaran belanja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah tahun 2011 yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Sebagai wujud penyelenggaraan urusan wajib kearsipan yang di antaranya diarahkan untuk pelayanan pengelolaan arsip in aktif dan arsip statis. Pada tahun 2011 telah diselamatkan/dilakukan pemeliharaan terhadap 7 dokumen arsip inaktif dan statis serta 200 buku pedoman arsip statis, serta penyuluhan/sosialisasi kearsipan di lingkungan pemerintah daerah.

Secara rinci target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan kearsipan disajikan pada lampiran.

4.1.2.26. Urusan Wajib Perpustakaan.

Urusan wajib perpustakaanpun diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan perpustakaan daerah ditempuh melalui peningkatan jumlah koleksi buku dan melakukan pembinaan kepada perpustakaan di kecamatan. Untuk mencapai sasaran ini, dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang rajin belajar, yang diimplementasikan melalui pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling, penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah, dengan menyediakan buku bacaan bagi pengunjung perpustakaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.26
Daftar Aset Pustaka di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

No	Jenis Arsip	Satuan	Jumlah
1	Arsip Foto Bersejarah	Buah	75
2	Karya Umum, Bibliografi	Eksp.	403
3	Filsafat, Etika Psikologi	Eksp.	385
4	Agama	Eksp.	1.632
5	Ilmu Sosial	Eksp.	2.237
6	Bahasa	Eksp.	531
7	Ilmu Murni	Eksp.	2.652
8	Teknologi dan Ilmu Terapan	Eksp.	2.215
9	Seni, Olah Raga dan Dekorasi	Eksp.	479



10	Sastra	Eksp.	1.068
11	Geografi, Sejarah dan Biografi	Eksp.	910
12	Buku Kimia	Eksp.	500
13	Buku Bahasa dan Sastra	Eksp.	767
14	Buku Matematika	Eksp.	600
15	Buku Fisika	Eksp.	500
16	Buku Keagamaan	Eksp.	800
17	Buku IPTEK	Eksp.	675
18	Buku Seni dan Budaya	Eksp.	500
19	Buku Cerita Rakyat Labaong Bukit Timbunan Tulang	Eksp.	350
20	Look A Head 2	Eksp.	50
21	Look A Head 1	Eksp.	50
22	Inked To The Word	Eksp.	75
23	Kamus Inggris Indonesia	Eksp.	5
24	Oxford Advanced Dictionary	Eksp.	3
25	Arsip Citra Bergerak/Audio Visual	Kotak	2
26	Album Arsip Foto	Buah	10

Sumber Data : Kantor Arpusda Kab. Sumbawa

Terkait dengan peningkatan minat baca masyarakat, yang diidentifikasi melalui peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan yang menunjukkan peningkatan baik kumulatif pengunjung maupun persen peningkatannya. Untuk mengimbangi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan maka ditingkatkan pelayanan dan menambah koleksi buku. Dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca masyarakat yang dimulai dari usia dini dengan menumbuhkan minat baca pada siswa-siswi untuk menunjang hal tersebut perpustakaan menyediakan koleksi untuk siswa-siswi dan mengadakan lomba membaca, menulis dan bercerita dan lomba baca puisi serta lomba pidato.

4.1.3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan pokok yang masih dan akan dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk masa mendatang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib, sebagai berikut.

1. Dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan terkait dengan bidang pendidikan terdapat beberapa permasalahan diantaranya :
 - a. Akses layanan pendidikan
 - Tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah masih rendah



- Sebaran layanan pendidikan menengah belum merata

Solusinya :

- Inisiasi wajib belajar 12 tahun (setara SMA)
- Peningkatan cakupan layanan program paket B dan C
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK

b. Ketersediaan sarana dan prasarana

- Terdapat kekurangan ruang kelas pada semua jenjang
- Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) atau SNP.

Solusinya :

- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
- Rehabilitasi ruang kelas / ruang belajar lainnya yang dalam kondisi rusak
- Pemenuhan kebutuhan sarana pembelajaran.

c. Peningkatan mutu pendidikan

- Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PNS belum terpenuhi.
- Kualifikasi tenaga pendidik terutama pada jenjang SD masih rendah
- Kompetensi tenaga pendidik masih rendah dan belum merata

Solusinya :

- Pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan CPNS
- Pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional
- Penyediaan bantuan beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang S-1 dan S-2
- Penyetaraan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum S-1
- Penyelenggaraan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
- Pelatihan professional berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Pembangunan urusan kesehatan, belum idealnya rasio tenaga pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk. Penambahan tenaga pelayanan kesehatan melalui rekrutmen baru kiranya menjadi solusi yang perlu



dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, serta tetap mengupayakan peningkatan mutu SDMnya dan daya dukung sarana prasarana pelayanan kesehatan.

4.2. Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pada Pasal 3 ayat (2) bahwa terdapat 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan.

4.2.1. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 3 ayat (2) bahwa terdapat 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan. Secara rinci ke delapan urusan pilihan dimaksud beserta program yang dilaksanakan disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.27
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kab. Sumbawa Pada Urusan Pilihan, Tahun 2011

No	Urusan Pilihan	Program
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3 Program Perikanan Tangkap 4 Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan 5 Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Payau & Air Tawar 6 Program Pengembangan Penge-lolaan Pesisir & Pulau-pulau kecil
2	Urusan Pertanian	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan 2 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan 3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak



		4 Program peningkatan produksi hasil peternakan 5 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
3	Urusan Kehutanan	1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4 Program Pembinaan & Penertiban Industri Hasil Hutan
4	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Program pembinaan dan pengawasan pertambangan 2 Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan 3 Pengembangan Geologi Sumberdaya Mineral dan Air Bawah Tanah 4 Program pengembangan energy
5	Urusan Pariwisata	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Program Pengemb. Kemitraan Pariwisata
6	Urusan Industri	1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2 Program Peningkatan Kapasitas Produksi IKM
7	Urusan Perdagangan	1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4 Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan Asongan
8	Urusan Ketransmigrasian	1 Program Pembinaan & Pengemb. Wilayah Transmigrasi

Uraian kegiatan masing-masing program disajikan pada lampiran.

4.2.2. Realisasi Program pada Urusan Pilihan

Pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan berdasarkan LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 menunjukkan bahwa secara rata-rata berada di dalam skala ordinal 80-100% atau termasuk ke dalam kategori berhasil. Untuk masing-masing urusan disajikan sebagai berikut.

4.2.2.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana *urusan pilihan kelautan dan perikanan*, pada tahun 2011 menunjukkan nilai capaian kinerja berdasarkan tolak ukur dan terget kinerja pada kisaran 93,88% - 100% dengan rata-rata



capaian kinerja sebesar 99,46%. Sedangkan pencapaian sasaran pada kisaran 97,27% - 100%, sehingga dengan kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dapat digolongkan sebagai kriteria berhasil. Indikator keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan tersedianya teknologi tepat guna untuk kegiatan budidaya dan penangkapan ikan, serta bantuan sarana penangkapan yang diyakini mampu mendorong peningkatan produksi, peningkatan konsumsi ikan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan sekaligus daya beli pembudidaya ikan/ nelayan dan secara positif menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan PAD.

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan kepada penataan sarana dan prasarana guna percepatan peningkatan produksi dan produktivitas yang ditempuh melalui pembinaan masyarakat (nelayan dan pembudidaya) dalam rangka intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi usaha, serta peningkatan sistem dan upaya pengamanan wilayah perairan melalui aktivasi dan penumbuhan kelompok pengawas. Sedangkan dalam upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terpencil yang menghuni pulau-pulau kecil ataupun wilayah pulau-pulau kecil yang belum berpenghuni, maka Dinas Kelautan dan Perikanan juga berupaya melaksanakan penataan wilayah melalui pembangunan infrastruktur pulau-pulau kecil, serta peningkatan pengamanan wilayah melalui penetapan zona Konservasi Kawasan Laut (KKL), penertiban pengelolaan kelautan dan perikanan dengan penetapan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Perda Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.

Secara umum gambaran pencapaian target urusan Kelautan dan Perikanan disajikan sebagai berikut.

1. Produksi perikanan.

Pada tahun 2011 **produksi perikanan sebesar 179.171,02 ton (101,07%)** dari target 177.268,40 ton. Adapun pencapaian target produksi tersebut berasal dari **perikanan tangkap** dengan target 44.647,00 ton terealisasi **45.374,02 ton (Pencapaian 101,63%)**, sedangkan produksi **perikanan budidaya** dari target



132.621,40 ton terealisasi 133.691,00 ton (pencapaian 100,81 %) meliputi pencapaian target sasaran pada peningkatan **produksi udang** sebesar 104,5 %, dari target 38,087,08 ton terealisasi 39.819,80 ton, peningkatan produksi budidaya **rumput laut** 101,1 %, dari target 87.872,00 ton terealisasi 88.902,98 ton, peningkatan produksi **budidaya kerapu** mencapai 112,5 %, dari target 205,7 ton terealisasi 231,47 ton, peningkatan produksi **budidaya ikan air tawar** mencapai 100 %, dari target 430,32 ton terealisasi 438,96 ton, peningkatan produksi **budidaya bandeng** sebesar 116,4 % dari target 2.157,12 ton terealisasi 2.511,50 ton.

Pencapaian kinerja dari peningkatan produksi perikanan tersebut dapat tercapai karena :

- a). Bertambahnya jumlah sarana penangkapan, berupa :
 - perahu motor tempel, dari 1.504 unit pada tahun 2010 menjadi 1.634 unit pada tahun 2011.
 - Kapal Motor, dari 1.279 unit pada tahun 2010 menjadi 1.298 unit pada tahun 2011.
 - alat penangkapan, dari 3.555 unit pada tahun 2010 menjadi 4.163 unit pada tahun 2011.
 - Pengadaan sarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan, seperti kapal Perikanan 3,5 GT (1 unit), Mesin Ketinting 5,5 PK 15 unit, Mesin dalam 16 PK dan 24 PK sebanyak 50 unit, Jaring 330 unit, Rumpon 2 unit, Colbox 40 unit.
- b). Adanya pembangunan prasarana penangkapan, seperti : pembangunan dermaga dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang terdapat di TPI Labuhan Terata, TPI Labuhan Mapin, TPI Labuhan Bajo, TPI Tanjung Pengamas (Pembangunan Talud pengaman pantai dan Jalan serta Parkiran PPI Tanjung pengamas.), TPI Teluk Santong, TPI Labuhan Jambu, TPI Labuhan Sangoro, TPI Prajak, TPI Pidang, TPI Pulau Bungin dan TPI Pulau Kaung. Selain itu, pada tahun 2011 telah dibangun dermaga TPI Pidang dan terehabnya dermaga TPI Labuhan Terata,
- c). Adanya peningkatan penggunaan bibit unggul rumput laut ;
- d). Adanya pengembangan sarana budidaya perikanan, seperti pembangunan



dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak, perbaikan jalan produksi kawasan pertambakan rakyat, pembangunan jembatan penyeberangan di kawasan tambak rakyat. Selain itu, pada tahun 2011 telah dilakukan pengadaan sarana budidaya rumput laut sebanyak 150 unit.

- e). Adanya peningkatan kualitas pembinaan terhadap kelompok maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2011 telah dilakukan penumbuhan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) di 4 Desa yaitu didesa Labuhan Aji Pulau moyo, desa Batu Bangka kecamatan Moyo Hilir, desa Labuhan Jambu dan desa Bale Brang Kecamatan Utan, sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya, yang terdiri dari unsur nelayan, pengolah ikan, Tokoh masyarakat, pemerhati kelautan dan perikanan.

2. Kawasan konservasi dan jumlah kawasan bebas *illegal fishing*.

Sumber daya pesisir dan laut merupakan sumberdaya yang sangat besar untuk mendukung kehidupan manusia baik sebagai sumber kalori, sumber material maupun sumber energi. Berbagai aktivitas manusia berlangsung secara intensif di kawasan pesisir. Disamping itu, berbagai limbah dibuang ke muara dan laut. Berbagai fungsi dan kepentingan tersebut menjadikan wilayah pesisir harus menyangga beban lingkungan yang berat. Di sisi lain ekosistem pesisir sangat rentan terhadap kerusakan dan pengrusakan baik secara alami maupun buatan. Bila pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tersebut tidak dilakukan dengan bijaksana, maka kerusakan dan bencana lingkungan yang sangat mahal akan dapat terjadi.

Pada tahun 2011 telah dilaksanakan survey potensi populasi penyu dan pemetaan kawasan konservasi penyu serta sosialisasi di wilayah pesisir Lunyuk. Selain itu dalam rangka penanganan *illegal fishing* dilakukan pembentukan tim Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta penyuluhan hukum.



Adapun Daerah konservasi dan reservasi yang ada di Kabupaten Sumbawa adalah:

1. Kawasan wisata alam laut Taman Nasional Pulau Moyo
2. Kawasan Konservasi Penyu di Kec. Lunyuk
3. Kawasan Konservasi terumbu karang Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Sejangan , Pulau Moyo, Pulau Medang, dll.
4. Kawasan konservasi mangrove Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Liang, Pulau Medang, Pesisir Teluk Saleh, Pulau Panjang, Pesisir Utara Sumbawa dan Pesisir Selatan Pulau Sumbawa.
5. Kawasan konservasi perairan Pulau Keramat.

Kawasan–kawasan konservasi yang ada saat ini yaitu kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang masih belum ditetapkan dalam suatu Perda ataupun Keputusan Bupati.

3. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Sebagian besar pelaku usaha pengolahan hasil perikanan masih menerapkan teknologi sederhana yang menghasilkan produksi primer sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh rendah. Hal ini mendorong terjadinya pemborosan sumberdaya perikanan, karena untuk mendapatkan margin yang besar dalam usaha pengolahan diperlukan tingkat eksploitasi yang besar juga.

Beberapa sentra pengolahan yang ada di Kabupaten Sumbawa adalah:

- a. Sentra pengolah terasi dan masin di wilayah Kec. Tarano meliputi Lab. Bontong dan Lab. Aji
- b. Sentra pengolahan rumput laut di Ngeru dan Lab. Terata
- c. Sentra pengolahan bandeng presto di Penyaring, Lab. Kuris dan Lab. Mapin
- d. Sentra ikan bakar di Karang Dima
- e. Sentra ikan kering dan pindang di Lab. Sumbawa, Sangoro, Jontal, Teluk Santong, Lab. Jambu, P.Kaung, Bungin, Lab. Bajo, dan Lab. Mapin.



Tabel 4.28
Data RTP Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2011

No	Kecamatan	RTP Pengolahan										Jumlah
		Pengalengan	Pembekuan	Penggaraman	Pemindaan	Pengasapan	Peraian	Pereduksian	Pengolahan	Prod. Segar	Lainnya	
1	Alas	-	-	167	-	-	-	2	-	-	2	171
2	Alas Barat	-	-	32	-	1	-	-	-	-	-	33
3	Buer	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Utan											-
5	Rhee											-
6	Lab. Badas	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	22
7	Batu Lanteh											-
8	Sumbawa	1	-	-	5	-	-	-	-	2	1	9
9	Untir Iwis											-
10	Moyo Hilir											-
11	Moyo Utara	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
12	Moyo Hulu											-
13	Ropang											-
14	Lunyuk											-
15	Orong Telu											-
16	Lantung											-
17	Lenangguar											-
18	Lape	-	1	14	-	-	-	-	-	-	5	20
19	Lopok	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
20	Plampang											-
21	Labangka											-
22	Maronge											-
23	Empang	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
24	Tarano	-	-	62	-	-	3	-	-	-	-	65
	Jumlah	1	1	278	8	23	6	2	-	2	8	329

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa.

Pada tahun 2011 telah dilakukan pembinaan kelompok melalui kegiatan antara lain temu kemitraan pesisir, pelatihan, pemberian paket sarana dan prasarana pengolahan.

Prasarana pengolahan yang telah tersedia sebelumnya berupa *cold storage* dan pabrik es berjumlah 4 (empat) buah dengan kapasitas produksi masing-masing 5-10 ton per hari yang berlokasi di Sumbawa Besar, Karang Dima, Teluk Santong, dan Alas. Kapasitas produksi tersebut masih relatif rendah dibandingkan dengan produksi ikan yang dihasilkan masyarakat nelayan. Sarana pengolahan lain yaitu adanya unit pengeringan ikan tenaga surya sebanyak 3 unit yang berada di Lab. Ijuk, Teluk Santong, dan Lab. Jambu.



Sedangkan sentra pemasaran hasil perikanan yang ada di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.29
Data RTP Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2011

No	Kecamatan	RTP Pemasaran						Jumlah
		Pengumpul	Pedagang Besar/ Distributor	Pengecer	Restoran	Catering	Hotel	
1	Alas	11	2	10	4	-	-	27
2	Alas Barat							-
3	Buer	6	-	18	-	-	-	24
4	Utan	-	-	96	-	-	-	96
5	Rhee							-
6	Lab. Badas	20	18	100	3	-	1	142
7	Batu lanteh							-
8	Sumbawa	7	2	8	9	1	-	27
9	Untir Iwis							-
10	Moyo Hilir	1	1	8	-	1	-	11
11	Moyo Utara	3	-	47	-	-	-	50
12	Moyo Hulu	-	-	1	-	-	-	1
13	Ropang	-	-	5	-	-	-	5
14	Lunyak	1	1	19	-	-	-	21
15	Orong Telu							-
16	Lantung							-
17	Lenangguar	-	-	5	-	-	-	5
18	Lape	4	6	167	-	-	-	177
19	Lopok	4	-	163	-	-	-	167
20	Plampang	2	1	74	-	-	-	77
21	Labangka							-
22	Maronge	6	2	52	-	-	-	60
23	Empang	1	1	-	1	-	-	3
24	Tarano	-	3	23	-	-	-	26
Jumlah		66	37	796	17	2	1	919

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa.

Secara garis besar jumlah pemasaran ikan keluar daerah pada tahun 2011 mencapai sebesar 16.352,5 ton.

4. Pulau-pulau kecil yang terkelola.

Salah satu sumberdaya kelautan yang sekarang tampaknya masih kurang mendapat perhatian adalah sumberdaya pulau-pulau kecil. Di Kabupaten



Sumbawa saat ini memiliki 63 pulau kecil dimana 6 pulau telah berpenghuni yaitu: 1) P Bungin, 2) P Kaung, 3) P . Medang, 4) P. Moyo, 5) P. Tete, dan 6) P. Ketapang.

Pembangunan prasarana yang dilaksanakan di pulau-pulau kecil pada Tahun 2011 meliputi pembangunan jalan antar kampung 4 unit yaitu di Dusun Brangkuah, Dusun sebotok, Dusun Patedong dan Dusun Lepaloang, pembangunan Jalan wisata pulau Keramat 1 unit serta pengadaan listrik tenaga surya sebanyak 5 unit yang merupakan sarana penerangan untuk keperluan masyarakat di Pulau Tete dan pembangunan sarana air bersih di Pulau Bungin.

4.2.2.2. Urusan Pilihan Pertanian

a. Pertanian Tanaman Pangan

Dalam penetapan kinerja urusan pertanian tanaman pangan Kabupaten Sumbawa tahun 2011, tingkat pencapaian kegiatan yang ditetapkan tersebut mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **97,22%** dari total belanja yang dianggarkan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan program tersebut, maka berbagai upaya peningkatan produksi pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Sumbawa sampai dengan akhir Tahun 2011 masih diprioritaskan pada peningkatan dan pemantapan produksi padi/beras, palawija (kedele, jagung, kac. Hijau, kacang tanah dan ubi kayu) dan pengembangan hortikultura terutama tanaman sayuran dan buah-buahan dengan skala prioritas kegiatan difokuskan pada peningkatan mutu intensifikasi pertanian serta pengelolaan lahan dan air melalui pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan

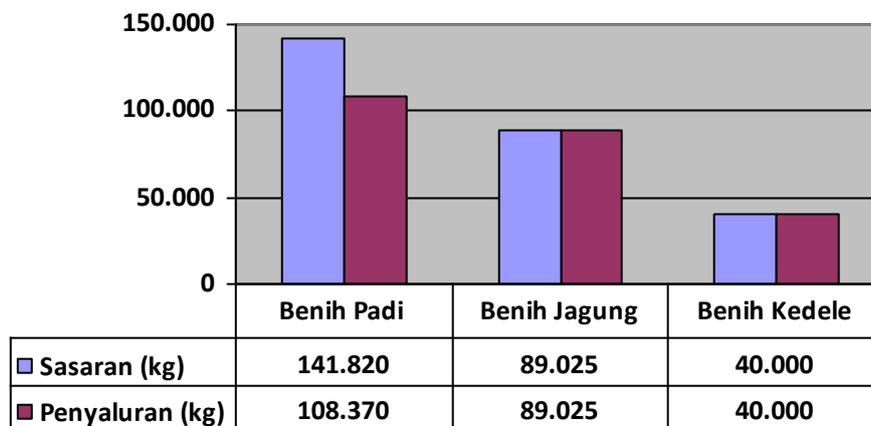


meliputi pembangunan fisik berupa pembangunan chek dam, jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta pengembangan alsintan.

Sebagai langkah kongkrit dalam upaya peningkatan produksi antara lain :

1. Penggunaan Bibit Unggul.

Salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan produksi padi dan palawija adalah dengan penggunaan benih unggul bersertifikat. Pada tahun 2011 bibit unggul bersertifikat penyalurannya terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.10
Sasaran dan Penyaluran Benih Unggul Bersertifikat
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

2. Peningkatan Infrastruktur

Sebagai upaya penunjang peningkatan produksi komoditi pertanian, maka pada tahun 2011 berbagai aspek ketersediaan sarana prasarana pertanian seperti infrastruktur yang dilaksanakan melalui pembangunan cekdam, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) dan jaringan irigasi desa (JIDES) serta jalan usaha tani telah dilaksanakan, karena hal ini akan berkaitan satu dengan lainnya guna saling mendukung upaya peningkatan dan pemantapan produksi pada komoditas pertanian, seperti berikut.



Tabel 4.30
Pembangunan Jalan Usaha Tani Satu Paket Dengan
Pencetakan Sawah di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

NO	LOKASI	KELOMPOK PELAKSANA	VOLUME (M)
1.	Ds. Kerekeh Kec. Unter Iwes	Maris Gama	400
2.	Ds. Bale Brang Kec. Utan	Pengalo	400
3.	Ds. Berare Kec. Moyo Hilir	Pasang Sunung II	400
4.	Ds. Batu Bangka Kec. Moyo Hilir	Olat Sepang	400
5.	Ds. Batu Bulan Kec. Moyo Hulu	Kuang Dope	400
6.	Ds. Suka Maju Kec. Lunyuk	Dewi Sri	500
7.	Ds. Lab. Kuris Kec. Lape	Saleng Beme	400
8.	Ds. Maronge Kec. Maronge	Empang Ketujir	400
9.	Ds. Jaya Makmur Kec. Labangka	Gerta Merta	400
10.	Ds. Suka Mulya Kec. Labangka	Semangat Baru	500
11.	Ds. Jotang Kec. Empang	Orong Melung	400
12.	Ds. Pamanto Kec. Empang	Orong Unter	400

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sumbawa

Demikian pula dengan upaya untuk mendukung pengembangan pengelolaan usaha tani, maka pada tahun 2011 dilaksanakan pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES). Adapun rehabilitasi **Jaringan Irigasi Desa (JIDES)** dengan realisasi sepanjang 1.670 meter dan 2 unit chekdam (105,5%) dari rencana sepanjang 1.677 meter, untuk luas 340 ha pada 13 Kecamatan serta rehabilitasi **Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)** dengan realisasi sepanjang 1.169 meter (105%) dari rencana sepanjang 1.169 meter, untuk luas 310 ha pada 7 Kecamatan. Jaringan irigasi ini akan berpengaruh terhadap peningkatan luas areal tanam melalui penambahan Intensitas Pertanaman lebih dari 30% dan peningkatan produktivitas lebih dari 0,5 ton/ha, hal ini seperti tergambar pada tabel 4.31 berikut.



Tabel 4.31
Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa
Yang Dibangun di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

NO	KELOMPOK TANI	DESA / KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	VOLUME (M)
A.	JITUT			
1.	Buin Sawe	Samapuin/Sumbawa	25	61
2.	Hasrat Indah	Kerato/Unter Iwes	25	133
3.	Saling Pendi	Jorok/Utan	30	97
4.	Susung Aris II	Jorok/Utan	30	111
5.	Orong Mala I	Olat Rawa/Moyo Hilir	25	60
6.	Unter Paresan	Kakiang/Moyo Hilir	30	125
7.	Unter Anat Desa	Batu Bangka/Moyo Hilir	30	111
8.	Buin Bonto	Baru Tahan/Moyo Utara	30	135
9.	Puncak Sari	Suka maju/Lunyuk	30	111
10.	Hidup Makmur	Lunyuk Rea	25	90
11.	Batu Pabua	Maronge	30	135
Jumlah			310	1.169
B.	JIDES			
1.	Uma Monyeng	Pelat/Unter Iwes	20	124
2.	Tunas Harapan	Pukat/Utan	20	106
3.	Saling Angkat	Pukat/Utan	20	87
4.	Batu Putih I	Rhee Loka/Rhee	20	106
5.	Tarupa Mandiri	Marente/Alas	20	1 unit*
6.	Kemang Kuning	Penyaring/Moyo Utara	20	87
7.	Tiu Mera	Berang Rea/Moyo Hulu	20	150
8.	Batu Senapang	Batu Bulan/Moyo Hulu	20	106
9.	Uma Sampar	Marga Karya/Moyo Hulu	20	1 unit*
10.	Brang Menir II	Telaga/Lenangguar	20	131
11.	Kokar Pakat	Lape/Lape	20	120
12.	Orong Rea	Sepayung/Plampang	20	106
13.	Orong Padak	Brang Kolong/Plampang	20	109
14.	Beme Rara II	Maronge/Maronge	20	106



15.	Tekad Maju	Boal/Empang	20	120
16.	Ai Renung	Bunga Eja/Empang	20	106
17.	Senap Semu	Banda/Tarano	20	106
Jumlah			340	1.670

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sumbawa.

*) Tarupa Mandiri : Bangunan Penangkap air bentang 7 meter

Uma Sampar : Bangunan penangkap air bentang 5 meter.

Untuk menjamin ketersediaan prasarana irigasi dan jalan usaha tani tersebut, maka pada tahun 2011 dilaksanakan **pembangunan embung** sebanyak 11 unit (untuk mendukung tanaman pangan) dan 2 unit (untuk mendukung hortikultura). Embung ini berfungsi untuk mendukung pengembangan pertanian dengan areal yang akan diairi seluas 140 ha, serta meningkatkan layanan irigasi untuk tanaman pangan seluas 96 ha dan 44 ha guna mendukung hortikultura.

Selain itu juga telah dikembangkan **irigasi air permukaan** sebanyak 11 unit untuk mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan seluas 315,8 Ha. Hal ini akan bermanfaat untuk meningkatkan Intensitas Pertanaman pada lahan usaha tani tanaman pangan dari Intensitas Pertanaman 100 menjadi Intensitas Pertanaman 200, sehingga meningkatnya produktivitas tanaman pangan akibat peningkatan fungsi layanan irigasi air permukaan.

kegiatan lainnya adalah dengan pengembangan pengelolaan **irigasi partisipatif** yang merupakan suatu pendekatan strategis dalam pengelolaan infrastruktur irigasi melalui keikutsertaan petani dalam semua aspek penyelenggaraan irigasi, termasuk perencanaan, desain, pelaksanaan, pengembangan (pembangunan/rehabilitasi), pembiayaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta penyempurnaan sistem dari waktu ke waktu secara berkelanjutan yang dilakukan di Kecamatan Utan (20,50 ha), Rhee (49,00 ha), Plampang (43,57 ha) dan Batu lanteh (25,50 ha). Pengelolaan irigasi partisipatif pada tahun 2011 ini berupa rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) sepanjang 410 meter di Kecamatan Plampang dan pembangunan embung 1 unit di Kecamatan Batu lanteh serta pengembangan air permukaan 2 unit di Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee. Adapun manfaatnya adalah meningkatnya fungsi layanan jaringan irigasi seluas



138,57 ha, sehingga meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, berdampak pada meningkatnya Intensitas Pertanaman dan Perluasan Areal Tanam (PAT).

Selanjutnya adalah **Pengembangan Sumur Resapan** yang merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan aliran permukaan agar dapat meresap ke dalam tanah. Adapun manfaatnya adalah meningkatnya muka air tanah yang dapat dipompa untuk keperluan pertanian sebanyak 15 unit untuk luasan 157 ha di Kecamatan Labuhan Badas dan Utan.

Demikian juga dengan kegiatan **Irigasi Air Tanah Dangkal** yang merupakan pengaturan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah pada kedalaman < 30 meter, sebanyak 20 unit untuk luasan 196 ha, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan air untuk memperpanjang masa tanam pada lahan kering dan lahan tadah hujan.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan kualitas petani baik pengetahuan dan keterampilan telah dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk petani, pelaku agribisnis, sekolah lapang, magang maupun studi banding. Pada tahun 2011 diantaranya telah dilaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) seperti :

- SL-PHT padi dilaksanakan di kelompok tani Buin Ramit Desa Boak Kecamatan Unter Iwes
- SL-PHT padi dilaksanakan di kelompok tani Leseng Permai Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu
- SL-PHT Jagung dilaksanakan di kelompok tani Meci Angi Desa Labangka Kecamatan Labangka
- SL-PHT Jagung dilaksanakan di kelompok tani Biara I Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang
- SL-Iklim dilaksanakan di kelompok tani Saling Beme Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat.

4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) secara Terpadu.

Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dominan menyerang tanaman padi adalah seperti tikus, penggerek batang, kresek, keong



mas, walang sangit, tungro, hama putih, wereng coklat, belalang dan blas, namun serangan Organisme Pengganggu Tanaman tersebut tidak mengakibatkan puso, sehingga perkembangan tanaman pada tahun 2011 relatif aman, karena masih dalam batas intensitas kecil/ringan serta masih dapat ditanggulangi.

Untuk peningkatan produksi pertanian masih terkendala oleh cuaca yang tidak menentu seperti adanya bencana alam, hal ini berdampak terhadap kehilangan hasil produksi pertanian. Berdasarkan analisis hujan BMG bahwa sifat hujan Kabupaten Sumbawa pada awal musim kemarau adalah normal dan dibawah normal (curah hujannya rendah), yang tentu akan menimbulkan kekeringan. Pada tahun 2011 kondisi alam ini telah menimbulkan kerusakan pada lahan padi sawah seluas 131 ha lebih tinggi dibanding tahun lalu dengan luas 91 Ha, akan tetapi pada padi gogo tidak terjadi kerusakan, sedangkan pada tahun sebelumnya kekeringan berdampak pada padi gogo seluas 75 Ha. Selain itu, kondisi alam yang tidak menentu tersebut berdampak pula terhadap tanaman jagung seluas 6 ha. Secara lebih rinci dapat tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.32
Luas Kerusakan Padi dan Palawija Tahun 2011

NO	KOMODITI	LUAS TANAMAN (Ha)	LUAS KERUSAKAN (Ha)	
			BANJIR	KEKERINGAN
1.	Padi Sawah	70.553	103	28
2.	Padi Gogo	9.989	-	-
3.	Jagung	26.174	4	2

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sumbawa

Kerusakan (puso) pada tanaman padi sawah, jagung disebabkan oleh perubahan cuaca ekstrem dan gejala El-nino sehingga terjadinya musim kemarau yang lebih panjang dan berakibat tidak adanya sumber air untuk pengairan. Mengingat adanya bencana alam tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa telah mengantisipasi dengan berbagai upaya diantaranya:

- 1) Membentuk dan mengaktifkan Tim Pemantau antisipasi kekeringan dan banjir di wilayah kecamatan masing-masing.
- 2) Melakukan inventarisasi daerah/lokasi rawan kekeringan maupun banjir (desa/kelompok tani)



- 3) Melaksanakan sosialisasi antisipasi kekeringan kepada petani sebagai dasar penyesuaian pola tanam serta pengamanan produksi dengan menerapkan berbagai pola tanam yang dapat mengurangi dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif berkurangnya air pada musim kemarau.
- 4) Pada daerah-daerah irigasi teknis yang kondisi airnya tidak mencukupi untuk mengairi areal tanam yang sudah ditetapkan dilakukan penyesuaian pola tanam dan pergiliran air.
- 5) Memanfaatkan seluruh Pompa Air yang ada pada UPJA pada daerah-daerah yang mempunyai sumber air permukaan.
- 6) Mengganti tanaman yang mengalami puso dengan tanaman palawija, umbi-umbian atau sayuran yang relatif kurang membutuhkan air.
- 7) Menanam varietas padi yang berumur relatif pendek
- 8) Penanaman dengan sistem TOT (Tanpa Olah Tanah) dan Tabela (Tabur Benih langsung).
- 9) Melaksanakan demplot tanaman padi sistem SRI/sistem tanam padi hemat air.
- 10) Memberikan bantuan bibit padi pada daerah yang terjadi bencana alam.

Pengembangan Hortikultura di Kabupaten Sumbawa, saat ini, baru mampu memasok kebutuhan konsumen dalam negeri/pasar tradisional dan masih sedikit yang bisa di export, karena produksi hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan masih relatif rendah sementara potensi lahan masih luas, sehingga pada tahun 2011, Kabupaten Sumbawa mengalokasikan bantuan untuk pengembangan hortikultura seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.33
Bantuan Bibit dan Alat Pertanian Pendukung Pengembangan Hortikultura di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

Kegiatan	Jenis Bibit/ Alat	Varietas	Jumlah (Pohon/ buah)	Kelompok Penerima	Lokasi Penyaluran (Kecamatan)
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Mangga	Lingsar	50	Uma Sopan	Batu Lanteh
	Durian	Kani	100	Uma Sopan	Batu Lanteh
	Manggis	Lingsar	50	Ai Ara	Batu Lanteh
	Rambutan	Narmada	100	Ai Ara	Batu Lanteh
Pengemb. Wilayah Agropolitan	Durian	Kani	500	Brang Sanero	Alas
	Durian	Kepala Gajah	150	Tamodong	Buer
		Sedapir	150	Tamodong	Buer
	Pisang	Kepok/Saba	1.500	Harapan Jaya	Utan
	Sawo	Sawo	370	Plam Tawar	Alas Barat



		Plampang	400 200	Lenang Kukin Tiu Sebangka	Alas Barat Alas Barat
Pengeb. Buah- buahan di Wil. DAS	Alpukat Sukun	- -	20.000 30.000	Batu Bulan Batu Bulan	Moyo Hulu Moyo Hulu
Pengembangan Hortikultura	Alat Petik Buah Keranjang Buah		10 30 20 30 20 12	Alas Sari Karta Loka Orong Bungir Alas Sari KWTIngin Maju Kebun Semongkat	Lab. Badas Lab. Badas Moyo Utara Lab. Badas Empang Batu Lanteh

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sumbawa.

Berdasarkan pendataan harga komoditi pertanian pada tahun 2011 terutama gabah dan beras berfluktuasi, hal ini terlihat dari harga gabah ditingkat petani pada bulan Pebruari hingga April mengalami pergerakan menurun, dengan kisaran harga Rp. 2.400 – Rp. 2.600,-. Harga tersebut berada dibawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), karena berdasarkan INPRES No. 7 tahun 2009 harga gabah kering panen sebesar Rp. 2.640,-. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan pangan, nomor : 05/Permentan/PP.200/2/2011 Tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah, yaitu Rp. 2.685,- sehingga kisaran harga Rp. 2.400 – Rp. 2.600,- termasuk dalam kualitas gabah di luar kualitas 2 (GKL 2) dan 3 (GLK 3). Pada bulan Januari, Mei hingga Agustus harga gabah ditingkat petani berkisar Rp. 2.700 – Rp. 2.800, dan pada Bulan September hingga Desember harga gabah meningkat mencapai Rp. 4.000 – Rp. 4.300,-.

Untuk harga beras ditingkat pengecer pada bulan Januari hingga Agustus berkisar Rp. 5.500 – Rp. 7.000, pada bulan September hingga Desember seiring dengan meningkatnya harga gabah, maka harga beras juga meningkat berkisar Rp. 7.000 – Rp. 8.500,-.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam pengembangan komoditas unggulan daerah adalah dengan melaksanakan program pengembangan jagung secara intensif baik dari sisi peningkatan produksinya maupun pengelolaan pasca panennya. Adapun produksi jagung pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 78.563 ton (145,51%) dibandingkan tahun sebelumnya (produksi tahun 2011 sebesar 132.554 ton dan pada tahun 2010 sebesar 53.991 ton). Tingginya produksi tersebut, tidak akan berarti



apa-apa tanpa didukung dengan pengelolaan pasca panen yang optimal, sehingga telah diupayakan pengembangan pasca panen jagung tersebut lewat keberadaan silo jagung di Kecamatan Labangka yang merupakan sentra produksi jagung di Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2011 silo jagung tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas seperti gudang penyimpanan berukuran 12 x 9 x 6 m dan lantai jemur dengan luasan 25 x 14 m, agar dapat beroperasi secara optimal sebagai upaya peningkatan baik dari segi kuantitas dan kualitas untuk memenuhi permintaan pasar. Disamping itu, dapat meningkatkan efisiensi usaha, menekan susut hasil, mempertahankan mutu, meningkatkan nilai tambah dan daya saing yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu pemanfaatannya diarahkan menggunakan prinsip bisnis yang sehat dan mandiri serta berkelanjutan. Pengembangan komoditas jagung tersebut berdampak positif terhadap besarnya minat para pengusaha/investor luar daerah terhadap jagung Sumbawa, hal ini terlihat pada kegiatan Pekan Nasional (PENAS) ke XIII di Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 – 22 Juni 2011, lewat sistem iPasar, dimana komoditi jagung Kabupaten Sumbawa terjual melalui pasar lelang tersebut sebanyak 5.000 ton dengan nilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), hal ini mengisyaratkan bahwa jagung sumbawa mendapat apresiasi yang cukup besar dari daerah lain karena keunggulan yang dimiliki jagung sumbawa sangat khas dengan kecerahan biji yang sempurna, sehingga kedepan peningkatan serta pemantapan jagung tetap menjadi prioritas.

Selain upaya kegiatan peningkatan produksi komoditi, pemerintah Kabupaten Sumbawa juga memformulasikan strategi pemasaran hasil komoditi pertanian dengan cara memutus rantai pemasaran yang relatif cukup panjang. Salah upaya terobosan yang efektif untuk meminimalisir/memperpendek rantai pemasaran tersebut adalah dengan keberadaan/dibentuknya **Pasar Tani**. Kegiatan Pasar Tani tersebut dilaksanakan dengan penyediaan outlet pasar tani sebanyak 23 buah yang diperuntukkan bagi petani produsen (terdaftar sebagai anggota asosiasi pasar tani/Aspartan Mampis Rungan) yang secara langsung memasarkan hasil pertaniannya, baik berupa produk segar maupun olahan. Adapun jenis komoditi/produk yang dipasarkan adalah komoditi yang dihasilkan oleh produsen/petani lokal seperti :



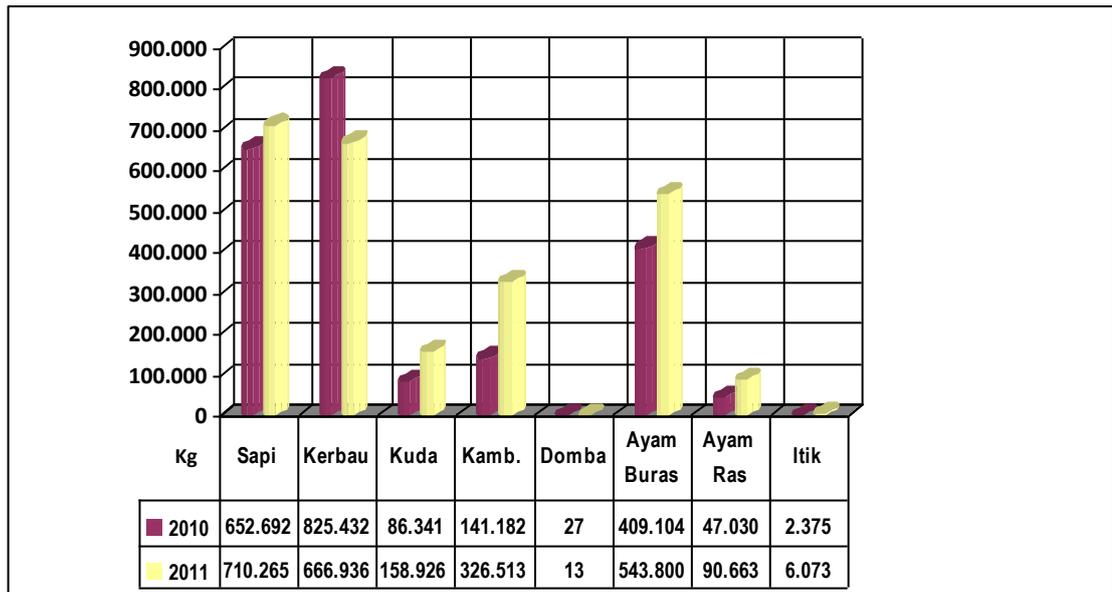
- Sayuran dan buah segar serta olahannya;
- Tanaman hias
- Tanaman obat/biofarmaka dan olahannya
- Tanaman pangan dan olahannya
- Tanaman Perkebunan dan olahannya
- Produk Peternakan dan olahannya
- Produk Perikanan dan olahannya

Secara rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatannya disajikan pada lampiran.

b. Peternakan

Berdasarkan penetapan kinerja urusan peternakan Kabupaten Sumbawa Tahun 2011, secara rata-rata tingkat pencapaian kinerja kegiatan mencapai skala ordinal 80-100%, sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **97,12%** dari total belanja yang dianggarkan pada Peternakan Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

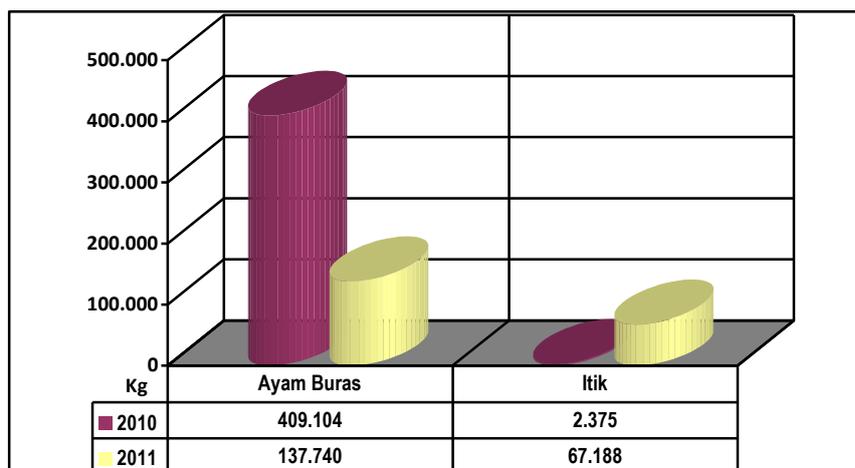
Penyelenggaraan pembangunan peternakan sebagai bagian dari urusan wajib pertanian yang dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan, diantaranya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat akan protein hewani. Jumlah konsumsi daging di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 adalah sebagai berikut.



Gambar 4.11
Konsumsi Daging di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2010-2011

Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumsi daging di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hanya pada daging kerbau dan domba yang mengalami penurunan.

Demikian dengan konsumsi telur, mengalami peningkatan konsumsi telur itik dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi pada konsumsi telur ayam buras menurun dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tergambar pada grafik berikut.



Gambar 4.12
Konsumsi Telur di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2011



Peningkatan konsumsi daging di masyarakat antara lain disebabkan karena adanya peningkatan populasi ternak. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pembibitan dan perawatan ternak.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Kabupaten sebagai sumber bibit di Propinsi Nusa Tenggara Barat, selain itu Pulau Sumbawa ditetapkan sebagai tempat pemurnian Sapi Bali. Untuk memacu tingkat pertumbuhan populasi ternak, Kabupaten Sumbawa menetapkan kebijakan di bidang Perbibitan terutama Sapi Bibit yang diatur dan diawasi secara ketat.

Pada tahun 2011 dilaksanakan Inseminasi Buatan di Kabupaten Sumbawa dengan target sebanyak 500 ekor sapi, kebuntingan 200 ekor dengan pengadaan semen 1.000 dosis. Straw yang digunakan adalah Sapi Bali. kegiatan tersebut dilaksanakan di kecamatan Alas, Alas Barat, Utan, Buer, Moyo Utara, Unter Iwes dan kecamatan Sumbawa dengan realisasi masing-masing kecamatan adalah Alas Barat dan Alas sebanyak 205 ekor dengan rincian 110 ekor bunting dengan kelahiran 32 ekor, Kecamatan Buer jumlah realisasi IB 92 ekor, 39 ekor mengalami kebuntingan lahir 12 ekor, Kecamatan Utan realisasi IB 243 ekor dengan jumlah bunting 60 ekor, lahir 21 ekor, Kecamatan Moyo Utara Jumlah realisasi IB 212 ekor bunting 88 ekor lahir 45 ekor, Kecamatan Sumbawa jumlah realisasi IB 254 ekor kebuntingan 94 ekor dan jumlah lahir 25 ekor, Kecamatan Unter Iwes jumlah realisasi IB 143 ekor kebuntingan 90 ekor dan jumlah lahir 53 ekor, Kecamatan Lape dan Moyo Hulu jumlah realisasi IB 5 ekor, karena pelaksanaannya dilakukan dibulan Desember sehingga belum terdeteksi umur kebuntingan. Data jumlah kebuntingan dan kelahiran yang tertera pada laporan ini merupakan jumlah akumulasi dari pertama dilaksanakan kegiatan IB terhadap ternak masyarakat sejak tahun 2.000. Kelebihan jumlah keseluruhan realisasi IB yang telah dilaksanakan 1.159 ekor dari jumlah semen 1.000 dosis yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten tertutupi dengan adanya bantuan semen dari provinsi sebesar 200 dosis.

Selain sapi Tahun 2011 juga dialokasikan anggaran untuk pengadaan straw kerbau sebanyak 200 dosis dari jumlah IB yang telah dilakukan terjadi kebuntingan sebanyak 11 ekor dengan angka kelahiran 6 ekor ini terlaksana



di kecamatan Moyo Utara. Kerbau sebagai ternak lokal yang menjadi kebanggaan daerah Sumbawa berdasarkan data registrasi tahun 2008-2010 mengalami penurunan tajam, tren menurunnya jumlah populasi kerbau ini cukup mengkhawatirkan dimana jika ini tidak segera ditangani maka pada suatu saat kerbau Sumbawa hanya tinggal kenangan.

2. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.

Pada tahun 2011 distribusi ternak bibit yang anggarannya teralokasi lewat APBD Kabupaten Sumbawa tidak tersedia. Namun pemerintah daerah telah melakukan redistribusi ternak bibit yang bersumber dari ternak bibit yang terdistribusi dari tahun-tahun sebelumnya sebanyak 283 ekor terdiri dari 192 ekor sapi (70 jantan dan 122 betina) dan 91 ekor kerbau (20 jantan dan 71 betina) kepada 31 kelompok pada 31 Desa yang tersebar di 16 Kecamatan.

3. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak.

Pembelian dan pendistribusian vaksin ini, agar tercipta kekebalan ternak terhadap penyakit SE dan AT, sehingga kedepan kabupaten Sumbawa dapat bebas dari penyakit ini.

Pada tahun 2011 telah dilakukan pembelian dan pendistribusian vaksin untuk mendukung kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular terutama penyakit-penyakit strategis di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Sumbawa seperti Penyakit SE, Anthrax, dan ND. Mengingat penyakit hewan menular tidak pernah mengenal batas-batas wilayah tertentu, maka untuk mengintensifkan usaha-usaha penanggulangannya perlu dilakukan pembinaan evaluasi dan koordinasi dalam upaya meningkatkan kerja sama dengan membuat kesepakatan bersama dalam melaksanakan program kegiatan khususnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H).

4. Pengembangan Agribisnis Peternakan

Terbinanya kelompok agribisnis peternakan yang mengalami peningkatan skill daya saing serta pendapatan kelompok merupakan target program yang ingin dicapai dalam upaya mengembangkan agribisnis peternakan pada tahun 2011. Untuk itu telah dilakukan pembinaan terhadap 3 kelompok



ternak di kecamatan Sumbawa, 4 kelompok ternak di Kecamatan Alas dan Alas Barat, dan masing-masing 1 kelompok ternak di kecamatan Moyo Utara, kecamatan Rhee, kecamatan Empang, dan kecamatan Plampang serta keikutsertaan pada kegiatan expo batam agribisnis.

5. Pengembangan Sistem dan Pola Kawasan

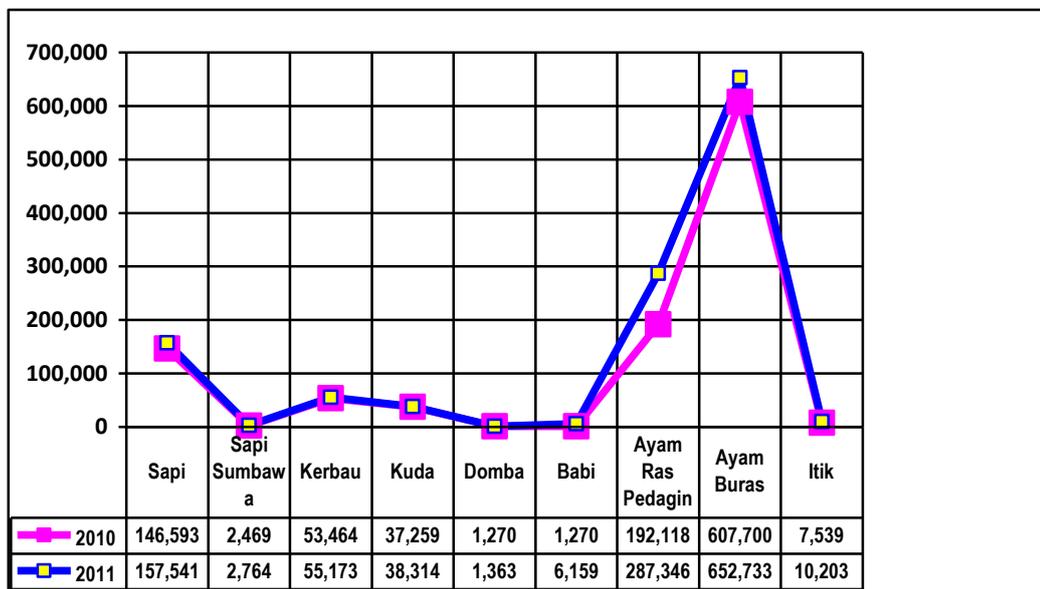
Pada tahun 2011 pemerintah daerah telah melaksanakan penyusunan *master plan* Lar Limung, pembangunan gerbang kawasan, serta pengadaan dan pembangunan infrastruktur pendukung antara lain seperti Kebun HMT, irigasi tanah dalam, irigasi tanah dangkal, jalan usaha tani, bak air minum dan lain-lain dengan sumber dana dari DAK, APBD II dan APBN. Dalam rangka pengkajian dan optimalisasi padang penggembalaan dilakukan identifikasi dan pemetaan terhadap seluruh potensi padang penggembalaan (LAR) yang ada di kabupaten Sumbawa. Khusus pada kawasan pengembangan peternakan terpadu Lar Limung, sesuai dengan peruntukannya pada tahun 2011 dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung peternakan diantaranya pembangunan irigasi tanah dalam 1 unit, irigasi tanah dangkal 2 unit, pemagaran kelililing Lar, pembuatan bak air minum 6 unit, pembuatan padang penggembalaan dan kebun HMT 2 paket (perluasan per 5 Ha) pembuatan koda 2 unit dan pembuatan jalan usaha tani 2 paket. Dari anggaran APBN (Dirjen PSP) telah dibangun rumah kompos sederhana, pengadaan APPO, kendaraan roda 3, kandang ternak, bak fermentasi, dan pengadaan ternak 35 ekor (sapi/kerbau), embung/dam/parit, sumur resapan, padang penggembalaan (20 Ha). Selain kawasan Limung, pembangunan peternakan juga menyentuh beberapa lokasi lain yang dianggap layak dan memenuhi syarat. Lokasi tersebut meliputi pembangunan Embung 1 unit di Kelurahan Pekat/Sumbawa, pembangunan embung 1 unit di Plampang, pembangunan koda 1 unit di Moyo Hulu, JUT 1 paket di Lar Badi Desa Lopok, pembuatan Koda 1 paket di Desa Lantung / Ropang, pembuatan Bak Air Minum di Desa Mapin Kebak /Alas Barat.



6. Pengkartuan ternak.

Pengumpulan dan pengolahan data, sebagai upaya untuk mengetahui jumlah populasi dan pertumbuhan serta perkembangan ternak yang ada di Kabupaten Sumbawa, sehingga dilakukan pengkartuan / Registrasi Ternak dengan pemberian kartu pada pemilik ternak sehingga masing-masing ternak mempunyai kartu identitas ternak yang memuat keterangan-keterangan dan status kepemilikannya. Registrasi ternak ini dalam pelaksanaannya disertai dengan vaksinasi pada daerah-daerah endemi.

Perkembangan populasi ternak berdasarkan Hasil Registrasi (Diluar Ternak Pemerintah), pada tahun 2011 mengalami peningkatan populasi dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini terlihat pada populasi Sapi yang meningkat sebesar 7,47%, Sapi Sumbawa meningkat 11,95%, Kerbau meningkat 3,20%, dan Kuda meningkat 2,83%. Demikian juga dengan ternak kecil, terjadi peningkatan seperti kambing sebesar 3,26%, Domba meningkat 7,32%. Untuk unggas juga mengalami peningkatan seperti Ayam Pedaging sebesar 49,57%, Ayam buras 7,41% Itik Meningkat 35,34%, hal ini tergambar pada gambar berikut.



Gambar 4.13

Perkembangan Populasi Ternak Rakyat Hasil Registrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2010 dan 2011



7. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. Pengobatan terhadap penyakit hewan menular (PHM) dengan target 4.850 ekor ternak dan terlaksananya vaksinasi dan pencegahan penyakit Hewan menular terhadap 198.000 ekor ternak yang ditargetkan, terbentuknya kekebalan ternak terhadap penyakit khususnya SE dan capaian program yang ingin diraih yaitu terlindunginya ternak dan masyarakat veteriner dari penyakit hewan menular dapat terwujud. Pelayanan medik dalam bentuk vaksinasi dan pengambilan sampel, Vaksinasi SE/AT dengan target 198.000 ekor pada ternak besar dan kecil (sapi, kerbau, kuda dan kambing),realisasi SE tersebar di 24 kecamatan : sapi 88.109 ekor, kerbau 25.795, sedangkan realisasi untuk vaksinasi AT tersebar di 15 kecamatan (Tarano, Empang, Plampang, Labangka, Lape, Lopok, Lunyuk, Lenangguar, Moyo Hulu, Moyo Hilir, Moyo Utara, Sumbawa, Unter Iwes, Lab. Badas, Buer) yang merupakan wilayah Endemis adalah : sapi 70.395,ekor kerbau 10.623 ekor, Kuda 5.675 ekor, kambing 580 ekor. Anggaran yang disiapkan untuk mendukung operasional kegiatan ini adalah Rp. 106.250.000 kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular pada ternak (sapi, kerbau kuda dan kambing) . Hal lain yang dilakukan pada kegiatan ini adalah melaksanakan pengobatan dan penanganan Penyakit Hewan Menular (PHM) Khusus penyakit SE dengan target 4.850 ekor ternak yang dilakukan oleh petugas baik yang ada di Kabupaten maupun kecamatan.
8. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik. Kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit hewan menular khususnya Antrak, dengan target 13 ekor bertujuan : adanya penanganan ternak atau bangkai yang terkena PHM sehingga tidak menjadi sumber penularan kepada manusia atau ternak yang lain. Dengan terlaksananya pemusnahan terhadap ternak mati karena PHM diharapkan penyebaran penyakit Anthrax Keegiatannya berupa pemberian dana operasional kepada petugas di lapangan yang melakukan penanganan seperti : pembakaran, penguburan dan desinfektansi kandang dan peralatan.



Untuk tahun 2011 ada 13 kasus yaitu :

- Ternak Kuda 1 ekor dan sapi 2 ekor Kecamatan Lab Badas
- Ternak sapi 2 ekor di Kecamatan Labangka
- Ternak sapi 1 ekor di kecamatan Empang
- Ternak sapi 6 ekor dan 4 ekor kerbau dikecamatan Moyo Hulu
- Ternak sapi 1 ekor di Kecamatan Lenangguar

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah, pengaturan lalu lintas ternak di Kabupaten Sumbawa berdasarkan Perda No, 16 Tahun 2005 tentang pengaturan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak. Pada Tahun 2011 telah terjadi 11 kasus pelanggaran, diantaranya 4 kasus telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan 7 kasus lainnya tidak diproses karena telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Secara umum pelanggaran yang terjadi adalah tidak adanya dokumen yang lengkap sesuai dengan prosedur dan teknis serta administrasi pengeluaran ternak.

9. Monitoring penyakit Brucellosis dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan.

Pendeteksian penyakit secara dini telah dilakukan untuk menentukan strategi usaha pencegahan dan pembebasan Kabupaten Sumbawa dari penyakit tersebut. Dari usaha yang telah dilakukan, maka pada tanggal 1 maret 2006 Kabupaten Sumbawa telah dinyatakan bebas Brucellosis yang ditegaskan melalui Piagam Penghargaan Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Bupati Sumbawa atas prestasinya dalam pemberantasan dan pembebasan penyakit Berucellosis di Pulau Sumbawa Propinsi NTB, Untuk tahun 2011 monitoring Brucellosis dilaksanakan di 5 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Maronge desa Maronge (sapi 25 dosis, kerbau 25 dosis) Simu (sapi 25 dosis kerbau 25 dosis), Lape desa Lab. Kuris (sapi 150 dosis, kerbau 100 dosis), Desa Lape Bawah (sapi 50 dosis, kerbau 50 dosis), Tarano desa Bt. Lante (sapi 50 dosis, kerbau 150 dosis), Empang Desa Empang Bawah (sapi 100 dosis, kerbau 100 dosis), dan Lenangguar di desa Tatebal (sapi 75 dosis, kerbau 75 dosis), jumlah secara keseluruhan sebanyak 1000 dosis untuk sapi dan kerbau. Dengan rincian sapi 475 dosis dan kerbau 525 dosis.



Pengambilan serum darah untuk pemeriksaan terhadap reaktor Brucellosis dengan Metode Rose Bengal Plate Test (RBPT) di Laboratorium Dinas Peternakan Sumbawa, bila hasilnya positif, selanjutnya dikirim ke Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar untuk dilakukan pengujian CFT (Complement Fixation Test).

10. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesmavet di 11 RPH terhadap 6.500 ekor ternak (ternak besar dan kecil) maka pada kegiatan ini dilaksanakan pemeriksaan ante mortem pada ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) sebanyak 4.500 ekor dan 2.000 ekor yang merupakan target yang ingin dicapai sesuai dengan DPA 2011 ternak kecil (kambing).

11. Peningkatan pelayanan dan pemeriksaan hewan qurban.

Setiap Tahun Umat Islam melaksanakan Ibadah Qurban dengan menyembelih Ternak Sapi, Kerbau, Kambing ataupun Ternak domba, yang mana proses penyembelihan dilakukan di Luar RPH/TPH. Namun demikian tetap diperlukan aspek kehalalalan dan keamanan serta jaminan mutu daging yang ASUH (Aman Sehat, Utuh dan Halal). Secara Umum Pemeriksaan Hewan Qurban terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pemeriksaan Ante Mortem (Sebelum Hewan di Potong)
2. Pemeriksaan Post Mortem (Setelah Hewan di Potong)

Pemeriksaan Ante Mortem dilakukan dengan Pemeriksaan Klinis dan Pemeriksaan Laboratorium. Pemeriksaan Laboratorium dilakukan dengan mengambil darah pada ternak yang akan dipotong kemudian dilakukan pemeriksaan Mikroskopis. Jika secara Klinis dan hasil pemeriksaan Laboratorium dinyatakan sehat dan bebas dari bibit penyakit berbahaya, maka ternak boleh dipotong sedangkan jika secara klinis terlihat sakit maka penyembelihan ditunda untuk pemeriksaan selanjutnya sampai dinyatakan boleh dipotong atau ditolak oleh petugas yang berwenang.

Pemeriksaan Post Mortem dilakukan dengan Pemeriksaan Organoleptik (Makroskopik) dilakukan terhadap kepala dan Organ dalam yaitu limpa, hati, paru-paru, jantung, usus dan ginjal serta limfoglandula yang meliputi:



Inspeksi (Bentuk, warna, ukuran, ketajaman tepi organ); Palpasi (Perabaan kekenyalan dan presipitasi); Insisi (Sayatan dengan pisau untuk melihat adanya kerusakan jaringan).

Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyakit hewan menular yang dapat membahayakan kesehatan manusia melalui konsumsi daging hewan qurban. Jumlah pemotongan hewan qurban 1432 H / 2011 M (1,086 ekor) terjadi Peningkatan sebesar 9,32% dibanding jumlah pemotongan hewan qurban 1430 H / 2010 M (987 ekor).

12. Pemeriksaan kesehatan ternak keluar daerah dan keur kuda dokar.

Target pemeriksaan ternak yang akan dikirim keluar daerah adalah sebanyak 17.000 ekor. Realisasi pemeriksaan yang telah dilakukan Selama tahun 2011 adalah sebanyak 19.925 ekor dengan rincian 10,415 ekor sapi, 2.763 kerbau, 2.002 ekor Kuda, 965 ekor sapi bibit 715 ekor babi, 65 ekor kambing, 3.000 ekor ayam, daging 280 kg, tulang 85 kg, kulit 31 kg, biaya pemeriksaan yang dikenakan untuk setiap ternak (besar, kecil dan unggas) sebesar Rp. 2500/ekor sedangkan untuk daging, tulang kulit biaya pemeriksaannya sebesar Rp. 1000/100kg dan jumlah seluruh retribusi yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikirim keluar daerah adalah sebesar Rp. 42,695,500,- Adapun daerah tujuan pengiriman adalah : Pulau Lombok, Bima, Dompu, Jawa, Sulawesi, Denpasar, Kalimantan, Jakarta, Sumbawa barat, dan NTT.

13. Surveylance penyakit Anthrax.

Untuk tahun 2011 kegiatan surveylance iini dilaksanakan di 15 kecamatan yaitu kecamatan Sumbawa, Lab. Badas, Labangka, Lenangguar, Buer, Moyo Hilir, Moyo Utara, Moyo hulu, Lopok, Lape, Plampang, Unter Iwes, Lunyuk, Tarano, dan Empang sebanyak 1500 dosis. Untuk memenuhi peningkatan hasil produksi peternakan dan pemenuhan gizi masyarakat melalui swasembada daging serta peningkatan pendapatan bagi petani ternak perlu dipikirkan pengembangan agribisnis peternakan.



4.2.2.3. Urusan Pilihan Kehutanan

Dalam tahun anggaran 2011 urusan kehutanan Kabupaten Sumbawa hingga akhir tahun 2011, secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan secara rata-rata mencapai skala ordinal 80%-100%. Artinya keseluruhan kegiatan relatif mencapai target yang ditetapkan sebagai indikator kinerja output. Sedangkan tingkat ketersediaan anggaran (dana) realisasinya mencapai **95,21%** dari total belanja yang dianggarkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan pembangunan pada urusan pilihan kehutanan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011, yang sarasanya diarahkan untuk dapat meningkatkan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dilakukan melalui optimalisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan melaksanakan pengendalian dan penertiban administrasi hasil hutan dan iuran hasil hutan ke 7 KPH, Cruising IPKTM, pertemuan dengan para pemegang izin hasil hutan serta melaksanakan pembinaan, penertiban dan evaluasi terhadap hasil hutan dan iuran hasil hutan. Selanjutnya untuk tata usaha kayu lahan milik (TUKTM) telah dilakukan penertiban peredaran hasil hutan kayu terutama di tingkat kecamatan.

Pada tahun 2011 jumlah izin pengecer kayu yang telah di keluarkan sebanyak 100 izin terbagi atas izin pengecer dan penimbun kayu.

Luas hutan di Kabupaten Sumbawa yang dapat dikonversi adalah seluas 17,314 Ha yang terdiri dari hutan yang belum devinitive seluas 1,406 Ha dan hutan yang dapat dikonversi seluas 15,908 Ha.

Tabel 4.34
Potensi sumber daya alam di Kabupaten Sumbawa

Jenis Hutan	Luas (Ha)
Hutan Lindung	243.765,53
Hutan Produksi Terbatas	58.379,30
Hutan Produksi Tetap	117.669,51
Hutan Cagar Alam	2.165,25
Hutan Wisata Alam	131,00
Hutan Tanaman Buru	22.537,51
Hutan Taman Laut	6.000,00

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa

Hutan di Kabupaten Sumbawa pada umumnya memiliki lahan yang luas, namun pemanfaatannya belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya lahan hutan yang gundul sehingga kegiatan – kegiatan persemaian



bhakti sosial pohon – pohon hutan dan pohon penghijauan harus digalakkan. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumberdaya hutan yang telah dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya:

1. Fasilitasi penyelesaian konflik tata batas kawasan hutan, dengan melakukan perlindungan dan konservasi Sumber daya Alam;
2. Pengecekan batas kawasan hutan dan Orientasi APL, Pengecekan lokasi di wilayah Kec, Lunyuk hasilnya lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan hutan KH, Selalu Legini (RTK, 59), pengecekan pal batas yang sudah hilang / rusak, pengecekan lokasi di wilayah Desa lape, labuhan Kuris Kecamatan lape dan Desa Olat Rawa Kec, Moyo Hilir;
3. Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan.
4. Rehabilitasi lahan kritis luar dan dalam kawasan, kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat terlaksananya rehabilitasi lahan kritis luar dan dalam kawasan dan terwujudnya peningkatan luas hutan dan lahan yang terrehabilitasi. Lokasi kegiatan rehabilitasi lahan kritis luar dan dalam kawasan dilaksanakan di 3 lokasi, yakni: 1) lokasi desa Tatebal Kec Lenangguar (Dalam Kawasan 50 Ha); 2) lokasi Karang Dima Kec, labuhan Badas (luar kawasan 25 Ha); 3) lokasi Omal Boan desa mamak Kec, Lpok(dalam kawasan 50 Ha).
5. Peningkatan konservasi tanah dan air, ditujukan untuk terjaganya areal DAS hulu dan hilir serta terbangunnya bangunan sipil teknik.
6. Rehabilitasi daerah tangkapan air dan sumber air, kegiatan ini dimaksudkan untuk merehabilitasi daerah tangkapan air dan sumber air yang kritis dan diharapkan berfungsinya kembali sumber air sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lokasi kegiatan rehabilitasi Daerah tangkapan air dan sumber air sebanyak 5 lokasi: Moyo Hulu, Lantung, Maronge, Empang dan Rhee.
7. Pengembangan hutan mangrove, kegiatan ini ditujukan untuk peningkatan luas wilayah yang terrehabilitasi, khususnya di kawasan pantai. Kegiatan ini berupa pengembangan hutan tamanan untuk lokasi Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat dengan luas 15 Ha dan jumlah tanaman sebanyak 25.500 Batang, Laokasi Labuhan Alas dengan Luas 15 Ha dan jumlah tanaman sebanyak 25.500 batang, lokasi Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge dengan Luas 15 Ha dan jumlah tanaman sebanyak 25.500 batang.



8. Pengembangan hutan tanaman tahun 2011, dengan tujuan dapat terselenggaranya rehabilitasi hutan dan konversi hutan dan air tanah di wilayah DAS serta terbentuknya kelompok pelestari DAS.

Dalam rangka memperoleh manfaat dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi, Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya – daya alam, hama dan penyakit.

Selanjutnya dalam upaya menjaga kondisi hutan tetap lestari, dilaksanakan kegiatan – kegiatan diantaranya kegiatan pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil, kegiatan ini dimaksudkan untuk tertibnya tata usaha kayu (TUK) hasil hutan kayu dan bukan kayu pada pemegang ijin dan pengecer hasil hutan.

Kegiatan pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan berupa pemeriksaan terhadap pemilik ijin baik ijin penebangan kayu tanah milik (IPKTM) dan ijin pengecer kayu, pemeriksaan terhadap peredaran dan pengangkutan hasil hutan serta pemeriksaan barang bukti di kepolisian dan kejaksaan, Pemeriksaan terhadap pemilik ijin diperlukan guna mengetahui pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai / tidak dengan ketentuan berupa masa ijin, volume, lokasi dan dokumen yang digunakan oleh pengecer kayu.

Selain pembinaan dan penertiban peredaran hasil hutan, pencegahan terjadinya illegal logging dilakukan melalui menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan dengan kegiatan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan, pengendalian dan pengaman hasil hutan, dukungan operasional penyuluh kehutanan.



4.2.2.4. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Penyelenggaraan urusan pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Sumbawa tahun 2011 memiliki tingkat pencapaian kegiatan rata-rata pada skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **87,26%** dari total belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung).

Kabupaten Sumbawa merupakan daerah atau kawasan yang dilewati jalur – jalur yang prospek akan cebakan bahan – bahan logam yang dikarenakan oleh letaknya di busur gunung api (daerah tunjaman), Ini terbukti dengan adanya beberapa indikasi maupun prospek cebakan logam dan salah satunya telah dieksplotasi oleh PT, Newmont Nusa Tenggara di daerah Dodo Rinti sedang dalam tahap eksplorasi. Potensi lain adalah bahan Galian Galian Golongan C (BGG-C) dimana penyebarannya hampir disemua wilayah Sumbawa dan mempunyai cadangan yang sangat besar. Biasanya terdapat sebagai endapan gosong sungai atau bukit-bukit kecil yang merupakan endapan piroklastik seperti batu kali, kerikil, pasir dan sirtu. Bahkan bahan lain seperti batu gamping, rijang, marmar, lempung, batu lempung, andesit, granodiorit juga terdapat sebagai bukit-bukit kecil.

Tabel 4.35
Potensi Bahan Galian Kabupaten Sumbawa

No	Bahan Galian	Sumberdaya (m ³)	Prospek Pengembangan
1	Sirtu	793,000	Ditambang penduduk
2	Batu Bangunan	269,227,708	Ditambang penduduk
3	Tanah Urug	4,577,667	Ditambang penduduk
4	Batu Lempung/Tanah Liat	5,925,500	Ditambang penduduk
5	Kaolin	-	Belum ditambang
6	Gypsum	-	Belum ditambang
7	Batu gamping	274,292,344	Ditambang penduduk
8	Marmar	43,062,500	Belum ditambang
9	Krisopras	-	Belum ditambang
10	Batuan Silika	-	Ditambang utk bahan bangunan
11	Kalsedon	-	Belum ditambang
12	Emas (Au)	-	Akan ditambang PT, NNT
13	Perak (Ag)	-	Belum ditambang, sedang eksplorasi PT. NNT
14	Tembaga (Cu)	-	Sedang eksplorasi PT, NNT
15	Pasir besi	395	Belum ditambang

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumbawa



Pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan eksploitasi terhadap potensi pertambangan prinsipnya akan selalu dilakukan dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Gambaran pembangunan urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2011, diantaranya kegiatan eksplorasi/penyelidikan umum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan eksplorasi dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan cadangan sumberdaya mineral di wilayah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut :

Tabel 4.36
Daftar Perusahaan Eksplorasi Pertambangan
di Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2011

NO	Nama Perusahaan	Jenis KP	Nomor dan Tanggal SK	Luas/Lokasi (Ha)
1	PT. Maliki Resources	zirkon	SKIUP No. 319/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	2,980 Ha
2	PT. Syabas Sumbawa Mineral	zirkon	SKIUP No. 320/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	8,565 Ha
3	PT. Fattah Minerals	zirkon	SKIUP No. 545/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	5,046 Ha
4	PT. Taruna Perkasa	Mineral Kuarsa	SKIUP No. 232/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	7,660 Ha
5	PT. Sumbawa Batu Mulia	Batu Kuarsa	SKIUP No. 132/IUP/KPPT/2011 tgl 03 Maret 2011	19,730 Ha
6	PT. Dua Rajawali Proenergi	Kaolin	SKIUP No. 135/IUP/KPPT/2011 tgl 04 Maret 2011	18,65 Ha
7	PT. Sumbawa Prima Mineralindo	Pasir Kuarsa	SKIUP No. 1025/IUP/KPPT/2011 tgl 29 November 2011	1,126 Ha

Hasil-hasil kegiatan eksplorasi dan penyelidikan umum yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa pada saatnya diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang potensi yang terkandung di dalam perut bumi Kabupaten Sumbawa.

Aspek lain yang penting menjadi perhatian dalam pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah menyangkut cakupan layanan listrik perdesaan terutama wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi produktif dan potensi energi setempat. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran



ini dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu (a) koordinasi pengembangan ketenagalistrikan; (b) Pengawasan dan penertiban perusahaan ketenagalistrikan; (c) Peningkatan sarana listrik daerah terpencil; (d) Pemutakhiran data kelistrikan.

Pasokan listrik masyarakat Kabupaten Sumbawa sebagian besarnya sangat tergantung pada pasokan listrik PT. PLN (Persero), Kendala utama pengembangan listrik PLN ini adalah sangat terbatasnya kapasitas daya, sehingga pertumbuhan pemasangan baru listrik PLN progres pertumbuhannya sangat kecil, Dimana pertumbuhan *supply* tidak sebanding dengan pertumbuhan *demand*.

Untuk menanggulangi kendala distribusi pasokan listrik terutama di desa-desa terisolir dan tepencil, ditempuh dengan pengembangan listrik tenaga surya (PLTS). Selama tahun 2011 telah dilakukan kegiatan peningkatan sarana listrik daerah terpencil, untuk pemenuhan listrik masyarakat melalui Distamben Kabupaten Sumbawa melakukan pemasangan PLTS di Dsn Jambu Timur Kec Empang sebanyak 8 unit dan Dsn Labuhan Liang sebanyak 13 unit sehingga total PLTS yang telah disalurkan ke masyarakat untuk pengembangan ketenagalistrikan tahun 2011 ini sebanyak 21 unit. Menurut penelitian yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Institut Teknologi Malang pada tahun 2003 terdapat beberapa potensi energi alternatif yang layak dikembangkan diuntuk pembangkit tenaga listrik di pedesaan.

Tabel 4.37
Potensi Sumberdaya Energi Angin

No	Kecamatan	Kecepatan Angin (knots)	Daya (watt)
1	Alas Barat	17	376,177
2	Labuhan Alas	20	612,541
3	Lape Lopok	15	258,415
4	Plampang	16	313,621
5	Labangka	19	525,177
6	Empang	17	376,177

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa



Tabel 4.38
Potensi Sumberdaya Energi Air

No	Kecamatan	Sungai/ Bendungan	Volume (m3)	Debit (m3/dtk)	Head (m)	Energi (MWh/Thn)
1	Lunyuk	Brang Beh	-	70,3	2	7,249,527
2	Alas	Brang Ode (marente)	-	3,27	2	337,211
3	Moyo Hulu	Bendungan Batu Bulan	46,5 Juta	1,635	38,5	8,377,170
4	Lape Lopok	Bendungan Mamak	32,5 juta	1,490	41,5	4,600,560
5	Plampang	Bendungan Tiu Kulit	10,8 juta	408	31,7	2,451,740
6	Empang	Bendungan Gapit	10,3 juta	380	29	1,001,840

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumbawa

4.2.2.5. Urusan Pilihan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata yang diselenggarakan pada tahun 2011 diarahkan pada beberapa sasaran, diantaranya melalui pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata. Dilihat dari segi produksi, potensi kebudayaan dan potensi obyek wisata dan daya tarik wisata sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 129 Tahun 2005 tentang Lokasi Obyek Wisata dan Tempat Rekreasi, terdapat 50 (lima puluh) satuan obyek/kawasan wisata, 10 (sepuluh) satuan diantaranya dikategorikan sebagai satuan kawasan wisata unggulan, Keberadaan obyek, daya tarik, sarana prasarana serta fasilitas pariwisata di Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan cukup baik, jumlah obyek dan daya tarik wisata yang dapat dinikmati wisatawan saat ini sebanyak 53 jenis. Peningkatan daya tarik wisata di Kabupaten Sumbawa tetap akan terus diupayakan dan dikembangkan. Berdasarkan kondisi terakhir, kecenderungan pengunjung lokal terhadap wisata kuliner cukup menunjukkan kemajuan yang didukung dengan mulai bertumbuhnya usaha-usaha kuliner tersebut. Meningkatnya kontribusi sektor hotel dan restoran dalam postur perekonomian daerah meskipun belum terlalu signifikan ditunjang dengan peningkatan kontribusi sektor keuangan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa menjadi salah satu indikator yang akan dapat memberikan ekspektasi pengembangan ke depan. Kampanye Visit Lombok-Sumbawa 2012 yang sedang gencar disosialisasikan dan program Go Sumbawa, selaras dengan mulai



ramainya kunjungan ke beberapa obyek wisata seperti Pantai Goa dan Labu Padi diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan pariwisata Kabupaten Sumbawa.

Upaya pengembangan urusan kepariwisataan secara terintegrasi dengan urusan kebudayaan dilakukan melalui pembinaan, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya telah ditempuh langkah-langkah :

1. Mengembangkan kebudayaan daerah secara terpadu sebagai bagian dari sistem pengembangan pariwisata daerah.
2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai seni dan budaya daerah dalam rangka sadar wisata.
3. Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, penatagunaan naskah kuno nusantara, dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan nilai budaya.
4. Mengembangkan dan memantapkan pembinaan seni budaya dan penyelenggaraan even seni budaya secara teratur.

Pengembangan sarana informasi untuk promosi dan pemasaran pariwisata mutlak dilakukan, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan sarana informasi, promosi dan pemasaran produk wisata dengan menitik beratkan pada: *a)* Pembuatan media informasi pariwisata; *b)* Pengadaan sarana pendukung promosi wisata; *c)* pengiriman duta wisata, seni dan budaya keluar daerah; *d)* Kerjasama dan pemberian bantuan untuk promosi pariwisata. Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran di bidang pariwisata dan pada tahun 2011 diselenggarakan event promosi wisata, melalui promosi pariwisata, terlaksananya BAB NTB dan festival Budaya, pekan budaya daerah dan pergelaran apresiasi seni serta juga melakukan pengembangan SDM dan profesionalisme pariwisata (penyuluhan, pembinaan pokdarwis dan pelatihan). Beberapa event wisata budaya seperti permainan rakyat tetap dilaksanakan.

4.2.2.6. Urusan Pilihan Industri

Pengembangan industri dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat yang mendukung sektor perdagangan serta memperlancar distribusi produk. Sebagai gambaran, jumlah industri kecil dan menengah (IKM) pada tahun 2010 dan 2011 di Kabupaten



Sumbawa sebagai berikut.

Tabel 4.39
Perkembangan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)
di Kabupaten Sumbawa

No,	Uraian	Tahun		Perkembangan	
		2010	2011	Jumlah	%
1,	IKM Formal	723	736	13	1,80
2,	IKM non Formal	2.782	2.810	28	1,01

Sumber Data : Dinas Koperindag Kab. Sumbawa

Penyelenggaraan urusan pilihan industri diarahkan pada meningkatnya jumlah pelaku dan usaha industri kecil dan menengah yang memperoleh akses terhadap pasar dan lembaga permodalan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan: a) Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah; b) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah; c) perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah; d) Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah; e) Peningkatan dan pengembangan usaha KUKM agribisnis dan agroindustri; f) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan; g) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi; h) Koordinasi penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil menengah; i) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil; j) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil; k) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah; l) Sertifikasi tanah UMKM.

Meskipun pelaku industri di Kabupaten Sumbawa saat ini dapat dikatakan cukup banyak, namun kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah masih sekitar 3-4% dengan pertumbuhan per tahun dalam lima tahun terakhir berkisar antara 9-10% per tahun ADHB. Menurut hasil analisis sektor unggulan, sektor industri di Kabupaten Sumbawa belum dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan daerah. Kondisi tersebut dapat dipahami, mengingat hingga tahun 2011 belum adanya industri berskala besar yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa.



4.2.2.7. Urusan Pilihan Perdagangan

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan ini, pada tahun 2011 telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan pembangunan, diantaranya telah dilakukan uji laboratorium terhadap 85 sampel barang/makanan. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 14 sampel (19,72%) dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 71 sampel. Selanjutnya untuk perlindungan kepada konsumen dilakukan tera terhadap alat ukur sejumlah 59,91 % dari seluruh jumlah alat ukur, sedangkan pada tahun 2010 sejumlah 42,24% sehingga mengalami peningkatan jumlah alat ukur yang ditera sejumlah 18%.

Pengembangan usaha perdagangan dalam negeri pada tahun 2011 mencapai nilai ekspor sebesar US\$ 796.564 sedangkan pada tahun 2010 sebesar US\$ 597.672 meningkat US\$ 198.868 atau 33,27%.

Tabel 4.40
Perkembangan jumlah pelaku usaha perdagangan
menurut besaran usahanya di Kab. Sumbawa Tahun 2011

No,	Tahun	Klasifikasi UKM				Jumlah
		Usaha informal / mikro	Usaha kecil	Usaha menengah	Usaha besar	
1,	2010	6.511	5.108	271	19	11.909
2,	2011	8.383	5.539	307	19	14.248
Perkembangan		1.872	431	36	-	2,339
%		28,75	8,43	13,28	-	19,64

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa

Pembangunan pada urusan perdagangan, kondisinya sangat didominasi oleh faktor harga, di samping faktor-faktor produksi yang mempengaruhi tingkat suplai, terutama untuk bahan-bahan kebutuhan pokok. Pemerintah pada tahun 2011 telah meningkatkan intensitas koordinasi dengan para pelaku pasar bahan pokok dan bahan strategis serta peningkatan sistem dan jaringan informasi termasuk penyediaan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di wilayah Kabupaten Sumbawa.



4.2.2.8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Penyelenggaraan urusan pilihan ketransmigrasian pada tahun 2011 diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dengan mempertimbangkan kondisi angkatan kerja, peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta terlaksananya program KTM Labangka, yang dilaksanakan melalui penyebarluasan informasi pasar kerja dengan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui media-media seperti radio dan pembuatan buletin berita pasar kerja ke desa-desa, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri yang mencapai 5.580 orang tenaga kerja yang mengikuti pembinaan pada tahun 2011 serta penempatan tenaga kerja luar negeri sebanyak 4.483 orang sementara pada tahun 2010 total penempatan sebanyak 5.483 orang. Demikian pula dengan lowongan pekerjaan untuk tenaga kerja luar negeri juga terjadi penurunan sekitar 88 orang yaitu Tahun 2011 = 10.555 orang bila dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2010 = 10.643.

Dalam rangka perluasan lapangan kerja dan usaha mandiri pemberdayaan tenaga kerja berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan bagi 5 (lima) kelompok Tenaga Kerja Indonesia purna dan keluarganya. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 (lima) desa dengan jumlah peserta setiap desa sebanyak 10 (sepuluh) orang dan waktu pelaksanaannya 6 (enam) hari (36 jam pelajaran). Demikian pula dengan pembinaan hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja. Pada tahun 2011 telah dilakukan penyuluhan tata cara penyelesaian kasus PHI dan PHK serta kegiatan revitalisasi Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan. Sedang perlindungan tenaga kerja yang dilaksanakan dalam Tahun 2011 ditekankan pada pemberian hak-hak dasar tenaga kerja, perlindungan dibidang sosial ekonomi, perlindungan norma umum dan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Menyangkut pembangunan dan pengembangan KTM di kawasan transmigrasi Labangka dan sekitarnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 berupa pembangunan infrastruktur jalan boulevard, perencanaan taman kota tahap I (pertama), perencanaan trotoar dan saluran jalan boulevard (1,1km), perencanaan jalan penghubung pusat KTM Labangka.



4.2.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan pilihan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2011 masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Rentannya ekosistem pesisir terhadap kerusakan dan pengrusakan baik secara alami maupun buatan, yang didasarkan pada berbagai aktivitas manusia yang berlangsung secara intensif di kawasan tersebut, sehingga berbagai limbah terbuang ke muara dan laut. Untuk itu diperlukan upaya antisipasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bijaksana, berkelanjutan dan lestari.

Disamping itu, terjadinya alih fungsi lahan mangrove ke lahan lain, alih fungsi sempadan pantai dan pengrusakan terhadap terumbu karang yang ada. sehingga diperlukan Perda tentang kawasan-kawasan konservasi yang ada saat ini baik kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang. Disamping itu diperlukan pengembangan kawasan reservasi baru selain Pulau Moyo, sehingga terdapat kawasan perlindungan laut di Bagian Barat, Tengah dan Teluk Saleh.

2. Terjadinya anomali iklim sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman, hal ini sering terjadi pada saat musim hujan berakhir yang mengakibatkan debit air irigasi begitu cepat menurun, sehingga para petugas mengatur pemakaian air melalui pergiliran antara kelompok dalam satu aliran/daerah irigasi (waduk, bendungan, embung dan lain-lain). Untuk itu diperlukan adanya pemantapan penyusunan rencana detail pola tanam pada masing-masing daerah irigasi dan peningkatan peran komisi irigasi. Bilamana terjadi kekeringan akibat anomali iklim, maka diadakan mobilisasi peralatan mesin pompa air untuk menaikkan air yang masih tersedia baik di sungai, sumur dan lain-lain.
3. Populasi kerbau yang menurun dari tahun ke tahun disebabkan antara lain terjadinya pemotongan ternak betina produktif, sehingga populasinya semakin menurun. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menekan angka/tingkat pemotongan kerbau tersebut, guna dijadikan sebagai sumber pembibitan. Disamping itu diperlukan penumbuhan minat bagi pengusaha ternak untuk memberikan kontribusi bagi kelompok-kelompok peternakan



sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan populasi ternak umumnya dan ternak kerbau khususnya.

4. Kasus-kasus perambahan hutan masih sering terjadi, sehingga diperlukan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat terhadap fungsi dan manfaat pelestarian hutan. Disamping itu, perlunya penanganan pembangunan kehutanan secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya, sehingga dapat saling bersinergi dalam upaya pembangunan kehutanan kedepan.
5. Maraknya pertambangan liar di Kabupaten Sumbawa, berdampak terhadap kesehatan lingkungan, karena tidak memperhatikan standar kesehatan, baik kesehatan individu itu sendiri, maupun pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya terutama pencemaran areal persawahan. Untuk itu, kedepan diperlukan upaya preventif baik lewat pembinaan SDM masyarakat sebagai langkah antisipatif yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektor maupun dengan upaya sosialisasi aturan minerba terbaru, sehingga aturan hukum yang ada dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Demikian pula dengan listrik, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sarana penerangan listrik. Untuk itu diperlukan penambahan jumlah pengadaan PLTS.



BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

5.1. Tugas Pembantuan Yang diterima

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (9), menyebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Lebih lanjut dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sehingga tugas pembantuan dapat diselenggarakan melalui pola dari pemerintah kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan desa, dari provinsi kepada kabupaten/kota dan desa, serta dari kabupaten/kota kepada desa.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian/lembaga negara kepada Kepala Daerah atas beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan fisik.

Pemberian tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan umum serta memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah (provinsi dan kabupaten/ kota serta desa).

5.1.1. Dasar Hukum

Peraturan yang mendasari pelaksanaan Tugas Pembantuan telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33



tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Selain itu, masing-masing jenis tugas pembantuan yang diterima tersebut memiliki DIPA sebagai dasar operasional pelaksanaannya oleh SKPD yang menerimanya, meliputi:

1. Kementerian Pertanian:
 - a. DIPA Nomor : 1950.0/018-03.4/21/2011
 - b. DIPA Nomor : 1950.0/018-08.4.01/21/2010
 - c. DIPA Nomor : 2457.0/018-10.4.01/21/2011
2. Kementerian Peternakan :
 - a. DIPA Nomor : 1949/018-08.4.01/21/2011
3. Kementerian Kehutanan:
 - a. DIPA Nomor : 1951/018-08.4.01/2011
4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
 - a. DIPA Nomor : 0803.0/026-04.4.01/21/2011
 - b. DIPA Nomor : 0795/026-07.4.01/21/2011
 - c. DIPA Nomor : 0796/026-13.4.01/21/2011
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan :
 - a. DIPA Nomor : 0638/032-06.4.01/21/2011
 - b. DIPA Nomor : 0638/032-06.4.01/21/2011
6. Kementerian Pendidikan Nasional :
 - a. DIPA Nomor : 0804/023.05.4.01/21/2011
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat - Pemerintahan Desa (BPM-PD):
 - a. DIPA Nomor : 0887/010.05.5.01/21/2011

5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian pemberi Tugas Pembantuan tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah :

- Kementerian Pertanian (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian).



- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Ditjen pembinaan pelatihan dan produktivitas).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/KP3K, Ditjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil perikanan (P2HP)).
- Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal).
- Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa)

5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Tugas Pembantuan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- Badan pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)
- Dinas Peternakan
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- Dinas Pendidikan Nasional
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD)

5.1.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

A. Program dan Kegiatan

program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD adalah :

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
 - a) Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang
 - b) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal
 - c) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan



- d) Peningkatan Pasca Panen Tanaman Pangan
 - e) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
 - b) Perluasan Areal dan pengelolaan Lahan Pertanian
 - c) Pengelolaan sistem Penyediaan dan Pengawasan alat Mesin Pertanian
 - d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
 - e) Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - f) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan usaha Agribisnis Pedesaan

b. Dinas Peternakan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Penyediaan Dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian
- a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
 - b) Pengembangan Embung, Sumur Resapan
 - c) Pembuatan Embung dikawasan Peternakan
 - d) Pembangunan Sumur Resapan
 - e) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
 - f) Perluasan Areal Peternakan untuk Pembangunan Kebun HMT dan Padang Penggembalaan
 - g) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian
 - h) Fasilitas Pupuk dan Pestisida

c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- a) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
 - b) Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
 - c) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan sarana pertanian
 - d) Fasilitas Pupuk dan Pestisida



d. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

1. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
 - a) Pemantapan Sistem penyuluhan pertanian

e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
 - a) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)
 - b) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - c) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - a) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
 - b) Terapan Teknologi Tepat Guna Padat Karya Produktif
 - c) Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja
2. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
 - b) Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi
 - c) Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
 - d) Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi
 - e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen P2MKT
3. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas
 - a). Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Binalantas

g. Dinas Pendidikan Nasional

1. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

h. Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan
 - a). Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan



- b). Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan
- c). Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP
- 2. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - a). Pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat

B. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan selama Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
Yang Dilaksanakan Pada Masing-Masing SKPD
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
A	Dinas Pertanian Tanaman Pangan					
1	Program Peningkatan produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	4.546.153	100			
	Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang	1,239,125	100	- SLPTT komoditas aneka kacang dan umbi - Dema rea kom. kacang dan umbi - Laporan pelaksanaan SLTT kacang dan umbi	3750 Ha 50 Ha 1 Lap	100,00
	Pengelolaan produksi tanaman sarella	2,848,935	100,00	SL-PTT komoditas serealia Dem area komoditas serealia	21.860 Ha 10 Ha	100,00



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan	6500	100,00	Laporan subsidi benih (subsidi harga, CBN dan BLBU)	1 Lap	100,00
	Penangan pasca panen tanaman pangan	406,693	100,00	Laporan pembinaan, sosialisasi, bimtek, koordinasi/workshop, a presiasi dan monev pasca panen Jumlah kelompok tani yag mendapat bantuan sarana pasca panen taaman pangan	1 Lap	100,00
	Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	44,900	100,00	Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen Laporan pembinaan, sosialisasi, bimtek, koordinasi/workshop, a presiasi dan monev pasca panen	12 Bulan 4 Lap	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	8.652.000	99,26			
	Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	2.382.000	100,00	Tersedianya unit pengembangan air permukaan Rehabilitasi JITUT dan JIDES Tersedianya unit pengembangan embung mendukung tanaman pangan dan hortikultura serta pengembangan sumur resapan mendukung hortikultura Tersedianya unit pengembangan irigasi tanah dangkal Tersedianya unit	11 unit 640 Ha 27 Unit 20 Unit 4 Unit	100,00



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
				pengembangan irigasi partisipatif mendukung hortikultura		
	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian	5.147.500	98,83	Cetak sawah Prasarana sertifikasi lahan pertanian Tersedianya jalan usaha tani Tersedianya data spasial luas baku lahan sawah	600 Ha 600 persil 5 Km 3 Unit	98,83
	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	157.700	97,62	Tersedianya traktor R-2 dan pompa air Penguatan kelembagaan UPJA	6 Unit 42 Paket	97,62
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis	50.000	100,00	Adanya administrasi kegiatan mendukung tanaman pangan	12 bulan	100,00
	Fasilitas pupuk dan pestisida	835.000	100,00	Terbangunnya rumah kompos (RPPO) Adanya unit pengolah pupuk organik (UPPO) Penguatan komisi pengawas pupuk dan pestisida	1 Unit 2 Unit 1 Paket	100,00
	Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan	80.000	100,00	Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan	10 Dok	100,00
	Total	13.198.153	94,45			
B	Dinas Peternakan					
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1.593.000	100,00		19 Unit	100,00
	Pengelolaan air irigasi untuk pertanian:	455.000	100,00	Terlaksananya pengemb. Fasilitas dalam pengelolaan		



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Pengembangan embung dan sumur resapan 19 unit.			lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian		
	- Pembuatan embung di kawasan peternakan 8 unit	400.000	100,00	Tersedianya (unit) pengemb. Konservasi air (melalui pengemb. Embung, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir yang berfungsi	8 Unit	100,00
	- Pembangunan sumur resapan 11 unit	55.000	100,00	Terbangunnya sumur resapan guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian	11 Unit	100,00
	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	388.000	100,00	Terlaksananya lahan yang di optimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi		100,00
	Perluasan areal peternakan untuk pembangunan kebun HMT dan padang penggembalaan	50.000	98	Terlaksananya layanan yang optimal		98
	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	700.000	97	Terbangunnya rumah kompos	1 Unit	97
		1.593.000	100,00			98,68
C	Dinas Kehutanan dan Perkebunan					
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	33.200	100,00	Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian		99,65



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	Pengelolaan air irigasi untuk pertanian: - Pengembangan Embung, Dam Parit - Pembangunan sumur resapan - Pembuatan irigasi sumur dangkal - Pengembangan irigasi air permukaan	950.000	100,00	Tersedianya Embung, dam parit yang memadai. Tersedianya sumber air untuk lahan pertanian. Tersedianya sarana irigasi sumur dangkal. Tersedianya unit pengembangan permukaan.	10 Unit 10 Unit 10 Unit 5 unit	100,00
	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian	1.850.000	100,00			100,00
	Perluasan areal kebun kakao (penyiapan lahan dan penyediaan saprodi)	800.000	100,00	Tersedianya lahan perkebunan yang siap tanam	200 Ka	
	Pengembangan jalan produksi (upah tenaga kerja, bahan/material dan sewa alat)	500.000	100,00	Terbangunnya jalan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian	5 KM	
	Optimalisasi lahan (upah tenaga kerja dan saprodi)	400.000	100,00	Terlaksananya optimalisasi lahan pertanian	100 Ha	
	Pengembangan jalan usaha tani (upah tenaga kerja dan bahan/material)	150.000	100,00	Terbangunnya jalan usaha tani untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian	3 KM	
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan sarana pertanian	50.000	100,00		1 Keg	98,60
	Layanan perkantoran	14.100	100,00	Terwujudnya tertib administrasi	12 Bulan	100,00



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
				perkantoran		
	Pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	35.900	100,00	Tersedianya laporan pembinaan, sosialisasi, bintek, koordinasi, apresiasi dan monev pasca panen	3 KM	100,00
	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	350.000	100,00		3 Unit	100,00
	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) pendukung perkebunan	350.000	100,00	Terbangunnya rumah kompos serta adanya unit pengeloaah pupuk organik	3 Unit	100,00
		3.200.000	99,65			99,65
D	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan					
1	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	514.900	84,98			4,98
	Pemantapan sistem penyuluhan pertanian	2.141.590	91,09	Terselenggaranya dukungan terhadap kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh petani (UP-FMA) Tersalurnya bantuan sosial dana hibah FMA di 40 desa Terlaksananya penguatan Terlaksananya kaji tindak pengembangan dan aplikasi teknologi spesifik lokalita bagi TPL Terselenggaranya manajemen dan evaluasi program Terselenggaranya dukungan pelaksanaan program Terlaksananya pengadaan Laptop	40 desa 1 paket 40 paket 15 BPP 1 Keg 1 Keg 1 Unit	80,14



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	Total	2.141.590	91,09			91,09
E	BPM-PD					
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	66.553.930	93,88			
	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	65.841.590	94,07	Cakupan Penerapan PNPM	3 Keg	94,07
	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	600.000	88,94	Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal dalam PNPM Perdesaan	12 Bulan	88,94
	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	112.340	7,54	Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan pemerintah lokal dalam PNPM Perdesaan	12 Bulan	7,54
	TOTAL	66.553.930	93,88			93,88
G	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	426.011	99,55			
	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	376.011	99,55	Terlaksananya program perluasan kesempatan kerja	88 org	99,55
	Pelayanan informasi pasar kerja	50.000	93,17	Tercapainya pencari kerja yang memanfaatkan jasa pusat layanan IPK	12 bulan	93,17
	Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	2.298.897	80,06			



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	1.484.900	71,88	Terwujudnya sinkronisasi antar program P2MKT		71,88
	Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi	6.600	95,45	Tersedianya kelembagaan masyarakat	1 Peket	95,45
	Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi	398.150	5,52	Terfasilitasinya pelayanan Jadup pemb, sosbud pendidikan dan pengembangan kelembagaan sehingga transmigran kerasan	1 Paket	5,52
	Penyerasian lingkungan dikawasan transmigrasi	163.687	96,06	Terlaksananya keg pengembangan KTM	1 paket	96,06
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT	245.560	91,31	Terlaksananya pengendalian dan tersusunnya laporan pelaksanaan program bidang P2MKT	1 Paket	91,31
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas					
	Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binalantas	44.510	99,96	Tercapainya jumlah lembaga pelatihan dan produktivitas yang dikembangkan	1 Paket	100,00
	TOTAL	3.173.418	91,86			99,88
H	Dinas Pendidikan Nasional					
	Program Pendidikan Non Formal dan Informal					
	Penyelenggaraan	1.102.840	88,63	10 Lembaga Desa	10 PAUD	88,63



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	pendidikan anak usia dini (PAUD) rintisan			gelombang ke 2 tahun 2011 PPAD 6 lembaga penerima Additional Block Grant (ABG) tahun 2011	6 PPAUD	
	TOAL	1.102.840	88,63			88,63
J	Dinas Kelautan dan Perikanan					
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan					
	Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan	320.000	73,15			84,32
	- Pembangunan Depo pemasaran ikan		100	- Pembangunan Depo pemasaran ikan	1 Unit	100
	- Jasa konsultan perencana		100	- Jasa konsultan perencana	1 keg	100
	- Jasa konsultan pengawas		100	- Jasa konsultan pengawas	1 keg	100
	Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan	100.000	99,20			
	- Pengadaan para- para penjemuran rumput laut		99,20	Pengadaan para-para penjemuran rumput laut	10 unit	100
	-Pengadaan sarana pengolahan rumput laut		99,30	Pengadaan sarana pengolahan rumput laut	2 unit	100
	-Pengadaan sarana pengolahan terasi		99,50	Pengadaan sarana pengolahan terasi	2 unit	100
	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	69.262	98,84	Terwujudnya peningkatan dukungan managemen terhadap tugas-tugas teknis		99,63



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	Ditjen P2HP			Ditjen P2HP.		
	Program pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1.250.000	99,47	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi, sosialisasi program, lokakarya program dan pendampingan masyarakat pesisir		99,47
	TOTAL	1.739.262	99,62			91,90

5.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran Tugas Pembantuan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 pada kementerian/lembaga pemberi tugas pembantuan yang tertera dalam DIPA masing-masing kementerian / lembaga. Berdasarkan DIPA Tugas Pembantuan Departemen/Lembaga yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, secara kumulatif anggaran/pagu DIPA Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 sebesar Rp 92.702.193.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 50.530.278.000,- PNPB dan PHLN sebesar Rp 42.171.915.000,- dan UB sebesar Rp 65.841.590.000,-.

Adapun alokasi anggaran pada masing-masing SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan Kabupaten Sumbawa tahun 2011 adalah:

1. Tugas Pembantuan pada **Dinas Pertanian Tanaman Pangan**, anggaran sebesar Rp.13,198,153,000.00 (*Tiga Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
2. Tugas Pembantuan pada **Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)**, anggaran sebesar Rp 2.141.590.000,- (*Dua Miliar Seratus Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
3. Tugas Pembantuan pada **Dinas Peternakan**, anggaran sebesar Rp 1.593.000.000.000,- (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*).



4. Tugas Pembantuan pada **Dinas Kehutanan dan Perkebunan**, anggaran sebesar Rp 3.200.000.000,- (*Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
5. Tugas Pembantuan pada **Dinas Pendidikan Nasional**, anggaran sebesar Rp 1.102.840.000,- (*Satu Miliar Seratus Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
6. Tugas Pembantuan pada **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, anggaran sebesar Rp 3.173.418.000,- (*Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapa Belas Ribu Rupiah*).
7. Tugas Pembantuan pada **Dinas Kelautan dan Perikanan**, anggaran sebesar Rp 1.739.262.000,- (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).
8. Tugas Pembantuan pada **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) UB dan TP**, anggaran sebesar Rp 66.553.930.000,- (*Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah*).

Adapun rincian sumber dan besar anggaran program/kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Sumber dan Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2011

No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
A	Kementerian Pertanian			
		1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan		
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	4.546.153	89,64
		Pengelolaan produksi tanaman kacang	1.239.125	64,21
		Pengelolaan produksi tanaman	2.848.935	99,04



No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
		serelia		
		Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan	6.500	100
		Penangan pasca panen tanaman pangan	406.693	100
		Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	44.900	100
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	8.652.000	99,26
		Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	2.382.000	100
		Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian	5.147.500	98,83
		Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	157.500	97,62
		Dukungan manajemen dan dukungan teknis	50.000	100
		Fasilitas pupuk dan pestisida	835.000	100
		Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan	80.000	100
		Jumlah	13.198.153.000,-	94,45
		2. Dinas Peternakan		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		
		Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	846.000	100
		Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	388.000	100
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian	50.000	98
		Fasilitas Pupuk dan Pestisida	700.000	97
		Jumlah	1.593.000	98,68
		3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		



No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
		Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	950.000	100
		Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian	1.850.000	100,00
		Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan sarana pertanian	50.000	98,60
		Fasilitas Pupuk dan Pestisida	350.000	100,00
		Jumlah	3.200.000	99,65
		4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, perikanan dan Kehutanan		
		Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani		
		Pemantapan sistem penyuluhan pertanian	1.738.990	91,09
		Jumlah	1.738.990	91,09
B	Kementerian Dalam Negeri			
		1. BPM-PD		
		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		
		Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	26.098.665	94,07
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	600.000	88,94
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	112.340	7,54
		Jumlah	66.553.930	93,88
C	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
		1. Dinas Nakertrans		
		Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	426.011	99,55
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan	376.011	99,58



No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
		Kesempatan Kerja		
		Peningkatan pengembangan pasar kerja	50.000	95,84
		Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	2.298.897	80,06
		Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	1.484.900	71,88
		Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi tertinggal	6.600	95,45
		Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi	398.150	5,52
		Penyerasian lingkungan dikawasan transmigrasi	163.687	96,06
		Dukungan manajemen dan dukungan tehnik lainnya Ditjen P2MKT	245.560	91,31
		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas	448.510	99,96
		Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan Binalantas	448.510	99,96
		Jumlah	3.173.418	91,86
D	Kementerian Pendidikan Nasional			
		1. Dinas Pendidikan Nasional		
		Program Pendidikan Non Formal dan Informal		
		Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) rintisan	1.102.840	88,63
		Jumlah	1.102.840	88,63
E	Kementerian Kelautan dan Perikanan			
		1. Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	489.262	82,11



No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
		Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan	320.000	73,15
		Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan	100.000	99,20
		Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen P2HP	69.262	98,84
		Program pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1.250.000	99,47
		Pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat	1.250.000	99,47
		Jumlah	1.739.262	90,79

5.1.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan bantuan/Dana Tugas Pembantuan yaitu :

Tabel 5.3
Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi Pemecahannya
Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kab. Sumbawa Tahun 2011

No	Program/Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut yang Diperlukan
1	2	3	4
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintahan Desa (BPM-PD)		
	Program Peningkatan Pemberdayaan masyarakat		
	- Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dan Kecamatan	Keterlambatan pengesahan DIPA untuk PNPM-GSC	Realisasi pencairan dana BLM PNPM-GSC hanya 80% Mengupayakan sisa dana BLM PNPM-GSC untuk menjadi luncturan tahun 2012



No	Program/Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut yang Diperlukan
1	2	3	4
	- Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	Sedikitnya waktu yang diberikan untuk proses pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dikarenakan terlambatnya pengesahan DIPA Revisi Tugas Pembantuan	Diharapkan pengesahan DIPA Revisi bisa lebih awal
	- Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Masih ada pemblokiran dana pada tugas pembantuan	Satker Kabupaten telah melakukan konformasi dan konsultasi kepada Satker Pusat
2	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Kehutanan		
	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani		
	- Pemantapan sistem penyuluhan pertanian	Adanya revisi DIPA dan POK	Telah dilakukan revisi DIPA dan POK pada bulan Nopember 2011
3	Dinas Pendidikan Nasional		
	Program Pendidikan Non dan Informal		
	- Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) rintisan	Belum adanya kebijakan tentang mekanisme pengalihan program dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PPAUD	Mulai januari 2012 dukungan Pemda terkait dengan PPAUD sangat terbantuan

5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan

5.2.1. Dasar Hukum

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke desa sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas



pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Lebih lanjut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada Bab VII tentang penyelenggaraan tugas pembantuan.

Secara operasional, Tugas Pembantuan yang diberikan ke desa oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa didasarkan pada:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah.

5.2.2 Urusan Pemerintahan yang Ditugas pembantuankan Kepada Desa

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 pada pasal 212 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 perihal keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan desa hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.



Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pemberian Alokasi dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

5.2.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa. Adapun jumlah kumulatif anggaran yang dialokasikan untuk diberikan ke desa sebagai pelimpahan kewenangan/penugasan pemerintah daerah yang terdiri dari:

- a. Bantuan Keuangan Ke Pmdes :Rp. 22.550.972.000,-
- b. Pajak/Retribusi :Rp. 329.700.000,-
- c. Hibah kepada Desa :Rp. 641.750.058,-



BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. Kerjasama Antardaerah

6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antardaerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 195 dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemanfaatan serta pemasaran potensi daerah. Kerjasama antardaerah diyakini menjadi media solusi untuk menyelesaikan masalah lintas daerah, antara lain efektivitas dan efisiensi pelayanan lintas daerah, efektivitas & efisiensi pengelolaan pelayanan interrelasi antardaerah, manajemen konflik antardaerah.

Dalam rangka kerjasama antardaerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa menempuh kebijakan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pemerintah daerah lainnya, baik dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi, arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa dalam skala regional, pengembangan kapasitas SDM, penanggulangan kemiskinan maupun dalam pembinaan dan penertiban wilayah perbatasan, serta tetap melanjutkan kerjasama yang telah disepakati pada tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Mengimplementasikan hal tersebut, pada tahun 2011 telah terjalin kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah daerah lain/pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk secara bersama-sama berupaya menekan/menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kemandirian daerah khususnya dalam pengelolaan potensi sumber daya lokal.



6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2011, kerjasama antardaerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah didasarkan atas :

1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Wakil Gubernur Tentang Percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di NTB Nomor 3 Tahun 2011 Tanggal 18 Januari 2011;
2. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Gubernur NTB Tentang Peningkatan produksi beras nasional di NTB Nomor 121 Tahun 2011 Taggal 13 Oktober 2011;
3. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Gubernur NTB tentang program swasembada daging sapi/kerbau di NTB Nomor: 122 tahun 2011 tanggal 13 oktober 2011;

Sebagai gambaran terhadap hasil yang dicapai dari kerjasama tersebut adalah :

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin sebesar 2%, dari 90.400 orang (tahun 2010) menjadi 82.857 orang (tahun 2011).
2. Terjadi *surplus* beras sebesar 188.081,74 ton dari produksi 246.292,2 ton dan konsumsi 58.210,46 ton, sehingga Kabupaten Sumbawa mendapat penghargaan Ketahanan Pangan dari Menteri Pertanian RI.
3. Terjadi *surplus* daging sapi/kerbau di Kabupaten Sumbawa sebesar 61.263,82 Kg, dari total produksi 1.438.464,82 Kg dan konsumsi 1.377.201 Kg.

6.1.3 Permasalahan dan Solusi

Terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah, beberapa masalah yang mengemuka antara lain :

- Belum terkoordinasinya kerjasama antarkabupaten/kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik kerjasama antar sektor maupun lintas sektor.
- Kerjasama antarkabupaten/kota yang saling berbatasan terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan masih terkendala dengan belum tuntasnya penyelesaian batas wilayah.



Solusi sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh adalah melalui forum kerjasama antardaerah yang difokuskan pada kebutuhan bersama baik bagi masyarakat di wilayah perbatasan maupun dalam rangka pengembangan potensi sumberdaya alam yang saling menguntungkan.

6.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

6.2.1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh daerah. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 yaitu pada misi ke-2,3 dan 4 maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lebih difokuskan kepada memberikan kesempatan yang luas bagi berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah baik dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia, pengembangan daya dukung infrastruktur daerah/wilayah, pengembangan investasi serta sumber daya lokal.

Pola kerjasama ini diharapkan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terutama dalam memperoleh akses mereka ke lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang mereka miliki. Bidang yang dikerjakamkan dengan pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sarana prasarana publik, pendidikan, informasi, aparatur, aset daerah, pelayanan pada masyarakat, tata kota, agama.

6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2011 sesuai dengan kebijakan yang ditempuh maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama dengan beberapa pihak sebagai berikut :

1. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan PT Newmont Nusa Tenggara Tentang Kerjasama Dalam Rangka



Mendukung Kelancaran Kegiatan Eksplorasi PT Newmount Nusa Tenggara di wilayah Kabupaten Sumbawa Nomor 48 Tahun 2011 dan Nomor : 044A/GMO-DL/NNT/V/2011 tanggal 11 Mei 2011;

2. Kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT Putri Cahaya Kencana tentang pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 012.1/502/ADM PEM/2011 dan Nomor 648/686/2011 tanggal 3 November 2011;
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT Bank Pembangunan Daerah NTB tentang Kredit Pemilikan Rumah/Kredit serba guna bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa nomor:012.1/501/ADM PEM/2011 dan nomor PJ/01.10/60.30/033/2011 Tanggal 3 November 2011.

Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

1. Kerjasama dengan PT. NNT telah terealisasi dalam bentuk lanjutan pembangunan sarana dan prasarana pasar, pengerjaan jalan ruas Lantung – Ropang, ruas Batu Dulang – Tepal, ruas Tepal – Baturotok, GOR Mampis Rungan, Kantor Camat Sumbawa, Ruang Bengkel SMKN 2 Sumbawa, Laboratorium Bahasa SMAN 1 Sumbawa, truck Pengangkut Sampah, Buldozer, Kontainer, gedung DPRD Kabupaten Sumbawa.
2. Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan PT Putri Cahaya Kencana tentang pembangunan perumahan PNS, saat ini sedang dalam tahap seleksi calon yang akan mendapatkan rumah tersebut.
3. Kerjasama dengan PT. Bank NTB belum terealisasi, karena calon penerima belum final.

6.2.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga khususnya perumahan belum terlaksana secara efektif karena persyaratan administrative belum final. Sebagai solusi dari permasalahan yang



dihadapi akan dilakukan upaya percepatan penyelesaian kelengkapan administrasi.

6.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

6.3.1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat 6 (enam) urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional. Dalam penyelenggaraan keenam urusan tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat ditingkatkan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat di daerah adalah dengan pembentukan instansi vertikal di daerah, yang berfungsi baik untuk melaksanakan program dan kegiatan dari instansi induk juga sebagai jembatan pelaksanaan program yang dapat dilaksanakan secara bersamaan di daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengurus kewenangan yang belum dapat ditangani oleh daerah dan juga kewenangan yang merupakan pengaturan hal-hal khusus antara lain dibidang keuangan, agama, militer, hukum dan pertanahan.

Menyikapi hal tersebut kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah mengintensifkan komunikasi dengan instansi vertikal serta melakukan penyelarasan dalam rangka menunjang kelancaran program-program pemerintah pusat di daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan koordinasi dan penyediaan dana daerah untuk urusan bersama serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan dekonsentrasi di daerah.

6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama dengan instansi vertikal sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

1. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang fasilitas pembentukan Perda program legislasi daerah nomor 42 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011;
2. Kesepakatan Bersama antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara Nomor: 110 Tahun 2011 Tanggal 1 Desember 2011;
3. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Tentang Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Kantor Desa Nomor 94 Tahun 2011 Tanggal 1 Juli 2011;
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengelolaan program Pembiayaan Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Nomor: 43/PKS/DP/2009 dan Nomor 027/130/BPM-PD/2009 tanggal 17 Juli 2009;
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya Tentang Pelaksanaan Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Swadaya di Kabupeten Sumbawa Nomor : 95/PKS/DS/2008 dan Nomor: 905/345/BPM-PD/2008 Tanggal 05 Desember 2008;
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonersia tentang Dukungan infrastruktur percepatan pembangunan Kawasan Strategis Kabupeten Sumbawa (KSK) nomor 129 Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011;
7. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa tentang penyusunan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Distribusi Pendapatan, PDRB dan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Nomor : 050.13/190/2011 dan Nomor : 52041.90 tahun 2011.

Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

1. Kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, telah berlangsung fasilitasi penyusunan produk hukum daerah khususnya fasilitasi rancangan peraturan daerah.
 2. Kerjasama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dan pembinaan administrasi pertanggungjawaban keuangan.
 3. Realisasi dari kerjasama dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI, telah terbangun 3 unit kantor desa yaitu masing-masing di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir, Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk dan Desa SP III Kecamatan Plampang.
 4. Kerjasama dengan Deputy Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya, telah dilakukan operasi bedah rumah di 13 desa sebanyak 450 rumah dan pembangunan sarana utilitas umum (PSU) di 3 desa sebanyak 300 unit.
 5. Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tentang Dukungan infrastruktur percepatan pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten Sumbawa (KSK) berupa pembangunan kawasan pantai goa sebagai kawasan hilir dari kawasan strategis kabupaten Brang Pelat.
 6. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa berupa dokumen Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Distribusi Pendapatan, PDRB dan Indek Pembangunan Manusia (IPM).
- Kegiatan-kegiatan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah seperti Kepolisian Resort Sumbawa, Kodim 1607 Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Pengadilan Negeri Sumbawa serta koordinasi dengan instansi vertikal lainnya yaitu Badan Pertanahan Nasional, Kantor



Perbendaharaan dan Keuangan Negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sumbawa, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Sumbawa, Kantor Konservasi Sumber Daya Alam, Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Sumbawa, Lembaga Pemasarakatan dan Kantor Imigrasi.

6.3.3. Permasalahan dan Solusi

Sampai dengan tahun 2011 kegiatan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh beberapa kendala antara lain terjadinya perubahan juklak/juknis dari instansi vertical yang ada di pusat, sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan di daerah. Kendala lain yang dihadapi adalah adanya keterbatasan daerah dalam penyiapan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah pusat dalam waktu yang cukup mendesak.

Terhadap permasalahan tersebut solusi yang akan dilakukan adalah lebih mengintensifkan komunikasi dan koordinasi serta melakukan tindakan-tindakan antisipatif terhadap penyiapan dokumen-dokumen perencanaan serta dokumen pendukung lainnya guna memenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat.

6.4. Pembinaan Batas Wilayah

6.4.1. Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan batas wilayah diarahkan untuk terwujudnya kepastian batas wilayah antardaerah maupun antarwilayah kecamatan dan desa/kelurahan serta pengamanan tanda batas wilayah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan batas wilayah dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu serta fasilitasi persoalan-persoalan batas antarkecamatan, antardesa/kelurahan.



6.4.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat terus dilakukan, sampai dengan saat ini sudah dalam tahap mediasi oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan penyelesaian oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Menyangkut batas desa pada tahun 2011 telah dilakukan koordinasi penetapan wilayah perbatasan dan telah dihasilkan dokumen peta desa.

6.4.3. Permasalahan dan Solusi

Batas wilayah desa dan kecamatan di Kabupaten Sumbawa masih belum terselesaikan secara keseluruhan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah-langkah antara lain penegasan batas teknis dengan instrument yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya dengan pal (tidak lagi menggunakan batas-batas alam), pemetaan wilayah desa dan kecamatan secara sistematis dengan bersandar pada peta dasar Bakosurtanal, serta mengakumulasi data dan informasi kewilayahan yang berbasis Geografis Information System (GIS) melalui Pusat Informasi Spasial Kabupaten (PISK) dan peningkatan kualitas SDM bidang *GIS-Remote Sensing*.

6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

6.5.1. Bencana yang Terjadi dan Pengulangannya

Pada tahun 2011 terjadi banjir bandang di Kecamatan Rhee, Utan, Buer, Alas dan Alas Barat. Banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan tersebut mengakibatkan korban meninggal, luka berat, luka ringan dan kehilangan harta benda. Wilayah kecamatan Buer merupakan wilayah yang paling parah tingkat kerusakannya seperti korban meninggal 1 orang, luka berat 9 orang, luka ringan 27 orang dan pengungsi 447 orang.

Penanganan dan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah dengan pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara, rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana.



6.5.2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi di Kabupaten Sumbawa selama tahun 2011 digolongkan sebagai status bencana lokal yang lingkup dampaknya pada tingkat desa atau kecamatan.

6.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana Kabupaten Sumbawa tahun 2011 adalah APBD Kabupaten Sumbawa. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan ini dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2011 sebesar Rp. 998.413.808,- (*sembilan ratus sembilan delapan juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan rupiah*).

6.5.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Langkah antisipasi dan kesiap-siagaan aparat pemerintah, masyarakat terhadap bencana perlu selalu disiapkan. Langkah-langkah antisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara lain sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan koordinasi antar anggota Satlak BPBD Kabupaten Sumbawa.
- b. Meningkatkan intensitas pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Pembuatan peta rawan bencana, peta rencana evakuasi.
- d. Pembuatan Regu Tanggap Darurat, maupun pelatihan penanggulangan bencana/ Gladi Posko / Lapang Bencana.
- e. memantau dan mengantisipasi seluruh kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa.

6.6. Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan kawasan khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan pariwisata, perdagangan dan



otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada dasarnya didalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan tentang kawasan khusus, melainkan kawasan strategis.

Di Kabupaten Sumbawa sudah terbangun beberapa kawasan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh yang merupakan simpul pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan keunggulan kawasan, diantaranya kawasan Agropolitan Alas-Utan, Kawasan Agropolitan Emparano, Kawasan KTM Labangka, serta Kawasan Agropolitan Brang Pelat.

Pengelolaan terhadap kawasan-kawasan strategis tersebut belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan kemampuan daerah baik didalam menyiapkan *blue print* perencanaan dan pengelolaan kawasan maupun kemampuan anggaran yang relatif sangat terbatas, sementara kontribusi atau peran serta pihak swasta didalam menanamkan investasi untuk pengembangan kawasan tersebut juga sangat terbatas.

6.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.7.1. Gangguan yang Terjadi

Pada tahun 2011, gangguan yang disebabkan oleh Konflik berbasis SARA, anarkisme bahkan separatis tidak terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Beberapa gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum antara lain terjadi dalam kasus-kasus pembebasan tanah warga/pembongkaran pagar/bangunan yang terkena proyek jalan, jembatan dan lain-lain, serta kasus pencurian ternak, miras dan kasus-kasus amoral yang meskipun frekwensinya tidak terlalu menonjol.

6.7.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

SKPD yang menangani Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesbangpol Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan, dan Kecamatan. Selain itu, terdapat



instansi lain yang tidak termasuk dalam kelompok SKPD yaitu instansi vertikal di daerah sebagai pilar kekuatan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu TNI dan Polri.

6.7.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Tabel 6.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD Yang Menangani Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

No	SKPD/UNIT	Kualifikasi Pendidikan										Pangkat/Gol			
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jlh	I	II	III	IV
1	Satpol PP	3	12	32	0	0	1	5	0	0	53	7	34	11	1
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat	1	2	10	0	0	2	14	1	0	30	2	7	15	6
	Jumlah	4	14	42	0	0	3	19	1	0	83	9	41	26	7

6.7.4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan ini dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2011 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2
Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kantibmas Kabupaten Sumbawa Tahun 2011

No.	SKPD	Anggaran (Rp)
1	Badan Kesbangpol Linmas	4.407.215.856
2	Sat Pol PP	3.849.341.371
	Jumlah	8.256.557.227

6.7.5. Penanggulangan

Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sumbawa adalah:

- Koordinasi dengan aparat pengamanan terkait dalam rangka koordinasi Pembina wilayah yang dilaksanakan setiap bulan yang terdiri dari anggota forum koordinasi pimpinan umat beragama.
- Penyiapan SDM yang memiliki kapasitas yang memadai melalui pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- Membangun forum-forum diskusi
- Melakukan tindakan sesuai aturan / regulasi dalam rangka supremasi hukum secara tegas dan konsisten.



- e. Penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
- f. Melakukan fasilitasi pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- g. Melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring wilayah sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban yang mungkin bisa terjadi.
- h. Melaksanakan aktifitas patroli wilayah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

6.7.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban, koordinasi dan pelibatan instansi terkait selalu dilakukan, sehingga penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi: Kepolisian, TNI, Polisi Pamong Praja dan aparat yang terkait.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa Tahun 2011 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumbawa dan merupakan rangkaian pelaksanaan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dari tahun tahun sebelumnya, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015. LKPJ ini disusun dengan penekanan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi terhadap perkembangan (*progress*) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih memfokuskan pada pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini, didasarkan atas ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2011 yang telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2011 diharapkan menjadi dokumen untuk mengarahkan perbaikan-perbaikan ke depan. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat berlandaskan prosedur yang



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

berlaku, sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa. Sangat disadari, bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

LKPJ Tahun 2011 ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja RKPD Tahun 2011 yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2009-2013. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan - Nya kepada kita semua.

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

Program	Kegiatan					Persentase pencapaian rencana tingkat	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	
URUSAN WAJIB Urusan Wajib Pendidikan <i>Pendidikan Anak Usia Dini</i>	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rupiah	291.737.500	291.737.500	100,00	
		Keluaran : Terselenggaranya pendidikan anak usia 0-6 tahun	WB	5.195	5.195	100,00	
		Hasil : Meningkatnya jumlah anak usia dini yang terlayani	%	10,39	10,39	100,00	
	Pendamping program PPAUD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rupiah	347.633.900	340.993.220	98,09	
		Keluaran : Terselenggaranya pendidikan anak usia 0-6 tahun	WB	5.195	5.195	100,00	
		Hasil : Meningkatnya jumlah anak usia dini yang terlayani	%	10,39	10,39	100,00	
	<i>Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>	Penambahan ruang kelas sekolah (ruang kelas baru) SD/SMP	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	2.121.500.000,00	1.492.182.229	70,34
			Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana sekolah	paket	10,00	-	-
			Hasil : Meningkatnya daya tampung untuk peserta didik ditingkat dasar	%	19,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan/rehab ruang kelas, paving block dan pagar	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	1.138.822.200,00	1.078.277.700	94,68
		Keluaran : Terlaksananya pembangunan/rehab ruang kelas, pembangunan pagar dan penataan lingkungan sekolah	paket	11,00	11,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya kelayakan dan keamanan sarana belajar	%	17,00	17,00	100,00
	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	87.500.000,00	87.400.000	99,89
		Keluaran : Terlaksananya pemasangan jaringan listrik	paket	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya proses kegiatan pelayanan administrasi dan belajar mengajar	%	20,00	20,00	100,00
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	41.500.000,00	41.190.000	99,25
		Keluaran : Terlaksananya pemasangan/pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi	paket	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya kesehatan siswa, guru dan pegawai	%	0,50	0,50	100,00
	Pengadaan meubelair sekolah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	197.600.000,00	197.600.000,00	100,00
		Keluaran : Tersedianya meubelair sekolah	paket	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Lancarnya proses belajar mengajar	%	5,00	5,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Rehab sedang/berat bangunan sekolah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	48.754.858.100,00	22.924.178.296	47,02
		Keluaran : Terselenggaranya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (dana DAK)	keg	1,00	0,55	54,82
		Hasil : Meningkatnya kualitas sarana prasarana belajar sekolah	%	1,44	0,79	54,82
	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	259.550.700,00	238.581.700	91,92
		Keluaran : Terselenggaranya pkt B setara SMP	orang	200,00	200,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya APK dan APM jenjang SMP	%	0,04	0,04	100,00
	Olimpiade MIPA siswa SD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	45.288.300,00	40.238.300	88,85
		Keluaran : Terselenggaranya olimpiade siswa tingkat SD	orang	100,00	100,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya kreatifitas siswa peserta lomba	%	10,00	10,00	100,00
	Pelaksanaan Ujian sekolah SMP	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	50.235.800,00	40.715.800	81,05
		Keluaran : Terlaksananya ujian akhir nasional SMP	siswa	950,00	950,00	100,00
		Hasil : Terukurnya mutu pendidikan ditingkat SMP	%	0,90	0,90	100,00
	Monitoring pelaksanaan PSB SD dan SMP	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	5.797.000,00	-	-
		Keluaran : Terselenggaranya monitoring pelaksanaan PSB SD dan SMP	sekolah	427,00	-	-
		Hasil : Sejumlah anak yang diterima bersekolah pada jenjang pendidikan dasar	%	6,57	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Olimpiade SAINS Nasional Tingkat SMP	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	96.966.750,00	86.499.750	89,21
		Keluaran : Terlaksananya olimpiade SAINS tingkat SMP	siswa	360,00	360,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya kualitas siswa SMP	%	3,36	3,36	100,00
	Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Nasional SD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	242.986.200,00	218.191.200,00	89,80
		Keluaran : Terlaksananya ujian akhir sekolah dan nasional SD	siswa	8.500,00	8.500,00	100,00
		Hasil : Terukurnya angka dan nilai lulusan	%	0,79	0,79	100,00
	Olimpiade olahraga siswa Nasional (O2SN) SMP	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	178.586.100,00	159.561.650	89,35
		Keluaran : Terlaksananya olimpiade olahraga siswa nasional tingkat SMP	siswa	90,00	90,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya kualitas siswa SMP	%	0,56	0,56	100,00
Biaya operasional sekolah (BOS) TK, SD dan SMP	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	3.146.675.600,00	2.939.290.195	93,41	
	Keluaran : Terpenuhinya operasional sekolah TK, SD dan SMP	siswa	70.928,00	70.928,00	100,00	
	Hasil : Meningkatnya APM, APK dan APS	%	27,73	27,73	100,00	
Biaya operasional UPT	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	251.122.741,00	171.791.692	68,41	
	Keluaran : Terlaksananya pengelolaan administrasi UPT	UPT	18,00	18,00	100,00	
	Hasil : Meningkatnya mutu pelayanan di UPT	%	27,07	27,07	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
	Workshop dan monitoring tim pengembang kurikulum SMP	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	35.003.000,00	35.003.000,00	100,00
		Keluaran : Terlaksananya workshop dan monitoring tim pengembang kurikulum SMP	orang	40,00	40,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya kemampuan kepala sekolah dan guru dalam penyusunan KTSP	%	1,16	1,16	100,00
	Olimpiade olahraga siswa Nasional (O2SN) SD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	152.338.000,00	116.835.500	76,69
		Keluaran : Terlaksananya olimpiade olahraga siswa nasional tingkat SD	siswa	90,00	90,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya prestasi siswa Sd di bidang olahraga	%	1,17	1,17	100,00
	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	3.340.843.100,00	3.321.365.700	99,42
		Keluaran : Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga tidak mampu	keg	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya angka partisipasi	%	2,56	2,56	100,00
	Workshop dan monitoring tim pengembang kurikulum PAUD, TK dan SD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	58.711.300,00	55.811.300	95,06
		Keluaran : Terlaksananya workshop dan monitoring tim pengembang kurikulum PAUD, TK dan SD	orang	50,00	50,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pendidikan Menengah</i>	Pembangunan Gedung Sekolah SMA/SMK	Hasil : Meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam penyusunan KTSP	%	6,60	6,60	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	1.185.235.800,00	892.149.840	75,27
		Keluaran : Terlaksananya pembangunan ruang kelas SMA/SMK	paket	3,00	3,00	100,00
	Pembangunan/rehab rumah dinas kepek, guru, penjaga sekolah dan pagar sekolah	Hasil : Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana RKB	%	12,00	12,00	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	250.000.000,00	249.800.000	99,92
		Keluaran : Terlaksananya pembangunan pagar dan penataan halaman sekolah	paket	3,00	3,00	100,00
	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Hasil : Meningkatkan kenyamanan dan keamanan sarana prasarana belajar	%	14,00	14,00	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	220.000.000,00	219.800.000	99,91
		Keluaran : Terlaksananya pemasangan jaringan listrik di SMA/SMK	paket	3,00	3,00	100,00
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Hasil : Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar	%	1,34	1,34	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
			Keluaran : Terlaksananya pengadaan jaringan air bersih	paket	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Meningkatnya kesehatan siswa	%	1,23	1,23	100,00
	Pengadaan meubelair	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	273.600.000,00	273.600.000,00	100,00
		Keluaran : Terlaksananya pengadaan meubelair sekolah	paket	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Lancarnya proses belajar mengajar	%	2,30	2,30	100,00
	Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	464.500.000,00	346.400.000	74,57
		Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas	paket	3,00	3,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya kelayakan sekolah	%	0,46	0,46	100,00
	Penyediaan biaya operasional manajemen mutu (BOMM) SMA, SMK dan SLB	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	2.001.769.316,00	1.869.809.607	93,41
		Keluaran : Terlaksananya proses belajar mengajar di SMA/SMK dan SLB	Siswa	11.618,00	11.618,00	100,00
		Hasil : Meningkatkan angka partisipasi	%	15,48	15,48	100,00
	Penyelenggaraan paket C setara SMA	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	196.530.500,00	182.274.000	92,75
		Keluaran : Terselenggaranya kegiatan paket C	WB	200,00	200,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya angka melek huruf	%	0,40	0,40	100,00
	Pelaksanaan Ujian nasional dan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	95.168.700,00	83.147.700	87,37
		Keluaran : Terlaksananya ujian nasional, ujian sekolah SLB, SMA/MA & SMK	siswa	4.650,00	4.650,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya mutu pendidikan	%	6,02	6,02	100,00
	Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSSN) SMA	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	232.464.400,00	203.041.100	87,34
		Keluaran : Terselenggaranya OSSN SMA	siswa	216,00	216,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Meningkatnya prestasi siswa dibidang sains	%	0,42	0,42	100,00
	Penyelenggaraan kegiatan PSB SMA/SMK Negeri dan Swasta	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	10.322.100,00	10.322.100	100,00
		Keluaran : Terlaksananya monitoring pelaksanaan penerimaan siswa baru SMA/SMK	sekolah	40,00	40,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya siswa tamatan SMP yang melanjutkan kejenjang SMA dan SMK	%	25,85	25,85	100,00
	Lomba ketrampilan siswa (LKS) SMK	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	29.294.000,00	24.994.000	85,32
		Keluaran : Terlaksananya lomba ketrampilan siswa (LKS) SMK	siswa	65,00	65,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya ketrampilan dan mutu pendidikan kejuruan	%	0,02	0,02	100,00
	Lomba cerdas cermat UUD NRI Tahun 1945 SMA dan SMK	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	50.888.100,00	43.868.100	86,21
		Keluaran : Terlaksananya lomba cerdas cermat UUD NRI Tahun 1945 SMA/MA	siswa	90,00	90,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya pemahaman siswa terhadap UUD NRI Tahun 1945	%	0,10	0,10	100,00
	Olimpiade olahraga siswa nasional (OOSN) SMA dan SLB	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	124.850.000,00	109.844.000	87,98
		Keluaran : Terlaksananya lomba olahraga siswa tingkat SMA	siswa	40,00	40,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya prestasi siswa SMA dibidang olahraga	%	1,16	1,16	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pendidikan Non Formal</i>	Lomba debat bahasa inggris tingkat SMA	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	31.478.500,00	27.478.500	87,29
		Keluaran : Terselenggaranya debat siswa dalam beerbahasa inggris	siswa	200,00	200,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya pemahaman siswa dalam bahasa asing	%	0,20	0,20	100,00
	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	32.750.000,00	32.750.000,00	100,00
		Keluaran : Terlaksananya penyusunan pendidikan non formal dan informal	kegiatan	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Data dasar pendidikan non formal dan informal	%	0,32	0,32	100,00
	Pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal (PTK-	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	50.535.300,00	40.007.300	79,17
		Keluaran : Terselenggaranya jambore PTK-PNF	org	17,00	17,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya prestasi pendidik dan tenaga kependidikan non formal	%	0,20	0,20	100,00
	Pengembangan sanggar kegiatan belajar (SKB)	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	47.524.925,00	33.125.337	69,70
		Keluaran : Terselenggaranya pengelolaan pendidikan non formal di SKB Alas	SKB	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Terpenuhinya kebutuhan kurikulum untuk pelayanan PAUD dan pendidikan non formal	%	3,33	3,33	100,00
Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	150.000.000,00	140.331.000	93,55	
	Keluaran : Terlaksananya program pendidikan keaksaraan fungsional di kabupaten sumbawa	kelompok	28,00	28,00	100,00	
	Hasil : Meningkatnya angka melek huruf	%	0,32	0,32	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	Pembinaan LKP dan PKBM	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	75.570.000,00	74.990.000	99,23
		Keluaran : Terlaksananya pembinaan pengelolaan kursus dan PKBM	orang	30,00	30,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang administrasi dan sistem pengelolaan kursus dan PKBM	%	1,16	1,16	100,00
	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	3.036.530.500,00	3.027.470.500	99,70
		Keluaran : Terlaksananya Pembinaan KKG	KKG di Gugus	22,00	22,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya Mutu Pendidikan	%	28,32	28,32	100,00
	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	791.760.000,00	244.010.040	30,82
		Keluaran : Terlaksananya pendidikan lanjutan bagi pendidik	org	500,00	500,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya jumlah pendidik yang memiliki standar kualifikasi	%	0,22	0,22	100,00
	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	94.846.400,00	90.188.880	95,09
		Keluaran : Terlaksananya sertifikasi pendidik	org	700,00	700,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya mutu pendidikan	%	0,42	0,42	100,00
	Lomba gugus jenjang TK	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	30.002.000,00	19.182.000	63,94
		Keluaran : Terlaksananya lomba gugus jenjang TK	TK	165,00	165,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya kompetensi guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran	%	0,20	0,20	100,00
	Lomba gugus jenjang SD	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	38.304.500,00	29.494.500	77,00
		Keluaran : Terlaksananya lomba gugus jenjang SD	SD	353,00	353,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<i>Manajemen Pelayanan Pendidikan</i>	Pelaksanaan program BERMUTU	Hasil : Meningkatnya kompetensi guru dalam menyelenggarakan kegiatan	%	0,20	0,20	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	311.397.600,00	301.861.720	96,94
		Keluaran : Terlaksananya kegiatan program BERMUTU	org	500,00	500,00	100,00
	Workshop bimbingan teknis ujian nasional untuk guru SMP dan SMA	Hasil : Meningkatnya kompetensi guru	%	0,22	0,22	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	238.274.800,00	221.821.175	93,09
		Keluaran : Terlaksananya workshop bimbingan teknis ujian nasional untuk guru SMP/SMA	org	510,00	510,00	100,00
	Workshop pendalaman materi mata pelajaran UN untuk guru SMP dan SMA	Hasil : Meningkatnya kompetensi guru dengan pembelajaran terutama materi-materi ujian nasional	%	0,20	0,20	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	99.920.800,00	87.120.800	87,19
		Keluaran : Terlaksananya workshop bimbingan teknis ujian nasional untuk guru SMP/SMA	org	510,00	510,00	100,00
	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Hasil : Meningkatnya kompetensi guru dengan pembelajaran terutama materi-materi ujian nasional	%	0,20	0,20	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	861.399.000,00	712.515.000	82,72
		Keluaran : Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Sek/UPT	433,00	433,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya mutu pendidikan	%	37,50	37,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Wajib Kesehatan <i>Obat dan Perbekalan Kesehatan</i>	Pembinaan Dewan Pendidikan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	29.503.200,00	29.503.200,00	100,00
		Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Dewan Pendidik	Kegiatan	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Berfungsinya peranan dari Dewan Pendidikan	%	37,50	37,50	100,00
	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Masukan : dana Yang dibutuhkan	Rp.	2.501.805.500,00	2.493.739.300	99,68
		Keluaran : Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar	paket	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat	%	100,00	100,00	100,00
	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas & Rumah Sakit	Masukan : dana Yang dibutuhkan	Rp.	24.295.500,00	23.280.000	95,82
		Keluaran : Terbimbingnya Tenaga Farmasi Tentang Pelayanan Farmasi Komunitas dan Farmasi klinik	orang	70,00	67	95,82
		Hasil : Tersedianya Tenaga Farmasi Yang Berkualitas Untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	%	65,00	62,28	95,82

1	2	3	4	5	6	7
<i>Upaya Kesehatan Masyarakat</i>	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat & Perbekalan Kesehatan	Masukan : dana Yang dibutuhkan	Rp.	37.955.500,00	36.165.500	95,28
		Keluaran : Terlatihnya tenaga farmasi yang berkualitas tentang penggunaan obat yang rasional bagi petugas pustu dan puskesmas serta pemberian informasi bagi siswa sekolah-sekolah di kab. Sumbawa	orang	80,00	76	95,28
		Hasil : Tersedianya Tenaga Kesehatan Yang Berkualitas Untuk Mendukung Penggunaan obat Secara Rasional Kepada Masyarakat	%	62,05	59,12	95,28
	Revitalisasi Sistem Kesehatan	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	39.700.000,00	39.700.000,00	100,00
		Keluaran : Tersedianya Registrasi Pencatatan Dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan	UPT puskesmas	25,00	25,00	100,00
		Hasil : Terdatanya Dan terekamnya Kunjungan Pasien Ke Sarana Pelayanan Kesehatan	%	87,50	87,50	100,00
	Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	1.033.097.350,00	989.736.050	95,80
		Keluaran : Terlaksananya pelayanan didalam dan diluar gedung	UPT puskesmas	25,00	25,00	100,00
		Hasil : Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat	%	36,36	36,36	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pengawasan Obat & Makanan</i>	Penilaian Dokter Paramedis Teladan	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	41.630.000,00	24.065.000	57,81
		Keluaran : Terpilihnya tenaga Kesehatan tingkat kabupaten sumbawa yang Berprestasi	orang	12,00	12,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya Semangat kompetitif Bagi Petugas Kesehatan Puskesmas dan Pustu	%	71,00	71,00	100,00
	Peningkatan usaha kesehatan kerja	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	6.935.700,00	6.935.700,00	100,00
		Keluaran : Tersosialisasinyan dan pembentukan pos usaha kesehatan kerja	puskesmas	25,00	25,00	100,00
		Hasil : Terbentuknya pos UKK di setiap wilayah kerja	%	6,25	6,25	100,00
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	39.756.500,00	39.756.500,00	100,00
		Keluaran : Terlaksananya pemberdayaan		0,00	0,00	-
		Hasil : Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	%	0,00	0,00	-
	Peningkatan Pengawasan keamanan Pangan & Bahan Berbahaya	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	24.807.100,00	24.807.100,00	100,00
		Keluaran : Terlaksananya Pemeriksaan Sampel Kosmetik, obat,Makan Dan Minuman Secara Klinis dan Bakteriologis	Sampel kosmetik	14,00	14,00	100,00
			sampel obat tradisional jenis makanan	10,00 11,00	10,00 11,00	100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Tercapainya Peningkatan Peredaran Produk Kosmetik dan Produksi Obat tradisional makanan dan Minuman yang Memenuhi Syarat Kesehatan Makanan dan Minuman yang Memenuhi Syarat Kesehatan	%	61,02	61,02	100,00
	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	48.696.300,00	48.446.300	99,49
		Keluaran : Terlaksananya Pemeriksaan Sampel Kosmetik, obat, Makanan Dan Minuman Secara Klinis dan Bakteriologis	Sampel kosmetik	14,00	14,00	100,00
			sampel obat tradisional	10,00	10,00	100,00
			jenis makanan	11,00	11,00	100,00
		Hasil : Tercapainya Peningkatan Peredaran Produk Kosmetik dan Produksi Obat tradisional makanan dan Minuman yang Memenuhi Syarat Kesehatan Makanan dan Minuman yang Memenuhi Syarat Kesehatan	%	61,02	61,02	100,00
Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	36.201.500,00	31.161.500	86,08
		Keluaran : - Tersedianya checklist desa dan PHBS	lembar	3960,00		

1	2	3	4	5	6	7
		- Tersedianya catpor program promosi kesehatan	buah	25,00		
		- Tersedianya profil promosi kesehatan	buku	20,00		
		- Tersedianya poster PHBS 5 tatanan	lembar	500,00		
		- Tersedianya buku saku PHBS rumah tangga	buku	150,00		
		- Tersedianya CD penyuluhan kesehatan	CD	200,00		
		- Tersedianya sound system untuk penyebaran informasi	paket	1,00		
		Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pola hidup bersih dan sehat melalui media informasi	%	40,00		
	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	27.770.000,00	27.500.000	99,03
		Keluaran : - Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi promosi kesehatan	orang	25,00	25,00	100,00
		- Terlaksananya kegiatan PHBS, posyandu dan desa siaga di desa binaan	desa	3,00	3,00	100,00
		- Terlaksananya talk show masalah kesehatan ke masyarakat melalui radio	kali	2,00	2,00	100,00
		- Terlaksananya penyiaran radio sport kesehatan ke masyarakat	kali	6,00	6,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		- Terlaksananya pemuatan iklan kesehatan ke masyarakat melalui media cetak	kali	8,00	8,00	100,00
		- Terlaksananya peliputan dan sosialisasi kesehatan ke masyarakat melalui media cetak	kali	4,00	4,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pola hidup Sehat	%	25,00	25,00	100,00
	Sosialisasi & Pembinaan Desa Siaga	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	20.923.000,00	12.015.000	57,42
		Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi desa Siaga	desa	21,00	21,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya Pemahaman desa siaga Bagi Masyarakat desa dalam mewujudkan PHBS	%	30,00	30,00	100,00
<i>Perbaikan Gizi Masyarakat</i>	Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kurang Zat Gizi Mikro Lainnya	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	277.454.140,00	273.043.140	98,41
		Keluaran : Terlaksananya penimbangan balita	org	40.522,00	40.522,00	100,00
		Hasil : Tertanganinya kasus gizi kurang dan gizi buruk	%	100,00	100,00	100,00
<i>Pengembangan Lingkungan Sehat</i>	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Masukan : Dana Yang dibutuhkan	Rp.	54.245.300,00	54.063.000	99,66
		Keluaran : Terlaksananya sosialisasi desa sehat dan desa siaga	desa	21,00	21,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Meningkatnya pemahaman tentang lingkungan sehat bagi masyarakat	%	41,67	41,67	100,00
	Penyediaan dan pengawasan kualitas air dan lingkungan masyarakat	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	54.491.500,00	52.591.500	96,51
		Keluaran : Terehabilitasinya sarana air bersih dan sanitasi	PKM	25,00	25,00	100,00
		Hasil : Tersedianya sarana air bersih, jamban keluarga dan perbaikan kualitas air	%	0,00	0,00	-
	Kampanye cuci tangan pakai sabun dan sikat gigi	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	48.045.000,00	47.980.000	99,86
		Keluaran : Terciptanya sanitasi hygiene	kecamatan	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Tersusunnya kurikulum di masing-masing sekolah tentang cuci tangan pakai sabun dan sikat gigi	%	0,00	0,00	-
		Turunnya kasus penyakit yang disebabkan oleh perilaku perorangan dan sanitasi lingkungan				
	Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp.	51.948.080,00	51.948.080,00	100,00
		Keluaran : Terpicunya masyarakat untuk membangun sarana jamban keluarga	PKM	25,00	25,00	100,00
		Hasil : Tersedianya jamban keluarga	%	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk	Masukan : Dana yang Dibutuhkan	Rp.	101.440.000,00	101.440.000,00	100,00
		Keluaran : Memutuskan mata Rantai Penularan Penyakit Akibat Nyamuk DBD	focus	100,00	100,00	100,00
		Hasil : Dilaksanakan Penyemprotan dan Pengasapan di desa / Kelurahan	%	8,62	8,62	100,00
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Masukan : Dana yang Dibutuhkan	Rp.	205.302.000,00	204.877.400	99,79
		Keluaran : Terlaksananya Penemuan dan Pengobatan Penderita :ISPA, Diare, kusta dan TBC BTA (+)	orang	13.523,00	13.523,00	100,00
		Hasil : Dilaksanakannya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular :ISPA, Diare,Kusta dan TBCBTA (+), Kecacangan	%	18,05	18,05	100,00
	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	53.873.500,00	41.873.500	77,73
		Keluaran : Terlaksananya pengendalian penyakit menular (malaria)	orang	23.965,00		
		Hasil : Menurunnya jumlah kasus malaria	%	1022,00		
	Peningkatan Imunisasi	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	53.940.000,00	53.880.000	99,89
		Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan logistik kegiatan vaksinasi di puskesmas	UPT puskesmas	25,00	25,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Hasil : Tercapainya UCI diseluruh desa	%	11,29	11,29	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	50.091.500,00	44.517.500	88,87
		Keluaran : Tertanganinya kasus KLB di desa/kelurahan kurang dari 24 jam	UPT puskesmas	25,00	25,00	100,00
		Hasil : Kasus KLB di desa/kelurahan yang ditangani kurang dari 24 jam	%	0,15	0,15	100,00
<i>Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Masukan : Dana yang Dibutuhkan	Rp.	5.538.500,00	5.418.500	97,83
		Keluaran : Pertemuan sosialisasi dan pembinaan yankesdas di puskesmas	UPT	25,00	25,00	100,00
		Hasil : Puskesmas siap untuk di akreditasi	%	87,50	87,50	100,00
<i>Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</i>	Pelayanan Operasi Katarak	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	100.860.000,00	75.630.000	74,99
		Keluaran : Terlaksananya pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat miskin	orang	50,00	50,00	100,00
		Hasil : peningkatan kesehatan mata bagi masyarakat miskin	%	90,00	90,00	100,00
	Pelayanan Operasi Bibir Sumbing	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	36.062.600,00	34.662.600	96,12
		Keluaran : Terlaksananya operasi bibir sumbing pada masyarakat miskin	orang	50,00	50,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan pada masyarakat miskin	%	87,50	87,50	100,00
	Penanggulangan ISPA	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	32.777.000,00	32.152.000	98,09
		Keluaran : Penemuan penderita peneumoni pada bayi dan balita	orang	4.521,00	4.521,00	100,00
		Hasil : Ditemukan dan ditanganinya penyakit peneumoni pada bayi dan balita	%	58,19	58,19	100,00
	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	34.969.000,00	34.969.000,00	100,00
		Keluaran : Jumlah kelompok resiko tinggi yang mendapat pemeriksaan		-	-	-
		Hasil : Ditemukan kasus penyakit kulit kelamin melalui pemeriksaan	%	0,00	0,00	-
	Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu	Masukan : dana yang dibutuhkan	Rp.	35.757.000,00	31.097.000	86,97
		Keluaran : Terlaksananya audit pelacakan kasus AFP pada anak <15 tahun	kasus	10,00	10,00	100,00
		Hasil : Ditemukan dan ditangania AFP pada anak <15 tahun	%	0,01	0,01	100,00
	Jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin	Masukan : dana yang dibutuhkan	Rp.	17.818.500,00	17.638.500	98,99
		Keluaran : -				
		Hasil : Tercavernya pelayanan masyarakat miskin oleh Jamkesmas	%	100,00		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</i>	Pembangunan Puskesmas	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	1.701.610.240,00	1.674.767.160	98,42
		Keluaran : Terbangunnya Jaringan Puskesmas	jaringan puskesmas	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Tersedianya jaringan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas	%	69,00	69,00	100,00
	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	219.514.000,00	219.514.000	100,00
		Keluaran : Terbangunnya Puskesmas pembantu dan polindes/ poskesdes	pokesdes	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Tersedianya tempat pelayanan kesehatan masyarakat (pustu,polindes/poskesdes)	%	1,13	1,13	100,00
	Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	9.965.949.000,00	9.960.376.600	99,94
		Keluaran : Tersedianya prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan	paket	8,00	8,00	100,00
		Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kegiatan puskesmas	%	25,00	25,00	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	Masukan : dana yang dibutuhkan	Rp.	102.620.000,00	102.533.578	99,92	
	Keluaran : Terpeliharanya fisik UPT puskesmas dan UPT IFK	UPT puskesmas	25,00	25,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Tersedianya puskesmas yang memadai untuk pelayanan kesehatan	%	60,00	60,00	100,00
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Masukan : dana yang dibutuhkan	Rp.	1.806.640.350,00	1.791.413.750	99,16
		Keluaran : Terehabilitasi puskesmas pembantu	pustu	3,00	3,00	100,00
		Hasil : Tersedianya puskesmas pembantu yang memadai untuk pelayanan kesehatan	%	2,08	2,08	100,00
	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Masukan : dana yang dibutuhkan	Rp.	351.585.000,00	351.585.000,00	100,00
		Keluaran : Terehabilitasi puskesmas	pustu	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Tersedianya puskesmas yang memadai untuk pelayanan kesehatan	%	0,69	0,69	100,00
	Operasional Physcal Asset Management (PAM) Centre	Masukan : dana yang dibutuhkan	Rp.	28.657.000,00	28.469.500	99,35
		Keluaran : Terwujudnya tata kelola alat kesehatan		-	-	-
		Hasil : Terpeliharanya alat pelayanan kesehatan	%	20,00	20,00	100,00
<i>Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</i>	Kemitraan pelayanan kesehatan oleh swasta	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	5.259.500,00	4.979.500	94,68
		Keluaran : Meningkatnya jumlah pengusaha pelayanan kesehatan swasta yang memahami aturan penyelenggaraan pelayanan	kecamatan	17,00	17,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Meningkatnya kepemilikan ijin penyelenggaraan pelayanan oleh institusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta	%	71,00	71,00	100,00
<i>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</i>	Pelayanan kesehatan lansia	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	31.340.500,00	31.020.500	98,98
		Keluaran : Teerlaksananya pelayanan kesehatan lansia dengan penerapan strategi puskesmas santun lansia	UPT puskesmas	25,00	25,00	100,00
		Hasil : Tercapainya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan pada lansia	%	57,14	57,14	100,00
<i>Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</i>	Peningkatan kemampuan Petugas dalam Pelayanan Persalinan dan perawatan anak	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	381.145.340,00	360.632.340	94,62
		Keluaran : Terselenggaranya kegiatan AMPN, Audit KB, EPP APN, validasi data dan pelaksanaan PWS KIA	%	100,00	100,00	100,00
		Hasil : Tercapainya pelayanan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	%	60,00	60,00	100,00
	Penyuluhan kesehatan, pemantauan dan perawatan anak	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	251.103.150,00	241.331.150	96,11

1	2	3	4	5	6	7
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Penyuluhan penyakit tidak menular	Keluaran : Terlaksananya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak	orang	2.682,00	2.682,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan anak	%	75,00	75,00	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	90.546.180,00	65.300.180	72,12
		Keluaran : Terlaksananya pencegahan dan perawatan penyakit tidak menular	Kegiatan	9,00	9,00	100,00
	Penyuluhan pencegahan penyakit akibat rokok	Hasil : Terlaksananya penyuluhan serta terlaksananya perawatan penyakit tidak menular	%	17,33	17,33	100,00
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	128.306.500,00	106.726.500	83,18
		Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyuluhan penyakit akibat rokok di puskesmas Terlaksananya pembinaan feer group untuk mendukung kegiatan anti tembakau Tersedianya media promosi dalam menunjang penyuluhan akibat rokok	Kegiatan	7,00	7,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit akibat rokok seperti jantung, hipertensi, TBC, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin	%	0,00	0,00	-
<i>Standarisasi Pelayanan Kesehatan</i>	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	145.295.460,00	141.417.420,00	97,33
		Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	dok	12,00		
		Hasil : Tersedianya laporan hasil evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	%	10,91		
<i>Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</i>	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	8.600.000.000,00	5.227.978.320,68	60,79
		Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	org	10.000,00		
		Hasil : Tersedianya laporan hasil evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	%	20,00		
<i>Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</i>	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	14.352.786.080,00	14.075.717.500,00	98,07
		Keluaran : Jumlah alat kesehatan yang disediakan	jenis	350,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit	%	9,38		
	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	350.000.000,00	349.398.000,00	99,83
		Keluaran : Jenis Obat-obatan yang disediakan	jenis	300,00		
		Hasil : Tersedianya kebutuhan obat-obatan rumah sakit	%	8,04		
	Pengadaan mebeuleur rumah sakit	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	19.448.040,00	19.429.440,00	99,90
		Keluaran : Jumlah meubeleur	jenis	5,00		
		Hasil : Tersedianya mebeuleur rumah sakit yang memadai	%	1,34		
	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	1.182.466.400,00	1.162.231.900,00	98,29
		Keluaran : Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang disediakan	Jenis	40,00		
		Hasil : Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang memadai	%	1,07		
	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	3.295.771.900,00	2.131.908.700,00	64,69
		Keluaran : Jumlah jenis pelayanan makanan yang disediakan	jenis	16,00		
		Hasil : Tersedianya kebutuhan logistik rumah sakit	%	0,04		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	725.230.000,00	681.017.375,00	93,90
		Keluaran : Jumlah gedung	unit	18,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (general maintenance)	%	4,86		
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	71.500.000,00	71.437.500,00	99,91
		Keluaran : Jumlah alat-alat kesehatan	unit	50,00		
		Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin dan kalibrasi alat-alat kesehatan rumah sakit	%	13,51		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	173.756.800,00	167.328.000,00	96,30
		Keluaran : Jumlah kendaraan ambulance	unit	6,00		
		Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance dalam menunjang mobilisasi pasien	%	1,62		
<i>Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</i>	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Masukan : Jumlah Anggaran Yang Dibutuhkan	Rp.	131.316.510,00	131.316.510,00	100,00
		Keluaran : Jumlah mahasiswa yang dididik	orang	85,00		
		Hasil : Tersedianya tenaga dokter dan paramedis yang berkualitas, bermutu dan profesional dalam pelayanan kesehatan di RS	%	20,00		

1	2	3	4	5	6	7	
Urusan Wajib Lingkungan Hidup <i>Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</i>	Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	Input : Jumlah dana	Rp.	1.379.437.680,00	1.369.797.445,00	99,30	
		Output : Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	dok	12,00	12,00	100,00	
		Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	%	20,00	20,00	100,00	
	<i>Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</i>	Koordinasi penilaian kota sehat/adi pura	Input : Jumlah dana	Rp.	149.971.940,00	119.578.940,00	79,73
			Output : Rapat dan pertemuan koordinasi	kali	12,00	12,00	100,00
			Outcome : Terciptanya sumbawa besar yang "Green and Clean" melalui program ADIWiyata, Menuju Indonesia Hijau (MIH), Perlombaan Mata Air (PERMATA) dan tersedianya dokumen pendukung penilaian ADIPURA	%	2,86	2,86	100,00
	Pemantauan lingkungan	kualitas	Input : Jumlah dana	Rp.	73.246.390,00	57.288.750,00	78,21
			Output : Terwujudnya pemantauan kualitas lingkungan	kecamatan	5,00	3,91	78,20
			Outcome : Terpantaunya kualitas limbah cair	%	2,86	2,24	78,32
		Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Input : Jumlah dana	Rp.	48.961.160,00	48.961.160,00	100,00
			Output : Teertibnya kegiatan pertambangan secara ilegal	dokumen	1,00	1,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7		
<i>Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam</i>	Koordinasi penyusunan AMDAL	Outcome : Teridentifikasinya kegiatan pertambangan tanpa izin	%	2,86	2,86	100,00		
		Input : Jumlah dana	Rp.	140.169.000,00	138.519.000,00	98,82		
		Output : Tersusunnya dokumen lingkungan AMDAL TPA Raberas	dokumen	1,00	1,00	100,00		
			Outcome : Dokumen AMDAL TPA	%	2,86	2,86	100,00	
	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air		Input : Jumlah dana	Rp.	291.288.360,00	285.253.360,00	97,93	
			Output : Pengadaan bibit tanaman	Ha	20,00	20,00	100,00	
			Outcome : Tersedianya bibit tanaman	%	20,00	20,00	100,00	
	<i>Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</i>	Peningkatan masyarakat lingkungan hidup	Peningkatan edukasi dibidang	Input : Jumlah dana	Rp.	28.922.720,00	28.859.710,00	99,78
				Output : Penyediaan papan informasi lingkungan hidup	DOK	1,00	1,00	100,00
Outcome : Tersedianya papan informasi lingkungan hidup				%	2,86	2,85	99,65	
Penyusunan status lingkungan hidup daerah			Input : Jumlah dana	Rp.	74.557.385,00	73.765.160,00	98,94	
			Output : Tersusunnya dokumen status lingkungan hidup daerah tahun 2010	dok	1,00	1,00	100,00	
			Outcome : Tersedianya dokumen SLHD Kabupaten Sumbawa tahun 2010	%	2,86	2,83	98,95	

1	2	3	4	5	6	7	
Urusan Wajib Pekerjaan Umum <i>Pembangunan jalan dan jembatan</i>	Pembangunan jalan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	9.882.435.000,00	8.535.288.300,00	86,37	
		Keluaran : Jumlah jalan yang dibangun	paket	1,00	1,00	100,00	
		Hasil : Terbangunnya jembatan dalam rangka menunjang sarana transportasi	%	6,67	6,67	100,00	
	Pembangunan jembatan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	1.158.391.500,00	1.156.435.200,00	99,83	
		Keluaran : Jumlah jembatan yang dibangun	buah	5,00	5,00	100,00	
		Hasil : Terbangunnya jembatan dalam rangka menunjang sarana transportasi	%	6,67	6,67	100,00	
	<i>Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong</i>	Pemeliharaan Saluran Drainase / gorong - gorong	Masukan : Jumlah Dana	Rp	275.910.000,00	193.583.775,00	70,16
			Keluaran : Gorong - gorong dan saluran drainase	Km	10,00	8,00	80,00
			Hasil : Terpeliharanya gorong - gorong dan saluran drainase	%	6,67	6,67	100,00
		Pembangunan Saluran Drainase / gorong - gorong	Masukan : Jumlah Dana	Rp	732.569.140,00	721.224.400,00	98,45
			Keluaran : Saluran drainase / Gorong - gorong	m	1.370,00	1.370,00	100,00
			Hasil : Terwujudnya keamanan masyarakat dari genangan / banjir	%	6,67	6,67	100,00
<i>Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</i>	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Masukan : Jumlah Dana	Rp	2.722.333.502,25	2.714.845.550,00	99,72	
		Keluaran : Turap/talud/bronjong	m	975,00	975,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	
<i>Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</i>	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Hasil : Terlindunginya daerah-daerah aliran sungai (DAS) yang rawan bencana banjir	%	33,07	33,07	100,00	
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	16.569.480.950,00	14.149.146.876,00	85,39	
		Keluaran : Panjang Jalan yang dipelihara	km	60,20	60,20	100,00	
	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Hasil : Terpeliharanya jalan dalam rangka menunjang sarana transportasi	%	2,50	2,50	100,00	
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	397.756.007,72	394.862.000,00	99,27	
		Keluaran : Panjang Jembatan yang dilaksanakan terpelihara	m	40,00	40,00	100,00	
	Peningkatan jalan	Hasil : Terpeliharanya jembatan dalam rangka menunjang sarana transportasi	%	2,50	2,50	100,00	
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	22.181.316.427,30	20.224.159.075,00	91,18	
		Keluaran : Panjang Jalan yang dilaksanakan peningkatannya	km	10,04	10,04	100,00	
	Peningkatan jembatan	Hasil : Terwujudnya jalan yang mantap	%	2,50	2,50	100,00	
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	3.552.033.000,00	3.535.708.000,00	99,54	
		Keluaran : Panjang Jembatan yang dilaksanakan peningkatannya	m	88,00	88,00	100,00	
			Hasil : Meningkatnya kualitas konstruksi jembatan	%	2,50	2,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<i>Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</i>	Inspeksi Kondisi Jalan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	15.466.760,00	-	-
		Keluaran : Data hasil survey kondisi jalan	km	80,00		
		Hasil : Terlaksananya kegiatan pendataan ruas jalan kabupaten (K.1)	%	10,00		
	Inspeksi Kondisi Jembatan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	12.908.380,00	190.500,00	1,48
		Keluaran : Data hasil survey kondisi jembatan	km	25,00	25,00	100,00
		Hasil : Terlaksananya kegiatan pendataan jembatan pada ruas kabupaten (K.10)	%	10,00	10,00	100,00
<i>Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan</i>	Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat	Masukan : Jumlah Dana	Rp	208.816.930,00	179.745.380,00	86,08
		Keluaran : Alat-alat berat untuk pelaksanaan konstruksi	Unit	6,00	5,00	83,33
		Hasil : terpenuhinya alat-alat berat siap pakai dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik	%	20,00	20,00	100,00
<i>Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</i>	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Masukan : Jumlah Dana	Rp	786.134.520,00	781.591.600,00	99,42
		Keluaran : Normalisasi alur sungai	m	350,00	350,00	100,00
		Hasil : Alur Sungai yang terpelihara DAS yang bebas banjir	%	4,00	4,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<i>Penyediaan dan pengelolaan air baku</i>	Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi	Masukan : Jumlah Dana	Rp	1.769.896.920,00	1.686.786.250,00	95,30
		Keluaran : Panjang jaringan irigasi ditingkatkan	m'	1.035,00	1.035,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya sistem jaringan irigasi yang baik dalam rangka mendukung peningkatan hasil pertanian	%	4,00	4,00	100,00
	Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Masukan : Jumlah Dana	Rp	2.162.819.240,01	2.145.873.100,00	99,22
		Keluaran : Pemeliharaan jaringan irigasi di 24 Daerah Irigasi	m'	22.431,00	22.431,00	100,00
		Hasil : Kondisi jaringan irigasi di 24 DI membaik dan dapat dimanfaatkan secara optimal	%	4,00	4,00	100,00
	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa	Masukan : Jumlah Dana	Rp	304.853.510,00	269.703.510,00	88,47
		Keluaran : Pemasangan jaringan irigasi air tanah dengan sistem pompa	unit	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya sumber air baku dan distribusinya	%	5,00	5,00	100,00
	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan Saluran Pembawa	Masukan : Jumlah Dana	Rp	2.118.271.370,00	1.900.027.050,00	89,70
		Keluaran : Pemeliharaan Bendung dan Sungai	m'	316,00	316,00	100,00
		Hasil : terwujudnya bendung yang mantap sebagai sarana penyiapan air baku untuk pertanian	%	5,00	5,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	Masukan : Jumlah Dana	Rp	300.747.800,00	182.419.000,00	60,66
		Keluaran : Tersediannya sarana pengelolaan air dan organisasi pengolahan air	m'	286,00	286,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya peningkatan kemampuan P3A dan pemanfaatan air irigasi secara efisien	%	5,00	5,00	100,00
<i>Pengembangan , Pengelolaan dan Konversi Sungai , Danau dan Sumber Daya Air lainnya</i>	Pemeliharaan dan rehabilitasi Embung dan bangunan penampung lainnya	Masukan : Jumlah Dana	Rp	1.619.123.200,00	1.574.739.700,00	97,26
		Keluaran : Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya	m'	60,00	60,00	100,00
		Hasil : Terpeliharanya kondisi embung dan bangunan penampung air lainnya	%	6,67	6,67	100,00
	Unit pelayanan teknis pengairan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	77.222.305,00	23.842.800,00	30,88
		Keluaran : Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung yang telah dibangun	unit	8,00	8,00	100,00
		Hasil : Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung yang telah dibangun	unit	6,67	6,67	100,00
<i>Pengendalian banjir</i>	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Masukan : Jumlah Dana	Rp	250.750.000,00	249.293.000,00	99,42
		Keluaran : Terbangunnya prasarana pengaman pantai	m'	150,00	150,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan infrastruktur Perdesaan	Koordinasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan	Hasil : Terwujudnya prasarana pengaman pantai yang baik dan berfungsi untuk kegiatan lainnya	%	20,00	20,00	100,00
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	132.852.560,00	114.394.200,00	86,11
		Keluaran : Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan	desa	15,00	15,00	100,00
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	Hasil : Terbangunnya infrastruktur perdesaan	%	2,86	2,86	100,00
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	2.869.589.940,00	2.810.188.714,00	97,93
		Keluaran : Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	m'	6.235,00	6.235,00	100,00
	Koordinasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)	Hasil : Terwujudnya pelaksanaan jalan yang menghubungkan wilayah pedesaan lebih lancar dan baik	%	2,86	2,86	100,00
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	407.799.050,00	339.303.620,00	83,20
		Keluaran : Terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat pedesaan	kegiatan	4,00	4,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Tercapainya penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan	%	2,86	2,86	100,00
	Penataan lingkungan permukiman penduduk pedesaan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	851.827.200,00	743.001.807,00	87,22
		Keluaran : Terbangunnya pagar pacuan kuda	m	1.000,00	1.000,00	100,00
		Hasil : Tertatanya lingkungan permukiman penduduk sesuai peruntukannya	%	2,86	2,86	100,00
	Fasilitasi dan koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)	Masukan : Jumlah Dana	Rp	111.249.500,00	69.072.000,00	62,09
		Keluaran : koordinasi lintas sektor tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dalam pelaksanaan prasarana PNPM infrastruktur pedesaan	kali	10,00	10,00	100,00
		Hasil : Kelancaran pelaksanaan program dan peningkatan keberdayaan masyarakat	%	2,86	2,86	100,00
Pengawasan Jasa Konstruksi	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi bidang prasarana jalan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	1.402.281.475,00	1.328.377.195,00	94,73
		: Pengawasan bidang pembangunan Jalan dan jembatan				100,00
		Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan jasa konstruksi	kegiatan	4,00	4,00	100,00
		Hasil	%	6,67	6,67	

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pengelolaan Areal Pemakaman</i>	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi bidang pengairan dan PSDA	Masukan : Jumlah Dana	Rp	327.738.717,00	315.826.400,00	96,37
		: Pengawasan jasa konstruksi bidang pengairan dan PSDA	kegiatan	7,00	7,00	100,00
		Keluaran Hasil : Terwujudnya konstruksi bidang sumber daya air yang baik dan mantap	%	6,67	6,67	100,00
	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi bidang cipta karya	Masukan : Jumlah Dana	Rp	137.273.300,00	123.690.000,00	90,10
		Keluaran : Terawasinya penyelenggaraan jasa konstruksi bidang cipta karya	kegiatan	3,00	3,00	100,00
		Hasil : Terawasinya penyelenggaraan jasa konstruksi bidang cipta karya	%	6,67	6,67	100,00
	<i>Pembangunan sarana pemakaman</i>	Masukan : Jumlah Dana	Rp	37.200.000,00	37.139.000,00	99,84
		Keluaran : Pelaksanaan pengelolaan pemakaman areal	Dok	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya areal pemakaman sesuai harapan	%	20,00	20,00	100,00
Urusan Wajib Penataan Ruang						
<i>Perencanaan Tata Ruang</i>	Penyusunan Rencana Tata ruang wilayah	Masukan : Jumlah Dana	Rp	278.368.480,00	245.664.650,00	88,25

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pemanfaatan Ruang</i>	Penyusunan kebijaksanaan perijinan pemanfaatan ruang	Keluaran : Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW Kab. Sumbawa	Dok	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Legalisasi tata ruang	%	10,00	10,00	100,00
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	87.045.440,00	73.865.000,00	84,86
		Keluaran : - Baliho pemanfaatan ruang kawasan kerato dan RS rujukan Sumbawa	buah	2,00	2,00	100,00
		- Dokumen kebijakan perijinan IMB	dokumen	1,00	1,00	100,00
		- Pelaksanaan sosialisasi kebijakan perijinan/IMB	kecamatan	14,00	14,00	100,00
Hasil : Tertatanya kegiatan pembangunan yang disesuaikan rencana tata ruang dan peraturan dan perundangan yang berlaku	%	10,00	10,00	100,00		
<i>Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Masukan : Jumlah Dana	Rp	15.685.210,00	15.067.000,00	96,06
		Keluaran : Dokumen monitoring	Dok	5,00	5,00	100,00
		Hasil : Tertatanya kawasan sesuai dengan RTRW	%	20,00	20,00	100,00
Urusan Wajib Perumahan <i>Pengembangan Perumahan</i>	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan di Bidang Perumahan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	14.118.700,00	-	-
		Keluaran : Dokumen laporan hasil pelaksanaan sosialisasi	Dok	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan di bidang perumahan kepada masyarakat	%	20,00		
<i>Lingkungan Sehat Perumahan</i>	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	Masukan : Jumlah Dana	Rp	2.472.288.270,00	2.254.215.475,00	91,18
		Keluaran : - Terbangunnya sarana air bersih	Km	13,91	13,91	100,00
		- Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi komunal	kecamatan	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Meningkatnya jumlah masyarakat pengguna air dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat	%	10,00	10,00	100,00
<i>Pembangunan/penataan taman dan penerangan jalan</i>	Pembangunan/penataan taman	Input : Jumlah dana	Rp.	405.285.360,00	403.355.570,00	99,52
		Output : Terlaksananya pembangunan/penataan taman	lokasi	22,00	22,00	100,00
		Outcome : Terciptanya keindahan kota	%	20,69	20,69	100,00
	Penataan dan pemeliharaan lampu jalan	Input : Jumlah dana	Rp.	401.050.136,00	400.877.910,00	99,96
		Output : Tersedianya terpeliharanya lampu penerangan jalan /	Kec.	24,00	24,00	100,00
		Outcome : Berfungsinya lampu penerangan jalan di kabupaten sumbawa	%	20,00	20,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan <i>Pengembangan Data dan Informasi</i>	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	28.342.250,00	26.842.250,00	94,71
		Keluaran : Dokumen kompilasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sumbawa	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya dokumen data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah	%	17,24	16,33	94,72
	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	45.453.600,00	43.753.600,00	96,26
		Keluaran : Dokumen Analisis Statistik Ekonomi Daerah dan Distribusi Pendapatan Kabupaten Sumbawa	dok	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Tersedianya dokumen data/informasi perencanaan ekonomi daerah	%	15,87	15,28	96,28
	Penyusunan profil daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	38.285.220,00	36.735.100,00	95,95
		Keluaran : Dokumen profil daerah	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya dokumen data/informasi profil daerah	%	13,79	13,23	95,94
	Penyusunan Data Sumber Daya Alam Spasial dan Lingkungan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	43.825.500,00	39.143.000,00	89,32
		Keluaran : Dokumen spasial Kabupaten Sumbawa	dokumen	1,00	1,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Kerjasama Pembangunan	Koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM PISEW)	Hasil : Tersedianya data spasial Kabupaten Sumbawa	%	20,00	17,86	89,30
		Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	456.044.970,00	440.205.170,00	96,53
		Keluaran : - Tersedianya dokumen arah kebijakan PSE	eksp	15,00	15,00	100,00
		- Tersedianya dokumen promosi PSE	eksp	15,00	15,00	100,00
	Hasil : Terlaksananya rangkaian kegiatan PNPM PISEW di kabupaten sumbawa	%	40,00	38,61	96,53	
	Koordinasi PNPM generasi bidang pendidikan dan kesehatan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	27.959.980,00	25.029.900,00	89,52
		Keluaran : Tersedianya laporan hasil koordinasi PNPM bidang pendidikan dan kesehatan	eksp	15,00	15,00	100,00
		Hasil : Terlaksananya rangkaian kegiatan PNPM bidang pendidikan dan kesehatan di kabupaten sumbawa	%	25,00	22,38	89,52
	Koordinasi Tim penanggulangan kemiskinan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	71.359.500,00	64.663.000,00	90,62
		Keluaran : Terlaksananya identifikasi keluarga miskin	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Adanya dokumen keluarga miskin se kabupaten sumbawa	%	25,00	22,65	90,60

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pengembangan Wilayah Perbatasan</i>	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	53.588.350,00	38.034.500,00	70,98
		Keluaran : Dokumen hasil koordinasi	expl	25,00	25,00	100,00
		Hasil : Terkoordinasinya penanganaan permasalahan dan pemanfaatan ruang wilayah perbatasan	%	21,74	15,43	70,98
	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	62.401.080,00	53.165.000,00	85,20
		Keluaran : Tersusunnya dokumen peta desa	exp	40,00	40,00	100,00
		Hasil : Tersedianya peta dasar wilaya desa yang telah disinkronkan dengan peta dasar RBI sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan	%	70,00	59,64	85,20
<i>Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis</i>	Koordinasi pembangunan kawasan Agropolitan Alas Utan dan Empar Ano	Masukan : jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	64.506.840,00	60.845.440,00	94,32
		Keluaran : Laporan pembangunan kawasan Agropolitan	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya bahan evaluasi pembangunan kawasan Agropolitan	%	53,33	50,30	94,32
<i>Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kota-kota Besar dan Menengah</i>	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	123.104.610,00	107.317.020,00	87,18
		Keluaran : Dokumen identifikasi kawasan kumuh perkotaan	dokumen	1,00	1,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan RKPD 2012	Hasil : Tersedianya data/dokumen kawasan kumuh perkotaan dan pedesaan sebagai acuan perencanaan pembangunan permukiman dan perumahan	%	50,00	43,59	87,18
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	66.151.180,00	58.887.100,00	89,02
		Keluaran : Dokumen Peraturan Bupati RKPD 2012	dokumen	1,00	1,00	100,00
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbang RPJM dan Asistensi Renstra SKPD	Hasil : Tearahnya perencanaan pembangunan tahun 2012	%	1,96	1,74	88,78
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	231.075.320,00	159.553.290,00	69,05
		Keluaran : Dokumen hasil musrenbang RKPD 2012 dan Perda RPJMD 2012-2015	dokumen	2,00	2,00	100,00
	Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Hasil : Terhimpunnya aspirasi pelaku pembangunan dalam rangka memantapan RKPD tahun 2012	%	3,92	2,71	69,13
		Masukan : Jumlah Dana	Rp	59.190.330,00	57.390.250,00	96,96
		Keluaran : Dokumen LAKIP 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2011	dokumen	2,00	2,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	%	7,69	7,46	97,01
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Masukan : Jumlah Dana	Rp	111.662.200,00	88.557.000,00	79,31
		Keluaran : Dokumen EKPDP 2010, Midterm Review 2011, TP dan DAK 2010 dan 2011	dokumen	3,00	3,00	100,00
		Hasil : Tersedianya dokumen laporan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, DAK dan pembantuan	%	1,96	1,55	79,08
	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Masukan : Jumlah Dana	Rp	58.583.780,00	52.796.200,00	90,12
		Keluaran : Dokumen Kebijakan Umum APBD TA 2012 dan Perubahan 2011	dokumen	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Tersedianya rancangan dokumen KUA sebagai dasar penyusunan Rancangan PPAS	%	3,92	3,53	90,05
	Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Masukan : Jumlah Dana	Rp	49.170.000,00	43.515.000,00	88,50
		Keluaran : Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2012 dan Perubahan 2011	dokumen	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Tersedianya Rancangan Dokumen PPAS sebagai dasar Penyusunan RKA-SKPD	%	3,92	3,47	88,52

1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Pengkajian masalah-masalah strategis pembangunan daerah	Masukan : Jumlah Dana	Rp	63.516.400,00	57.336.400,00	90,27
		Keluaran : Dokumen hasil pengkajian masalah-masalah strategis pembangunan daerah	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Terakomodirnya masalah-masalah Strategis dalam perencanaan pembangunan daerah	%	1,96	1,77	90,31
	Koordinasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Masukan : jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	216.911.800,00	215.093.200,00	99,16
		Keluaran : - Laporan hasil koordinasi pengembangan UsPKD	dokumen	1,00	1,00	100,00
		- Terlatihnya pengurus UsPKD dalam menyusun pedoman kerja operasional	orang	15,00	15,00	100,00
		- Terlatihnya pengurus UsPKD tentang manajemen perkreditan	orang	44,00	44,00	100,00
		- Terlatihnya manager UsPKD	orang	22,00	22,00	100,00
		Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan dalam rangka pembinaan tehnik UsPKD	%	10,53	10,44	99,15
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian	Masukan : jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	133.462.500,00	130.704.500,00	97,93
		Keluaran : Laporan hasil koordinasi perencanaan pemb. Bidang pertanian	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya bahan evaluasi perencanaan pemb. bidang pertanian	%	10,53	10,31	97,91

1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pengembangan Dunia Usaha	Masukan : jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	93.715.030,00	67.414.300,00	71,94
		Keluaran : Laporan hasil koordinasi perenc. pemb. Bidang Dunia Usaha	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya bahan evaluasi perencanaan pemb. Ekonomi daerah	%	18,42	13,25	71,93
	Koordinasi Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal (PPDT)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	39.722.000,00	35.787.640,00	90,10
		Keluaran : Laporan Pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pertumbuhan daerah tertinggal	%	10,53	9,49	90,12
	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal	Masukan : jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	52.168.000,00	51.868.000,00	99,42
		Keluaran : Laporan hasil koordinasi pengembangan ekonomi lokal	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan Pengembangan ekonomi lokal	%	5,26	5,23	99,43

1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan Sosial dan Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	72.996.240,00	68.376.000,00	93,67
		Keluaran : Dokumen hasil koordinasi bidang perencanaan pendidikan dan kesehatan	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya laporan hasil koordinasi pembangunan pendidikan dan kesehatan	%	26,67	24,98	93,66
	Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat	Masukan : Jumlah Dana	Rp	31.434.480,00	28.204.400,00	89,72
		Keluaran : Jumlah dokumen koordinasi AMPL-BM	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya laporan hasil koordinasi pengelolaan AMPL-BM	%	26,67	23,93	89,73
	Koordinasi Program Water Supply, Higiene and Sanitation (Program UNICEF)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	334.707.080,00	319.228.000,00	95,38
		Keluaran : Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan program UNICEF	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya data cakupan Water Supply, Hygiene, Sanitation (Program WES bantuan UNICEF)	%	32,73	31,22	95,39
	Koordinasi Perencanaan bidang pemerintahan umum	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	47.338.420,00	43.854.300,00	92,64

1	2	3	4	5	6	7
Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Koordinasi program nasional percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah (PPSP)	Keluaran : Laporan hasil koordinasi pembangunan bidang pemerintahan umum	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya sinkronisasi dan tersedianya bahan acuan dalam evaluasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum	%	10,53	9,75	92,59
		Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	296.533.260,00	260.418.500,00	87,82
		Keluaran : Terlaksananya program nasional percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah (PPSP)	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya dokumen program nasional percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah (PPSP)	%	42,77	37,56	87,82
	Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan sumberdaya energi alternatif	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	18.040.080,00	14.497.500,00	80,36
		Keluaran : Laporan pelaksanaan pengembangan energi alternatif	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Terinventarisirnya data kawasan pengembangan energi alternatif	%	20,00	16,07	80,35

1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi penyusunan rencana dan pengembangan wilayah pesisir dan laut	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	133.793.945,00	114.698.865,00	85,73
		Keluaran : dokumentasi kegiatan MCRMP	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya informasi kegiatan MCRM Kabupaten Sumbawa dalam rangka pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan	%	23,68	20,30	85,73
	Koordinasi dan pembinaan perkuatan kelembagaan sumberdaya air	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	257.362.060,00	191.721.490,00	74,49
		Keluaran : -Tersusunnya dokumen PSETK	dok	1,00	1,00	100,00
		- Evaluasi Kinerja KPI	dok	1,00	1,00	100,00
		Hasil : - Terbina dan terwujudnya kemandirian kelompok P3A dan GP3A	%	23,68	20,30	85,73
		- Terlaksananya kegiatan pengelolaan irigasi secara partisipatif	%	12,50	9,31	74,48
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana wilayah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	79.697.820,00	66.209.800,00	83,08
		Keluaran : Dokumen hasil pengkajian masalah-masalah strategis pembangunan daerah	dokumen	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Terakomodirnya masalah-masalah strategis dalam perencanaan pembangunan daerah	%	12,50	10,38	83,04

1	2	3	4	5	6	7
<i>Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</i>	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	33.883.520,00	23.848.100,00	70,38
		Keluaran : Laporan koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	dokumen	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Tersedianya bahan evaluasi perencanaan penanganan daerah rawan bencana	%	40,00	28,15	70,38
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga <i>Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</i>	Pembinaan pemuda Pelopor keamanan lingkungan	Input : Jumlah dana	Rp.	71.603.800,00	70.952.180,00	99,09
		Output : Terselenggaranya penilaian dan pembiayaan pemuda pelopor	kec	24,00		
		Outcome : Terseleksinya potensi kepeloporan pemuda dibidang teknologi tepat guna, kewirausahaan, pendidikan dan sosial budaya dan kebaharian	%	18,00		
<i>Peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda</i>	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Input : Jumlah dana	Rp.	54.015.740,00	52.765.740,00	97,69
		Output : Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pemuda dan pertukaran pemuda	orang	55,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Outcome : Terbentuknya sentra kewirausahaan pemuda	%	50,38		
<i>Pembinaan dan Pemasarakatan Olah raga</i>	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Input : Jumlah dana	Rp.	227.646.290,00	225.946.205,00	99,25
		Output : Terselenggaranya lomba olahraga pelajar/Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	cabor	2,00		
		Outcome : Teridentifikasinya siswa SMP dan SMA yang berprestasi dan juara	%	52,80		
<i>Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</i>	Pengembangan Pemuda	Input : Jumlah dana	Rp.	57.612.324,00	57.392.324,00	99,62
		Output : Pendataan potensi kepemudaan	lokasi	3,00		
		Outcome : Terselenggaranya kegiatan pendataan pemuda di 3 lokasi	%	18,78		
<i>Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga</i>	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Input : Jumlah dana	Rp.	145.474.960,00	129.509.400,00	89,03
		Output : Pelatihan wasit dan pelatih se kabupaten sumbawa	kegiatan	3,00		
		Outcome : meningkatnya mutu dan keahlian pelatih dan wasit se kabupten sumbawa	%	45,65		

1	2	3	4	5	6	7	
Urusan Wajib Penanaman Modal <i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</i> <i>Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi</i>	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Input : Jumlah dana	Rp.	128.088.800,00	128.088.800,00	100,00	
		Output : Tersedianya fasilitas peralatan dan sarana/ prasarana olahraga	jenis	8,00			
		Outcome : Terlaksananya bantuan fasilitasi kegiatan olahraga masyarakat	%	25,00			
	Pengembangan potensi unggulan daerah	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Input : Jumlah dana	Rp.	102.993.330,00	102.578.830,00	99,60
			Output : Tersedianya data potensi investasi daerah	expl	500,00	497,99	99,60
			Outcome : Meningkatnya/penyebaran informasi potensi daerah	%	33,33	33,20	99,61
			Input : Jumlah dana	Rp.	36.215.530,00	36.204.530,00	99,97
			Output : Terlaksananya kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	dokumen	1,00	1,00	100,00
			Outcome : laporan hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	%	20,00	20,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</i>	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Input : Jumlah dana	Rp.	28.361.745,00	28.361.745,00	100,00
		Output : Tersedianya data dan informasi tentang potensi daerah yang "Up to Date"	kali	1,00	1,00	100,00
		Outcome : Adanya informasi potensi unggulan daerah dan informasi penanaman modal di website BKPM-RI	%	20,00	20,00	100,00
	Sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	Input : Jumlah dana	Rp.	44.993.070,00	44.993.070,00	100,00
		Output : Pelayan investasi satu pintu	dok	2,00	2,00	100,00
		Outcome : terlasananya pelayanan investasi satu pintu	%	50,00	50,00	100,00
Urusan Wajib Koperasi dan UKM <i>Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif</i>	Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	5.081.000,00	5.081.000,00	100,00
		Keluaran : Penyusunan konsep rancangan peraturan tentang pembangunan koperasi, penataan PKL, pemberdayaan UKM	dok	3,00		
		Hasil : Tersedianya rancangan peraturan perundang-undangan daerah pembangunan KUMKM, naskah akademik	%	-		

1	2	3	4	5	6	7
	Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Sinkronasi program/kegiatan lintas SKPD dalam rangka pembangunan perkoperasian, perindustrian dan perdagangan Koonsultasi perencanaan pembangunan perkoperasian, perindustrian dan perdagangan ke luar daerah Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan perkoperasian perindustrian dan perdagangan	Rp kali kali dokumen %	119.641.938,00 1,00 6,00 1,00 11,47	114.875.395,00	96,02
	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Bimbingan teknis pendirian koperasi bagi kelompok pra koperasi Penerbitan surat keputusan badan hukum koperasi Hasil : Terfasilitasinya formalisasi badan usaha UKM	Rp unit koperasi dokumen %	24.524.730,00 10,00 10,00 0,70	19.250.230,00	78,49
<i>Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</i>	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp	39.584.370,00	39.583.970,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		SDM : Tenaga pengajar luar daerah dari provinsi	orang	1,00		
		SDM : Anggota panitia pelaksanaan kegiatan	orang	1,00		
		Keluaran : Diklat administrasi dan pembukuan bagi pengelola koperasi	orang	35,00		
		Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan manajemen pengelola koperasi	%	25,00		
	Peningkatan Dan Pengembangan Usaha KUKM Agribisnis dan Agroindustri	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp	44.926.520,00	43.954.020,00	97,84
		Keluaran : Bimtek pengembangan agribisnis dan agroindustri koperasi	unit	25,00		
		Fasilitasi sarana pengelolaan jagung bagi KUD Tekad Beersama	unit	3,00		
		Hasil : Meningkatkan dan berkembangnya KUKM di sektor agribisnis dan agroindustri	%	4,20		
	Pengembangan kewirausahaan	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp	77.704.683,00	77.704.683,00	100,00
		Keluaran : Pendataan wirausaha baru	unit	1.850,00		
		Bimbingan teknis manajemen usaha	UMKM	50,00		
		Hasil : Meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah	%	3,50		
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pembinaan, pengawasan, dan Penilaian Koperasi	Masukan : jumlah Dana Yang Dibutuhkan SDM : Tim pembina RAT koperasi	Rp tim	37.506.960,00 3,00	23.566.720,00	62,83

1	2	3	4	5	6	7
		Keluaran : Pembinaan penguatan kelembangan dan pengawasan koperasi Fasilitasi pelaksanaan RAT koperasi Peningkatan koperasi	koperasi unit unit	50,00 130,00 130,00		
		Hasil : Meningkatnya kualitas kelembangan koperasi	%	8,14		
	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Masukan : jumlah Dana Yang Dibutuhkan SDM : Tim pembina khusus koperasi model	Rp orang	24.747.280,00 13,00	23.226.710,00	93,86
		Keluaran : Bimbingan teknis usaha unggulan koperasi model berbasis usaha unggulan	unit	5,00		
		Hasil : Beerkembangnya koperasi model berbasis usaha unggulan	%	20,00		
	Pembinaan, pengawasan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan SDM : Tim penilai kesehatan KSP/USP koperasi	Rp orang	25.913.670,00 7,00	25.913.525,00	100,00
		Keluaran : Bimtek KSP / USP Koperasi Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi Pembinaan usaha lembaga keuangan mikro (LKM Bumdes)	unit unit unit	50,00 150,00 10,00		
		Hasil : Meningkatkan kesehatan usaha simpan pinjam koperasi	%	9,00		

1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koordinasi penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil menengah	Masukan : jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp	16.931.240,00	16.271.240,00	96,10
		Keluaran : Koordinasi / konsultasi / fasilitasi perkuatan permodalan bagi KUMKM	KUMKM	20,00		
		Hasil : Meningkatnya jumlah KUMKM yang memiliki modal usaha yang kuat	%	3,10		
	Pemantauan Pengelola Penggunaan Dana Pemerintah Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah	Masukan : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp	15.591.515,00	14.561.515,00	93,39
		Keluaran : Pemantauan dan Pembinaan Terhadap Koperasi yang mendapatkan perkuatan permodalan	koperasi	85,00		
		Hasil : Terpantaunya KUMKM yang menggunakan / memanfaatkan dana pemerintah	%	6,50		
	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Masukan : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp	239.742.699,00	236.792.659,00	98,77
		Keluaran : Perencanaan relokasi pasar utam	unit pasar	1,00		
		Hasil : Tersedianya prasarana usaha yang layak	%	15,00		
	Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro	Masukan : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan SDM : Narasumber sosialisasi teknologi biogas dari provinsi	Rp	1.219.087.679,00	1.204.295.485,00	98,79
			orang	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Keluaran : Sosialisasi biogas kepada KUKM	orang	30,00		
		Pengadaan lapak PKL pasar Seketeng (gandeng)	unit	15,00		
		Pengadaan lapak PKL pasar Seketeng (tunggal)	unit	30,00		
		Pengadaan lapak PKL pasar di wonogiri	unit	14,00		
		Pengadaan lapak PKL pasar di Pernang	unit	6,00		
		Pengadaan tenda PKL pasar di Empang	unit	10,00		
		Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana UMKM	%	18,00		
	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	20.729.880,00	20.519.880,00	98,99
		Keluaran : Bimtek menejemen bagi UMKM	UMKM	250,00		
		Hasil : Berkembangnya KUMKM di sektor industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	%	25,10		
	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	133.775.191,00	132.833.991,00	99,30
		SDM : Pengelolaan KUKM peserta promosi	orang	15,00		
		Keluaran : Fasilitasi promosi produk KUKM melalui pameran	kali	3,00		
		KUKM yang mengikuti pameran/promosi	unit	15,00		

1	2	3	4	5	6	7		
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil <i>Penataan Administrasi Kependudukan</i>	Sertifikasi Tanah UMKM	Hasil : Meningkatnya jumlah KUMKM yang mengadakan kontak dagang dan pemasaran produk regional, nasional dan internasional	%	0,60				
		Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	4.387.320,00	4.387.320,00	100,00		
		Keluaran : Fasilitasi sertifikasi tanah KUKM	unit	100,00				
			Hasil : Meningkatnya jumlah KUMKM yang mempunyai kemampuan dukungan penjaminan	%	8,40			
	Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan	Input : Jumlah dana		Rp.	682.023.280,00	679.433.200,00	99,62	
			Output : Terlaksananya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	KTP	45.000,00			
			Outcome : Terbitnya dokumen KTP dan KK	KK %	10.000,00 20,00			
		Kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Input : Jumlah dana		Rp.	28.517.930,00	28.166.810,00	98,77
				Output : Terwujudnya penerbitan dokumen melalui SIAK	dokumen	1,00		
				Outcome : Tersedianya data Capil	%	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Input : Jumlah dana	Rp.	17.596.450,00	16.346.450,00	92,90
		Output : Jumlah akta yang diterbitkan	akta	150,00		
		Outcome : Meningkatnya kepemilikan akta capil	%	20,00		
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Input : Jumlah dana	Rp.	252.690.990,00	248.690.870,00	98,42
		Output : Jumlah akta yang diterbitkan	akta	7.000,00		
		Outcome : Meningkatnya kepemilikan akta capil	%	20,00		
	Pembinaan, pengendalian dan penertiban administrasi kependudukan	Input : Jumlah dana	Rp.	51.850.220,00	51.830.140,00	99,96
		Output : Terwujudnya penertiban dokumen kependudukan	dokumen	2,00		
		Outcome : Tertibnya administrasi kependudukan	%	20,00		
	Penyusunan profil perkembangan penduduk kabupaten sumbawa	Input : Jumlah dana	Rp.	40.468.500,00	39.018.420,00	96,42
		Output : Terwujudnya profil perkembangan penduduk kabupaten sumbawa (2005-2010)	dokumen	1,00		
		Outcome : Tersedianya profil perkembangan penduduk kabupaten sumbawa (2005-2010)	%	20,00		
	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Input : Jumlah dana	Rp.	31.691.996,00	27.791.996,00	87,69
		Output : Terwujudnya dokumen kependudukan	dokumen	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Wajib Ketenagakerjaan <i>Pengembangan tertinggal</i> <i>Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	<i>wilayah</i> Pengembangan laporan kependudukan dan pemuktahiran database kependudukan dan catatan sipil	Outcome : Tersedianya database kependudukan yang akurat	%	20,00		
		Input : Jumlah dana	Rp.	85.817.480,00	82.699.900,00	96,37
		Output : Terwujudnya pemuktahiran data penduduk	dokumen	3,00		
		Outcome : Tersedianya data penduduk yang valid dan akurat	%	20,00		
	Pengembangan usaha ekonomi	Input : Jumlah dana	Rp.	115.422.670,00	115.022.670,00	99,65
		Output : Menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agro industri yang mampu menarik investasi	kk	500,00		
Outcome : Peningkatan investasi budidaya dan industri jasa dan perdagangan		%	20,00			
Pelatihan non Institusional	Input : Jumlah dana	Rp.	249.740.330,00	228.362.290,00	91,44	
	Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	siswa	48,00			
	Outcome : Terciptanya tenaga kerja yang terampil	%	11,54			

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan Kesempatan Kerja</i>	Pendidikan & pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Input : Jumlah dana	Rp.	191.006.035,00	190.820.860,00	99,90
		Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	siswa	48,00		
		Outcome : Terciptanya tenaga kerja yang terampil	%	11,54		
	Koordinasi penyelenggaraan LLS	Input : Jumlah dana	Rp.	22.306.030,00	22.156.030,00	99,33
		Output : Terlaksananya pembinaan lembaga swasta latihan	siswa	38,00		
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan pembinaan lembaga latihan swasta	%	20,00		
	Penyuluhan produktivitas bagi tenaga kerja usaha kecil dan menengah	Input : Jumlah dana	Rp.	29.085.360,00	29.085.360,00	100,00
		Output : Terlaksananya penyuluhan produktivitas tenaga kerja usaha keil dan menengah	TK	50,00		
		Outcome : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja usaha kecil dan menengah	%	20,00		
Penyusunan informasi pasar kerja	Input : Jumlah dana	Rp.	32.928.210,00	32.838.170,00	99,73	
	Output : Tersusunnya informasi pasar kerja dan Bursa tenaga kerja	buku	468,00			

1	2	3	4	5	6	7
		Outcome : Tersedianya buku informasi pasar kerja dan Bursa tenaga kerja	%	20,00		
	Penyebarluasan informasi bursa kerja	Input : Jumlah dana	Rp.	82.740.190,00	81.330.870,00	98,30
		Output : Terbitnya informasi bursa kerja melalui media massa	jumlah terbit	54,00		
		Outcome : Terciptanya informasi bagi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja sehingga terjadi penempatan	%	20,00		
	Fasilitas dan pedoman pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat	Input : Jumlah dana	Rp.	162.068.430,00	162.068.430,00	100,00
		Output : Teerlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 5 kelompok TKI purna dan keluarganya	orang	50,00		
		Outcome : Terciptanya 5 kelompok wirausahaan TKI purna dan keluarganya	%	20,00		
	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Input : Jumlah dana	Rp.	246.941.005,00	206.802.765,00	83,75
		Output : Sosialisasi Penempatan dan perlindungan TKI asal Kabupaten Sumbawa	orang	2.680,00		
		Outcome : Terselenggaranya kesejahteraan, keamanan dan hak serta kewajiban TKI	%	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga Kerja	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industri	Input : Jumlah dana	Rp.	69.419.520,00	68.961.520,00	99,34
		Output : Terlaksananya hubungan industri yang efektif, selaras dan serasi	orang	250,00		
		Outcome : terlaksananya mekanisme perselisihan hubungan industrial secara tepat, cepat adil dan murah	%	20,00		
	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum jaminan sosial TK, keselamatan dan kesehatan kerja	Input : Jumlah dana	Rp.	77.653.910,00	77.522.830,00	99,83
		Output : Terlaksananya pemeriksaan, pengawasan dan pendataan tenaga kerja	orang	250,00		
		Outcome : Dipatuhinya kewajiban maupun hak oleh pengusaha maupun pekerja	%	20,00		
	Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja	Input : Jumlah dana	Rp.	55.889.945,00	55.421.305,00	99,16
		Output : penyusunan kebijakan standarisasi UMK	orang	300,00		
		Outcome : terwujudnya penyusunan UMK dan terlaksananya syarat-syarat kerja yang berkeadilan	%	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Wajib Ketahanan Pangan <i>Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</i>	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	21.502.200,00	21.352.200,00	99,30
		Keluaran : Tersusunnya laporan pola pangan masyarakat	Dokumen	1,00		
		Hasil : Pola konsumsi pangan masyarakat dapat diketahui dengan baik	%	7,18		
	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	88.809.000,00	35.744.500,00	40,25
		Keluaran : Dokumen sistem kewaspadaan gizi dan pangan dan peta kerawan pangan	Dokumen	1,00		
		Hasil : Tersedianya dokumen SKPG dan Peta Kerawanan pangan sebagai bahan dalam Pengambilan Keputusan untuk memantau Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat sekaligus intervensi kerawanan pangan	%	24,98		
	Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	74.520.500,00	73.413.500,00	98,51
		Keluaran : Jumlah Ibu Rumah Tangga yang mengikuti sosialisasi kegiatan	Orang	120,00		
		Hasil : Ibu Rumah Tangga dapat memanfaatkan pekarangan secara optimal	%	12,17		
	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	14.530.500,00	13.312.500,00	91,62

1	2	3	4	5	6	7
		Keluaran : Terpantaunya harga beberapa pangan pokok	Bulan	12,00		
		Hasil : Tersedianya informasi beberapa harga pangan pokok	%	4,24		
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	13.057.300,00	13.057.300,00	100,00
		Keluaran : Tersusunnya dokumen pengemngembangan cadangan pangan daerah	Dokumen	1,00		
		Hasil : Jumlah stok cadangan pangan dapat diketahui dengan akurat	%	4,66		
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	56.091.160,00	55.851.120,00	99,57
		Keluaran : Dokumen Penumbuhan Desa Mandiri Pangan	Dokumen	1,00		
		Hasil : Terwujudnya Desa Mandiri Pangan	%	14,22		
	Pengembangan Pertanian Lahan Kering	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	35.900.500,00	35.385.500,00	98,57
		Keluaran : Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Federasi PIDRA	Orang	40,00		
		Hasil : Meningkatkan kapasitas teknik dan manajemen usaha mikro	%	11,29		
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	14.064.500,00	14.064.500,00	100,00
		Keluaran : Dokumen keadaan pangan daerah	Dokumen	1,00		
		Hasil : Kelembagaan kelompok lumbung pangan yang terbina	%	2,48		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</i>	Lomba Cipta Menu Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	28.801.000,00	25.751.000,00	89,41
		Keluaran : Tersedianya menu makanan Bergizi, Beragam, Serimbang dan Aman (B2SA)	Jenis Makanan	15,00		
		Hasil : Tersedianya menu pilihan terbaik non beras	%	9,39		
	Identifikasi dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	23.653.500,00	22.303.500,00	94,29
		Keluaran : Stabilitas Harga Pembelian Gabah di Tingkat Kelompok Tani	Dokumen	1,00		
		Hasil : Terjaminnya Pembelian Gabah Kelompok Tani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	%	6,56		
	Hari Pangan Sedunia	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	7.900.000,00	7.450.000,00	94,30
		Keluaran : Pameran sehari produk kelompok tani	Kelompok	20,00		
		Hasil : Produk olahan kelompok tani Sumbawa dikenal masyarakat NTB	%	2,82		
	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	5.000.000,00	4.430.000,00	88,60
		Keluaran : Promosi produk segar dan olahan pertanian unggul daerah	kali	1,00		

1	2	3	4	5	6	7		
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Hasil : Partisipasi dalam promosi produksi pertanian unggulan daerah	%	100,00				
		<i>Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</i>	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Input : Jumlah dana	Rp.	35.726.820,00	32.626.820,00	91,32
			Output : Terlaksananya sosialisasi UU no,23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, UU thn 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan terlaksananya sosialisasi UU no, 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang	Output	orang	40,00		
		Outcome : Tersosialisasinya program kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan	%	20,00				
<i>Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i>	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Input : Jumlah dana	Rp.	91.126.540,00	90.933.340,00	99,79		

1	2	3	4	5	6	7
		Output : Menggalang komitmen masyarakat dan dukungan pemda kabupaten sumbawa dan dunia usaha/swasta dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	kasus	80,00		
		Outcome : Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung terbentuknya P2TP2A sebagai wahana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	%	23,19		
	Evaluasi pelaksanaan PUG	Input : Jumlah dana	Rp.	24.265.410,00	24.265.410,00	100,00
		Output : Terfasilitasinya kegiatan GSI tingkat kabupaten, kecamatan dan terfasilitasinya satgas GSI dan pokjasap GSI tingkat kabupaten	kegiatan	1,00		
		Outcome : Berfungsinya satgas GSI dan pokjasap GSI tingkat kabupaten dan dapat tercapinya target penurunan angka kematian ibu dan anak tingkat kabupaten	%	0,29		
	Temu anak samawa dan pengiriman duta anak samawa untuk temu anak NTB dan temu anak nasional	Input : Jumlah dana	Rp.	44.226.450,00	43.826.450,00	99,10

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</i>	Penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Output : Terlaksananya temu anak samawa, temu anak NTB dan terlaksananya pengiriman duta anak kabupaten	anak	27,00		
		Outcome : Terwujudnya anak-anak samawa yang cerdas, kreatif dan partisipatif dalam pembangunan	%	3,60		
		Input : Jumlah dana	Rp.	10.464.410,00	10.323.910,00	98,66
		Output : Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam pembangunan keluarga sejahtera dan terwujudnya pembinaan PPKSS dalam rangka lomba desa	orang	15,00		
<i>Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</i>	Peningkatan kualitas POKTAN, IMP dan PKB yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan bina keluarga	Outcome : Terwujudnya peningkatan kesadaran ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	%	4,23		
		Input : Jumlah dana	Rp.	208.550.560,00	207.504.520,00	99,50
		Output : Peningkatan POKTAN yang berkualitas	Kelompok	33,00		
		Outcome : Terwujudnya pembinaan Kelompok POKTAN	%	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera <i>Keluarga Berencana</i>	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Input : Jumlah dana	Rp.	70.536.460,00	70.536.460,00	100,00
		Output : Meningkatnya akses pelayanan KB bagi GAKIN	orang	84.815,00		
		Outcome : Meningkatnya cakupan peserta KB baru dan KB aktif	%	74,47		
	Pelayanan KIE	Input : Jumlah dana	Rp.	557.222.385,00	556.009.383,00	99,78
		Output : Pembinaan dan bimbingan peserta program KBKS	orang	850,00		
		Outcome : Meningkatnya animo masyarakat untuk ber-KB dan tersedianya informasi KB	%	0,75		
	Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu	Input : Jumlah dana	Rp.	31.645.090,00	26.245.090,00	82,94
		Output : Terlindunginya akseptor dalam pemakaian alat kontrasepsi	Kasus	7.963,00		
		Outcome : Terlindunginya hak reproduksi peserta KB	%	1,10		
	Promosi pelayanan KHIBA	Input : Jumlah dana	Rp.	11.661.970,00	11.661.970,00	100,00
		Output : Terlaksananya pelatihan KIE dan KIP/K KHIBA bagi UPT KB dan penyuluh KB	orang	30,00		

1	2	3	4	5	6	7	
Pelayanan Kontrasepsi	Pembinaan Berencana	Keluarga	Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sehingga diharapkan kematian ibu, bayi dan anak menurun	%	0,03		
			Input : Jumlah dana	Rp.	28.954.200,00	28.954.200,00	100,00
			Output : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap program KB/KS	orang	17.290,00		
			Outcome : Meningkatnya keyakinan peserta KB dalam pemakaian alat kontrasepsi	%	15,18		
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB		Input : Jumlah dana	Rp.	101.558.500,00	101.558.500,00	100,00
			Output : Terlayannya pemasangan alat kontrasepsi bagi keluarga Pra S dan KS I	Kasus	160,00		
			Terlayannya pemasangan alkon bagi keluarga Pra S dan KS I	orang	11.874,00		
			Outcome : Meningkatnya capaian sasaran program	%	51,59		
	Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis		Input : Jumlah dana	Rp.	108.068.950,00	107.968.950,00	99,91
			Output : Tersedianya alat kontrasepsi KB	Vial	2.240,00		
		Outcome : Terpenuhinya permintaan alkon bagi keluarga miskin	%	9,73			

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri</i>	Pelayanan KB medis operatif	Input : Jumlah dana	Rp.	45.415.500,00	45.415.500,00	100,00
		Output : Terlaksananya KB medis operatif bagi keluarga miskin	kasus	40,00		
		Outcome : Terpenuhinya permintaan MOW dan MOP bagi keluarga miskin	%	0,17		
	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Input : Jumlah dana	Rp.	9.380.150,00	9.380.150,00	100,00
		Output : Terlaksananya orientasi teknis usaha bagi anggota kelompok UPPKS	orang	30,00		
		Outcome : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota kelompok UPPKS sebagai sarana peningkatan berusaha	%	17,14		
	Pengelolaan data dan infoormasi program KB	Input : Jumlah dana	Rp.	171.614.060,00	170.515.260,00	99,36
		Output : Dokumen hasil pendataan keluarga dan data program	dokumen	2,00		
		Outcome : Tersedianya laporan hasil pendataan keluarga dan data program yang akurat	%	20,00		
	Publikasi program Badan KB dan PP	Input : Jumlah dana	Rp.	99.223.250,00	90.442.250,00	91,15
		Output : - Terlaksananya penyebaran pembangunan daerah - Terlaksananya IT di tingkat kecamatan	Iklan kecamatan	3,00 24,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Outcome : - Tersajinya informasi yang sedang dan akan dilaksanakan - Tersedianya hasil pengolahan data yang akurat dan cepat	% %	20,00 20,00		
<i>Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR</i>	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Input : Jumlah dana	Rp.	60.709.620,00	60.709.620,00	100,00
		Output : Review pembinaan kelompok PIK KRR	kelompok	32,00		
		Outcome : Peningkatan kualitas PIK KRR	%	94,29		
<i>Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</i>	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Input : Jumlah dana	Rp.	6.574.800,00	6.494.800,00	98,78
		Output : Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping	orang	30,00		
		Outcome : Tersedianya tenaga pendamping yang paham dan trampil dalam pengelolaan bina keluarga	%	20,00		
Urusan Wajib Perhubungan						
<i>Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</i>	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Input : Jumlah dana	Rp.	44.735.400,00		
		Output : Dokumen perencanaan dan pengawasan	dok.	2,00		

1	2	3	4	5	6	7	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pengawasan dalam rangka pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	18,94			
		Input : Jumlah dana	Rp.	2.500.000,00			
		Output : Tersusunnya draft perda bidang perhubungan	dok.	2,00			
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Outcome : Tersedianya dokumen Perda bidang perpajakan	%	1,06			
		Input : Jumlah dana	Rp.	6.010.000,00			
		Output : Pemeliharaan alat PKB	unit	5,00			
	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Outcome : Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor	%	1,55			
		Input : Jumlah dana	Rp.	43.000.000,00			
		Output : Rehab pagar kantor PKB	paket	1,00			
	Pemeliharaan sarana rambu-rambu lalu lintas	Outcome : Terpeliharanya terminal dan pelabuhan	%	11,11			
		Input : Jumlah dana	Rp.	28.400.000,00			
		Output : Pemeliharaan rutin traffic light	unit	4,00			
			Outcome : Terpeliharanya rambu dan traffic light	%	7,34		

1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Input : Jumlah dana	Rp.	2.672.000,00		
		Output : Terlaksananya pertemuan dengan pengelola angkutan umum	kegiatan	2,00		
		Outcome : Meningkatnya pemahaman pengelola angkutan umum untuk ketertiban lalu lintas	%	0,14		
	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Input : Jumlah dana	Rp.	56.515.000,00		
		Output : Pengujian kendaraan bermotor	unit	-		
		Outcome : Laik jalannya kendaraan angkutan umum	%	-		
	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Input : Jumlah dana	Rp.	39.414.300,00		
		Output : Terlaksananya penertiban angkutan umum di jalan raya	kali	6,00		
		Outcome : Terwujudnya disiplin berlalu lintas	%	2,13		
	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Input : Jumlah dana	Rp.	20.338.000,00		
		Output : Penciptaan keamanan dan kenyamanan di lingkungan terminal	terminal	7,00		
		Outcome : Tersedianya dokumen administrasi sebagai bahan evaluasi tingkat pelayanan angkutan di terminal	%	1,10		

1	2	3	4	5	6	7
	Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	Input : Jumlah dana Output : Tersedianya peralatan kebersihan Outcome : Tersedianya dokumen pembayaran jasa kebersihan terminal	Rp. paket %	26.162.500,00 1,00 1,41		
	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Input : Jumlah dana Output : Tersusunnya dokumen statistik perhubungan Outcome : Tersedianya database layanan angkutan darat, laut dan udara	Rp. dok %	14.213.100,00 1,00 0,77		
	Fasilitas perijinan di bidang perhubungan	Input : Jumlah dana Output : Pelayanan ijin operasi dan ijin trayek Outcome : Sehatnya persaingan usaha angkutan umum	Rp. kendaraan %	18.168.000,00 1.180,00 0,98		
	Pengujian kendaraan tidak bermotor dan pelayanan SIM doker	Input : Jumlah dana Output : Pengujian KTB Outcome : Kendaraan tidak bermotor laik jalan	Rp. KTB %	15.307.350,00 1.890,00 0,82		
	Pengawasan jaringan transportasi jalan	Input : Jumlah dana Output : Terlaksananya pengawasan jaringan transportasi jalan Outcome : Teraturnya jaringan transportasi	Rp. kali %	109.599.500,00 5,00 5,91		
	Pelayanan perizinan bidang perhubungan laut	Input : Jumlah dana	Rp.	42.744.700,00		

1	2	3	4	5	6	7	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pengelolaan parkir	Output : Tersedianya blanko perizinan transportasi laut	paket	1,00			
		Outcome : Tertibnya jasa usaha bidang perhubungan laut	%	2,30			
		Input : Jumlah dana	Rp.	21.601.500,00			
		Output : Tersedianya kartu parkir berlangganan roda 4	dok.	3.000,00			
		Outcome : Terkelolanya potensi parkir	%	1,17			
		Lomba tertib lalu lintas	Input : Jumlah dana	Rp.	3.951.000,00		
		Output : Terlaksananya lomba tertib lalu lintas angkutan kota	keg.	1,00			
		Outcome : Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan kota	%	2,21			
		Pembangunan fasilitas sarana penunjang perhubungan darat	Input : Jumlah dana	Rp.	1.177.718.000,00		
			Output : Tersedianya fasilitas sarana penunjang perhubungan darat dan mobil angkutan perintis	unit	6,00		
			Outcome : Terpenuhinya fasilitas sarana penunjang perhubungan darat	%	19,92		
		Pembangunan fasilitas sarana penunjang perhubungan laut	Input : Jumlah dana	Rp.	4.475.400,00		
		Output : Terbangunnya sarana dan fasilitas penunjang perhubungan laut	unit	-			
		Outcome : Terbangunnya sarana dan fasilitas pelabuhan	%	0,08			

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Bermotor Kendaraan</i>	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Input : Jumlah dana	Rp.	4.064.000,00		
		Output : Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	paket	1,00		
		Outcome : Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor	%	20,00		
<i>Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas</i>	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Input : Jumlah dana	Rp.	194.021.200,00		
		Output : Tersedianya rambu-rambu lalu lintas	rambu	98,00		
		Outcome : Terpenuhinya rambu lalu lintas	%	19,15		
	Pengadaan marka jalan	Input : Jumlah dana	Rp.	8.640.000,00		
		Output : Tersedianya marka jalan/zebra kros	M2	96,00		
		Outcome : Meningkatnya keselamatan lalu lintas	%	0,85		
<i>Peningkatan Akses Informasi dan Keselamatan Penerbangan</i>	Koordinasi kawasan operasi penerbangan bandara	Input : Jumlah dana	Rp.	4.222.500,00		
		Output : Koordinasi dengan daerah lain dalam hal peningkatan keamanan kawasan operasi bandara.	kali	1,00		
		Outcome : Terciptanya keamanan di kawasan operasi penerbangan bandara.	%	20,00		

1	2	3	4	5	6	7	
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika <i>Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</i>	Operasionalisasi siaran RPD	Input : Jumlah dana	Rp.	68.493.500,00			
		Output : Tersedianya dokumen siaran tentang penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	dok.	365,00			
		Outcome : Masyarakat dapat menerima informasi secara cepat dan akurat	%	14,74			
	Pemeliharaan peralatan RPD	Input : Jumlah dana	Rp.	11.922.300,00			
		Output : Perawatan perangkat siaran	paket	1,00			
		Outcome : Optimalnya kualitas siaran RPD sumbawa	%	2,56			
	Kerjasama siaran RPD dengan RRI	Input : Jumlah dana	Rp.	12.500.000,00			
		Output : Tersedianya dokumen siaran regional dan nasional	dok.	2,00			
		Outcome : Tersebaranya informasi Pemda Sumbawa di tingkat regional dan nasional	%	2,70			
	<i>Pemanfaatan Potensi Sektor Pos dan Telekomunikasi</i>	Koordinasi dan sinkronisasi peraturan bidang pos dan telekomunikasi	Input : Jumlah dana	Rp.	6.010.400,00		
			Output : Terlaksananya koordinasi bidang postel	kali	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>	Pembinaan dan pengembangan jaringan informasi	Outcome : Terwujudnya sinkronisasi peraturan bidang pos dan telekomunikasi	%	20,00		
		Input : Jumlah dana	Rp.	10.935.000,00		
		Output : Pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM)	orang	250,00		
<i>Fasilitas Peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi</i>	Pelatihan SDM bidang informasi dan komunikasi	Outcome : Terbentuknya forum informasi masyarakat	%	20,00		
		Input : Jumlah dana	Rp.	36.094.000,00		
		Output : Terselenggaranya pelatihan OSS	orang	21,00		
<i>Kerjasama Informasi dan Media Massa</i>	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Outcome : Meningkatnya kesadaran pengguna dalam pemanfaatan perangkat lunak legal atau open sources	%	20,00		
		Input : Jumlah dana	Rp.	9.507.300,00		
		Output : Terlaksananya penyebaran pembangunan daerah dan pameran promosi pembangunan	kali	1,00		
		Outcome : Tersajinya informasi pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan	%	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pengembangan Teknologi Informatika</i>	Pengembangan infrastruktur jaringan	Input : Jumlah dana	Rp.	122.882.000,00		
		Output : Terpeliharanya dan tersedianya komunikasi wirelies LAN/WAN di SKPD	kegiatan	1,00		
		Outcome : Kemudahan dalam mengakses informasi di setiap SKPD	%	14,09		
	Pengembangan implementasi teknologi internet dan intranet	Input : Jumlah dana	Rp.	51.500.300,00		
		Output : Tersedianya media informasi tentang kabupaten sumbawa yang up to date	media informasi	2,00		
		Outcome : Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	%	5,91		
Urusan Wajib Pertanahan <i>Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</i>	Penyusunan dan evaluasi kebijakan pertanahan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	15.891.400,00	15.028.900,00	94,57
		Keluaran : Terselenggaranya penyusunan dan evaluasi kebijakan pertanahan	dok	-		
		Hasil : terselesainya penyusunan dan evaluasi kebijakan pertanahan	%	3,00		
<i>Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</i>	Penerbitan rekomendasi SPPT tanah masyarakat	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	53.585.980,00	44.398.480,00	82,85
		Keluaran : Tertanganinya penerbitan SPPT tanah masyarakat	dok	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : terselesainya penerbitan SPPT tanah masyarakat	%	3,00		
	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	28.501.960,00	15.899.460,00	55,78
		Keluaran : Terselenggaranya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	dok	-		
		Hasil : terselesaikannya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	20,00		
<i>Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</i>	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	40.356.640,00	32.278.600,00	79,98
		Keluaran : Fasilitasi penyelesaian konflik tanah	exp	35,00		
		Hasil : Terlaksananya penyelesaian konflik	%	20,00		
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri <i>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</i>	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	68.548.245,00	68.428.245,00	99,82
		Keluaran : Masyarakat sadar akan pentingnya tenaga pengendali lingkungan	Kecamatan	2,00	2,00	100,00
		Hasil : Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	79,20	79,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	10.605.265,00	10.605.265,00	100,00
		Keluaran : Terlaksananya sosialisasi penanaman nilai-nilai kerukunan hidup antar umat beragama	orang	50,00	50,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat	%	3,46	3,46	100,00
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	6.006.470,00	6.001.470,00	99,92
		keluaran : Terlaksananya sosialisasi penanaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar suku dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat	Orang	50,00	50,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya percepatan proses pembauran di kalangan masyarakat	%	3,77	3,77	100,00
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	17.762.375,00	17.702.375,00	99,66
		Keluaran : Terlaksananya sosialisasi penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945	orang	150,00	150,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa	%	57,50	57,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	31.249.410,00	31.211.910,00	99,88
		Keluaran : Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat tingkat kecamatan	Orang	400,00	400,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap berbagai potensi konflik di tengah masyarakat	%	33,30	33,30	100,00
<i>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	Pelaksanaan Kirab Pataka	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	79.436.680,00	74.436.680,00	93,71
		Keluaran : Terlaksananya Kirab PATAKA Kabupaten dan NTB tahun 2010	Orang	80,00	80,00	100,00
		Hasil : Terciptanya hubungan yang harmonis antar kecamatan dan kab / kota Se-NTB	%	25,08	25,08	100,00
<i>Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</i>	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	13.093.685,00	13.093.685,00	100,00
		Keluaran : Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	orang	90,00	90,00	100,00
		Hasil : Terhindarnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan minuman keras dan narkoba	%	45,10	45,10	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pendidikan Politik Masyarakat</i>	Koordinasi Intelijen Daerah (Kominda)	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	40.149.480,00	37.965.480,00	94,56
		Keluaran : Terselenggaranya pemerdayaan KOMINDA	orang	84,00	84,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya deteksi dini terhadap permasalahan yang mengganggu stabilitas daerah	%	81,00	81,00	100,00
	Penyuluhan Kepada masyarakat	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	5.775.340,00	5.775.340,00	100,00
		Keluaran : Terlaksananya sosialisasi UU bidang politik	kali	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Terciptanya kesadaran politik bagi masyarakat	%	38,00	38,00	100,00
	Koordinasi Forum-forum diskusi politik	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	11.256.840,00	8.266.840,00	73,44
		Keluaran : Terselenggaranya forum diskusi tentang UU bidang politik	kali	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya keamanan persepsi dalam bidang politik	%	3,83	3,83	100,00
	Rapat Koordinasi Pembina wilayah	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	307.429.885,00	303.369.885,00	98,68
		Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi pembina wilayah	kali	1,00	1,00	100,00
		Hasil : Terwujudnya persamaan persepsi di bidang politik	%	87,71	87,71	100,00
	Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	12.581.840,00	12.581.840,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan Ketrantibmas dan pencegahan Tindakan Kriminal		Keluaran : Terselesainya administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan parpol	kali	9,00	9,00	100,00
		Hasil : Tersedianya media aspirasi masyarakat	%	4,89	4,89	100,00
	Apel besar dalam rangka HUT polisi pamong praja se-NTB	Masukan : Jumlah dana	Rp.	49.855.100,00	48.205.100,00	96,69
		Keluaran : Jumlah personel yang mengikuti kegiatan	orang	60,00		
		Hasil : Terkontrolnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota satpol PP	%	7,69		
		Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dan teknik pencegahan kejahatan	Masukan : Jumlah dana	Rp.	58.826.300,00	53.126.300,00
	Keluaran : Operasi gabungan yang dilaksanakan		orang	20,00		
		Hasil : Terwujudnya koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan	%	20,00		
		Kerja sama Pengembangan kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI / Polri dan Kejaksaan	Masukan : Jumlah dana	Rp.	86.457.600,00	84.457.600,00
	Keluaran : Terciptanya mitra kerja kelembagaan dalam penegakan hukum		orang	13,00		
	Hasil : meminimalisir tingkat pelanggaran hukum		%	18,05		

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian <i>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i> Penyusunan pedoman pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten sumbawa <i>Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</i>	Pengawasan dan pengamanan pejabat negara dan tempat-tempat vital	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Adanya penjagaan pejabat Negara / daerah dan tempat - tempat strategis Hasil : Terjaminya keamanan bagi pejabat negara / daerah dan aset -aset daerah	Rp. orang %	628.743.600,00 174,00 18,01	607.833.600,00	96,67
	Penyusunan Harga Satuan Upah dan bahan Pekerjaan	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan Keluaran : Penyusunan buku harga standar Hasil : Tersusunnya buku harga standar	Rp. buku %	93.436.520,00 200,00 58,09	87.576.520,00	93,73
	Penyusunan pedoman pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten sumbawa	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan Keluaran : Tersusunnya buku pedoman pengadaan barang/jasa Hasil : Tersusunnya pedoman	Rp. buku %	50.913.760,00 125,00 41,91	48.213.680,00	94,70
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	100.256.800,00	85.345.720,00	85,13

1	2	3	4	5	6	7
<i>Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah</i>	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Keluaran : Pelaksanaan monitoring kegiatan fisik	exp	50,00		
		Hasil : Pelaksanaan kegiatan fisik yang terkontrol secara intensif	%	79,01		
		Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	50.503.120,00	37.377.040,00	74,01
		Keluaran : Koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pada SKPD	SKPD	33,00		
		Hasil : Terselenggaranya rapat koordinasi pembangunan	%	16,17		
	Pembinaan, Pengembangan dan Revitalisasi BUMD	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	108.631.930,00	104.495.250,00	96,19
		Keluaran : Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan repitalisasi BUMD	lap	3,00		
		Hasil : Terlaksananya BUMD yang sehat dan memiliki daya saing	%	11,92		
	Koordinasi sektor perekonomian daerah	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	18.862.500,00	18.002.500,00	95,44
		Keluaran : Pelaksanaan koordinasi sektor pengembangan perekonomian daerah	exp	5,00		
		Hasil : Terlaksananya koordinasi	%	18,28		
	Koordinasi kormonev distribusi raskin	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	76.920.000,00	76.440.000,00	99,38
Keluaran : Pelaksanaan koordinasi		kec	22,00			

1	2	3	4	5	6	7	
Peningkatan kapasitas sumber daya pembangunan	Koordinasi keikutsertaan pada PEDANA dan PENAS	Hasil : Terlaksananya koordinasi	%	55,61			
		Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	293.814.365,00	292.093.565,00	99,41	
		Keluaran : Laporan pelaksanaan PEDANA dan PENAS	laporan	2,00			
			Hasil : Terlaksananya keikutsertaan pada PEDANA dan PENAS	%	100,00		
	Pembinaan jasa konstruksi	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	99.914.960,00	76.975.960,00	77,04	
		Keluaran : Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	orang	115,00			
		Hasil : Tersedianya jasa konstruksi yang mandiri dan profesional	%	50,00			
	Pembinaan sumber daya aparatur bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	31.548.595,00	17.642.475,00	55,92	
		Keluaran : Penyelenggaraan pembinaan sumber daya aparatur bidang pengadaan barang/jasa	orang	65,00			
		Hasil : Terselenggaraan pembinaan sumber daya aparatur bidang pengadaan barang/jasa	%	27,07			
	Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP dan LPSE	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	790.689.540,00	720.655.497,00	91,14	
		Keluaran : Penyelenggaraan rancangan peraturan bupati tentang unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP dan LPSE kab. Sumbawa	dok	50,00			

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</i>	Sosialisasi peraturan presiden nomor 54 tahun 2010	Hasil : Tersedianya peraturan bupati tentang unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP dan LPSE kab. Sumbawa	%	50,00		
		Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	156.479.875,00	112.027.045,00	71,59
		Keluaran : Penyelenggaraan pembinaan sumber daya aparatur bidang pengadaan barang/jasa	orang	65,00		
	Penyusunan dan evaluasi kebijakan pertanahan	Hasil : Terselenggaranya pembinaan sumber daya aparatur bidang pengadaan barang/jasa	%	27,07		
		Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	15.891.400,00	15.028.900,00	94,57
		Keluaran : Terselenggaranya penyusunan dan evaluasi kebijakan pertanahan	dok	-		
<i>Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</i>	Penerbitan rekomendasi SPPT tanah masyarakat	Hasil : terselesainya penyusunan dan evaluasi kebijakan pertanahan	%	3,00		
		Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	53.585.980,00	44.398.480,00	82,85
		Keluaran : Tertanganinya penerbitan SPPT tanah masyarakat	dok	-		
		Hasil : terselesainya penerbitan SPPT tanah masyarakat	%	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	28.501.960,00	15.899.460,00	55,78
		Keluaran : Terselenggaranya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	dok	-		
		Hasil : Terelesaikannya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	20,00		
<i>Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</i>	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	40.356.640,00	32.278.600,00	79,98
		Keluaran : Fasilitasi penyelesaian konflik tanah	exp	35,00		
		Hasil : Terlaksananya penyelesaian konflik	%	20,00		
<i>Peningkatan pelayanan Kehidupan Beragama</i>	Fasilitasi pendataan dan pembinaan kehidupan beragama	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	48.273.060,00	48.209.460,00	99,87
		Keluaran : pelaksanaan fasilitasi, pendataan dan pembinaan kegiatan keagamaan	lembar	5.000,00		
		Hasil : Terlaksananya fasilitasi dan pendataan serta pembinaan kegiatan keagamaan	%	25,00		
<i>Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)</i>	Fasilitasi pembinaan UKS Kabupaten dan Kecamatan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	33.127.320,00	33.127.320,00	100,00
		Keluaran : Fasilitasi pembinaan UKS kabupaten dan Kecamatan	kec	24,00		
		Hasil : Terlaksananya fasilitasi pembinaan UKS	%	50,00		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Soaial</i>	Pendataan organisasi osial, organisasi wanita, lembaga sosial kemasyarakatan dsn fasilitasi pemberian swasta	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	45.882.960,00	45.282.960,00	98,69
		Keluaran : Pendataan	lembar	5.000,00		
		Hasil : Terlaksananya pendataan	%	20,00		
<i>Koordinasi pembinaan pemuda dan olah raga</i>	Fasilitasi pembinaan organisasi keolahragaan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	23.894.675,00	23.894.675,00	100,00
		Keluaran : Fasilitasi pembinaan organisasi keolahragaan	exp	5,00		
		Hasil : Terlaksananya fasilitasi organisasi keolahragaan	%	20,00		
<i>Pengembangan dan Penataan Kecamatan</i>	Kajian relokasi ibu kota kecamatan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	19.551.930,00	6.156.390,00	31,49
		Keluaran : Penyediaan kajian relokasi ibu kota kecamatan batulanteh	exp	5,00		
		Hasil : Tersedianya kajian relokasi ibu kota kecamatan batulanteh	%	20,00		
	kajian pemekaran kecamatan labuhan badas	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	44.718.030,00	36.614.750,00	81,88
		Keluaran : Penyediaan kajian pemekaran kecamatan labuhan badas	exp	5,00		
		Hasil : Teersedianya kajian pemekaran kecamatan labuhan badas	%	20,00		
<i>Penataan Daerah Otonomi Baru</i>	Fasiltasi pengkajian dan penyiapan pembentukan kabupaten/kota Samawa Rea	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	36.276.410,00	35.176.330,00	96,97

1	2	3	4	5	6	7
		Keluaran : Penyediaan fasilitas kajian dan penyiapan pembentukan kota Samawa Rea	exp	10,00		
		Hasil : Tersedianya fasilitas kajian pembentukan kota Samawa Rea	%	25,00		
<i>Pengembangan wilayah perbatasan</i>	Fasilitas penyelesaian konflik batas desa antar kecamatan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	57.268.040,00	47.277.960,00	82,56
		Keluaran : Penataan batas desa antara kecamatan	dokumen	0,00		
		Hasil : Tertibnya administrasi batas desa antar kecamatan	%	3,00		
<i>Pembakuan Nama Rupa Bumi</i>	Inventarisasi dan pengolahan data unsur-unsur rupa bumi	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	37.647.050,00	35.787.050,00	95,06
		Keluaran : Teerlaksananya pembakuan nama rupa bumi	dokumen	200,00		
		Hasil : Teerlaksananya Inventarisasi dan pengolahan data unsur-unsur rupa bumi	%	30,00		
<i>Penataan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Penyusunan Rencana Kerja rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	2.297.000,00	2.297.000,00	100,00
		Keluaran : Tersusunnya rencana kerja	Perda	5,00		
		Hasil : Terselenggaranya rencana kerja	%	0,44		
	Legislasi Rancangan Peraturan Per-UU	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	77.220.560,00	75.231.480,00	97,42
		Keluaran : Legislasi peraturan perundang-undangan	Perda	800		

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Terselenggaranya legislasi	%	4,44		
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Per-UU	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	87.618.100,00	87.334.600,00	99,68
		Keluaran : Penyelenggaraan fasilitasi	kec	20,00		
		Hasil : Terselenggaranya fasilitasi	%	8,89		
	Publikasi Peraturan Per-UU	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	26.066.390,00	25.922.390,00	99,45
		Keluaran : Publikasi pertauran per Uuan	exp	5,00		
		Hasil : Terselenggaranya publikasi	%	2,22		
	Kajian Peraturan Per-UU Daerah thd Peraturan Per-UU yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Per-UU-an	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	34.918.510,00	26.717.630,00	76,51
		Keluaran : Kajian peraturan perundang-undangan	exp	2,00		
		Hasil : Terselenggaranya Kajian peraturan perundang-undangan	%	2,22		
	Pemberian Bantuan Hukum Kepada Pemerintah Daerah	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	78.237.660,00	61.647.580,00	78,80
		Keluaran : Pemberian bantuan hukum kepada pemerintah daerah	kasus	5,00		
		Hasil : Terselenggaranya pemberian bantuan hukum	%	2,22		
	Penyusunan peraturan bupati tentang perubahan OPD	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	44.270.780,00	42.995.780,00	97,12
		Keluaran : Dokumen peraturan bupati tentang tupoksi perubahan OPD	dok	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Tersedianya peraturan bupati tentang tupoksi perubahan OPD	%	0,00		
<i>Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM</i>	Penyuluhan Hukum Terpadu	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	97.500.765,00	97.425.765,00	99,92
		Keluaran : terlaksananya penyuluhan hukum terpadu	kec	24,00		
		Hasil : Terlaksananya Penyuluhan hukum terpadu	%	15,00		
	Desiminasi Bahan Informasi dan Peningkatan Pengetahuan Aparatur Pemerintah akan pentingnya HAM	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	6.576.900,00	6.576.900,00	100,00
		Keluaran : Pelaksanaan desiminasi	dok	100,00		
		Hasil : Terlaksananya desiminasi	%	1,25		
Fasilitasi pembinaan PPNS	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	13.999.840,00	6.278.040,00	44,84	
	Keluaran : Fasilitasi pembinaan PPNS	kali	2,00			
	Hasil : Terlaksananya Fasilitasi PPNS	%	1,25			
Pembinaan desa dan kelompok kadarkum	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	31.934.475,00	28.589.475,00	89,53	
	Keluaran : Pembinaan desa dan kelompok kadarkum	desa	4,00			
	Hasil : Terlaksananya Pembinaan desa dan kelompok kadarkum	%	0,03			
<i>Peningkatan Pelayanan Publik</i>	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	96.782.580,00	93.880.540,00	97,00
		Keluaran : Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat	exp	17,00		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</i>	Fasilitasi tata naskah dinas	Hasil : Terlaksananya penyusunan indeks kepuasan masyarakat	%	76,63		
		Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	32.190.440,00	31.040.440,00	96,43
		Keluaran : Tersusunnya tata naskah dinas	exp	100,00		
	Kompetisi pelayanan publik	Hasil : Tersedianya data tentang ketatalaksanaan	%	0,00		
		Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	23.700.425,00	23.700.385,00	100,00
		Keluaran : Peningkatan pelayanan publik bidang ketatalaksanaan	exp	15,00		
	Penyusunan standar operasional prosedur	Hasil : meningkatnya pelayanan bidang ketatalaksanaan	%	20,00		
		Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	62.874.190,00	60.174.190,00	95,71
		Keluaran : Dokumen standar operasional prosedur	exp	50,00		
	Pengkajian peningkatan kapasitas kelembagaan kecamatan	Hasil : Tersusunnya standar operasional prosedur	%	0,00		
		Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	28.612.680,00	28.512.600,00	99,65
		Keluaran : Dokumen hasil kajian pelimpahan kewenangan bupati kepada camat	exp	10,00		
		Hasil : Adanya dokumen hasil pengkajian pelimpahan kewenangan bupati kepada camat	%	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Analisis Jabatan</i>	Penyusunan informasi jabatan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	72.871.220,00	72.802.920,00	99,91
		Keluaran : Dokumen hasil informasi jabatan	exp	60,00		
		Hasil : Terwujudnya perbaikan tunjangan kinerja PNS	%	20,00		
	Penyusunan analisa beban kerja	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	49.990.950,00	49.840.170,00	99,70
		Keluaran : Dokumen hasil analisa beban kerja	exp	50,00		
		Hasil : Terwujudnya formasi kebutuhan pegawai dan kesejahteraan PNS	%	20,00		
<i>Peningkatan Kapasitas UPT</i>	Penyusunan pola koordinasi dan tata kerj UPT	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	17.392.505,00	17.342.465,00	99,71
		Keluaran : Peningkatan kapasitas UPT	SKPD	0,00		
		Hasil : Peningkatan kapasitas UPT	%	20,00		
<i>Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</i>	Pengumpulan data dan informasi media cetak	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	139.536.525,00	104.144.525,00	74,64
		Keluaran : Kliping koran dari media cetak	unit	61,00		
		Hasil : Data dan informasi bagi pengambilan kebijakan	%	15,78		
	Iklan layanan masyarakat dan interaktif melalui media elektronik	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	26.120.000,00	23.620.000,00	90,43
		Keluaran : Informasi dari pemerintah kepada masyarakat	unit	61,00		
		Hasil : Tersajinya informasi secara berkala kepada masyarakat	%	15,78		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pemberitaan dan penyebaran informasi</i>	Pembuatan Baliho	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp.	76.598.615,00	75.848.615,00	99,02
		Keluaran : Tersedianya Baliho dalam rangka PHBN/PHBK	dokumen	70,00		
		Hasil : Termanifestasikannya atensi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PHBN/PHBK	%	20,00		
	Penyusunan naskah pidato/keterangan pemerintah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	24.247.370,00	23.817.370,00	98,23
		Keluaran : Naskah pidato dan keterangan pers pemerintah daerah	buku	360,00		
		Hasil : Tersusun, tersaji dan terdokumentasinya naskah pidato bupati dan keterangan pers pemerintah daerah	%	20,00		
	Kerjasama publikasi dengan media massa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	254.130.540,00	205.562.191,00	80,89
		Keluaran : Beerita dan informasi media cetak	dokumen	100,00		
		Hasil : Tersajinya berita dan informasi yang memadai bagi aparatur dalam rangka intervensi kebijakan	%	14,29		
	Peliputan dan pemberitaan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	109.027.880,00	107.817.902,00	98,89
		Keluaran : Pemberitaan kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah di media massa	dokumen	70,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Tersajinya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah	%	20,00		
	Sosialisasi LPPD	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	31.181.800,00	30.860.800,00	98,97
		Keluaran : Dokumen informasi LPPD	dokumen	290,00		
		Hasil : Tersosialisasinya informasi LPPD secara memadai	%	41,43		
	Penerbitan khusus Pemerintah daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	56.886.250,00	55.966.250,00	98,38
		Keluaran : Majalah khusus pemerintah daerah (barungan)	dokumen	70,00		
		Hasil : Tersajinya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah	%	20,00		
	Regulasi kehumasan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	21.600.255,00	20.950.255,00	96,99
		Keluaran : Untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya pengolahan informasi dan dokumentasi	dokumen	70,00		
		Hasil : Tersajinya informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah	%	20,00		
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	111.606.420,00	27.991.150,00	25,08
		Output : - Rapat Pembahasan Perda APBD	kali	80,00		

1	2	3	4	5	6	7
		- Rapat pembahasan Perda lainnya	kali	60,00		
		Outcome : Meningkatnya kegiatan rapat pembahasan Ranperda	%	5,93		
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama	Input : Jumlah dana	Rp.	5.659.500,00	2.209.500,00	39,04
		Output : Terlaksananya pertemuan-pertemuan / rapat	kali	10,00		
		Outcome : Terlaksananya dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama	%	0,17		
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Input : Jumlah dana	Rp.	750.145.200,00	598.894.200,00	79,84
		Output : - Rapat pimpinan	kali	13,00		
		- Rapat panitia musyawarah	kali	120,00		
		- Rapat anggaran	kali	60,00		
		- Rapat Badan Legislasi	kali	30,00		
		- Rapat Badan Kehormatan	kali	30,00		
		- Rapat komisi-komisi dewan	kali	300,00		
		Outcome : Terwujudnya rapat-rapat kelengkapan dewan	%	11,29		
	Rapat-rapat paripurna	Input : Jumlah dana	Rp.	202.642.270,00	124.036.570,00	61,21
		Output : - Terlaksananya rapat-rapat paripurna DPRD	kali	63,00		
		- Terlaksananya rapat-rapat fraksi	kali	156,00		
		Outcome : Terlaksananya rapat-rapat paripurna	%	1,84		

1	2	3	4	5	6	7
	Reses	Input : Jumlah dana Output : - Reses Outcome : Terlaksananya kegiatan Reses anggota DPRD	Rp. kali %	3.388.871.615,00 2,00 0,08	3.372.731.615,00	99,52
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Input : Jumlah dana Output : Terlaksananya kunjungan kerja didalam daerah: - Pimpinan/anggota - 40 orang, 6 kali, 4 hari/ - Peninjauan lapangan - 40 orang, 6 kali, 4 hari/ Outcome : Terlaksananya tugas pemerintahan dan pembangunan	Rp. kali kali kali kali %	193.988.250,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,28	147.522.150,00	76,05
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Input : Jumlah dana Output : - Plaquet - Bintek - Pelatihan Legal Drafting Baleg - kunjungan kerja Outcome : Terwujudnya peningkatan kemampuan pimpinan dan anggota DPRD	Rp. buah kali kali kali %	3.353.845.020,00 25,00 2,00 1,00 3,00 0,17	2.969.245.285,00	88,53
	Sosialisasi peraturan per-UU-an	Input : Jumlah dana Output : - Risalah KUA PPAS - Risalah APBD - Risalah Ranperda Kabupaten	Rp. buah buah buah	78.014.675,00 100,00 100,00 200,00	58.025.000,00	74,38

1	2	3	4	5	6	7
		- Risalah LKPJ - Produk DPRD - Himpunan per-UU - Risalah pelantikan bupati dan wakil bupati	buah buah buah buku	100,00 50,00 600,00 100,00		
		Outcome : Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	%	0,11		
	Penyusunan rancangan peraturan daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	402.759.020,00	402.511.930,00	99,94
		Output : Rancangan perda inisiatif	Ranperda	4,00		
		Outcome : Tersedianya perda inisiatif DPRD	%	0,11		
	Pelantikan bupati dan wakil bupati sumbawa periode 2011-2016	Input : Jumlah dana	Rp.	84.388.265,00	79.425.265,00	94,12
		Output : Terlantiknya pejabat begara	orang	2,00		
		Outcome : Terlaksananya roda pemerintahan kabupaten	%	100,00		
<i>Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah</i>	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	602.566.105	584.705.000	97
		Keluaran : laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	LHP	125,00		-
		Hasil : Mengurangi jumlah penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku	%	28,00		-
	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	98.604.360	95.277.900	97

1	2	3	4	5	6	7
		Keluaran : laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	LHP	70,00		-
		Hasil : meningkatnya penyelesaian kasus dilingkup Pemda	%	28,00		-
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	166.821.270	166.142.460	100
		Keluaran : laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	LHP	75,00		-
		Hasil : Mengurangi tumpang tindih pengawasan	%	20,00		-
	Inventarisasi temuan pengawasan	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	43.530.910	42.198.040	97
		Keluaran : laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	obrik	150,00		-
		Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kebutuhan pengawasan	%	20,00		-
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	261.427.375	251.915.000	96
		Keluaran : laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	LHP	135,00		-
		Hasil : Meningkatkan penyelesaian temuan tindak lanjut hasil pengawasan	%	30,00		-
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	57.991.750	51.188.640	88
		Keluaran : laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	obrik	140,00		-
		Hasil : Meningkatnya penyelesaian temuan pemeriksaan secara berkala	%	20,00		-

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pendidikan Kedinasan</i>	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	27.207.380	26.955.600	99
		Keluaran : Peserta telah memahami SPIP dan teknis pengawasan	orang	80,00		-
		Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman SPIP dan teknis pengawasan	%	25,00		-
	Peningkatan Keterampilan Dan Profesionalisme (ujian Dinas)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	33.003.537,00	22.564.600,00	68,37
		Keluaran : Terbitnya STLUD bagi peserta ujian dinas Tk. I dan Tk. II yang bagi peserta yang dinyatakan lulus	STLUD	50,00		
		Hasil : Termanfaatnya STLUD untuk bahan kenaikan pangkat pindah golongan	%	100,00		
Peningkatan Keterampilan dan profesionalisme (ujian Penyesuaian ijazah)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	16.042.430,00	15.541.600,00	96,88	
	Keluaran : Jumlah PNS yang lulus uji	orang	100,00			
	Hasil : Jumlah PNS yang bisa diproses kenaikan pangkatnya melalui jalur penyesuaian ijazah	%	100,00			
<i>Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</i>	Penyusunan Analisis Formasi Pegawai Kabupaten Sumbawa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	25.494.000,00	24.325.940,00	95,42
		Keluaran : Laporan tentang penyusunan formasi pegawai kabupaten sumbawa	laporan	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Tersusunnya laporan formasi pegawai kabupaten sumbawa	%	40,59		
	Seleksi Penerimaan CPNS Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	424.954.930,00	53.955.080,00	12,70
		Keluaran : Jumlah CPNS dan PNS yang diterima	orang	400,00		
		Hasil : Terisinya kekurangan informasi PNS	%	35,59		
	Penempatan PNS	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	107.371.910,00	100.786.080,00	93,87
		Keluaran : Aparatur yang ditempatkan dalam tugas , jabatan dan instansi	orang	1.506		
		Hasil : Terwujudnya penempatan PNS dalam tugas dan jabatan	%	42,04		
	Penataan Sistem Administrasi kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	105.310.910,00	102.630.240,00	97,45
		Keluaran : jumlah usulan kenaikan pangkat yang diproses dan kenaikan gaji berkala	orang	2.533,00		
		Hasil : Terwujudnya kenaikan pangkat dan gaji berkala PNS	%	100,00		
	Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	83.781.970,00	80.308.290,00	95,85
		Keluaran : Aplikasi SIM kepegawaian dan data yang berhasil direvitalisasi / dimutakhirkan	orang	8.462,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Jumlah data PNS yang berhasil direvitalisasi dan dimutakhirkan dan aparatur yang mampu mengoperasikan aplikasi SIM kepegawaian	%	52,54		
	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang berprestasi	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	79.249.205,00	77.745.580,00	98,10
		Keluaran : Aparatur yang mendapatkan piagam penghargaan (SLKS)	orang	67,00		
		Hasil : Terciptanya PNS berprestasi dan dapat diteladani	%	24,35		
	Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	76.715.305,00	54.584.120,00	71,15
		Keluaran : Aparatur yang diproses terhadap pelanggaran disiplin PNS	orang	100,00		
		Hasil : Terwujudnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	%	0,24		
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	1.443.441.300,00	1.429.957.900,00	99,07
		Keluaran : PNS yang lulus seleksi tugas belajar dan ikatan dinas	orang	54,00		
		Hasil : Terwujudnya PNS yang profesional di bidangnya, handal dan sesuai kompetensi	%	53,58		
	Pengurusan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	42.678.470,00	40.483.000,00	94,86

1	2	3	4	5	6	7
Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian		Keluaran : Terseleksinya pengurusan administrasi PNS dan cuti	orang	1.352,00		
		Hasil : Jumlah aparatur yang mendapatkan kelengkapan administrasi PNS dan cuti	%	17,74		
	Pelayanan Taperum PNS	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	19.472.850,00	15.594.540,00	80,08
		Keluaran : Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan dana perumahan	orang	130,00		
		Hasil : Aparatur yang mendapatkan bantuan dana perumahan	%	15,32		
	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	46.911.285,00	35.156.600,00	74,94
		Keluaran : Calon Praja yang lulus sel Hasil : Calon praja yang dikirim s	orang %	5,00 85,25		
	Verifikasi dan penetapan jabatan fungsional PNS kab.sumbawa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	53.741.250,00	52.839.540,00	98,32
		Keluaran : Terwujudnya verifikasi dan penetapan jabatan fungsional PNS lingkup pemerintah Kab.sumbawa	dokumen	1.017,00		
		Hasil : Verifikasi dan penetapan jabatan fungsional PNS lingkup pemerintah Kab.sumbawa	%	26,42		
	Pendataan Dan Penataan Dokumen / Arsip Kepegawaian Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	17.385.084,00	17.279.300,00	99,39

1	2	3	4	5	6	7
		Keluaran : Dokumen / tata naskah kepegawaian yang terdata dan tertata dengan baik	dokumen	8.106,00		
		Hasil : Terdata dan tertatanya seluruh tata naskah kepegawaian seluruh PNS lingkup Pemkab Sumbawa	%	43,97		
	Penduplikatan dokumen / Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	20.748.045,00	19.625.100,00	94,59
		Keluaran : Dokumen / Tata naskah kepegawaian yang diduplikatkan / digandakan	dokumen	7.864,00		
		Hasil : Tersedianya duplikasi dan pelestasian tata naskah / dokumen kepegawaian	%	36,00		
<i>Peningkatan Pelayanan Izin Usaha</i>	Pendataan izin usaha dan kebutuhan perizinan	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	34.336.820	33.526.820	97,64
		Keluaran : izin usaha dan kebutuhan perizinan	dok	1,00		
		Hasil : Tersedianya data perizinan yang akurat	%	20,00		
<i>Sosialisasi dan Kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu</i>	Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	15.421.840	14.201.840	92,09
		Keluaran : Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan	dok	1,00		
		Hasil : Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	%	20,00		
	Peninjauan lokasi	Masukan : Jumlah Dana	Rp.	131.101.800	97.681.800	74,51
		Keluaran : Terlaksananya peninjauan lokasi	dok	250,00		
		Hasil : Meningkatnya kinerja pelayanan perizinan	%	20,00		

1	2	3	4	5	6	7	
<i>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	827.852.270,00	776.502.730,00	93,80
		Keluaran	: Dokumen Perda tentang APBD	eksp	100,00		
		Hasil	: Tersedianya Perda tentang APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah	%	35,29%		
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	82.640.200,00	78.026.000,00	94,42
		Keluaran	: Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD	eksp	100,00		
		Hasil	: Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah	%	4,32%		
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	133.668.820,00	131.961.270,00	98,72
		Keluaran	: Dokumen Perda tentang Perubahan APBD	eksp	100,00		
		Hasil	: Tersedianya Perda tentang Perubahan APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah	%	6,53%		
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	54.257.200,00	38.830.000,00	71,57

1	2	3	4	5	6	7
		Keluaran : Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	eksp	100,00		
		Hasil : Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah	%	0,28%		
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	126.509.160,00	108.058.820,00	85,42
		Keluaran : Dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	eksp	205,00		
		Hasil : Tersedianya dokumen pelaporan keuangan TA 2010	%	6,54%		
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	81.661.360,00	55.134.620,00	67,52
		Keluaran : Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2009	dok	120,00		
		Hasil : Tersedianya Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2009	%	3,83%		

1	2	3	4	5	6	7
	Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan SP2D	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Dokumen Suart perintah Membayar DAU, DAK, DBH dan Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non gaji Hasil : Tersedianya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Pokok + Tunjangan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan, SKPP dan Kartu Gaji untuk tertib administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Rp. dok %	234.493.420,00 58,00 10,36%	220.689.130,00	94,11
	Pengelolaan Administrasi PNS Daerah Otonom	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Pokok+Tunjangan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan, SKPP Hasil : Tersedianya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Pokok + Tunjangan, Kekurangan Gaji, Gaji Terusan, SKPP untuk tertib administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Rp. eksp %	163.068.360,00 57,00 8,52%	117.147.160,00	71,84
	Penerbitan SPD	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Terbitnya dokumen SPD Hasil : Tersedianya dokumen SPD	Rp. dok %	11.159.000,00 220,00 0,58%	9.690.200,00	86,84

1	2	3	4	5	6	7
	Penyaluran Dana Bantuan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Tertibnya dokumen administrasi penyaluran dana bantuan Hasil : Meningkatnya kinerja pengelola administrasi keuangan daerah	Rp. dok %	206.229.210,00 304,00 8,07%	163.600.220,00	79,33
	Penyusunan Akuntansi Pendapatan Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah TA. 2010 Hasil : Tersedianya dokumen akuntansi dan pelaporan Pemerintah Daerah TA. 2010	Rp. dok %	98.402.840,00 1,00 4,27%	90.785.920,00	92,26
	Penyusunan Akuntansi Belanja Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah 2009 Hasil : Tersedianya dokumen akuntansi dan pelaporan Pemerintah Daerah TA. 2009	Rp. dok %	92.491.860,00 1,00 3,62%	87.006.440,00	94,07
	Pengelolaan Administrasi Kegiatan TPTGR	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Dokumen administrasi TPTGR Hasil : Berkurangnya temuan yang berkaitan dengan kerugian Negara / daerah	Rp. dok %	59.959.580,00 12,00 3,13%	44.459.180,00	74,15

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan Daerah</i>	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	40.338.020,00	33.457.940,00	82,94
		Keluaran : Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan daerah	dok	40,00		
		Hasil : Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam mengelola keuangan Daerah	%	2,11%		
	Penyusunan Rencana Penerimaan Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	176.839.860,00	126.442.020,00	71,50
		Keluaran : Dokumen Rencana Penerimaan Daerah yang akurat	dokumen	25,00		
		Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah	%	10,04%		
	Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	123.973.000,00	68.313.000,00	55,10
		Keluaran : Data Pajak dan Retribusi Daerah	dokumen	40,00		
		Hasil : Tersusunnya pedoman rencana penerimaan daerah	%	41,22%		
	Pengendalian dan Evaluasi Penerimaan PAD	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	101.930.640,00	48.978.480,00	48,05
		Keluaran : Dokumen evaluasi penerimaan PBB dan PAD	dokumen	52,00		
		Hasil : Tersedianya data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah	%	5,79%		

1	2	3	4	5	6	7
	Sosialisasi PAD kepada Wajib Pajak	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Wajib pajak yang paham tentang PBB dan PAD Hasil : Tersedianya dokumen obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah	Rp. dok %	94.706.000,00 160,00 5,38%	88.383.000,00	93,32
	Perhitungan, Penerbitan dan Penyampaian SKPD	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Hasil : Terwujudnya pemahaman dan kesadaran tentang PBB dan PAD	Rp. dokumen %	71.525.500,00 200,00 3,78%	71.029.500,00	99,31
	Pelayanan Keberatan Atas Materi Penetapan Pajak	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Terlayannya wajib pajak atas keberatan yang diajukan Hasil : Terlaksananya penyampaian SPPT yang cepat dan tepat	Rp. dokumen %	98.670.400,00 10,00 5,60%	43.598.400,00	44,19
	Penagihan PAD dan PBB	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Dokumen penerimaan PAD dan PBB Hasil : Terwujudnya peningkatan Penerimaan PAD dan PBB	Rp. dokumen %	316.937.100,00 2,00 17,07%	227.000.100,00	71,62
	Dukungan operasional Pengelolaan PAD dan PBB	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Tersedianya dokumen peningkatan penerimaan daerah	Rp. dokumen	144.637.967,00 2,00	111.420.900,00	77,03

1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : Terwujudnya peningkatan penerimaan PBB dan PAD	%	8,21%		
	Pengadaan dan Pembukuan Benda Berharga	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	140.196.999,00	135.800.020,00	96,86
		Keluaran : Benda berharga sebagai alat bukti pembayaran	dokumen	2,00		
		Hasil : Terdatanya semua penerimaan sumber pendapatan lain-lain	%	3,58%		
	Koordinasi Penyelesaian Dana Perimbangan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	202.850.720,00	172.747.130,00	85,16
		Keluaran : Terlaksananya pencairan Dana Perimbangan	dokumen	24,00		
		Hasil : Tercapainya realisasi dana perimbangan	%	8,67%		
	Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	94.569.400,00	76.329.500,00	80,71
		Keluaran : Terlaksananya rekonsiliasi PBB di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan	dokumen	6,00		
		Hasil : Tercapainya peningkatan Penerimaan PBB	%	5,27%		
	Pemuktahiran Obyek dan Subyek PBB yang bermasalah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	30.799.000,00	2.500.000,00	8,12
		Keluaran : Melaksanakan kegiatan pemuktahiran SPPT bermasalah	dokumen	50,00		
		Hasil : Penerimaan PBB terealisasi dengan baik	%	1,75%		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan Daerah</i>	Sosialisasi dan Optimalisasi PBB kepada Wajib Pajak	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	188.599.200,00	177.692.000,00	94,22
		Keluaran : Terlaksananya pelayanan PBB yang optimal	dokumen	2,00		
		Hasil : Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap PBB	%	7,30%		
	Penyampaian dan Pemantauan SPPT PBB	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	128.907.060,00	104.984.060,00	81,44
		Keluaran : Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB kepada Wajib Pajak	dokumen	2,00		
		Hasil : Terwujudnya Pencapaian target penerimaan PBB	%	6,06%		
	Penyusunan Raperda tentang pajak dan retribusi daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	183.751.120,00	160.425.000,00	87,31
		Keluaran : Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB kepada Wajib Pajak	dokumen	2,00		
		Hasil : Terwujudnya Pencapaian target penerimaan PBB	%	6,06%		
	BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	159.632.140,00	101.805.220,00	63,77
		Keluaran : Tersedianya dokumen Surat Ketetapan Pajak daerah	dok	100,00		
		Hasil : Terwujudnya pemahaman dan kesadaran tentang PAD	%	7,39%		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</i>	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	120.726.320,00	98.270.240,00	81,40
		Keluaran : Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan manajemen aset daerah	dok	100,00		
		Hasil : Terwujudnya manajemen aset yang baik	%	13,50%		
	Revaluasi Barang Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	213.952.780,00	119.400.040,00	55,81
		Keluaran : Tersedianya dokumen aset daerah	dokumen	290		
		Hasil : Tersedianya dokumen inventarisasi aset daerah	%	18,91%		
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	265.400.413,00	168.758.246,00	63,59
		Keluaran : Surat bukti pelayanan Jasa	dokumen	70,00		
		Hasil : Tersedianya bukti penyediaan Jasa Barang Milik Daerah	%	21,97%		
	Pengukuran dan Pemetaan tanah milik pemerintah kabupaten sumbawa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	176.189.800,00	121.427.300,00	68,92
		Keluaran : Pemasangan Tapal Batas Lokasi Barang Milik Daerah	dokumen	70,00		
		Hasil : Tersedianya bukti penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	%	19,81%		

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa <i>Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</i>	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	48.948.400,00	24.705.360,00	50,47
		Keluaran : Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah	dokumen	70,00		
		Hasil : Tersedianya Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	%	5,50%		
	Penertiban barang milik daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	213.646.980,00	143.883.000,00	67,35
		Keluaran : Dokumen pengelola aset / barang milik daerah	dokumen	53,00		
		Hasil : Terwujudnya manajemen aset yang baik	%	22,33%		
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	202.193.800,00	167.093.300,00	82,64
		Keluaran : Terasilitasinya kegiatan pokjanal Posyandu Tk. Kab, Kec, Pokja/UPP desa/kel	Pokjanal, UPP	24 pokjanal, 165 UPP desa/kel		
		- Terbinanya kader posyandu madya didesa/kel	Org	300 org, 60 posyandu madya		
- Terasilitasinya program P2KSS		Org	230,00			
- Terlaksananya pembangunan Fisik Pospa BKB		buah	24,00			

1	2	3	4	5	6	7
		Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan dan monev Pospa BKB	lokasi	18,00		
		Hasil : Berfungsinya lembaga organisasi masyarakat pedesaan	%	23,19		
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan masyarakat	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	47.078.000	47.078.000	100,00
		Keluaran : Persiapan penyelenggaraan pelatihan penguatan pemberdayaan masyarakat	orang	48,00		
		Hasil : Tersedianya SDM pengurus lembaga kemasyarakatan/toga/toma yang trampil dan mampu sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat desa/kel	%	0,51		
	Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa (inventarisasi program proyek masuk desa)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	101.138.350,00	100.195.850,00	99,07
		Keluaran : Terselenggaranya bulan bakti gotong royong masyarakat	desa/kel	165,00		
		Hasil : Terwujudnya peningkatan partisipasi dan kewaspadaan masyarakat.	%	16,58		
		Tersedianya data profil desa	%	12,5		
	Penyelenggaraan Bimtek kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan (KPP) tingkat kabupaten	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	9.275.000,00	4.699.000,00	50,66

1	2	3	4	5	6	7
		Keluaran : Jumlah masyarakat yang terbina	orang, klp	150, 10		
		Hasil : Masyarakatn mampu memelihara hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan	%	1,52		
	Koordinasi evaluasi dan bintek bagi badan pengelolaan air minum pasca WSLIC II	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	7.348.500,00	7.002.500,00	95,29
		Keluaran : Terlaksananya monitoring pasca program	orang	30,00		
		Hasil : Terjadinya peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana serta administrasi pengelola air minum secara berkelanjutan	%	1,20		
	Penerapan dan pengembangan TTG (penjaringan)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	42.573.700,00	38.524.400,00	90,49
		Keluaran : Terjaringnya temuan TTG	orang	6,00		
		Hasil : Akses masyarakat terhadap TTG	%	4,07		
	Sosialisasi hasil temuan TTG dan uji coba TTG unggulan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	60.895.700,00	59.770.700,00	98,15
		Keluaran : Terlaksananya sosialisasi/demontarsi hasil temuan TTG dan uji coba TTG unggulan	org	250,00		
		Penyegaran pengurus Posyantekdes	kec	10,00		
		Hasil : Percepatan pengembangan dan pemasyarakatan TTG di masyarakat	%	8,59		

1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Promosi TTG unggulan daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : pelaksanaan gelar TTG Tk Provinsi dan Nasional Hasil : Penyebarluasan informasi tentang berbagai produk unggulan daerah dan jenis TTG hasil temuan putra daerah	Rp orang %	287.466.000,00 300,00 44,34	286.666.000,00	99,72
	Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (pasca pelatihan)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Terlaksananya pembinaan BUMDES Hasil : Meningkatnya pemahaman pengurus BUMDES	Rp unit %	6.595.300,00 13,00 14,34	595.300,00	9,03
	Fasilitasi pembinaan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Fasilitasi/pembinaan klp usaha kecil dan menengah pedesaan Terlaksananya fasilitasi kelompok usaha mikro kecil Hasil : Pengurus Pokmas usaha mikro mampu mengelola usaha dengan baik	Rp. org org %	12.735.900,00 35,00 30,00 27,70	5.380.900,00	42,25
	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan prasarana desa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Terlaksananya fasilitasi pembangunan kantor desa dan pasar desa	Rp unit	26.654.000,00 5,00	19.696.000,00	73,90

1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Hasil : Meningkatnya prasarana pemerintahan desa	%	57,96		
		Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	426.713.100,00	396.009.600,00	92,80
		Keluaran : Terbinanya kelompok-kelompok masyarakat pembangunan desa (klp pantai dan pesisir, program bantuan stimulan rehab perumahan kumuh pedesaan bagi masy. Kurang mampu)	desa	6,00		
		Terlaksananya koordinasi ke Menpera program perumahan rumah bersubsidi	kali	10,00		
		Hasil : Tersedianya kelompok masyarakat yang mampu untuk membangun desa/kel	%	2,21		
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	64.632.300,00	64.632.300,00	100,00
		Keluaran : Dokumen perencanaan pembangunan 24 kecamatan	dok	24,00		
		Hasil : Tersedianya pedoman program yang aspiratif	%	2,36		
	Fasilitasi dan koordinasi PNPM melalui program pengembangan kecamatan (PPK)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	1.503.658.000,00	1.297.964.500,00	86,32
		Keluaran : Koordinasi kab, prop dan pusat	kali	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Fasilitasi pelaksanaan program di tk kecamatan dan desa	desa	80,00		
		Pelatihan manajemen kelompok usaha ekonomi	angkatan	10,00		
		Hasil : Terselenggaranya pengendalian program	%	20,00		
		Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat	%	24,44		
		Terwujudnya peningkatan pemahaman dan ketrampilan	%	10,00		
	Koordinasi pelaksanaan lomba desa/kelurahan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	110.558.000,00	110.448.000,00	99,90
		Keluaran : Penilaian lomba desa dan kelurahan tk kabupaten	kec	24,00		
		Hasil : Terpilihnya 6 desa terbaik (rangking) dan 1 kelurahan	%	4,34		
<i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</i>	Pelatihan aparatur PEMDES dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	23.404.000,00	23.404.000,00	100,00
		Keluaran : Pelatihan kades dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa di malang	org	30,00		
		Hasil : Meningkatnya peran kades dalam penyelenggaraan pemdes	%	100,00		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pengembangan dan Penataan Desa dan Kelurahan</i>	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	21.756.500,00	15.595.500,00	71,68
		Keluaran : Pemilihan kepala desa yang demokratis, jujur dan adil	desa	16,00		
		Hasil : Terpilihnya kades yang aspiratif	%	9,10		
	Penyusunan dan evaluasi kebijakan pemerintahan desa dan kelurahan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	62.179.000,00	51.383.500,00	82,64
		Keluaran : Laporan hasil penyusunan evaluasi kebijakan pemerintah desa	desa	35,00		
		Hasil : Terwujudnya pedoman pengendalian pelaksanaan tata pemerintahan desa/kelurahan	%	16,19		
	Fasilitasi masalah desa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	16.482.100,00	12.572.100,00	76,28
		Keluaran : Fasilitasi penerapan regulasi dan penanganan masalah desa	desa	12,00		
		Hasil : Terwujudnya suasana desa yang kondusif dan tenteram	%	4,65		
	Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	43.590.100	16.882.100	38,73
		Keluaran : Pembinaan dan evaluasi ADD	desa	70,00		
		Hasil : Tersedianya bahan informasi dalam pengalokasian ADD untuk perencanaan berikutnya	%	7,83		

1	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan desa dan pengkajian pembentukan desa/kelurahan dan dusun baru (pemekaran desa/kelurahan dan dusun)	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Pembinaan administrasi desa Terbentuknya desa/kelurahan dan baru Hasil : Terwujudnya tertib administrasi desa	Rp kecamatan desa/kel, dusun %	93.300.700,00 4,00 8 desa/kel, 62 dusun 14,41	82.914.700,00	88,87
	Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Ditetapkannya batas desa Hasil : Terhindarnya persoalan sengketa batas desa	Rp desa %	178.131.000,00 13,00 51,69	106.012.000,00	59,51
Urusan Wajib Sosial <i>Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</i>	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Output : Terlaksananya pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga kurang mampu Outcome : Terlatihnya keluarga miskin untuk berusaha mencari penghasilan sendiri	Rp. orang %	29.709.995,00 70,00 0,57	29.409.665,00 69,29 0,56	98,99 98,99 98,25
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	38.942.880,00	38.495.880,00	98,85

1	2	3	4	5	6	7
		Output : Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	org	50,00	49,00	98,00
		Outcome : Terlatihnya keluarga tidak layak huni untuk berusaha dan mencari penghasilan sendiri	%	0,84	0,83	98,81
	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	45.772.110,00	45.742.110,00	99,93
		Output : Tersedianya bantuan UEP bagi KAT	KK	78,00	78,00	100,00
		Outcome : Meningkatnya penghasilan KAT melalui bantuan UEP daerah KAT	%	14,65	14,65	100,00
	Persiapan pemberdayaan komunitas adat terpencil	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	77.177.120,00	76.016.240,00	98,50
		Output : - Terlaksananya kegiatan penjajakan lokasi dan studi kelayakan	desa	1,00	1,00	100,00
		- Laporan pelaksanaan kegiatan	ekp	10,00	10,00	100,00
		Outcome : Terwujudnya lokasi persiapan daerah KAT	%	60,00	60,00	100,00
	Pemberdayaan sosial bagi KTM-PM	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	68.063.850,00	68.003.690,00	99,91
		Output : Meningkatkan pemahaman KTK-PM dalam mengelola bantuan	org	30,00	30,00	100,00
		Outcome : Pemberdayaan bagi KTK-PM dalam mengelola bantuan	%	7,69	7,69	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	18.339.810,00	18.234.810,00	99,43
		Output : Terlaksananya KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	desa	2,00	2,00	100,00
		Outcome : Tersebarluasnya program pembangunan kesos	%	15,00	15,00	100,00
	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar (anak cacat dan anak nakal)	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	61.910.800,00	61.890.800,00	99,97
		Output : Diberikannya pelatihan praktek belajar kerja (PBK) bagi anak nakal dan terlatihnya anak cacat melalui PBK	orang	30,00	30,00	100,00
		Outcome : Terampilnya anak cacat, anak nakal dan anjal	%	9,36	9,36	100,00
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan KLB	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	156.966.545,00	156.878.425,00	99,94
		Output : Tersalurnya bantuan tanggap cepat darurat (pangan, sandang dan lauk pauk) bagi korban bencana sosial maupun bencana alam	KK	150,00	150,00	100,00
		0 : Terpenuhinya bantuan bagi korban bencana dan adanya Tagana sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanggulangan bencana	%	5,13	5,13	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pembinaan Anak Terlantar</i>	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	60.295.855,00	60.235.815,00	99,90
		Output : Terlaksananya pelatihan bagi anak terlantar	orang	30,00	30,00	100,00
		Outcome : Terlatihnya anak terlantar	%	8,00	8,00	100,00
	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	10.764.310,00	10.764.310,00	100,00
		Output : Adanya dokumen hasil pendataan	eksp	5,00	5,00	100,00
		Outcome : Teridentifikasinya anak terlantar serta permasalahannya	%	44,00	44,00	100,00
	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	23.364.885,00	23.364.425,00	100,00
		Output : Adanya pengiriman kelayan anak terlantar ke PSPA (Panti Sosial Petirahan Anak) PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) dan PSMP	orang	102,00	102,00	100,00
		Outcome : Anak terlantar yang mampu mengembangkan bakat dan ketrampilan	%	41,09	41,09	100,00
<i>Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</i>	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	63.450.825,00	63.380.821,00	99,89
		Output : - Diberikan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	orang	20,00	20,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		-Adanya biaya pengiriman dan penjemputan kelayan ke panti rehabilitasi Solo	orang	8,00	8,00	100,00
		Outcome : Terlatihnya penyandang cacat dan eks trauma	%	17,49	17,49	100,00
	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	13.557.440,00	13.557.440,00	100,00
		Output : Adanya buku pendataan penyakit kejiwaan dan trauma, penyandang cacat	eksp	5,00	5,00	100,00
		Outcome : Teridentifikasinya penyandang cacat, trauma dan penyakit kejiwaan	%	44,00	44,00	100,00
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	67.886.220,00	67.886.220,00	100,00
		Output : Adanya bantuan UEP bagi KUBe penyandang cacat	orang	20,00	20,00	100,00
		Outcome : Penyandang cacat dan eks trauma yang usahanya berkembang	%	66,67	66,67	100,00
<i>Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidanan, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya)</i>	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	85.800.330,00	85.800.330,00	100,00
		Output : - Diberikannya pelatihan bagi eks Napza, eks WTS dan waria	orang	30,00	30,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	- Adanya biaya pengiriman WTS ke panti Budi Rini Mataram	orang	15,00	15,00	100,00	
		Outcome : Terlatihnya eks Narkoba dan WTS	%	45,85	45,85	100,00	
		Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	55.727.570,00	55.727.570,00	100,00	
		Output : - Adanya bantuan UEP bagi KUBe eks napi	orang	20,00	20,00	100,00	
		- Adanya biaya pengiriman kelayan ke PSBK Aikmal	orang	16,00	16,00	100,00	
		Outcome : Terbantunya eks penyandang penyakit sosial untuk peningkatan taraf hidup	%	45,35	45,35	100,00	
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan masyarakat	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	23.739.270,00	23.739.190,00	100,00	
		Output : - Terlaksananya pembinaan bagi TKSM	orang	25,00	25,00	100,00	
		- Adanya PSM dan Organisasi sosial berprestasi	klp	3,00	3,00	100,00	
		Outcome : Terwujudnya kualitas SDM kesejahteraan sosial	%	70,21	70,21	100,00	
		Pemberdayaan karang taruna	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	28.575.940,00	28.455.940,00	99,58
			Output : Terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi karang taruna	orang	20,00	20,00	100,00
	Outcome : Terwujudnya karang taruna yang menunjukkan peningkatan usaha		%	3,25	3,25	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	
Urusan Wajib Kebudayaan <i>Pengembangan Nilai Budaya</i>	Pelestarian kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	27.748.840,00	26.632.282,00	95,98	
		Output : Adanya sarasehan nilai kepahlawanan bagi generasi muda dan terlaksananya pembinaan dan tersantuninya janda pahlawan	orang	22,00	21,00	95,45	
		Outcome : Terwujudnya nilai kesetiakawanan sosial bagi masyarakat	%	5,70	5,47	95,96	
	Fasilitasi pemberian bantuan sosial	Input : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp.	28.252.690,00	28.042.690,00	99,26	
		Output : Tersalurkannya bantuan kepada masyarakat	kelompok	35,00	35,00	100,00	
		Outcome : Pemberdayaan kemasyarakatan	%	35,00	35,00	100,00	
	<i>Pengelolaan kekayaan Budaya</i>	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	138.477.505,00	136.627.505,00	98,66
			Output : Terselenggaranya Pekan Budaya Samawa	kali	1,00		
			Outcome : Peningkatan apresiasi terhadap budaya sendiri	%	54,32		
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Input : Jumlah dana	Rp.	93.356.460,00	93.356.460,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Output : Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan benda cagar budaya	BCB	25,00		
		Outcome : Meningkatnya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumbawa	%	27,82		
	Pendukung Pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	102.386.684,00	79.407.763,00	77,56
		Output : Terwujudnya proses penatausahaan, tata pameran dan konservasi koleksi museum daerah	kegiatan	3,00		
		Outcome : Tercapainya sasaran fungsionalisasi UPT museum daerah	%	25,00		
<i>Pengelolaan Keragaman Budaya</i>	Pengembangan Kesenian dan budaya daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	242.223.695,00	241.923.695,00	99,88
		Output : Terselenggaranya kegiatan seleksi Gita Bahana Nusantara dan Festival seni	kegiatan	2,00		
		Outcome : Teridentifikasinya potensi seniman dikalangan pelajar	%	11,65		
Urusan Wajib Statistik <i>Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah</i>	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	114.359.600,00	112.115.800,00	98,04
		Keluaran : - Dokumen Sumbawa Dalam Angka Tahun 2010	Expl	75,00	75,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		- Dokumen Kecamatan Dalam Angka Tahun 2010	Expl	72,00	72,00	100,00
		- Dokumen IPM kabupaten Sumbawa	Expl	40,00	40,00	100,00
		Hasil : Tersedianya dokumen data statistik kecamatan, kabupaten dan dokumen IPM	%	41,67	40,85	98,03
	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	90.375.600,00	85.125.600,00	94,19
		Keluaran : Dokumen PDRB Kab. Sumbawa per kecamatan tahun 2010	Expl	40,00	40,00	100,00
		Hasil : Tersedianya dokumen data statistik indikator ekonomi daerah	%	33,33	31,39	94,18
Urusan Wajib Kearsipan <i>Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah</i>	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	112.231.780,00	105.711.410,00	94,19
		Output : daftar arsip yang telah melalui proses penilaian kembali	dokumen	7,38		
		Outcome : Keselamatan dan kelestarian dokumen / arsip daerah	%	26,62		
<i>Pemeliharaan Rutin / Berkala Sasaran dan Prasarana Kearsipan</i>	Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	70.179.915,00	64.175.635,00	91,44

1	2	3	4	5	6	7
		Output : DPA musna terselamatkannya kumpulan seri berkas arsip yang berhasil disusutkan dan dimusnahkan dengan mempertimbangkan nilai guna arsip	DPA musnah, DPA Statis, bk pedoman arsip statis	20, 2, 200		
		Outcome : Terpeliharanya koleksi / arsip daerah secara rutin	%	-		
<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</i>	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Input : Jumlah dana	Rp.	83.006.150,00	74.490.550,00	89,74
		Output : Terdapatnya standar operasional prosedur pengelolaan kearsipan di tingkat kabupaten	desa sasaran binaan	18,00		
		Outcome : Ketersediaan informasi kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	%	9,96		
Urusan Wajib Perpustakaan						
<i>Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</i>	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Input : Jumlah dana	Rp.	145.449.380,00	141.187.975,00	97,07
		Output : Pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling	jenis pelayanan	2,00		
		Outcome : Keterpenuhan layanan pengunjung perpustakaan	%	10,82		
	Pengembangan minat dan budaya baca	Input : Jumlah dana	Rp.	37.530.800,00	37.530.800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
URUSAN PILIHAN Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan <i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</i>	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Output : Terlaksananya lomba membaca dan bercerita untuk siswa SD/MI dan lomba pidato untuk siswa SMA/MA	jenis lomba	4,00			
		Outcome : Keikutsertaan siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA	%	0,02			
		Input : Jumlah dana	Rp.	19.642.935,00	19.642.135,00	100,00	
		Output : Terbinanya tenaga pengelola perpustakaan	orang	96,00			
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Outcome : Ketersediaan pengelola perpustakaan yang berkualitas	%	0,01			
		Input : Jumlah dana	Rp.	356.324.930,00	251.864.085,00	70,68	
		Output : Terbinanya tenaga pengelola perpustakaan	orang	96,00			
		Outcome : Ketersediaan pengelola perpustakaan yang berkualitas	%	0,01			
		Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Input : Jumlah dana	Rp.	6.464.000,00	6.464.000,00	100
			Output : Terbinanya kelompok penerima bantuan dana penguatan modal	lokasi	10,00	10,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		Outcome : Terbinanya kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang tangguh dan mandiri	%	20,00	20,00	100
<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</i>	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Input : Jumlah dana	Rp.	11.891.300,00	8.491.300	71,41
		Output : - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kelestarian lingkungan perairan	orang	120,00	120,00	100
		- Laporan pembinaan pokmaswas	buku	30,00	30,00	100
		Outcome : Tumbuhnya POKMASWAS kelautan dan perikanan	%	6,67		
	Pengelolaan dan pengendalian kawasan konservasi usaha perikanan	Input : Jumlah dana	Rp.	224.903.020,00	216.451.020	96,24
		Output : - Ikan Nila Gift	ekor	100.000,00	100.000,00	100
		- Ikan Mas	ekor	50.000,00	50.000,00	100
		- Ikan tawes	ekor	50.000,00	50.000,00	100
		Outcome : Terkendalinya kawasan konservasi usaha perikanan di perairan umum dengan rasio 1 lokasi 1 kelompok	%	13,33	13,33	100
<i>Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut</i>	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Input : Jumlah dana	Rp.	16.569.900,00	14.989.900	90,46
		Output : Terwujudnya penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan	orang	120,00	120,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya laut	%	12,00	12,00	100
	Pengawasan perairan laut	Input : Jumlah dana	Rp.	342.483.400,00	332.503.400	97,09
		Output : Terlaksananya kegiatan penertiban dan pengamanan perairan laut	kali	8,00	8,00	100,00
		Baju tim kmla	buah	10,00	10,00	100,00
		Kompresor tabung selam	buah	1,00	1,00	100,00
		Pengadaan alat selam komplit	unit	2,00	2,00	100,00
		Alat kunci kapal patroli	paket	1,00	1,00	100,00
		Pengadaan megaphone	unit	2,00	2,00	100,00
		Pengadaan teropong	unit	2,00	2,00	100,00
		Pengadaan repiter	unit	3,00	3,00	100,00
		Outcome : Terjaganya kelestarian sumberdaya laut dan meningkatnya kesadaran nelayan akan arti pentingnya kelestarian sumberdaya hayati di perairan dengan rasio 1 : 10 orang	%	4,80	4,80	100,00
	Penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Input : Jumlah dana	Rp.	32.835.800,00	16.995.800	51,76
		Output : Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	kasus	3,00	3,00	100,00
		Outcome : Kelestarian sumberdaya hayati diperairan dengan rasio 1:10 orang	%	3,20	3,20	100,00
Peningkatan Budaya kelautan dan wawasan Maritim kepada Masyarakat	Penyuluhan budaya kelautan	Input : Jumlah dana	Rp.	101.073.120,00	100.223.000	99,16

1	2	3	4	5	6	7	
Pengembangan Perikanan	Budidaya	Pengembangan bibit unggul	Output : Terlaksananya forum gemar makan ikan	kali	1,00	1,00	100,00
			Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang budaya kelautan dan wawasan maritim masyarakat	%	14,29	14,29	100,00
			Input : Jumlah dana	Rp.	1.541.480.620,00	1.532.254.375	99,40
		Output : - Mobil operasional BBI	unit	1,00	1,00	100,00	
		- Kebun bibit rumput laut	unit	1,00	1,00	100,00	
		- Pembangunan jalan kompleks BBI	unit	1,00	1,00	100,00	
		- Pembangunan instalasi listrik BBI	unit	1,00	1,00	100,00	
		- Pembangunan instalasi air bersih BBI	unit	1,00	1,00	100,00	
		- Terehabnya kolam BBI	unit	12,00	12,00	100,00	
		- Terehabnya rumah dinas BBI	paket	1,00	1,00	100,00	
		- Pembnagunan rumah pompa air laut	unit	1,00	1,00	100,00	
		- Terbangunnya mess karyawan BBU meno	unit	1,00	1,00	100,00	
		- Tersedianya mesin pemotong rumput	unit	1,00	1,00	100,00	
		- Tersedianya gerobak dorong	unit	2,00	2,00	100,00	
		Outcome : Meningkatnya penggunaan bibit unggul dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya	%	0,74	0,74	99,40	
Pengembangan perikanan	Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	Input : Jumlah dana	Rp.	1.063.567.520,00	1.054.437.520	99,14	
		Output : - Perahu motor pengangkut rumput laut	unit	10,00			

1	2	3	4	5	6	7		
		- Para-para penjemuran rumput laut	unit	20,00				
		- Pembangunan gudang penyimpanan rumput laut	unit	1,00				
		- Pembangunan gerbang kawasan budidaya	unit	4,00				
		- Kantong jaring KJA air tawar	kantong	22,00				
		- Budidaya ikan di kolam	unit	25,00				
		Outcome : Tercapainya produktivitas dan produksi budidaya perikanan	%	12,65				
	Pengembangan perikanan	prasarana	Input : Jumlah dana	Rp.	1.066.158.400,00	1.061.839.200	99,59	
			Output : - Pemb. Jalan produksi pertambakan penyaring	paket	1,00	1,00	100,00	
			- Pemb. Jalan produksi pertambakan sinar jaya	paket	1,00	1,00	100,00	
			- Pemb. Dan rehab jaringan irigasi tambak	paket	7,00	7,00	100,00	
			- Pemb. Jalan produksi pertambakan maronge	paket	1,00	1,00	100,00	
		Outcome : Meningkatnya prasarana budidaya yang mampu menunjang peningkatan produktivitas dan produksi budidaya	%	6,76	6,76		100,00	
Pengembangan Tangkap	Perikanan	Pembangunan pelelangan ikan	tempat	Input : Jumlah dana	Rp.	757.325.840,00	754.254.840	99,59
			Output : - Terbangunnya jalan dan parkir PPI Tj Pangamas	paket	1,00	1,00	100,00	
			- Terbangunnya dermaga TPI Pidang	paket	1,00	1,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
		- Terehabnya dermaga TPI Lab. Kuris	paket	1,00	1,00	100,00
		- Terbangunnya talud dan timbunan PPI Tanjung Pangamas	paket	1,00	1,00	100,00
		- Terbangunnya talud dan pemagaran panati dermaga PPI Tanjung Pangamas	paket	1,00	1,00	100,00
		Outcome : Tercapainya peningkatan sarana penangkapan ikan dalam rangka peningkatan produksi hasil tangkap	%	0,57	0,57	100,00
	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	Input : Jumlah dana	Rp.	6.443.400,00	5.468.400	84,87
		Output : Terselenggaranya sosialisasi fungsi TPI/PPI	kali	2,00	2,00	100,00
		Outcome : Meningkatnya perdagangan produksi perikanan tangkap	%	0,06	0,06	100,00
	Pengembangan sarana penangkapan ikan	Input : Jumlah dana	Rp.	1.843.931.000,00	1.373.635.098	74,49
		Output : - Jaring tasi 2 1/2 inch	unit	50,00		
		- Jaring tasi 1 3/4 inch	unit	50,00		
		- Gill net 2 1/2 inch	unit	10,00		
		- Jaring teri	unit	50,00		
		- Gill net 1 inch	unit	10,00		
		- Jaring rajungan	unit	30,00		
		- jaring lobster	unit	30,00		
		- Rumpon dalam	unit	2,00		
		- Collbox	unit	40,00		
		- Kapal ikan 3,5 GT	unit	5,00		
		- Mesin dalam kapal ikan 24 PK	unit	40,00		
		- Mesin ketinting 5,5 PK	unit	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Outcome : Tercapainya peningkatan sarana penangkapan ikan dan produksi perikanan	%	15,25		
<i>Pengembangan Penyuluhan Perikanan</i>	<i>Sistem</i> Pembinaan kelompok nelayan	Input : Jumlah dana	Rp.	339.197.620,00	337.286.450	99,44
		Output : - Tersedianya sepeda motor roda 2	unit	5,00	5,00	100,00
		- Terbanggunya pos penyuluh	unit	1,00	1,00	100,00
		- Tersedianya bahan penyuluh dan perpustakaan	unit	1,00	1,00	100,00
		Outcome : Meningkatnya kelas kelompok pembudidaya dan nelayan	%	20,00	20,00	100,00
<i>Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</i>	Pembinaan mutu dan pengembangan produk perikanan	Input : Jumlah dana	Rp.	812.430.200,00	787.762.120	96,96
		Output : - Tersedianya para-para penjemuran ikan	unit	20,00	20,00	100,00
		- Tersedianya sarana pengolahan ikan	paket	4,00	4,00	100,00
		- Tersedianya freezer	unit	6,00	6,00	100,00
		- Tersedianya coolbox	unit	40,00	40,00	100,00
		- Terbanggunya kios mini pemasaran ikan	unit	10,00	10,00	100,00
		- Terehabnya outlet pemasaran ikan	unit	1,00	1,00	100,00
		- Terbanggunya depo pemasaran ikan hidup	unit	1,00	1,00	100,00
		- Terbanggunya pagar outlet pemasaran ikan	paket	1,00	1,00	100,00
		- Sepeda motor roda 3	unit	1,00	1,00	100,00
		Outcome : Meningkatnya mutu produk dan peningkatan prasarana	%	0,11	0,11	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar	Temu kemitraan usaha perikanan	Input : Jumlah dana	Rp.	20.680.400,00	17.930.400	86,70
		Output : Terlaksananya kegiatan temu kemitraan rumput laut	kali	2,00	1,94	97
		Outcome : Tercapainya kemitraan dan peningkatan pemasaran produk	%	0,36	0,36	100,00
	Penerbitan dan penertiban ijin usaha perikanan (IUP)	Input : Jumlah dana	Rp.	17.205.400,00	14.705.400	85,47
		Output : Terbitnya Ijin Usaha Perikanan (IUP)	dok	100,00	97	97,3
		Outcome : Tercapainya penerbitan dan IUP dalam upaya peningkatan pemasaran hasil perikanan ke luar daerah	%	11,69	11,69	100,00
	Penerbitan dan penertiban SKPHP	Input : Jumlah dana	Rp.	13.425.600,00	13.405.600	99,85
		Output : Terbitnya SKPHP	lembar	3.000,00	2.912	97,06
		Outcome : Termonitornya aktifitas hasil perikanan ke luar daerah	%	4,08	4,08	100,00
	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Input : Jumlah dana	Rp.	296.160.000,00	294.743.000	99,52
		Output : - Meningkatnya pengetahuan petambak tentang budidaya	orang	25,00	25,00	100,00
		- Tersedianya benur udang	ekor	150.000,00	150.000,00	100,00
		- Tersedianya mesin pompa air	unit	2,00	2,00	100,00
		- Terehabnya konstruksi dan jaringan irigasi tamabk dinas	paket	1,00	1,00	100,00
		- Terehabnya pintu air	unit	2,00	2,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		- Terpasangnya instalasi listrik	paket	1,00	1,00	100,00
		- Terbangunnya rumah jaga tambak	unit	1,00	1,00	100,00
		Outcome : Berkembangnya areal kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	%	11,54	11,54	100,00
	Pengembangan pengelolaan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Input : Jumlah dana	Rp.	13.417.000,00	12.277.000	91,50
		Output : Tersedianya laporan identifikasi sertifikasi tanah kawasan pemukiman nelayan dan budidaya	dok.	1,00	1,00	100,00
		Outcome : Berkembangnya areal kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	%	3,85	3,85	100,00
	Pengembangan perencanaan pembangunan	Input : Jumlah dana	Rp.	138.393.600,00	96.401.400	69,66
		Output : - Proposal kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dan DED	buku	45,00	45,00	100,00
		- Tersedianya dokumen renstra dinas kelautan dan perikanan	dok	1,00	1,00	100,00
		- Tersedianya DD kelautan dan perikanan	dok	1,00	1,00	100,00
		Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan	%	5,00	5,00	100,00
	Pengendalian dan pengawasan pembangunan	Input : Jumlah dana	Rp.	29.640.000,00	27.289.000	92,07
		Output : - Terlaksananya pertemuan koordinasi	kali	4,00	4,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		- Laporan pemantauan kegiatan	buah	5,00	5,00	100,00
		- Tersedianya dokumen pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan	dok.	1,00	1,00	100,00
		Outcome : Tersedianya dokumen pengendalian dan pengawasan pembangunan	%	3,34	3,34	100,00
	Evaluasi kegiatan pembangunan	Input : Jumlah dana	Rp.	5.782.500,00	5.012.500	86,68
		Output : Tersedianya laporan evaluasi dan pengendalian kegiatan dinas	buku	5,00	5,00	100,00
		Outcome : Tersedianya dokumen evaluasi kegiatan dinas kelautan dan perikanan	%	2,78	2,78	100,00
	Penyusunan data statistik perikanan	Input : Jumlah dana	Rp.	122.750.500,00	120.895.000	98,49
		Output : - Tersedianya buku statistik perikanan	buku	50,00	50,00	100,00
		- Tersedianya sepeda motor operasional statistik perikanan	unit	1,00	1,00	100,00
		- Tersedianya laptop	unit	2,00	2,00	100,00
		- Tersedianya printer	unit	1,00	1,00	100,00
		- Tersedianya kamera digital	unit	1,00	1,00	100,00
		- Tersedianya lemari kabinet	unit	1,00	1,00	100,00
		- Tersedianya external disk	unit	1,00	1,00	100,00
		Outcome : Tersedianya data base dan statistik perikanan yang up to date	%	8,34	8,34	100,00
Pengembangan Pulau-pulau kecil	Pengelolaan Pengembangan prasarana dasar pulau-pulau kecil	Input : Jumlah dana	Rp.	563.220.000,00	561.728.900	99,74

1	2	3	4	5	6	7
		Output : - Terbangunnya jalan antar kampung	paket	4,00	4,00	100,00
		- Tersedianya listrik tenaga surya	unit	5,00	5,00	100,00
		- Terbangunnya jalan wisata pulau keramat	paket	1,00	1,00	100,00
		Outcome : Tersedianya sarana prasarana ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan	%	15,00	15,00	100,00
Urusan Pilihan Pertanian						
<i>Peningkatan Kesejahteraan Petani</i>	Revitalisasi kelembagaan UPJA,BPLM,dan KWT	Input : Jumlah dana	Rp.	16.503.000,00	16.503.000,00	100,00
		Output : Terlatihnya Kelompok Wanita Tani (KWT)	orang	6,00		
		Outcome : Meningkatnya jumlah kelembagaan petani yang berprestasi dalam pengelolaan kelompok	%	20,00		
<i>Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan</i>	Penyusunan data base potensi produk pangan	Input : Jumlah dana	Rp.	42.376.500,00	41.796.500,00	98,63
		Output : Tersusunnya data base potensi produk pangan	buku	10,00		
		Outcome : Tersedianya data potensi dan capaian pangan	%	1,26		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Input : Jumlah dana	Rp.	17.707.500,00	12.017.500,00	67,87
		Output : Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan perberasan	dok	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Outcome : Tersedianya bahan rencana tindak lanjut penentuan kebijakan perberasan	%	0,63		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Input : Jumlah dana	Rp.	24.819.500,00	22.870.500,00	92,15
		Output : Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi pertanian (pupuk bersubsidi)	dok	1,00		
		Outcome : Tersedianya bahan rencana tindak lanjut penentuan kebijakan subsidi pertanian	%	0,53		
	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Input : Jumlah dana	Rp.	10.846.000,00	10.226.000,00	94,28
		Output : Tersebar nya informasi pasar melalui media massa	bulan	12,00		
		Outcome : Tersedianya informasi beberapa harga pangan pokok	%	0,42		
	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Input : Jumlah dana	Rp.	51.710.200,00	44.500.200,00	86,06
		Output : Terlaksananya pelatihan penanganan pasca panen	kali	1,00		
		Outcome : Meningkatnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	%	1,16		
	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Input : Jumlah dana	Rp.	35.009.000,00	33.051.000,00	94,41

1	2	3	4	5	6	7
		Output : Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	keg	1,00		
		Outcome : Terwujudnya peningkatan intensifikasi tanaman padi, palawija	%	1,16		
	Pengembangan tanaman diversifikasi	Input : Jumlah dana	Rp.	17.991.400,00	17.671.400,00	98,22
		Output : - Benih tanaman sayuran	jenis	1,00		
		- Bibit buah-buahan untuk koleksi kebun semongkat	jenis	3,00		
		Outcome : Berkembangnya areal diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura	%	1,47		
	Pengembangan lahan kering pertanian	Input : Jumlah dana	Rp.	9.655.400,00	9.295.400,00	96,27
		Output : Dikembangkannya tanaman pangan dan hortikultura pada lahan kering	lokasi	3,00		
		Outcome : Berkembangnya areal komoditas pertanian pada lahan kering	%	1,68		
	Pengembangan perbibitan / perbibitan	Input : Jumlah dana	Rp.	33.477.790,00	32.467.790,00	96,98
		Output : - Benih sumber padi	Kg	500,00		
		- Benih sumber kedelai	Kg	500,00		
		Outcome : Berkembangnya areal penangkaran benih/bibit pertanian	%	1,89		
	Pengembangan informasi pasar sistem	Input : Jumlah dana	Rp.	9.389.000,00	9.309.000,00	99,15
		Output : Teerpantaunya harga beberapa pangan pokok	dokumen	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Outcome : Terwujudnya data informasi pasar yang up to date	%	0,74		
	Koordinasi kebijakan perberasan	Input : Jumlah dana	Rp.	23.138.000,00	20.313.000,00	87,79
		Output : Terlaksananya koordinasi kebijakan perberasan	dokumen	6,00		
		Outcome : Terwujudnya data informasi pasar yang up to date	%	0,74		
	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	Input : Jumlah dana	Rp.	18.057.700,00	17.907.700,00	99,17
		Output : Penerapan teknologi budidaya	unit	2,00		
		Outcome : Tersedianya rekomendasi teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	%	0,32		
	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	Input : Jumlah dana	Rp.	86.649.975,00	86.597.475,00	99,94
		Output : Pengembangan jagung hibrida	Ha	80,00		
		Outcome : Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	%	2,00		
	Pengembangan infrastruktur peningkatan produksi pertanian	Input : Jumlah dana	Rp.	2.601.021.350,00	2.583.578.500,00	99,33
		Output : Pembangunan JUT	unit	25,00		
		Pembangunan jaringan irigasi	unit	34,00		
		Pembangunan/rehab chekdam	unit	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan irigasi air permukaan	unit	2,00		
		Outcome : Meningkatnya akses transportasi dan IP komoditas pertanian	%	1,56		
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air (NTB-WRMP)	Input : Jumlah dana	Rp.	46.723.700,00	45.943.700,00	98,33
		Output : Tersedianya petani yang terlatih dalam pengelolaan sumberdaya air	klp	10,00		
		Tersedianya data base P3A	buku	10,00		
		Terkirimnya petugas dan pengurus P3A pelatihan di Mataram	kali	3,00		
		Outcome : Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan sumberdaya air	%	1,58		
	Pengembangan perlindungan tanaman	Input : Jumlah dana	Rp.	39.341.650,00	38.971.650,00	99,06
		Output : SL-PHT	unit	4,00		
		Sekolah lapang iklim	unit	1,00		
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan petani tentang organisme pengganggu tanaman dan bencana alam	%	1,37		
	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Input : Jumlah dana	Rp.	10.533.000,00	10.513.000,00	99,81
		Output : Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	keg	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat	%	1,37		
<i>Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan</i>	Pengelolaan lahan dan perluasan areal	Input : Jumlah dana	Rp.	125.380.500,00	124.990.500,00	99,69
		Output : Bertambahnya areal sawah melalui percontaan sawah baru	Ha	600,00		
		Outcome : Optimalisasi pengelolaan lahan dan perluasan areal	%	0,95		
	Pengelolaan air	Input : Jumlah dana	Rp.	11.235.470,00	10.895.470,00	96,97
		Output : Perencanaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Iringan Desa (JIDES)	%	20,00		
		Outcome : Optimalisasi pengelolaan air	%	0,95		
Pengembangan prasarana usaha komoditi pertanian/perkebunan	Input : Jumlah dana	Rp.	836.734.500,00	835.504.500,00	99,85	
	Output : Jaringan irigasi	unit	6,00			
	Outcome : Meningkatnya IP komoditas pertanian dan perkebunan	%	0,95			
<i>Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan</i>	Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	138.524.050,00	129.288.550,00	93,33
		Output : Promosi produk segar dan olahan pertanian unggul daerah	kali	3,00		

1	2	3	4	5	6	7	
Peningkatan Teknologi Perkebunan	Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian	Outcome : Partisipasi dalam promosi produk pertanian unggulan daerah	%	3,00			
		Input : Jumlah dana	Rp.	10.746.000,00	10.746.000,00	100,00	
		Output : Terupdatenya perangkat pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian	unit	2,00			
			Outcome : Terpenuhinya penyampaian informasi pasar secara cepat	%	1,00		
	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna	Input : Jumlah dana	Rp.	15.960.500,00	15.960.500,00	100,00	
		Output : Tersedianya database kandungan unsur hara tanah	buku	10,00			
		Outcome : Tersedianya teknologi pertanian tepat guna yang direkomendasikan	%	4,00			
	Pelatihan penerapan teknologi perkebunan modern bercocok tanam	Input : Jumlah dana	Rp.	15.778.000,00	14.098.000,00	89,35	
		Output : Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi	kali	2,00			
		Outcome : Teknologi pertanian bercocok tanam yang diterapkan oleh petani	%	5,33			
	Pembinaan pengembangan mesin budidaya	unit alat dan	Input : Jumlah dana	Rp.	21.260.050,00	18.925.050,00	89,02

1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Output : Terlaksananya pembinaan unit pengembangan alat dan mesin budidaya	keg	1,00		
		Outcome : Teknologi pertanian bercocok tanam yang diterapkan oleh petani	%	5,33		
		Input : Jumlah dana	Rp.	57.723.500,00	57.008.500,00	98,76
		Output : Bibit tanaman sayuran	jenis	8,00		
		Bibit tanaman buah-buahan	jenis	6,00		
		Outcome : Berkembangnya komoditas pertanian	%	4,11		
	Pengembangan bibit unggul pertanian	Input : Jumlah dana	Rp.	145.978.850,00	145.858.850,00	99,92
		Output : bibit unggul pertanian yang dikembangkan	komoditi	3,00		
		Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bibit unggul pertanian	%	7,00		
	Sertifikasi bibit unggul pertanian	Input : Jumlah dana	Rp.	39.843.000,00	35.278.000,00	88,54
		Output : Komoditi yang disertifikasi	komoditi	3,00		
		Outcome : Tersedianya benih unggul bersertifikat oleh petani	%	3,33		
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Input : Jumlah dana	Rp.	157.288.500,00	157.138.500,00	99,90
		Output : - Pengobatan PHM	ekor	4.850,00		

1	2	3	4	5	6	7
		- Terlaksananya vaksinasi dan pencegahan penyakit hewan - Biosecurity	ekor OK %	198.000,00 24,00		
	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Outcome : Terbentuknya kekebalan ternak terhadap SE dan AT Input : Jumlah dana Output : Terlaksananya pemusnahan ternak mati karena PHM Outcome : Terjadinya jumlah penurunan penyebaran penyakit anhrak di wilayah/desa tertular	% Rp. ekor %	36,53 42.069.250,00 13,00 20,00	41.469.250,00	98,57
	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Input : Jumlah dana Output : Terciptanya pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak secara optimal Outcome : Menurunnya kasus pengeluaran ternak yang tidak sesuai dengan prosedur, teknik dan administrasi	Rp. ekor %	179.104.300,00 20.000,00 20,00	176.394.300,00	98,49
	Monitoring penyakit Brucellosis dan peningkatan mutu pelayanan keswan	Input : Jumlah dana Output : Terbebasnya ternak dari penyakit brucellosis Outcome : Tercapainya pembebasan Brucellosis di Kabupaten Sumbawa	Rp. ekor %	92.647.960,00 500,00 0,40	91.396.600,00	98,65

1	2	3	4	5	6	7
	Pengawasan obat Hewan dan Residu	Input : Jumlah dana Output : - Terlaksananya pengawasan obat hewan dan residu - Pemeriksaan residu makrolida dan tetra siklin Outcome : Terlaksananya peredaran vaksin dan obat hewan berkualitas, serta daging yang bebas residu	Rp. toko obat sampel %	30.704.430,00 6,00 20,00 0,75	30.704.430,00	100,00
	Peningkatan kesehatan Veteriner	Input : Jumlah dana Output : Terwujudnya pelayanan kesmavet di RPH/TPH Terwujudnya pelayanan kesmavet di RPH/TPH Outcome : Tercapainya peningkatan pelayanan kesmavet di RPH/TPH	Rp. RPH ekor %	56.775.140,00 11,00 11.884,00 0,01	56.130.140,00	98,86
	Peningkatan pemeriksaan hewan korban	Input : Jumlah dana Output : Terwujudnya pelayanan pemeriksaan ternak Qurban Outcome : Terlindunginya masy dari ternak Qurban yang mengandung bibit penyakit	Rp. ekor %	34.143.800,00 1.000,00 1,40	34.143.800,00	100,00
	Pemeriksaan kesehatan ternak keluar daerah dan keur kuda dokar	Input : Jumlah dana Output : - Terlaksananya pemeriksaan kesehatan ternak - Keur kuda dokar	Rp. ekor ekor	26.721.000,00 17.000,00 2.800,00	26.721.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan produksi hasil peternakan	Surveillance penyakit ternak	Outcome : Terpeliharanya kesehatan ternak yang terkirim keluar daerah dan keur kuda dokar	%	1,40		
		Input : Jumlah dana	Rp.	73.679.750,00	73.529.750,00	99,80
		Output : Terdeteksinya antibody anthrax pada sapi dan kerbau	ekor	1.000,00		
	Pembibitan dan perawatan ternak	Outcome : Terjaminnya kesehatan ternak sapi dan kerbau di Kab Sumbawa	%	0,31		
		Input : Jumlah dana	Rp.	250.111.000,00	249.453.000,00	99,74
		Output : - Pengadaan semen - Terlaksananya IB pada ternak sapi - Konsepsi/kebuntingan ternak	dosis ekor ekor	1.000,00 500,00		
	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Outcome : Meningkatnya mutu genet	%	0,18		
		Input : Jumlah dana	Rp.	189.212.400,00	177.057.400,00	93,58
		Output : Pembinaan kelompok ternak penerima ternak bibit dari pemerintah Tersebaranya bibit ternak redis	org ekor	150,00 150,00		
	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Outcome : Pemerataan kepemilikan ternak, serta peningkatan ekonomi masyarakat	%	0,17		
		Input : Jumlah dana	Rp.	95.750.000,00	95.490.000,00	99,73
		Output : - Tersedianya vaksin ternak SE - Tersedianya vaksin AT	dosis dosis	60.000,00 21.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
		- Tersedianya vaksin ternak ND	dosis			
		Outcome : Terciptanya kekebalan ternak terhadap penyakit SE/AT/ND	%	21.000,00		
				0,07		
	Pengembangan agribisnis peternakan	Input : Jumlah dana	Rp.	66.008.400,00	65.608.400,00	99,39
		Output : Terbinanya kelompok agribisnis kecamatan	klp	322,00		
		Outcome : Peningkatan skill daya saing serta pendapatan klp agribisnis peternakan	%	0,01		
	Pengkartuan ternak, pengumpulan dan pengolahan data	Input : Jumlah dana	Rp.	387.735.000,00	386.052.000,00	99,57
		Output : Terwujudnya layanan pengkartuan ternak	ekor	251.800,00		
		Outcome : Ketercapaian persentase pengkartuan ternak sehingga didapat data yang akurat	%	34,23		
	Perumusan parameter peternakan tingkat wilayah dan visualisasi	Input : Jumlah dana	Rp.	76.935.500,00	76.455.500,00	99,38
		Output : Teridentifikasinya parameter peternakan tingkat wilayah	eksp	20,00		
		Outcome : Ketersediaan standart parameter dan visualisasi data statistik peternakan tahun 2011	%	6,73		
Peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan sistem dan pola kawasan	Input : Jumlah dana	Rp.	2.006.636.700,00	1.961.718.800,00	97,76

1	2	3	4	5	6	7
		Output : - Teridentifikasinya potensi LAR dan tersedianya sarana pendukung kawasan LAR	lokasi	60,00		
		- Terbinanya kelompok petani peternak	kelompok	13,00		
		- Teroptimalkannya LAR Limung sebagai pusat BSS	lokasi	1,00		
		Outcome : Tercapainya peningkatan pemanfaatan kawasan produksi (LAR) peternakan	%	24,00		
	fasilitas kerjasama regional / nasional / internasional / penyediaan hasil produksi peternakan komplementer	Input : Jumlah dana	Rp.	27.031.600,00	19.090.400,00	70,62
		Output : Terlatihnya kelompok asosiasi dan pengusaha pengirim peternak	org	30,00		
		Outcome : Terwujudnya jaringan kerjasama lokal dan antar daerah tingkat pengusaha atau asosiasi	%	8,26		
	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Input : Jumlah dana	Rp.	63.086.200,00	58.378.400,00	92,54
		Output : Teridentifikasinya produk unggulan peternakan, serta pameran expo agribisnis	produk	30,00		
		Outcome : Terciptanya image dan daya saing ternak Kab. Sumbawa	%	0,21		

1	2	3	4	5	6	7	
Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Input : Jumlah dana	Rp.	75.117.000,00	73.537.000,00	97,90	
		Output : Terlatihnya petani peternakan pengoperasian serta penerapan teknologi peternakan	orang	60,00			
		Terlatihnya pelatih kelompok petani peternak	orang	1,00			
			Outcome : Peningkatan produksi, produktivitas ternak dengan penerapan teknologi tepat guna	%	38,71		
	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna	Input : Jumlah dana	Rp.	74.504.000,00	74.324.000,00	99,76	
		Output : Meningkatnya jumlah petani peternak yang menggunakan teknologi tepat guna	orang	90,00			
		Outcome : Peningkatan produksi, produktivitas ternak dengan penerapan teknologi tepat guna	%	35,48			
	Pengadaan bangunan, sarana dan prasarana teknologi peternakan teknologi peternakan tepat guna	Input : Jumlah dana	Rp.	174.207.800,00	173.557.800,00	99,63	
		Output : - Terbangunnya gudang pakan ternak	unit	1,00			
- Tersedianya mesin pencacah hijauan (chopper)		unit	2,00				
- Tersedianya pakansia untuk ternak kelompok		unit	5,00				
		Outcome : Optimalnya produksi ternak pemerintah dan ternak kelompok ternak	%	100,00			

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pilihan Kehutanan <i>Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan</i>	Pengembangan hutan tanaman (pendamping NTB-WRNP)	Input : Jumlah dana	Rp.	44.627.900,00	44.627.900,00	100,00
		Output : Fasilitasi kelompok dalam rehabilitasi hutan dan konservasi tanah	Ha	75,00		
		Outcome : Terselenggaranya rehabilitasi hutan dan konservasi tanah dan air diwilayah DAS	%	5,20		
	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	Input : Jumlah dana	Rp.	58.184.520,00	57.791.040,00	99,32
		Output : Tertanamnya areal PSDHBM dengan jenis kayu-kayuan dan MPTS	Ha	200,00		
		Outcome : Adanya pemanfaatan ruang kawasan hutan melalui PSDHBM	%	4,00		
	Optimalisasi PNB	Input : Jumlah dana	Rp.	30.830.737,00	28.960.737,00	93,93
		Output : Terwujudnya capaian target penerimaan PSDH/DR	Ha	2.000,00		
		Outcome : Adanya pemanfaatan sumberdaya hutan kayu maupun non kayu yang sesuai dengan target PSDH/DR	%	3,60		
	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Input : Jumlah dana	Rp.	39.362.940,00	32.852.900,00	83,46
		Output : Terlaksananya cruising hasil hutan pemanfaatan hasil hutan non kayu	Ha	1.400,00		

1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	Outcome : Tersedianya potensi rotan	%	3,10		
		Input : Jumlah dana	Rp.	21.812.450,00	21.812.450,00	100,00
		Output : Melaksanakan pengujian dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu	Ha	200,00		
	Pengembangan tata usaha kayu tanah milik (TUKTM)	Outcome : Tercapainya pengujian dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu	%	2,00		
		Input : Jumlah dana	Rp.	16.586.800,00	15.556.800,00	93,79
		Output : Tertib perijinan dan peredaran IPKTM ditingkat kecamatan dan desa	Ha	100,00		
	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Outcome : Terselenggaranya tertib peredaran hasil hutan kayu oleh kecamatan	%	1,90		
		Input : Jumlah dana	Rp.	106.218.205,00	99.838.205,00	93,99
		Output : Terlaksananya pembuatan bibit bakti sosial untuk penghijauan lingkungan sebagai rehabilitasi lahan kritis	lokasi	4,00		
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Outcome : Adanya peningkatan rehabilitasi lahan kritis	%	1,80		
		Input : Jumlah dana	Rp.	18.152.800,00	16.772.800,00	92,40

1	2	3	4	5	6	7
		Output : Terselenggaranya kegiatan pemantapan kelembagaan FHM dan Kder PSDHBM	Ha	200,00		
		Outcome : Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap rehabilitasi hutan melalui kelembagaan forum hutan kemasyarakatan (FHK)	%	0,20		
	Penyusunan rancangan teknis kegiatan kehutanan	Input : Jumlah dana	Rp.	42.053.740,00	41.753.740,00	99,29
		Output : Terlaksananya perencanaan rehabilitasi sumber mata air	Ha	120,00		
		Outcome : Terlaksananya kegiatan konservasi daerah tangkapan dan sumber mata air, dan 8 mata air	%	0,50		
	Rehabilitasi daerah tangkapan air dan sumber air	Input : Jumlah dana	Rp.	123.162.900,00	74.547.900,00	60,53
		Output : Terlaksananya rehabilitasi sumber mata air	Ha	40,00		
		Outcome : Terlaksananya kegiatan konservasi daerah tangkapan dan sumber mata air	%	2,20		
	Pengelolaan sumber benih kehutanan	Input : Jumlah dana	Rp.	38.690.720,00	38.540.720,00	99,61
		Output : Tersedianya benih yang berkualitas melalui tegakan benih teridentifikasi	Ha	600,00		
		Outcome : Tersedianya benih dan bibit untuk rehabilitasi	%	0,70		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan</i>	Pengembangan hutan magrove	Input : Jumlah dana	Rp.	183.507.000,00	166.581.000,00	90,78
		Output : Terlaksananya rehabilitasi kawasan pantai	Ha	30,00		
		Outcome : Terehabilitasinya kawasan sekitar pantai	%	3,70		
	Rehabilitasi lahan kritis luar dan dalam kawasan	Input : Jumlah dana	Rp.	378.464.240,00	361.163.450,00	95,43
		Output : Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis luar kawasan	Ha	145,00		
		Outcome : Adanya lahan kritis luar kawasan yang terehabilitasinya	%	6,90		
	Peningkatan konservasi tanah dan air	Input : Jumlah dana	Rp.	185.024.054,00	103.156.630,00	55,75
		Output : Terjaganya areal DAS hulu dan hilir	lokasi	5,00		
		Outcome : Terbangunnya bangunan sipil teknik	Ha	3,30		
	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	Input : Jumlah dana	Rp.	66.514.330,00	66.514.330,00	100,00
		Output : Jumlah orang yang tersuluh	lokasi	5,00		
		Outcome : Tercapainya persentase jumlah orang yang tersuluh mengenai dampak kerusakan lingkungan	%	1,80		
Fasilitasi penyelesaian konflik tata batas kawasan hutan	Input : Jumlah dana	Rp.	119.132.660,00	92.920.640,00	78,00	
	Output : Terlaksananya pengecekan sengketa batas kawasan hutan	lokasi	18,00			

1	2	3	4	5	6	7	
<i>Pembinaan dan Penertiban Industri hasil Hutan</i>	Pengamanan dan perlindungan hutan	Outcome : Adanya kesadaran masyarakat terhadap fungsi batas kawasan hutan	%	1,40			
		Input : Jumlah dana	Rp.	683.052.059,00	680.082.959,00	99,57	
		Output : Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan hasil hutan	lokasi	20,00			
	Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan	Outcome : Menekan tingkat kerusakan hutan dan lahan	%	16,70			
		Input : Jumlah dana	Rp.	9.415.800,00	9.415.300,00	99,99	
		Output : Terbinanya pemegang ijin industri hasil hutan	pemegang ijin	8,00			
	Pelayanan perizinan hasil hutan dan kebun	Outcome : Tertibnya tata usaha kayu (TUK) hasil hutan kayu dan bukan kayu pada pemegang ijin dan pengecer hasil hutan	%	8,60			
		Input : Jumlah dana	Rp.	12.381.700,00	11.811.700,00	95,40	
		Output : Terselenggaranya pelayanan perijinan hasil hutan non kayu	pemegang ijin	30,00			
	<i>Perencanaan dan Pengembangan Hutan</i>	Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat	Outcome : Terlayannya hasil pemanfaatan kayu dan non kayu	%	11,30		
			Input : Jumlah dana	Rp.	12.432.000,00	12.112.000,00	97,43
			Output : Terselenggaranya pelayanan perijinan hasil hutan non kayu	pemegang ijin	30,00		

1	2	3	4	5	6	7	
<i>Peningkatan Pemasaran Hasil Hutan Perkebunan</i>		Output : Terselenggaranya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan hutan	kelompok	26,00			
		Outcome : Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan hutan melalui pendampingan oleh penyuluh	%	3,30			
		Input : Jumlah dana	Rp.	12.176.000,00	11.856.000,00	97,37	
		Output : Terlaksananya pemuatan informasi harga pasar dimedia massa dan radio	eksemplar	16,00			
		Outcome : Tersedianya informasi harga pasar hasil perkebunan dan kehutanan	%	20,00			
		Input : Jumlah dana	Rp.	1.371.391.740,00	1.041.618.249,00	75,95	
<i>Peningkatan Perkebunan</i>	<i>Produksi</i>	Penyediaan sarana produksi perkebunan	Input : Jumlah dana	Rp.	1.371.391.740,00	1.041.618.249,00	75,95
		Output : Terlaksananya penyediaan alat/mesin produksi perkebunan	unit	11,00			
		Outcome : terlaksananya penyediaan alat pengolahan hasil perkebunan	%	18,90			
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	Input : Jumlah dana	Rp.	79.064.705,00	76.247.425,00	96,44	
		Output : Tersedianya sarana dan prasarana pertanian	kecamatan	2,00			
		Outcome : Adanya sarana dan prasarana teknologi pertanian	%	1,00			

1	2	3	4	5	6	7
Ketahanan Pangan Perkebunan	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	Input : Jumlah dana	Rp.	14.500.800,00	14.460.800,00	99,72
		Output : Terlaksananya penanganan pengolahan hasil perkebunan	Ha	60,00		
		Outcome : Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	%	0,50		
	Pengembangan perbenihan/pembibitan	Input : Jumlah dana	Rp.	29.030.556,00	22.092.000,00	76,10
		Output : Tersedianya bibit sulaman tanaman pokok dan tanaman sela	Ha	12,00		
		Outcome : Persentase pananaman/penyulaman tananam pokok	%	1,00		
	pengembangan lahan perkebunan (penunjang DIPA PLA)	Input : Jumlah dana	Rp.	189.455.030,00	146.945.030,00	77,56
		Output : Terselenggaranya kegiatan DIPA PLA	unit	7,00		
		Outcome : Terciptanya lokasi-lokasi baru dalam pengembangan tanaman perkebunan	%	6,50		
	Pengembangan lahan perkebunan (DBHCT)	Input : Jumlah dana	Rp.	341.590.965,00	312.602.100,00	91,51
		Output : Terlaksananya pengembangan lokasi tanaman tembakau	Ha	5,00		
		Outcome : Adanya lokasi pengembangan tanaman tembakau	%	11,80		

1	2	3	4	5	6	7
<i>Peningkatan Kesejahteraan Petani</i>	Peningkatan manajemen dan ketrampilan petani	Input : Jumlah dana	Rp.	65.773.000,00	65.753.000,00	99,97
		Output : Terlatihnya petani dalam peningkatan ketrampilan petani	angkatan	2,00		
		Outcome : Terwujudnya peningkatan pengetahuan ketrampilan agribisnis di bidang pertanian	%	20,00		
	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Input : Jumlah dana	Rp.	20.151.130,00	20.151.130,00	100,00
		Output : Terwujudnya kemampuan petani dlm berorganisasi	org	80,00		
		Outcome : Terwujudnya peningkatan pengetahuan organisasi petani	%	20,00		
<i>Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</i>	Penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan tepat guna	Input : Jumlah dana	Rp.	8.584.600,00	8.584.600,00	100,00
		Output : Diterapkannya teknologi tepat guna perkebunan pengendalian hama dan penyakit oleh masyarakat	orang	75,00		
		Outcome : Adanya masyarakat yang memiliki pengetahuan teknologi tepat guna	%	1,60		
	Penelitian penerapan teknologi perkebunan modern bercocok tanam	Input : Jumlah dana	Rp.	97.844.200,00	97.804.200,00	99,96
		Output : Terlatihnya petani tembakau melalui kegiatan KLPHT	kelas	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral <i>Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan</i>		Outcome : Tenwujudnya ketrampilan petani dalam pengembangan tanaman tembakau	%	18,30		
	Koordinasi Dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang pertambangan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	24.801.810,00	20.846.810,00	84,05
		Keluaran : Dokumen pelaporan hasil produksi dan pajak material	dokumen	1,00		
		Hasil : Meningkatnya kualitas data hasil produksi dan pajak material	%	4,00		
	Sosialisasi peraturan pertambangan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	88.896.405,00	88.531.405,00	99,59
		Keluaran : Laporan pembinaan dan pengawasan	dokumen	1,00		
		Hasil : Terlaksananya pengelolaan penambangan sesuai standar penerbitan izin pertambangan	%	4,00		
	Pembinaan dan Pengawasan usaha dan pemanfaatan air tanah yang tertib dan sesuai standar	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	21.049.610,00	20.569.010,00	97,72
		Keluaran : Laporan pembinaan dan p	dokumen	1,00		
		Hasil : Meningkatnya pengelolaan usaha dan pemanfaatan air tanah yang tertib dan sesuai standar	%	4,00		
	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan eksplorasi bahan galian	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	44.131.880,00	43.381.880,00	98,30

1	2	3	4	5	6	7
		Keluaran : Laporan pembinaan dan pengawasan	dokumen	1,00		
		Hasil : Meningkatnya pengelolaan eksplorasi bahan galian yang tertib sesuai standar	%	4,00		
	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pertambangan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	13.106.570,00	12.806.570,00	97,71
		Keluaran : Laporan pembinaan dan pengawasan	dokumen	1,00		
		Hasil : Terlaksananya pengelolaan penambangan sesuai standar penerbitan izin pertambangan	%	4,00		
	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan rakyat	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	17.327.540,00	17.007.540,00	98,15
		Keluaran : laporan inventarisasi kerusakan lingkungan akibat pertambangan mineral dan batuan (10 eksemplar)	dokumen	1,00		
		Hasil : Terinventarisasinya kegiatan pertambangan merusak lingkungan	%	20,00		
	Pembinaan dan Pengawasan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	12.979.435,00	12.979.435,00	100,00
		Keluaran : Laporan kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap 30 usaha ketenagalistrikan	dokumen	1		
<i>Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Penambangan yang Berpotensi Merusak Lingkungan</i>						
<i>Pembinaan Dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</i>						

1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Energi	Peningkatan Sarana Listrik Daerah Terpencil	Hasil : Terlaksananya pengelolaan usaha ketenagalistrikan sesuai peraturan yang berlaku	%	5,00		
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	319.380.145,00	255.901.695,00	80,12
		Keluaran : Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 21 unit	dokumen	1,00		
	Evaluasi dan pemuktahiran data kelistrikan	Hasil : Terpenuhinya kebutuhan penerapan listrik masyarakat daerah terpencil	%	5,00		
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	45.548.495,00	41.069.615,00	90,17
		Keluaran : Database kebutuhan listrik daerah terpencil	dokumen	1,00		
	Pembuatan Feasibility Study (FS) dan DED pembangunan PLTMH	Hasil : Meningkatkan data kebutuhan listrik	%	5,00		
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	104.687.065,00	104.687.065,00	100,00
		Keluaran : Dokumen teknis pembangunan PLTMH	dokumen	1,00		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Migas	Hasil : Tersedianya data desain engineering, UKL dan UPL	%	5,00		
Masukan : Dana yang dibutuhkan		Rp	9.088.865,00	8.718.865,00	95,93	
		Keluaran : laporan Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap 30 usaha	dokumen	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan Geologi Sumberdaya Mineral dan Air Bawah Tanah	Survei dan Pemetaan Bahan Galian	Hasil : Tersusunnya laporan hasil pembinaan, pengawasan dan penertiban perusahaan migas	%	20,00		
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	65.751.490,00	56.486.490,00	85,91
		Keluaran : Dokumen survei tinjau dan eksplorasi bahan galian logam	dokumen	1,00		
	Survei dan Pemetaan Air Bawah Tanah	Hasil : Peningkatan informasi dan potensi bahan galian logam	%	6,67		
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	12.929.150,00	9.621.650,00	74,42
		Keluaran : peta kondisi air bawah tanah	dokumen	1,00		
	Mitigas Bencana Alam Geologi	Hasil : Peningkatan data dan informasi kondisi air tanah di Labangka	%	6,67		
		Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp	30.003.880,00	27.688.840,00	92,28
		Keluaran : Laporan sosialisasi mitigas bencana alam geologi	dokumen	1,00		
Urusan Pilihan Pariwisata <i>Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	Promosi Pariwisata	Hasil : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bencana alam geologi	%	6,67		
		Masukan : Jumlah dana	Rp.	459.171.741,00	447.303.741,00	97,42
		Output : Terlaksananya kegiatan promosi di pasar potensial	kegiatan	2,00		

1	2	3	4	5	6	7	
		Outcome : Terikutsertanya duta seni budaya Kabupaten pada pentas budaya di pasar potensial	%	45,17			
Pengembangan Pariwisata	Destinasi	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Input : Jumlah dana	Rp.	413.736.120,00	411.603.425,00	99,48
			Output : Teridentifikasinya mutu, potensi dan daya tarik obyek wisata daerah	obyek	6,00		
			Outcome : Tersusunnya profil obyek wisata unggulan dan terlaksananya standarisasi operasional sarana obyek wisata	%	37,48		
Pengembangan kemitraan		Pelaksanaan koordinasi pembangunan pariwisata	Input : Jumlah dana	Rp.	27.632.255,00	25.952.255,00	93,92
			Output : Adanya koordinasi kepariwisataan	pengusaha	60,00		
			Outcome : Terselenggaranya forum koordinasi dan konsultasi stakeholder kepariwisataan	%	50,00		
		Pengembangan SDM dan profesionalisme pariwisata (Penyuluhan, Pembinaan pokdarwis dan pelatihan)	Input : Jumlah dana	Rp.	20.748.115,00	20.588.115,00	99,23
			Output : Teridentifikasinya pelaku dan penggerak jasa kepariwisataan	orang	60,00		
			Outcome : Terpenuhinya standarisasi pelayanan jasa kepariwisataan	%	66,00		

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pilihan Industri <i>Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri</i>	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan Keluaran : Bimbingan teknis pengembangan teknologi industri kopi bubuk (kopi luwak) Pembinaan teknologi pengolahan/produksi Hasil : Berkembangnya teknologi pengolahan/produksi	Rp sentra IKM %	45.148.790,00 1,00 75,00 6,30	40.024.740,00	88,65
	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan SDM : Tenaga ahli industri pengolahan garam beryodium SDM : Anggota panitia pelaksana kegiatan Keluaran : Bimbingan teknis pengolahan/produksi garam beryodium kepada 12 orang Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan usaha industri	Rp orang orang kelompok %	75.214.755,00 1,00 4,00 2,00 25,00	73.820.700,00	98,15
<i>Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</i>	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan SDM : Anggota panitia pelaksana kegiatan SDM : Instruktur luar daerah dari mataram SDM : Instruktur/narasumber dalam daerah	Rp orang orang orang	325.698.366,00 4,00 1,00 4,00	321.796.170,00	98,80

1	2	3	4	5	6	7	
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pembinaan kemampuan teknologi industri	bahan-bahan praktek bimtek industri tenun	paket	1,00			
		Peralatan industri tenun tradisional	paket	2,00			
		Keluaran : Fasilitasi bantuan peralatan produksi tenun tradisional untuk 2 (dua) paket	unit sentra	2,00			
		Fasilitasi bantuan bahan-bahan produksi industri tenun tradisional 4 paket	unit sentra	4,00			
		Hasil : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajemen usaha IKM	%	25,00			
		Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	90.025.750,00		89.316.130,00	99,21
		SDM : Instruktur diklat batik dari yogyakarta	orang	1,00			
		SDM : Instruktur diklat pengolahan rumput laut jakarta	orang	1,00			
		Bahan-bahan praktek diklat	paket	2,00			
		Keluaran : Pelatihan design membuat batik bagi kelompok/sentra industri kecil kepada 12 orang	sentra	1,00			
	Pelatihan deain kerajinan bagi kelompok/sentra produksi rumput laut kepada 15 orang	sentra	1,00				
	Hasil : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha industri	%	25,00				
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	87.548.425,00		87.346.035,00	99,77

1	2	3	4	5	6	7
		SDM : Instruktur luar daerah dari mataram Bahan praktik diklat Peralatan praktik (sealer)	orang paket unit	1,00 1,00 13,00		
		Keluaran : Diklat industri pengemasan produk makanan	IKM	12,00		
		Hasil : Meningkatnya kemampuan penggunaan teknologi industri	%	25,00		
<i>Peningkatan pengembangan kelembagaan</i>	Pembinaan dan pengawasan sentra-sentra IKM	Masukan : Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	10.392.320,00	10.232.320,00	98,46
		Keluaran : Pendataan sentra dan IKM	%	95,00		
		Hasil : Terdata dan terbinanya sentra-sentra IKM	IKM %	100,00 88,20		
Urusan Pilihan Perdagangan						
<i>Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</i>	peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan SDM : Anggota tim pengawasan peredaran barang dan jasa	Rp orang	42.804.040,00 23,00	34.379.040,00	80,32
		Keluaran : Pembentukan tim pengawas barang dan jasa	tim	1,00		
		uji sampel barang konsumsi	paket	16,00		
		Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar, toko, kios dll	jenis	125,00		

1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemitrologian daerah	Hasil : Terawasinya pelaku usaha distributor/ produsen barang/ jasa	%	40,30		
		Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	76.494.200,00	75.469.160,00	98,66
		Keluaran : Fasilitasi kemitrologian (tera alat ukur)	unit	2.647,00		
		Hasil : terlayannya stadarisasi alat ukur/ takaran/ timbangan pelaku usaha	%	54,60		
	Pengembangan pasar lelang daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	19.060.910,00	17.483.570,00	91,72
		SDM : Anggota panitia pelaksana kegiatan Calon Buyer dari luar daerah	orang	4,00		
			orang	6,00		
		Keluaran : Fasilitasi UKM dalam pasar lelang hasil agro	kali	2,00		
		Hasil : meningkatnya volume perdagangan UKM	%	12,00		
		Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp	168.022.245,00	147.284.220,00
Keluaran : penyediaan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	bulan		12,00			
Penyediaan informasi standar harga barang/jasa pemerintah	buku		1,00			
Hasil : Tersedianya informasi harga barang/jasa pemerintah	%		24,00			

1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan PAD	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan kantor	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp	168.525.000,00	168.525.000,00	100,00
		Keluaran : Rehabilitasi ringan sarana pasar tradisional Alas dan Lopok	unit pasar	2,00		
		Hasil : Mantapnya sarana dan prasarana pasar tradisional	%	43,00		
	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarang burung walet	Masukan : Dana Yang Dibutuhkan	Rp	26.364.435,00	26.094.435,00	98,98
		SDM : Anggota tim teknis KSDA	orang	6,00		
		SDM : Anggota tim teknis pembina kabupaten	orang	8,00		
		Keluaran : Pembina dan pengawasan pelaksanaan pemetikan sarang burung walet	lokasi	3,00		
		Hasil : Terawasi dsn terkendalinya unit pengelola sarang burung walet	%	13,30		
	Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan PAD	Masukan : Jumlah Dana Yang Dibutuhkan	Rp	1.906.510.373,00	1.904.307.930,00	99,88
		Keluaran : Renovasi pasar brangbiji	Paket	1,00		
		Pengadaan sarana dan prasarana pasar Brare	Paket	1,00		
		Pengadaan sarana dan prasarana pasar Alas	Paket	1,00		
		Pengadaan perlengkapan air bersih MCK	Paket	1,00		
Hasil : meningkatnya sarana dan prasarana peningkatan PAD dari sektor pasar	%	28,7				

1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pilihan Transmigrasi						
<i>Pengembangan Wilayah Transmigrasi</i>	Koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri (KTM) Labangka Kabupaten Sumbawa	Input : Jumlah dana	Rp.	536.625.435,00	323.571.845,00	60,30
		Output : Menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agro industri yang mampu menarik investasi	SKP	4,00		
		Outcome : Peningkatan investasi budidaya dan industri jasa dan perdagangan	%	20,00		
	Pengembangan pembinaan masyarakat & kawasan transmigrasi	Input : Jumlah dana	Rp.	410.729.525,00	106.990.000,00	26,05
		Output : Tersedianya peta lahan TSM Labangka V	SKP	1,00		
		Outcome : Terwujudnya pengembangan dan kawasan wilayah transmigrasi KTM Labangka	%	20,00		